

Jurnal Sejarah

JEJAK NUSANTARA

Jalur Rempah 
sebagai simpul peradaban bahari

ektorat
ayaan



JEJAK NUSANTARA

Jurnal Sejarah

Penerbit

Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pembina

Hilmar Farid
Direktur Jenderal Kebudayaan

Pengarah

Triana Wulandari
Direktur Sejarah

Penanggung Jawab

Edy Suwardi

Mitra Bestari

Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono
Dr. Imam B Prasodjo, Dr. Yudi Latif

Dewan Redaksi

Agus Widiatmoko, Sainih, Amurwani Dwi Lestariningsih, Saptari Novita Sri

Editor

Kasijanto Sastrodinomo

Redaktur

Herliswanny, R, Muhammad Iqbal, Ratih Widdyastuti, Dian Andika Winda, Purnawan Andra,
Samino K, Ganda Nainggolan, Agus Pramono, Euis Yulianingsih, Hartadi, Fariz Rizky, Zakiyah Egar

Tata Letak dan Design

Najib

Sekretariat

Ammastasia

Sirkulasi dan Distribusi

Supriadi, Muliana, Nurudin

Alamat Redaksi

Direktorat Sejarah
Gedung E Lantai 9 Kompleks Kemendikbud
Jl. Jend Sudirman, Senayan - Jakarta
Telp/Fax (021) 5725044

Jejak Nusantara adalah media publikasi kajian ilmiah sejarah yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Merupakan media penyebarluasan informasi tentang pengetahuan, wacana, hasil penelitian, dan berbagai isu seputar sejarah di Indonesia sebagai upaya mencerdaskan bangsa dan mendorong peningkatan pemahaman serta apresiasi sejarah bangsa Indonesia dalam keragaman budaya dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Editorial

Pada bulan September 2016, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan pameran bertajuk *Jalur Rempah Sebagai Simbol Peradaban Bahari* di Malang. Dengan tepat, judul pameran itu menggambarkan kenyataan yang mungkin tidak banyak disadari—bahwa kita “terlupa” pada salah satu faset penting sejarah peradaban Indonesia. Dalam wacana sejarah selama ini, misalnya, hampir tidak pernah terdengar atau terbaca pembahasan tentang Jalur Rempah. Tidak juga di sekolah, kampus ataupun ruang publik. Belum lama belakangan, Jalur Rempah baru mendapat perhatian.

Tampaknya, masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia, selama ini lebih “terpukau” pada Jalur Sutra yang telah dikenal luas sebagai jalur perdagangan Asia yang menghubungkan antara Dunia Timur dan Dunia Barat. Jalur itu membentang dari Tiongkok hingga Laut Hitam, bahkan Benua Afrika, terutama pada jalan darat. Dikenal sejak sekitar seribu tahun sebelum Masehi, istilah ‘Jalur Sutra’ pertama kali diperkenalkan oleh Ferdinand von Richthofen, ahli geografi berkebangsaan Jerman, pada abad ke-18. Disebut ‘jalur sutra’ karena komoditi utama dari negeri Tiongkok berupa kain sutra.

Akan halnya Jalur Rempah, yang membentang sepanjang lautan Nusantara hingga Benua Afrika dan Eropa, diduga telah dikenal jauh sebelum Jalur Sutra—meski tidak secara eksplisit disebut ‘jalur rempah’. Masuk akal karena sebelum Kepulauan Nusantara telah dikenal di India, Asia Barat, dan Eropa, sebagai daerah penghasil rempah, kayu cendana, dan emas sejak sebelum tarikh Masehi. Hingga pada tahun 400 Masehi, sastrawan India, Kalidasa, menyebut kata *dvipantara* dalam kumpulan puisinya. Kata itu mengacu pada kepulauan penghasil rempah. Diduga kuat, *dvipantara* yang dimaksud adalah Kepulauan Nusantara, khususnya Maluku yang terletak di bagian timur. Seperti diketahui, rempah, terutama cengkih dan pala, tumbuh di wilayah Indonesia bagian timur seperti Ternate, Tidore, Moti, Makian, Bacan, dan Banda.

Dalam artikel yang dimuat dalam jurnal ini, Bambang Budi Utomo menyertakan kutipan menarik. “Saudagar-saudagar Melayu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Timor untuk kayu cendana dan Banda untuk fuli (dan pala), dan Maluku (utara) untuk cengkih.” Kutipan itu menggambarkan bahwa daya tarik rempah-rempah menjadi faktor utama perkembangan perdagangan antarbangsa di Asia Tenggara. Secara estafet, rempah dibawa para pedagang ke pelabuhan di Goa (India), Kuffah (Persia), Oman di Jazirah Arab, Mesir, dan Syria. Rempah kemudian juga ditanam di Zanzibar, Afrika. Dengan demikian jelas, perdagangan rempah membentuk jalur perniagaan maritim yang sangat panjang dan masif dengan Maluku sebagai pusatnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa rempah telah menjadi faktor penentu berkembangnya perdagangan global.

Ditilik lebih jauh, seperti disebutkan oleh Bondan Kanumoyoso dalam artikelnya dalam jurnal ini, rempah telah membawa Indonesia terintegrasi dengan dunia. Perdagangan rempah yang diramaikan oleh pedagang dari pelbagai bangsa telah menyumbang penguatan ‘identitas Nusantara’ sekaligus pembentukan identitas global. Jalur Rempah merajut *cultural encounter*, pertemuan budaya, di antara bangsa-bangsa. Namun, pada saat yang bersamaan juga memunculkan tragedi peradaban antarbangsa. Rempah telah menggoda orang Eropa berbondong-bondong sekadar ingin berdagang hingga menguasainya secara paksa sehingga melahirkan bentuk kolonialisme di Kepulauan Nusantara.

Kini, Jalur Rempah seakan terpendam dalam ingatan dan ketidakingatan sejarah bangsa. Pengungkapan kembali Jalur Rempah diharapkan dapat menyadarkan Indonesia pernah berperan besar dalam menyumbang peradaban dunia. Di tengah upaya menjadikan negeri ini sebagai poros maritim dunia, seyogyanya pengetahuan tentang Jalur Rempah disebarluaskan kembali melalui pelbagai cara. Penulisan dan pelajaran sejarah di sekolah, misalnya, selayaknya memberi tempat pembahasan tentang Jalur Rempah.

Edisi JEJAK NUSANTARA kali ini juga dimaksudkan menyumbang perbincangan seputar Jalur Rempah. Disadari, artikel tematik yang dimuat di sini belum sepenuhnya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pokok pembicaraan. Namun, setidaknya dapat mengawali diskusi tentang aspek-aspek mendasar Jalur Rempah seperti terlihat pada artikel Bambang Budi Utomo dan Bondan Kanumoyoso yang telah disebutkan. Artikel lainnya, yang ditulis oleh Sem Touwe, Helda M. Siahainenia, dan Tasrifin Tahara, memaparkan segi-segi khusus dampak perdagangan rempah pada aspek dan lokalitas tertentu. Sementara itu, pada sisi yang agak lain, Tyson Tirta mengingatkan bahwa lada Nusantara pernah diperdagangkan hingga ke negeri Amerika—hal yang selama ini luput dari perhatian kita.

Seperti biasa, jurnal ini juga menampilkan artikel lepas yang dipandang perlu diketahui atau diingat kembali. Artikel Amrullah Amir merekam jejak seorang Melayu di kawasan Sulawesi Selatan yang penting untuk memahami keteladanan dalam masyarakat. Tulisan Imas Emalia tentang kesehatan masyarakat di Kota Cirebon mengingatkan bahwa aspek kesejahteraan rakyat dalam bidang kesehatan merupakan hal mutlak yang harus diwujudkan oleh pemerintah mana pun. Terakhir, risalah Retnowati Subarno tentang asimilasi menegaskan pesan tentang urgensi kesamaan, kebersamaan dan keutuhan bangsa Indonesia yang berkalung pelangi.

Daftar Isi

Editorial	3
Daftar Isi	5
Asal-Muasal dan Terbentuknya Jalur Rempah <i>Bambang Budi Utomo</i>	6-16
Arti Penting Rempah-rempah dalam Sejarah Indonesia <i>Bondan Kanumoyoso</i>	17-33
Jalur Rempah dan Keberuntungan Petani Maluku dalam Perdagangan Abad Ke-15 Hingga Abad Ke-17 <i>Helda M. Siahainenia</i>	34-54
Pengaruh Jalur Rempah terhadap Pertumbuhan Budaya Maritim Masyarakat Maluku : Kasus Orang Banda dan Gorom <i>Sem Touwe</i>	55-69
Melacak Jalur Rempah Pelayaran dan Migrasi Orang Buton di Kepulauan Maluku <i>Tasrifin Tahara</i>	70-80
Jejak Globalisasi Lada Perdagangan Lada Aceh ke Massachusetts 1797-1846 <i>Tyson Tirta</i>	81-90
Memoar Ince Abdul Wahab Daeng Masikki Keturunan Melayu-Makassar di Bandar Pelabuhan Makassar 1876-1910 <i>Amrullah Amir</i>	91-107
Dinamika Kota Pesisir Cirebon dan Kesehatan Masyarakat Masa Kolonial 1906-1940 <i>Imas Emalia</i>	108-120
Menuju Asimilasi yang Wajar : Wacana tentang Pembauran Golongan Tionghoa di Indonesia dalam “Star Weekly” 1946-61 <i>Retnowati Subarno</i>	121-137
Resensi Buku Jejak Nusantara	138-145
Pembelajaran Toleransi Dari Generasi ke Generasi	146-153

Asal-Muasal dan Terbentuknya Jalur Rempah

Bambang Budi Utomo

Peneliti, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

Abstract

Clove, nutmeg, and mace are outstanding trade commodities from Nusantara which are best grown only in the Moluccas Islands. The "journey" of these spices from its sources had been started since the beginning of the Christian era, even before. Cloves had been recorded found in Mesopotamia, Syria from around 1700 BC, and spices were recorded as tributes from King Solomon to Queen Sheeba. This paper is about spices trading from its sources in the Moluccas Islands to places where they were marketed far to Middle East and Europe. The marketing agents were merchants from Middle East, Europe, and very possible were the Moluccas local merchants. From these spices trading, inter-island sea-trade networks were formed as well as inter-kingdom in Nusantara.

Keywords: *spice, clove, nutmeg, trading route, Mollucas Islands, Nusantara*

Rempah yang terdiri dari cengkih, pala, bunga pala, dan kayu manis, merupakan barang komoditi penting dan banyak penggemarnya. Berdasarkan sumber tertulis diketahui bahwa komoditi ini diketahui telah menyebar jauh dari sumbernya yang kala itu hanya terdapat di sebelah timur Nusantara, tepatnya di Kepulauan Maluku. Sumber-sumber tertulis itu antara lain kitab *Injil Perjanjian Lama* atau dikenal juga dengan sebutan *Taurat*, sumber para penulis dari Yunani,



Gambar 1: Pohon cengkih tertua di Ternate yang masih hidup (Dok. BBU).

dan catatan para pengelana atau saudagar yang berniaga ke Maluku.

Sumber tertulis pertama yang menyebut *rempah* dan beberapa komoditi lain yang diduga berasal dari Nusantara adalah *Kitab Perjanjian Lama* (1 Raja-Raja 10: 10–12) yang menyebutkan,

- (10) Kemudian Ratu Syeba mem-berikan 4.140 kg emas kepada raja. Ia juga memberikan sejumlah besar *rempah* dan perhiasan. Tidak pernah ada pemberian *rempah-rempah* sedemikian banyak seperti yang diserahkan oleh Ratu Syeba kepada Raja Sulaiman.
- (11) Kapal-kapal milik Hiram membawa emas dari *Ofir* dan juga mengangkut banyak *kayu cendana* dan perhiasan.
- (12) Sulaiman mempergunakan *kayu cendana* untuk penopang Bait Allah dan istana dan membuat alat musik harpa dan alat seperti harpa yang lebih kecil hen-tuknya untuk para penyanyi. Tidak ada orang yang pernah membawa kayu semacam itu ke Israel dan tidak ada yang melihat kayu sejenis itu sejak waktu itu.

Dari kutipan *Kitab Perjanjian Lama* tersebut terdapat beberapa kata penting yang perlu digarisbawahi yaitu ‘rempah’, ‘kayu cendana’ (*Santalum album Linn*), dan ‘emas dari Ofir’. Rempah yang terdiri dari cengkik (*Eugenia aromatic, Kunze*), pala (*Myristica fragrans*), dan bunga pala, merupakan hasil hutan yang menurut ahli tumbuh-tumbuhan, sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara pada abad ke-15 hanya dihasilkan di Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku (Deinum 1949: 684–718). Pertanyaannya, bagaimana dan siapa yang membawa komoditi itu hingga jauh ke Timur Tengah, apakah para saudagar dari Maluku, atau saudagar lain yang

atang ke Maluku. Atau, boleh jadi komoditi ini dibawa dari Maluku secara estafet ke pelbagai pelabuhan penting seperti Goa di India, Kuffah di Persia (sekarang masuk Irak), dan kemudian bandar Oman di Jazirah Arab, dan Timur Tengah sekitar Mesir dan Syria. Perdagangan rempah di Nusantara telah berlangsung lama sebelum kurun niaga yang berkembang sejak abad ke-15 (Reid 1988).

Tumbuhan lain yang menjadi ciri khas Nusantara adalah kayu cendana. Jenis kayu ini hanya tumbuh di hutan-hutan Nusantara, khususnya di daerah Timor di Nusatenggara Timur. Kayu ini pada masa sejarah Nusantara menjadi barang komoditi yang cukup penting karena cirinya yang menimbulkan aroma wangi. Karena wanginya ini, sejak millennium kedua Masehi hingga kini komoditi ini dijual tidak dalam bentuk kayu gelondongan tetapi dalam bentuk potongan kecil atau serbuk yang penggunaannya dengan cara dibakar ditaburkan di atas bara arang.

Pada sekitar 1500 SM ketika hutan di Nusantara masih lebat, kayu cendana dapat dipotong dalam bentuk kayu gelondongan. Kayu cendana dalam bentuk gelondongan inilah mungkin yang dikirim ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah (Kuil Sulaiman), istana Raja Sulaiman, dan alat-alat musik yang dibuat dari kayu. Karena aroma harum yang ditimbulkan oleh kayu ini, dalam Kitab Raja-Raja 1 disebutkan kayu ini dipakai sebagai balok penopang dalam kuil, “Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk Bait Allah dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi;

kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini.” Karena alasan aroma harumnya, maka kayu jenis ini layak dipakai untuk sebuah kuil dan istana.

Di kalangan bangsa Yunani purba, Sumatera sudah dikenal dengan nama *Taprobane*. Nama *Taprobane Insula* telah dipakai oleh Claudius Ptolomeus, seorang ahli geografi Yunani abad kedua Masehi di Iskandariah (Mesir), ketika dia menguraikan daerah Asia Tenggara dalam karyanya *Geographike Hyphegesis*. Ptolomeus menulis bahwa di Pulau Taprobane terdapat negeri/kota Barousai. Mungkin sekali negeri yang dimaksudkan adalah Barus di pantai barat Sumatera Utara yang terkenal sejak zaman purba sebagai penghasil kapur barus. Ketika di daerah Tapanuli Barat, sekitar Barus masih banyak terdapat hutan yang pohonnya menghasilkan kristal kapur, banyak saudagar dari mancanegara yang datang. Kapur barus juga dihasilkan di daratan Tiongkok, namun kualitasnya kurang baik sehingga banyak yang datang ke Barus untuk membelinya.

Naskah Yunani yang lain *Periplus tēs Erythras thalassēs* dari tahun 70 Masehi menyebutkan Taprobane juga dijuluki *chryse nesos* ‘pulau emas’. Sejak zaman purba para saudagar dari daerah sekitar Laut Tengah sudah mendatangi Nusantara, terutama Sumatera. Selain mencari emas, mereka mencari kemenyan (*Styrax Sumaterana*) dan kapur barus (*Dryobalanops aromatica*) yang saat itu hanya ada di hutan belantara Sumatera. Sebaliknya, para saudagar Nusantara pun sudah menjajakan komoditi mereka sampai ke Asia Barat dan

Afrika Timur, sebagaimana tercantum pada naskah *Historia Naturalis* karya Pliny atau Plinius dari abad pertama Masehi.

Dalam *Kitab Perjanjian Lama* (1 Raja-Raja 10: 14–29) disebutkan bahwa Raja Sulaiman juga membuat kapal-kapal di Ezion-Geber di dekat Elot, di tepi laut Teberau, di Tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu setiap tiga tahun Raja Hiram mengirim anak buahnya, yaitu para awak kapal yang mengetahui tentang laut, menyertai anak buah Raja Sulaiman. Mereka sampai ke Ofir¹ dan dari sana mereka mengambil empat ratus dua puluh *talenta* emas, yang mereka bawa kepada Raja Sulaiman. Apabila ayat tersebut dicermati, pelayaran hingga Ofir memerlukan persiapan yang matang. Sengaja dipilih pelaut-pelaut yang benar-benar menguasai lautan, dan tentunya geografi kelautan. Menurut *Kitab Perjanjian Lama*, perjalanan ke Ofir ulang-alik memakan waktu tiga tahun.

Banyak ahli sejarah berpendapat bahwa negeri Ofir terletak di Sumatera.

¹Mengenai nama *ofir* atau kadang-kadang *ophir*, seperti disebut dalam *Perjanjian Lama*, sangat diragukan kebenarannya berada di Sumatera. Awalnya Marsden yang meragukan nama ini karena tidak melekat pada cerita rakyat setempat. Selanjutnya ia juga menyebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat dipastikan mengenai nama *ophir*—yang ditemukan di peta dan terdapat di pulau ini (Sumatera) dan satu lagi di Semenanjung Tanah Melayu. Nama *ophir* atau *ofir* terdapat juga di daerah Sinai, Timur Tengah, sebagai tempat berlatih tentara Israel. Berdasarkan kenyataan tersebut, saya meragukan keberadaan lokasi Ofir di Pulau Sumatera, meskipun di daerah Kabupaten Pasaman terdapat sebuah gunung yang bernama Ophir (+2.912 meter d.p.l.) dekat Gunung Talakmau.

Perlu dicatat, kota Tirus di Mediterania merupakan pusat pemasaran barang-barang dari Timur Jauh. Ptolemeus pun menulis *Geographike Hyphegesis* berdasarkan informasi dari seorang saudagar Tirus yang bernama Marinus, dan banyak petualang Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 mencari emas ke Sumatera dengan anggapan bahwa di sanalah letak negeri Ofir tempat Raja Sulaiman menambang emas.

Jauh sebelum tarikh Masehi, Nusantara telah dikenal di India di daerah Timur Tengah dan Eropa sebagai daerah penghasil rempah, kayu cendana dan emas. Mungkin, emas banyak dihasilkan di banyak tempat di muka bumi ini, namun rempah, kayu cendana, dan kayu lain yang beraroma harum boleh jadi hanya dihasilkan di bumi Nusantara seperti apa yang dikatakan para pakar tumbuh-tumbuhan.

JALUR SUTRA ATAU JALUR REMPAH?

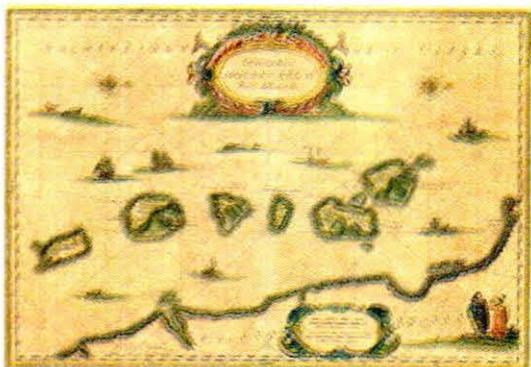
Pada era perdagangan rempah di Asia Tenggara terbentuk jalur-jalur pelayaran yang menghubungkan antara tempat yang memproduksi dan tempat-tempat untuk memasarkan. Tercatat dalam sejarah pulau-pulau produsen rempah terdapat di kawasan timur Nusantara, seperti Ternate, Tidore, Bacan, Ambon, dan Kepulauan Banda. Di Nusatenggara yang dulu dikenal dengan sebutan Kepulauan Sunda Kecil, juga dikenal sebagai penghasil kayu-kayuan yang beraroma harum seperti kayu cendana dan gaharu.

Dari tempat-tempat penghasil komoditi perdagangan yang sangat digemari itu, rempah dan kayu-kayuan dipasarkan

ke seluruh penjuru dunia dengan cara estafet, dari pelabuhan penghasil ke pelabuhan lain yang sejauh jangkauan kapal dan perbekalannya. Dari pelabuhan singgah tersebut kemudian diteruskan lagi ke pelabuhan tempat dipasarkan.

Di kawasan timur Nusantara, tercatat beberapa bandar yang membentuk jaringan pelayaran lokal. Di daerah Maluku Tengah terdapat Hitu sebagai pusat bandar yang membawahkan bandar-bandar kecil lainnya, seperti Seram Laut/Gorong, Kei-Aru, dan Timbar. Dari Hitu komoditi yang dihasilkan dari pelabuhan kecil tersebut kemudian dibawa ke pelabuhan yang jauh, seperti Jepara dan Gresik di Tanah Jawa.

Di daerah Maluku Utara terdapat empat pusat bandar utama, yaitu Jailolo, Bacan, Ternate, dan Tidore. Tidore membawahkan beberapa bandar di Halmahera Timur, Kepulauan Raja Ampat, dan Irian Barat; Ternate membawahkan bandar-bandar di Kepulauan Banggai, pesisir timur sampai utara Sulawesi; Jailolo membawahkan bandar-bandar di pesisir barat Halmahera. Pada sekitar abad ke-18 sampai malapetaka meletusnya Tambora (10-15 April 1815), Sumbawa dikenal sebagai penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Beras dari tempat ini dipasarkan ke Melaka untuk selanjutnya diteruskan ke bandar lain di Asia Tenggara daratan, seperti Yangoon dan Bangkok. Pelayaran dari Sumbawa tidak dilakukan secara langsung tetapi singgah di Banjarmasin dan Gresik.



Gambar 2 : Peta/gambar Kepulauan Maluku ini tidak akan pernah ada jika tidak ada cengkih dan pala di daerah itu.

Jalur pelayaran bisa terbentuk bukan saja berdasarkan alasan perdagangan, tetapi dapat pula berdasarkan alasan politik dan keluarga. Hubungan emosional antara Melaka-Palembang cukup erat. *Sejarah Melayu* mencatat bahwa seorang bangsawan Palembang, Parameswara, meninggalkan tempat kelahirannya untuk merantau. Awalnya (abad ke-14) ia berangkat menuju Ketapang di Kalimantan Barat untuk bertemu dengan Raja Majapahit. Dari Ketapang kemudian ia ke Temasek (sekarang Singapura) dan akhirnya tiba di sebuah perkampungan nelayan yang disebut Melaka. Oleh Parameswara perkampungan ini kemudian dibangun menjadi sebuah kota.

Pada era perdagangan rempah, sebelum dikuasai Portugis pada 1511, Melaka merupakan bandar besar. Dari Melaka komoditi perdagangan dibawa ke tempat lain, seperti Asia Barat dan Eropa, Thailand, Viet Nam, dan Jepang. Akibat dari ramainya perdagangan laut dan tumbuh berkembangnya kota, penguasa Melaka membuat Hukum Kanun

Melaka yang berisi tentang pengaturan pemerintahan dan kehidupan rakyat.

Hubungan keluarga juga terbentuk antara Kesultanan Brunei, Kesultanan Sambas, dan Ketapang. Dalam Sejarah Brunei disebutkan bahwa Sultan Sambas adalah anak Sultan Brunei. Demikian pula yang berkuasa di Ketapang. Pada waktu itu (abad ke-17), Kucing masih merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Brunei. Hubungan kerabat ini “menciptakan” jalur pelayaran antara Brunei–Kucing–Sambas–Ketapang.

CENGIH HANYA ADA DI MALUKU

“Saudagar-saudagar Melayu mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Timor untuk kayu cendana dan Banda untuk fuli (dan pala) dan Maluku (utara) untuk cengkih, dan barang-barang dagangan ini tidak tumbuh di tempat lain di dunia kecuali di tempat itu.” Kutipan ini menggambarkan bahwa daya tarik rempah-rempah—cengkih, pala, dan bunga pala—menjadi dorongan utama perkembangan perdagangan antarbangsa di Asia Tenggara. Pakar tumbuh-tumbuhan menyatakan bahwa cengkih (*Eugenia aromatica*) hanya tumbuh di Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Pala dan lapisan pembungkus kulit biji (fuli) diperoleh dari pohon pala (*Myristica fragrans*) terdapat di Pulau Banda. Setelah 1550, pohon-pohon ditanam di kawasan lain di Nusantara. Dengan kemajuan teknologi budidaya tanaman, pada akhirnya dapat ditanam di beberapa tempat di dunia seperti di Pulau Zanzibar yang letaknya di sebelah timur Tanzania, timur benua Afrika.



Gambar 3: Kayu manis, pala, bunga pala, dan cengkih (Dok. BBU).

Melalui komoditi cengkih dan pala, dapat ditelusuri jalur-jalur pelayaran dan perdagangan sampai seberapa jauh hubungan Maluku dengan dunia luar. Sebuah sumber tertulis Romawi dari Plinius Major (tahun 75 Masehi) menyebutkan *garyophyllon* (nama tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di hutan sakti India).² Diduga bahwa yang dimaksud dengan *garyophyllon* adalah cengkih, dan telah dikenal di benua Eropa pada awal abad Masehi (Rouffaer 1905: 363–95).

Namun, jauh sebelum itu orang-orang di Mesopotamia sudah menggemari cengkih. Hal ini terbukti oleh penemuan jambangan berisi cengkih di gudang dapur sebuah rumah di Situs Terqa, Euftrat Tengah, Syria, salah satu wilayah peradaban Mesopotamia. Saat ekskavasi dilakukan, arkeolog Italia Giorgio Buccellati begitu terkagum-kagum atas temuannya yang berupa

²Orang Tionghoa rupanya sudah mengetahui bahwa cengkih hanya dapat diperoleh dari Maluku. “hanya satu tempat di laut selatan yang memproduksi cengkih . . .” (Groeneveldt 1960).

sebuah wadah berisi benda seperti cengkih. Rupanya ia menggali rumah seorang saudagar yang berasal dari masa 1.700 SM di Terqa. Awalnya sang arkeolog ini tidak percaya. Namun setelah diteliti bersama seorang rekannya, ahli paleobotani (botani purbakala) bernama Kathleen Galvin, ia lantas yakin bahwa benda yang temuannya memang cengkih. Selanjutnya Kathleen menegaskan bahwa cengkih di dunia ini hanya dihasilkan di Kepulauan Maluku.

Sumber Eropa lainnya menyebutkan bahwa St. Silvester, seorang Paus di Roma (314–335 Masehi) menerima hadiah 150 pon cengkih. Sumber lain menyebutkan bahwa pada 547 Masehi Cosmos Indicopleustis mencatat di antara barang-barang dagangannya terdapat rempah-rempah yang didatangkan dari Tiongkok dan Srilanka.

Sumber-sumber tertulis tentang hasil dari Maluku, mengindikasikan bahwa bukan pembeli yang datang ke Maluku, melainkan orang-orang dari Maluku (Nusantara) yang datang. Kalau pembeli yang datang, biasanya diceriterakan juga tempat yang didatangi itu. Sebuah deskripsi “menyesatkan” yang ditulis oleh penulis Arab terkenal Ibnu Battūta pada 1350 menyatakan, “cengkih yang diperdagangkan adalah *batang* pohonnya, buahnya disebut *pala*, dan bunganya dinamakan *fuli*.” Ini berarti, Ibnu Battūta tidak mengetahui bagaimana bentuk pohon cengkih dan bagaimana bentuk pohon pala.

Sampai seberapa jauh para pelaut Nusantara mengarungi laut. Apakah mereka hanya melayari laut/selat yang memisahkan antarpulau, atau lebih jauh lagi sampai ke Asia Selatan, Tiongkok,

Asia Timur, bahkan sampai ke Eropa? Sebuah gambar cat air yang dibuat oleh Alphonse Pellion yang berjudul *Korakora from Gebe, North Moluccas, 1818* menggambarkan sebuah perahu besar dengan 9-10 pendayung dan sebuah layar besar. Perahu besar ini sangat layak untuk pelayaran jarak jauh dan digunakan untuk mengangkut rempah-rempah, khususnya pala dan cengkih, ke pelabuhan *entrepôt* di Asia Tenggara.

ERA PERDAGANGAN REMPAH

Indonesia yang terletak di pertengahan jalur pelayaran dan perdagangan antara India dan Tiongkok telah dikenal sejak dulu. Berhubungan dengan aktivitas itu, banyak ahli percaya bahwa "sosialisasi" budaya India berlangsung di Jawa dan Sumatera. Kedua pulau itu telah dinyatakan dalam catatan geografi Arab Kuno sejak abad-abad awal Masehi. Orang Portugis tampil pertama kali di Nusantara pada 1509, yang diikuti dengan aksi Antonio de Abreu, seorang perwira armada Afonso de Albuquerque, memperoleh Maluku, pulau penghasil rempah-rempah. Kakak-beradik Parmentier (1883) dari Dieppe, Prancis, pada 1529 juga berlayar ke Sumatera dalam usaha mencari rempah-rempah walaupun kematian yang ditemukannya di sana. Selanjutnya, orang Belanda datang ke Jawa pada 1596, membangun Batavia pada 1619, dan sedikit demi sedikit berhasil menggantikan kedudukan orang Portugis.

Pengenalan beberapa produk alam Nusantara sebagai komoditi perdagangan yang transaksinya berlangsung sejak

dulu dan melibatkan banyak bangsa merupakan hal menarik untuk diungkap. Mengacu pada data sejarah dan arkeologi maritim dapat dibicarakan pokok yang terkait dengan topik bahasan yang lebih luas, yaitu *economic exchanges*, sebagaimana dikemukakan Mollat (1980 : 45-60).

Besarnya kebutuhan akan rempah-rempah mengakibatkan perubahan jalannya sejarah serta mempengaruhi hubungan internasional. Hal itu memunculkan arti lain rempah-rempah sebagai komoditi yang menyebabkan bangsa Eropa mendatangi Nusantara untuk memperolehnya dari tangan pertama. Dalam konteks ini rempah-rempah adalah pala, cengkih, lada (*Piper nigrum*), kayu manis (*Cinnamomum zeylanicum*), dan beberapa lainnya. Pada saat itu perahu yang memanfaatkan angin sebagai tenaga penggerak—sangat berperan. Tanpa perahu atau kapal, eksplorasi, kolonisasi, ataupun perkembangan umum sebagian besar dunia, tidak akan begitu saja terwujud. Sejak abad pertama Masehi, masyarakat Nusantara telah memiliki hubungan dagang dengan wilayah-wilayah lain. Ada rute dagang dari Tiongkok melalui Kepulauan Nusantara ke India, Persia, Mesir, Eropa, dan sebaliknya. Barang dagangan yang dihasilkan Nusantara adalah rempah-rempah, terutama berasal dari Maluku. Saudagar Jawa dan Sumatera membawa barang itu ke pusat perdagangan di kawasan Nusantara barat. Selanjutnya mereka atau para saudagar dari India mengangkutnya ke India. Di sana telah menunggu saudagar-saudagar Asia Barat (orang Persia dan Arab, mula-mula juga orang Yunani dan Mesir), yang selan-

jutnya membawa rempah-rempah tersebut, bersama barang lain, ke pasaran Timur Tengah dan Eropa. Rute dagang itu tampak bagaikan sebuah rantai yang terjalin dari beberapa mata rantai.

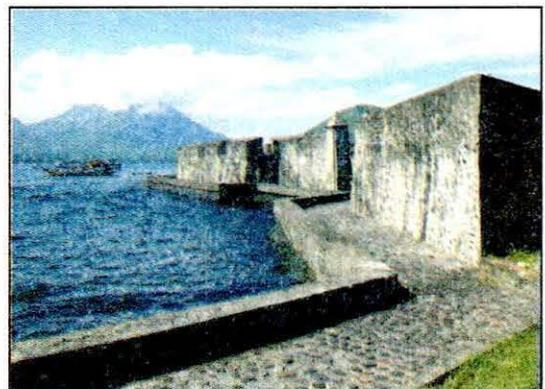
Penduduk Sumatera yang berada di ujung barat Nusantara telah melibatkan diri dalam perdagangan antara Tiongkok dan India sejak abad ke-5 dan ke-6 (Selling 1981). Mulai abad ke-7, secara teratur para saudagar Arab yang kebanyakan datang dari India berlayar ke Asia Tenggara. Perdagangan secara meluas tidak saja dilakukan di Nusantara, malahan mencapai Tiongkok sebelah selatan. Lada (*Piper nigrum*), macam rempah-rempah lain yang dihasilkan dari Lampung dan Jawa Barat, dan kayu harum, adalah komoditas yang dicari (Hall 1968).

Sejak lama Gresik juga menjadi mata rantai pelayaran dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Di Leran masih tersimpan data pertanggalan yang dihubungkan dengan keberadaan komunitas Islam yang paling tua di Asia Tenggara, ialah nisan Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 495 Hijrah (sekitar 1101 Masehi). Lokasi sekitarnya mengandung sisa kehidupan sebuah bandar abad ke-10–14 Masehi (Situs Pasucinan), yang mampu menempatkannya sebagai alternatif dari lokasi Gresik awal. Temuan keramikya ber-kronologi abad ke-10–14, dengan domi-nasi produk Dinasti Song-Yuan.

Kehadiran orang Portugis di Nusantara bermula dengan penjelajahan pantai barat Afrika sejak abad ke-15. Keinginan untuk menemukan jalur ke "Hindia" sebagai cara mencari kekayaan melalui perdagangan adalah motivasi ekonomi

yang menjadi pendorongnya. Di dalamnya terkandung maksud mengalihkan lalu lintas perdagangan melalui jalur baru. Diperhitungkan bahwa hal tersebut akan merugikan bangsa-bangsa yang sampai saat itu menguasai rantai perdagangan Asia-Eropa, di antaranya adalah bangsa Turki, yang ketika itu sedang menyerang kerajaan-kerajaan Eropa. Itu dapat dikategorikan sebagai alasan politis bangsa Portugis. Adapun alasan lain yang mendorong penjelajahan itu adalah rasa tanggung jawab mereka atas penyiaran agama, pengabdian terhadap agama Kristen sehingga dapat dilihat pula ada alasan keagamaan di dalamnya.

Berkenaan dengan itu, pada awal abad ke-16 ada faktor baru masuk ke dalam konstelasi kekuatan ekonomi, politik, dan religi di Nusantara, yakni ketika Melaka—pusat perdagangan utama antara Maluku dan India—direbut orang Portugis pada 1511. Peristiwa



Gambar 4: Benteng Kalamata atau Benteng Gamalama merupakan salah satu benteng yang dibangun Portugis di Pulau Ternate (Dok. BBU).

tersebut diikuti dengan malang-melintangnya armada kapal mereka di perairan antara Jawa dan Maluku. Puncaknya terjadi pada 1522 ketika mereka

mendirikan benteng di Temate. Semua itu merupakan kelanjutan dari kegiatan *os descobrimentos*, atau penjelajahan dan penemuan, dalam sejarah Portugal yang merupakan *seculo domo*, atau abad/zaman keemasan, pada lintasan sejarah bangsa itu. Tujuan jangka panjangnya jelas, yakni menguasai perdagangan Asia-Eropa yang dapat dicapai dengan menguasai lautan.

Orang Portugis jelas mencium peran Melaka sebagai bandar yang amat penting. Keletakannya yang strategis menjadi tumpuan hubungan dagang regional dan internasional. Dari barat, berdatangan kapal-kapal saudagar Pegu, Benggala, Srilanka (Serendib, menurut pelaut Arab) dan Goa. Mereka adalah perantara lalu lintas komoditi Barat dan Timur. Dari arah timur, kedatangan saudagar Siam, Tiongkok, dan Jepang meramaikan jual-beli berbagai jenis barang dagangan yang dibawa dan yang diperlukan. Jung Tiongkok datang ke Melaka membawa sutra, keramik, dan sebagainya, sedangkan barang utama yang dibawa balik ke Tiongkok berupa lada, gaharu, rempah, dan hasil hutan Nusantara. Disebutkan oleh Tomé Pires bahwa satu kuintal lada yang dibeli dengan nilai 4 *cruzados* di Melaka, laku dijual dengan harga 15 atau 16 *cruzados* di Tiongkok (Cortesaõ 1967). Dari selatan, kapal-kapal yang sarat dengan rempah-rempah dan kayu harum, hasil bumi dan hasil hutan Sumatera, Jawa, dan Kepulauan Maluku datang mengisi gudang-gudang saudagar di Melaka. Kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang besar atas tumbuh-kembangnya bandar-bandar pesisir utara Pulau Jawa

seperti Cirebon, Demak, Jepara, dan Tuban, selain memberi kesempatan diperolehnya pangsa pasar yang luas atas produk berupa cengkih dari Maluku, pala dan bunga pala dari Banda, dan kayu gaharu dari Lombok, atau kayu cendana dari Timor.

Kedatangan Diego Lopes de Sequiera³ pada 1509 di Pedir menandai hubungan Sumatera dan Portugal sebelum orang Portugis menguasai Melaka. Ia melanjutkan pelayaran ke Pasai di Aceh, dan kemudian ke Bandar Melaka di Semenanjung Tanah Melayu. Tujuannya menguasai kekayaan alam Pasai, yang antara lain menghasilkan kamper (kapur barus), damar, lada, dan jahe. Namun akibat serangan Aceh pada 1524, Portugis meninggalkan bentengnya di Pasai.

Penaklukan Goa dan Melaka oleh orang Portugis mengakibatkan perubahan rute perdagangan rempah-rempah. Dahulu lada dibawa melalui Laut Merah, melalui jalan darat ke Kairo, dilanjutkan lagi dengan kapal melalui Laut Tengah, dan masuk ke Eropa. Setelah itu rute bergeser ke selatan Afrika melalui Tanjung Harapan. Hal itu jelas menguntungkan pihak Portugal, dan sebaliknya merugikan orang-orang Venesia.

Pedagang Muslim yang tidak mau lagi singgah di Melaka cenderung berdagang di bandar-bandar pesisir utara Jawa dan kawasan barat Nusantara, seperti Aceh di Sumatera. Aceh yang beruntung, mampu menciptakan bandar alternatif bagi saudagar yang enggan

³Pemimpin armada pertama orang Eropa yang tiba di Asia Tenggara yang selamat dari serangan orang Melayu (Reid 2002).

menyinggahi Melaka. Sebagian ruas Selat Melaka berada di bawah kontrolnya sehingga mengganggu arus perdagangan orang Portugis di Nusantara. Aceh juga berkali-kali menyerang Melaka, bahkan menyerbu Patani (selatan Thailand), Johor, dan Perak (Tahir Al-Haddad 1957). Menurut sumber Tiongkok ketika itu Aceh mengekspor kayu gaharu, cengkih, dupa, lada, kayu sapang, dan sebagainya (Groen-eveldt 1960).⁴

Bangsa Eropa lain yang ikut memasuki "ajang perburuan rempah-rempah" Nusantara adalah orang Belanda. VOC yang dibentuk pada 1602 merupakan sebuah federasi dari enam badan dagang yang sejak 1596 telah mengirimkan armada dagangnya ke bandar-bandar di Nusantara. Tempat-tempat penting yang menghasilkan komoditi bagi konsumen Eropa—yakni rempah-rempah—dikuasainya dengan cara yang lebih luas, berbeda dengan tempat-tempat yang hanya dijadikan titik persinggahan atau jual-beli.

Walaupun jalur perdagangan utamanya antara Batavia dan Negeri Belanda, VOC tidak meninggalkan perdagangan dengan bandar lain di Asia Tenggara dan Asia Timur. Bila yang diangkut dari Batavia adalah rempah-rempah, maka yang dibawa dari Belanda berupa uang, barang-barang keperluan VOC, serta sedikit barang dagangan (Leirissa 1976 44–53).

⁴Dalam hal ini Aceh berfungsi sebagai pelabuhan antara karena Aceh tidak menghasilkan rempah dan kayu-kayuan yang harum.

Upaya Belanda memonopoli rempah-rempah Nusantara dilakukan dengan susah-payah. Kenyataan menunjukkan bahwa saudagar Tionghoa tetap aktif dalam perdagangan lada sepanjang abad ke-17. Bahkan mereka mampu mencegah Belanda menguasai perdagangan lada di Kalimantan pada 1730. Kondisi itu menyebabkan rencana Belanda memonopoli pasar lada Eropa tidak begitu saja dapat diimplementasikan sehingga pada 1736 English East India Company masih mampu mengimpor lada ke London dalam jumlah yang sama banyak dengan yang diterima VOC di Batavia dari seluruh kepulauan Nusantara (Boxer 1973).

EPILOG

Sejak zaman purba, sekurang-kurangnya sejak 1500 SM rempah, khususnya cengkih, sudah lama dikenal dan dikonsumsi oleh orang dari Timur Tengah (Mesopotamia). Pada abad-abad pertama tarikh Masehi cengkih sudah dikenal di kalangan kepausan Italia dan kekaisaran Tiongkok. Bagaimana komoditi ini tiba di daerah-daerah tersebut, diriwayatkan dalam berbagai sumber tertulis, di antaranya dari *Kitab Perjanjian Lama* oleh umat Islam dikenal sebagai kitab *Taurat*.

Dalam sejumlah sumber tertulis, tidak disebutkan siapa yang membawa komoditi tersebut, apakah para pelaut/saudagar lokal dari Maluku ataukah pelaut/saudagar asing (Arab, Persia, Tiongkok, atau Eropa). Diduga kuat para pelaut/saudagar asing yang datang itu mencari komoditi yang disebutkan

dalam *Kitab Perjanjian Lama*. Berita-berita Tionghoa juga menyebutkan bahwa Kaisar Tiongkok memerintahkan bawahannya pergi mencari cengkih, namun tidak disebutkan ke mana tujuannya. Utusan pertama tidak pernah kembali. Utusan berikutnya baru berhasil mendapatkan "obat panjang umur." Pada masa Dinasti Han, para pegawai kekaisaran yang akan menghadap Kaisar diwajibkan mengulum cengkih.

Ramainya perdagangan rempah ditambah dengan perdagangan bahan-bahan pewangi (getah, kristal, dan kayu), lama-kelamaan membentuk jaringan perdagangan laut di Nusantara, kemudian antara Nusantara dan kawasan lain seperti dengan India, Timur Tengah, dan Eropa ke arah barat, dan dengan Tiongkok ke arah timur. Pusat perdagangan tetap di Maluku sebagai penghasil, dan pelabuhan entréport berada di Jawa dan Melaka. Dalam konteks kekinian, jalur pelayaran yang perlu dihidupkan adalah yang dikenal sebagai jalur pelayaran tradisional. Jalur-jalur itulah yang dahulu dikenal sebagai Jalur Rempah, bukan Jalur Sutra, karena yang diangkut kapal-kapal niaga adalah rempah bukan sutra.

DAFTAR ACUAN

- Boxer, C. R. (1973). *The Dutch Seaborne Empire 1600-1800*. Middlesex: Penguin Books.
- Cortesaõ, A. (ed.) (1967). *The Suma Oriental of Tomé Pires and the Book of Francisco Rodrigues* (terjemahan dan editing oleh A. Cortesaõ). Nendeln/Liechtenstein: Kraus Reprint Limited.
- Deinum, Hk. dan F. Wit (1949), "De Kruidnagel," dalam *Landbouw in de Indische Archipel*, Jilid IIB (redaksi C. J. J. van Hall dan C. van der Koppel). s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Groeneveldt, W. P. (1960), *Historical Notes on Indonesia and Malaya: Compiled from Chinese Sources*. Jakarta: Bhratara.
- Hall, D. G. E. (1968), *A History of South East Asia*. London: Macmillan.
- Leirissa, R. Z. (1976), "Dokumen-dokumen VOC dari abad ke XVIII," *Buletin Yaperna*, No. 17, Tahun III (44-53).
- Mollat, M. (1980), "Historical Contacts of Africa and Madagascar with South and South-East Asia: The Role of Indian Ocean," dalam *Historical relations across the Indian Ocean* (45-60). Paris: Unesco.
- Parmentier (1883), *Le discours de la navigation de Jean et Raoul Parmentier de Dieppe*. Paris: Ernest Lereoux.
- Reid, A. (1988), *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*, Vol. 1: The Lands below the Winds. New Haven dan London: Yale University Press.
- (2002), *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara* (terj. S. Siregar, H. Amini, D. Setiawan). Jakarta: LP3ES.
- Rouffaer, G. P. (1905), "Oudste ontdekkingstochten," dalam *Encyclopædie van Nederlandsch-Indië*, Jilid IV (363-95). s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Tahir Al-Haddad, Sayed Alwi bin (1957), *Sedjarah Perkembangan Islam di Timur Djauh* (terj. D. Shahab). Jakarta: Almaktab Addaimi.

Disertasi

- Selling, E. (1981), "The Evolution of Trading States in Southeast Asia Before the 17th Century. Disertasi Doktor. Columbia: Columbia University.

Arti Penting Rempah-rempah dalam Sejarah Indonesia

Bondan Kanumoyoso
Pengajar, Universitas Indonesia

Abstract

Among others commodities that produced in Indonesian archipelago, spices occupied a special role in determining the course of history. Throughout the history, these commodities became the vehicle for economic activities and at the same time also as a means for the exchanges of values and cultures among many ethnics in Indonesia. There were various group of people and nations involved in the spice trade, and they did not only come from Indonesian archipelago, but also from various corners of the world. Since the ancient time until the early modern period the spice route has brought together various nations in a common activity that called trade. Spice route had cumulated the history of Asia, Europe, Afrika and two other continents into a global history. It is important to trace back the development of spice route in order to understand the important role that had been played by these commodities in shaping the history of Indonesia and even the world.

Keywords: *Spice route, Indonesian archipelago, Indonesian history, global history.*

Salah satu komoditi penting yang dihasilkan oleh Indonesia dan menjadi faktor penentu berkembangnya perdagangan global adalah rempah-rempah. Tidak diketahui dengan pasti sejak kapan tepatnya rempah-rempah telah diperdagangkan dalam kegiatan perdagangan maritim yang melintasi berbagai batas negara dan benua. Namun bukti-bukti

yang ada menyatakan bahwa paling tidak cengkih telah digunakan sebagai salah satu bahan untuk mengawetkan mumi di Mesir kuno dan cengkih serta pala sudah dikenal oleh masyarakat Yunani dan Romawi kuno. Penggalan arkeologi di Mesopotamia, di wilayah yang sekarang termasuk ke dalam negara Suriah, menemukan cengkih di bagian dapur dari

situs rumah orang biasa (Andaya dalam Reid 1999: 30).

Antara abad ke-11 hingga abad ke-16 Masehi, perdagangan rempah-rempah menjadi sumber kemakmuran bagi beberapa negara Eropa yang wilayahnya berbatasan dengan Laut Mediterania. Sedemikian besar kemakmuran yang dibawa oleh perdagangan rempah-rempah sehingga dapat dikatakan bahwa rempah-rempah telahturut menyumbang bagi kemunculan negara-negara kota di Eropa dan memainkan peran yang menentukan dalam transisi dari masyarakat feodal ke masyarakat modern awal. Keuntungan besar yang dijanjikan oleh perdagangan rempah-rempah telah menjadi salah satu kekuatan utama yang mendorong terjadinya interaksi perdagangan global (Pirenne 1966: 141).

Di Asia Timur cengkih, pala dan lada terutama dibutuhkan dalam jumlah yang besar oleh Cina.¹ Permintaan Cina terhadap komoditi rempah-rempah yang dihasilkan oleh Indonesia meningkat secara pesat terutama pada masa Dinasti Tang (abad ke-7-9). Dinasti itu mengalami kemakmuran dan menjadi semakin makmur karena mengembangkan kebijakan ekonomi yang dilandasi oleh sikap yang toleran terhadap perdagangan internasional. Sebagai kekuatan politik yang terkuat di Asia Timur, Dinasti Tang merupakan faktor penentu yang mendorong tumbuhnya Sriwijaya pada abad ke-8/9 menjadi kekuatan maritim yang

dominan di Indonesia bagian barat. Kekuatan maritim Sriwijaya menjadi sangat menentukan karena kerajaan itu menguasai jalur lalu lintas perdagangan di Selat Malaka. Dinasti berikutnya di Cina yang memiliki peran menentukan dalam mendorong kegiatan perdagangan rempah-rempah di Indonesia adalah Dinasti Sung (abad ke-10-13). Pengaruh politik dan ekonomi dinasti itu menjadi salah satu titik tolak utama bagi bangkitnya Majapahit menjadi kekuatan maritim yang menentukan di Indonesia menggantikan Sriwijaya. Dinasti Cina berikutnya yang mengawali kebangkitan perdagangan rempah-rempah di Indonesia pada abad ke-15 adalah Dinasti Ming (ke-14-17). Enam ekspedisi maritim yang dikirim oleh Kaisar Yongle dari Dinasti Ming ke Nan Yang (wilayah selatan atau Asia tenggara) menciptakan momentum melonjaknya permintaan terhadap produk-produk Asia Tenggara (Reid 1999: 15). Pada waktu itu, rempah-rempah merupakan komoditi yang paling banyak dicari.

Hingga abad ke-16 dapat dikatakan rempah-rempah belum menjalankan peran yang menentukan dalam perkembangan sejarah Indonesia. Rempah-rempah memang diperdagangkan oleh beberapa kerajaan dan kekuatan politik lokal, namun perdagangan itu tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam dinamika masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perubahan yang menentukan baru terjadi setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dengan tujuan utama mencari daerah produksi rempah-rempah. Dalam perkembangannya bangsa-bangsa Eropa

¹Dalam tulisan ini lebih condong digunakan istilah *Cina* untuk orang Cina ataupun negeri Cina, alih-alih *Tionghoa* atau *Tionkok*; disesuaikan dengan sumber-sumber penulisan yang digunakan.

tersebut tidak hanya melakukan kegiatan perdagangan, tetapi juga melakukan kolonisasi dan bahkan membangun kekuatan politik. Kepentingan awal mereka yang semula hanya mencari daerah penghasil rempah-rempah berkembang menjadi kepentingan ekonomi kolonial dalam arti luas yaitu melakukan eksploitasi kekayaan alam Indonesia demi kepentingan negeri induk.

Dalam aspek yang lain, perdagangan rempah-rempah tidak hanya membawa dampak terjadinya kolonialisme tetapi juga faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap sejarah Indonesia. Faktor tersebut antara lain semakin terintegrasinya Indonesia dengan dunia dan interaksi yang semakin intensif antara Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Perdagangan rempah-rempah tidak hanya membawa kisah yang suram tetapi juga menjadi kekuatan yang menyatukan Indonesia dengan berbagai masyarakat dan bangsa yang hidup di berbagai belahan dunia lainnya. Perdagangan rempah-rempah dalam sejarah Indonesia bukanlah sekadar perdagangan komoditi tetapi suatu bentuk perdagangan yang memungkinkan terjadinya pertukaran nilai dan budaya yang pada akhirnya justru turut membentuk identitas masyarakat Indonesia. Dengan demikian menjadi penting untuk ditelusuri berbagai aspek yang berkaitan dengan perdagangan rempah-rempah.

REMPAH-REMPAH SEBAGAI KOMODITI

Rempah-rempah memainkan peranan penting dalam perdagangan maritim di

Asia Tenggara, intra-Asia, dan bahkan dunia bukan karena kuantitas komoditi yang diperdagangkan tetapi karena nilai ekonomi dan arti pentingnya. Di Eropa sepanjang Abad Pertengahan rempah-rempah menjadi salah satu komoditi yang bernilai tinggi karena hanya bisa didapat melalui perdagangan jarak jauh melintasi jalur sutra dan jumlahnya yang selalu sangat terbatas. Di Cina, rempah-rempah paling tidak sejak masa Dinasti Tang menjadi komoditi yang sangat diminati karena dapat digunakan sebagai bumbu masakan, bahan pembuat obat, dan juga untuk mengharumkan mulut. Salah satu kaisar dinasti Han pada abad ke-3 sebelum Masehi mewajibkan semua orang untuk mengunyah cengkih ketika berbicara dengannya (Andaya dalam Reid 1999: 30).

Meskipun jenis rempah-rempah bermacam-macam, namun ada tiga jenis rempah utama yang dihasilkan di Indonesia dan diperdagangkan bukan hanya di Kepulauan Indonesia, tetapi juga Asia dan bahkan sampai ke Eropa. Ketiga jenis rempah itu ialah adalah lada hitam, cengkih dan pala. Lada hitam (*Piper nigrum*) merupakan salah satu jenis rempah pertama yang dibudidayakan dan diperdagangkan secara luas. Komoditi ini merupakan salah satu jenis rempah yang paling dicari karena kemampuannya untuk disimpan selama bertahun-tahun tanpa kehilangan rasa dan aroma.

Tanaman lada merupakan tanaman tropis yang memerlukan curah hujan tinggi dan kelembaban udara (Thomas dan Rajeev 2015: 1). Lada merupakan tanaman yang merambat. Proses mendapatkan lada hitam dimulai ketika buah

lada dipetik sewaktu belum sepenuhnya matang. Buah tersebut kemudian difermentasikan dan dikeringkan di bawah sinar matahari sampai kandungan airnya hilang dan berubah warna menjadi cokelat kehitaman. Tanaman lada bukanlah tanaman asli Indonesia. Tempat asal lada ialah Kerala yang terletak di Malabar, di India Barat Daya. Lada hitam mulai dikenal sebagai salah satu komoditi yang dihasilkan di Indonesia pada abad ke-12. Menurut sumber Cina, yaitu laporan perjalanan Chau Ju Kua, lada disebut sebagai komoditi yang dihasilkan di Jawa (Reid 1999: 9). Pada abad yang sama Sumatera belum dikenal sebagai daerah penghasil lada. Laporan awal tentang produksi lada di Sumatera dibuat oleh Ma Huan pada awal abad ke-15. Sangat mungkin lada yang dibudidayakan di Sumatera diperkenalkan oleh orang-orang Jawa atau oleh orang-orang India yang datang langsung ke pulau tersebut.

Cengkik adalah tanaman asli Indonesia. Hingga abad ke-17, pohon cengkik hanya dapat ditemukan di Kepulauan Maluku di Indonesia Timur. Pohon cengkik merupakan tanaman yang berasal dari lima pulau kecil yang terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, yaitu Ternate, Tidore, Moti, Makian dan Bacan. Kawasan Indonesia Timur merupakan salah satu kawasan yang paling unik di muka bumi dan memiliki karakteristik ekologi yang khas. Wilayah ini merupakan tempat pertemuan empat lempengan besar bumi, yaitu Samudra Hindia, benua Asia, benua Australia, dan Samudra Pasifik (Burnet 2011: 12). Sekitar tiga juta tahun

yang lalu pertemuan keempat lempengan besar bumi tersebut mendorong munculnya pulau-pulau vulkanis dari dalam bumi yang sekarang dikenal sebagai Kepulauan Maluku Utara. Iklim tropis dan musim hujan teratur yang dibawa oleh angin musim menciptakan kondisi yang ideal yang mendukung perkembangan keanekaragaman tumbuh-tumbuhan, burung-burung, dan hewan-hewan lainnya. Didukung oleh kondisi ekologi seperti itu cengkik tumbuh sebagai tanaman asli Maluku Utara.

Pada 1670-an, ahli ilmu alam George Rumphius menggambarkan pohon cengkik sebagai yang paling indah dan paling berharga diantara pohon-pohon yang telah dikenal. Pohon cengkik tumbuh hingga setinggi 10 meter. Daun pohon ini berwarna mengkilap dengan aroma yang khas. Bagian yang bernilai ekonomi dari pohon cengkik adalah kuncup bunga. Kuncup bunga cengkik tumbuh secara berkelompok dan semakin masak warnanya akan berubah, dari hijau menjadi kuning, lalu merah muda dan kemudian cokelat tua. Kuncup cengkik mengandung minyak atsiri dan untuk menjaga kandungan kuncup bunga dipanen sebelum mekar menjadi bunga. Kuncup yang telah dipetik kemudian dijemur untuk mengeringkannya. Kuncup yang dijemur akan mengeras dan menghitam dengan tetap menyimpan kandungan minyak atsiri di dalamnya. Kuncup yang mengering dan menghitam memiliki bentuk yang seperti paku dan dari bentuk kuncup yang mengering inilah sebutan cengkik berasal.

Dalam bahasa Latin paku disebut dengan *clavus*. Bahasa-bahasa Eropa adalah turunan dari Bahasa Latin sehingga dalam Bahasa Portugis kata untuk cengkih adalah *cravo*. Dalam Bahasa Spanyol cengkih disebut *clavo*; *clou de girofle* dalam Bahasa Perancis; *chiodo di garofano* dalam Bahasa Itali, dan dalam Bahasa Belanda adalah *kruidnagel* (rempah paku). Kata Indonesia *cengkih* berasal dari kata *zhen ga* yang merupakan kata dalam Bahasa Fukien² yang berarti 'kuku wangi'. Dalam masa pramodern cengkih banyak dicari bukan hanya karena rasa dan aromanya yang unik, tetapi juga karena kemampuannya sebagai bahan anti-bakteri dan penghilang rasa sakit. Keistimewaan inilah yang menyebabkan cengkih bernilai tinggi sebagai bahan obat-obatan dalam dunia pramodern. Diperlukan lebih dari 3000 kilogram kunciup untuk menghasilkan satu kilogram cengkih kering dan fakta ini turut menjelaskan mengapa cengkih secara ekonomi bernilai tinggi. Hingga abad ke-15 cengkih hanya dapat ditemukan di Kepulauan Maluku Utara. Pada abad ke-16, penanaman cengkih meluas ke Kepulauan Ambon bagian selatan, yaitu ke Ambon dan Seram. Pada paruh kedua abad ke-18 penanaman cengkih meluas keluar Kepulauan Maluku.

²Fukien adalah provinsi yang terletak di bagian tenggara Cina daratan. Bagian barat provinsi ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan sehingga penduduk Fukien di bagian pesisir berkarakter maritim. Paling tidak sejak abad ke-15 sebagian dari penduduk Fukien mulai bermigrasi ke Asia Tenggara, khususnya ke kepulauan Indonesia.

Pala merupakan tanaman yang menjadikan Kepulauan Banda terkenal ke seluruh dunia. Sama halnya cengkih, hingga abad ke-18 pohon pala hanya dihasilkan di Kepulauan Banda. Kepulauan ini terletak di selatan Pulau Seram dan terdiri dari gugusan pulau kecil yang terutama terdiri dari sepuluh pulau. Pulau-pulau utama di kepulauan Banda adalah Lontor atau Banda Besar, Neira, Gunung Api, Rosengain, Ai, dan Run. Disebut Kepulauan Banda karena pulau-pulau tersebut terletak secara tersebar di Laut Banda. Kepulauan Banda memiliki tingkat kesuburan yang tinggi karena terdiri dari pulau-pulau vulkanis. Diantara keenam pulau yang disebut sebelumnya ada lima pulau yang menghasilkan pala (Pires 2014: 286). Sedangkan pulau yang tidak menghasilkan pala adalah Pulau Gunung Api yang di atasnya terdapat sebuah gunung berapi yang masih aktif hingga sekarang.

Apa yang disebut 'pala' adalah biji dari pohon pala (*Mystica fragrans*). Biji pala memiliki penutup yang disebut dengan bunga pala atau fuli. Pohon pala berdaun berbentuk elips dan buahnya berbentuk lonjong. Buah pala berwarna kuning, berdaging dan beraroma khas karena seperti juga cengkih mengandung minyak atsiri. Ketika masak, kulit dan daging buah akan terbuka dan biji akan terlihat terbungkus fuli yang berwarna merah. Satu buah pala menghasilkan satu biji yang berwarna coklat. Bagian yang dipanen dari pohon pala adalah biji dan fuli atau bunga pala. Fuli bernilai ekonomi lebih tinggi karena dalam satu pohon pala dihasilkan lebih sedikit daripada bijinya (Lape 2000: 41).

Pohon pala dapat mulai dipanen ketika berusia antara 7–9 tahun. Pohon akan berproduksi secara maksimal ketika mencapai umur 25 tahun. Tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 20 meter dan dapat berusia hingga ratusan tahun. Setelah dipanen dan dipisahkan dari fuli, biji pala dijemur hingga kering. Proses pengeringan biji pala memakan waktu 6–8 minggu. Ketika dikeringkan bagian dalam biji akan menyusut sehingga akan berguncang ketika biji digoyangkan. Setelah kering cangkang biji akan pecah dan menghasilkan bagian dalam biji yang dikenal sebagai pala.

PENGGORGANISASIAN PRODUKSI

Secara geografis wilayah penghasil rempah-rempah di Indonesia dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah Indonesia bagian barat, terutama Pulau Sumatra, Jawa dan Kalimantan yang menghasilkan lada, dan daerah Indonesia bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, yang menghasilkan cengkih dan pala. Wilayah yang menjadi daerah produksi rempah-rempah merupakan tempat yang paling banyak berinteraksi dengan para pedagang yang berasal dari berbagai wilayah di Asia dan kemudian Eropa. Intensifnya interaksi yang terjadi memunculkan kebutuhan untuk mengorganisasikan perdagangan rempah-rempah secara lebih baik. Hal itu menjelaskan munculnya pelbagai kerajaan lokal di daerah produksi rempah-rempah. Kerajaan tersebut didirikan untuk mewa-

dahi kepentingan politik dan tentu saja juga untuk kepentingan ekonomi. Dalam hal yang terakhir khususnya untuk mengelola perdagangan rempah-rempah.

Lada terutama diproduksi di Indonesia bagian barat karena kawasan tersebut merupakan daerah yang paling banyak berinteraksi dengan India yang merupakan daerah asal tanaman itu. Diperkirakan lada dibawa masuk ke Indonesia oleh pedagang India sekitar satu abad sebelum Masehi. Penanaman lada untuk kepentingan perdagangan diketahui telah dilakukan di Pulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan sejak abad ke-14 Masehi. Pedir atau Pidie dan Pasai merupakan kerajaan-kerajaan pertama di Aceh yang ekonominya bergantung pada perdagangan lada. Pada abad ke-16 muncul dua kerajaan di Jawa dan Sumatra yang ekonominya banyak bertumpu pada komoditi lada, yaitu Kesultanan Aceh dan Banten (Cribb dan Kahin 2004: 337). Pada abad yang sama sumber Belanda menyatakan bahwa di Kalimantan lada telah diperdagangkan secara komersial. Hasil penanaman lada di Kalimantan Selatan dikumpulkan di Banjarmasin untuk diperdagangkan.

Pada abad ke-15, penanaman lada menyebar dari bagian paling utara Pulau Sumatra ke beberapa daerah di pesisir barat Sumatra, ke bagian paling barat dari pulau Jawa, dan ke Kedah serta Patani di Semenanjung Malaya (Bullbeck, dkk. 1998: 62). Penanaman lada sebagai komoditi perdagangan secara intensif mulai dilakukan di beberapa daerah di bagian barat Pulau Sumatra. Kegiatan penanaman kemudian berkembang menjadi perkebunan

karena terdapat stimulus dari kegiatan pelayaran di Pantai Barat Sumatera. Berkembangnya perkebunan lada juga disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pasar dunia terhadap komoditi ini.

Dalam catatan Tome Pires disebutkan bahwa hingga awal abad ke-16 daerah Tiku dan Pariaman di Sumatera Barat tidak menghasilkan lada. Namun pada akhir abad yang sama sumber Belanda melaporkan ada beberapa daerah penghasil lada di Sumatera Barat termasuk Tiku dan Pariaman. Berkembangnya kegiatan perdagangan lada di pantai barat Sumatera menyebabkan terintegrasinya daerah ini ke dalam jaringan perdagangan Islam di Asia. Proses pengintegrasian dapat dilihat dari pengaruh Islam di daerah itu. Wilayah Sumatra Barat dan wilayah lainnya yang memproduksi lada di Indonesia merupakan daerah yang mayoritas penduduknya telah beragama Islam sebelum abad ke-16.

Penanaman lada menyebabkan penduduk di berbagai daerah produksi mengalihkan kegiatan pertanian mereka dari tanaman pangan ke komoditi ini. Di Pulau Jawa, khususnya di daerah Banten, penduduk melakukan penanaman lada ketika permintaan pasar dunia terhadap lada meningkat. Meningkatnya permintaan akan lada memicu kenaikan harga dan faktor ini menjadi stimulus bagi penduduk untuk melakukan penanaman lada. Ketika permintaan meningkat penduduk Banten mengalihkan kegiatan pertanian mereka menjadi penanaman lada, dan ketika permintaan menurun mereka dengan cepat mengubah penanaman lada menjadi pertanian tanaman

pangan. Pengalihan kegiatan penanaman terjadi beberapa kali pada abad ke-17, yaitu ketika Belanda melakukan blokade terhadap Banten. Penduduk segera menghentikan penanaman lada dan mulai menanam padi lagi. Bahkan ada diantara mereka yang menanam tebu, karena tebu yang digiling dan dimasak menjadi gula laku dijual kepada para pedagang Inggris yang ada di Banten.³

Dalam perkembangannya, penanaman lada tidak hanya diusahakan oleh penduduk tetapi juga oleh pihak kerajaan. Di Sumatera penanaman lada berkembang di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Sepanjang abad ke-17 penanaman lada menyebar ke bagian barat Pulau Sumatera bersama dengan meluasnya kekuasaan Aceh di wilayah itu. Di Jawa, perkebunan lada berkembang terutama di masa kekuasaan Kesultanan Banten. Wilayah kekuasaan Banten meliputi wilayah ujung barat Pulau Jawa dan Lampung yang berada di wilayah paling selatan dari Pulau Sumatera. Sementara di Kalimantan, penanaman lada terutama berkembang di bagian selatan pulau itu di bawah kekuasaan Kesultanan Banjar. Pengorganisasian penanaman lada oleh kerajaan-kerajaan yang besar seperti Kesultanan Aceh dan Banten menyebabkan komoditi ini tidak dapat dimonopoli oleh kekuatan Barat, terutama Belanda, yang mulai mendirikan koloni di Indonesia sejak awal abad ke-17.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hingga abad ke-18 cengkih hanya dapat ditemukan di Kepulauan

³Kegiatan pertanian di Banten pada abad ke-17 dibahas dalam Talens (1999: 39-46).

Maluku. Bahkan hingga akhir abad ke-15 cengkih hanya dapat ditemukan di bagian utara Kepulauan Maluku. Penemuan cengkih di masa sebelum Masehi di berbagai tempat di Eropa dan Asia menunjukkan bahwa cengkih telah diusahakan sebagai tanaman komersial jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Dari sebuah sumber Cina diketahui bahwa kapal *jung* Cina secara teratur berkunjung ke Maluku pada 1340. Mereka yang ikut dalam *jung* Cina melaporkan bahwa "pohon ini (cengkih) terhampat di perbukitan, meskipun tidak banyak memberikan hasil pada saat yang bersamaan."⁴ Menurut tradisi lisan yang dikisahkan oleh orang Ternate dan Tidore kepada orang Portugis dikatakan bahwa dari para pedagang Cina leluhur orang Maluku Utara mengetahui cengkih memiliki nilai komersial.

Islam masuk dan mulai berakar di Maluku pada abad ke-15/16. Masuknya Islam ke Maluku seiring dengan semakin intensifnya perdagangan cengkih di kepulauan itu. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Maluku. Menurut bahasa Halmahera Utara sebutan 'Maluku' berasal dari kata *luku* yang diberi awal *ma-* yang berarti 'dalam sekali'. Sedangkan dalam bahasa Ternate, Maluku terbentuk dari kata *moloku* yang berarti 'menggenggam', 'menyatukan'. Pendapat yang lebih terkenal mengaitkan sebutan Maluku dengan kata dalam bahasa Arab *mamluk* yang artinya 'raja'. Menurut pendapat terakhir kata Maluku merupakan penamaan yang berasal dari Bahasa Arab

jaziral al-mamluk yang berarti 'daerah para raja'.⁵

Pendapat yang menyatakan Maluku sebagai daerah para raja mengacu kepada empat kerajaan utama di Maluku yaitu Loloda, Jailolo, Ternate, dan Tidore. Pada perkembangannya Kerajaan Loloda hilang dan digantikan oleh Kerajaan Bacan. Pada awal abad ke-16 diketahui bahwa keempat kerajaan di Maluku Utara telah menjadi kesultanan. Keempat kerajaan ini dalam terminologi Maluku dikenal dengan sebutan "Maluku Kie Raha" atau "Maluku Empat Gunung." Keberadaan keempat kerajaan yang diwadahi dengan ungkapan Maluku Kie Raha ditujukan untuk menghindari persaingan politik diantara kerajaan-kerajaan tersebut. Selain itu, ungkapan itu juga digunakan untuk mengatur kepentingan ekonomi diantara keempat kerajaan khususnya dalam perdagangan cengkih.

Untuk mengikat kerjasama secara lebih kuat, keempat kerajaan Maluku Utara menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan diantara keluarga raja. Para raja di Maluku Utara dikenal dengan sebutan *kaicili*. Meskipun ada hubungan kekeluargaan persaingan tetap tidak terhindarkan. Pada awal abad ke-16, Jailolo telah melemah dan kemudian bahkan hilang karena digabungkan ke dalam wilayah Ternate. Sementara itu terjadi persaingan politik antara Ternate dan Tidore dalam memperebutkan pengaruh di Kepulauan Maluku Utara. Wilayah kepulauan yang dikusai oleh Ternate terdiri dari bagian tengah dan

⁴Laporan ahli geografi Cina Wang Ta-yuan seperti yang dikutip oleh Reid (1999: 5).

⁵Tentang berbagai versi arti kata Maluku lihat Amal (2016: 5-8).

utara Pulau Halmahera, Pulau Morotai, Seram, Buru, Ambon dan Lease. Sementara wilayah yang dikuasai Tidore terdiri dari separuh bagian tengah dan selatan Pulau Halmahera, Kepulauan raja Ampat, dan pantai utara bagian kepala burung Papua.⁶

Kedatangan orang Eropa pada awal abad ke-16 menyebabkan terjadi perubahan dalam keseimbangan politik dan pengorganisasian produksi cengkih di Maluku Utara. Kesatuan Maluku dalam bentuk federasi tradisional yang dikenal dengan sebutan Maluku Kie Raha mulai goyah dan akhirnya ditinggalkan. Kesultanan di Maluku memanfaatkan kekuatan politik bangsa Eropa untuk meningkatkan hegemoni politik mereka terhadap kekuatan politik lokal yang menjadi saingannya. Ternate mengikat aliansi politik dengan Portugis, sementara Tidore membangun kerjasama dengan Spanyol. Kedatangan Belanda mengubah perimbangan kekuatan politik di Maluku Utara. Negara Belanda yang diwakili oleh VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Maskapai Dagang Hindia Timur) berhasil menegakkan monopoli rempah-rempah di Maluku Utara dengan menyingkirkan para saingan Eropa. Dalam rangka menjamin agar daerah produksi dapat diawasi dengan ketat, pada abad ke-17 Belanda memindahkan daerah produksi

tama cengkih dari Maluku Utara ke wilayah Ambon dan sekitarnya.⁷

Hingga kini belum ada sumber yang menjelaskan tentang pengorganisasian penanaman pala di Banda sebelum kedatangan orang Eropa. Apa yang dapat diketahui adalah bahwa Kepulauan Banda didatangi oleh para pedagang Islam secara teratur lebih kemudian dibandingkan dengan Kepulauan Maluku Utara. Menurut sumber Eropa dari tahun 1505, yang kemungkinan besar berdasarkan informasinya dari pihak lain, menyatakan bahwa orang Banda tidak menanam pala sebagai tanaman komersial. Mereka hanya mengumpulkan pala dari pohon-pohon liar di hutan jika memerlukannya (Reid 1999: 8). Keterangan yang diberikan oleh Tome Pires menyatakan bahwa pada awal abad ke-16 sebagian besar penduduk Banda terdiri dari mereka yang beragama Islam yang tinggal di pulau-pulau di daerah dekat pantai dan sejumlah penduduk yang masih pagan yang tinggal di daerah pedalaman (Pires 2014: 286). Islamisasi Banda, menurut Pires, berlangsung sekitar akhir abad ke 15. Islamisasi dilakukan oleh para pedagang Jawa dan Melayu yang datang secara teratur ke kepulauan itu.

Masih menurut Pires, buah pala dapat dipanen sepanjang tahun, dan orang-orang Banda biasanya mengum-

⁶Pembahasan singkat perkembangan politik di Maluku Utara pada awal abad ke-16 dapat ditemukan dalam Abdurachman (2008: 97-9).

⁷Pelaksanaan monopoli perdagangan cengkih oleh VOC di Maluku dibahas secara lengkap dalam Knaap (2004).

pulkannya setiap bulan. Pulau yang paling banyak menghasilkan pala adalah Pulau Lontor atau Banda Besar. Setiap tahun pulau itu bisa menghasilkan pala sebanyak 500–600 bahar.⁸ Pulau Lontor menghasilkan pala lebih banyak dari pulau-pulau lainnya karena luas pulau ini lebih besar dibandingkan luas pulau-pulau lain jika disatukan. Pulau-pulau di Kepulauan Banda terletak secara berdekatan dan bisa dilihat secara kasat mata. Berdasarkan keterangan Pires diketahui bahwa di Lontor terdapat empat pelabuhan, yaitu Selamon, Olutatam, Lontar dan Komber. Sementara di Pulau Neira hanya terdapat satu pelabuhan tempat para pedagang Jawa biasanya berlabuh. Pada awal abad ke-16, terdapat tiga pulau lainnya—selain Lontor dan Neira— yang juga memproduksi pala yaitu Pulau Ai, Run, dan Rozengain. Pulau Gunung Api, sebagai pulau vulkanis berupa gunung berapi aktif yang mencuat dari laut, tidak menghasilkan lada. Terdapat satu pulau kecil lainnya, yaitu Pulau Nailaka, yang hanya menghasilkan sagu.

Secara politik tidak ada satu kekuasaan terpusat yang menguasai seluruh Banda. Tidak ada raja atau penguasa politik yang sederajat dengan itu yang berkuasa di Banda. Penduduk Banda hidup di desa-desa yang dipimpin oleh para kepala desa yang disebut “Orang Kaya.” Hubungan antara kepala desa tidak bersifat hierarkis melainkan sederajat. Keadaan inilah yang menyebabkan sulit untuk menegakkan pengorgani-

sasian apapun termasuk monopoli dagang, terhadap perdagangan pala di kepulauan ini. Sumber Portugis yang dibuat oleh De Barros menyatakan bahwa dibandingkan dengan orang Ternate dan Tidore, orang Banda “. . . memilikireputasi terburuk di daerah-daerah ini . . . mereka tidak memiliki raja maupun tuan . . . mereka bertengkar diantara sesama mereka sendiri.”⁹ Sifat orang Banda yang seperti itu, ditambah ketiadaan pengorganisasi politik dan ekonomi, menjadi sebab utama mengapa Portugis tidak pernah berusaha menguasai Kepulauan Banda.

Orang Banda menjual pala kepada siapa saja dan cenderung tidak mau terikat dalam suatu kontrak dengan orang asing. Jikapun ada kepala desa yang mengikat kontrak dengan pedagang asing, kontrak itu tidak diakui oleh kepala desa yang lain. Hal itu menyebabkan sangat sulit untuk memonopoli ataupun mengendalikan perdagangan lada di Banda dalam suatu sistem tertentu. Perubahan mendasar terhadap situasi ini terjadi pada 1621. Pada waktu itu, Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon Coen, menaklukkan Kepulauan Banda dengan cara yang kejam. Sebagian besar penduduk Banda dibunuh dan yang masih hidup ditangkap dan diangkut ke Batavia.¹⁰ Segera setelah menguasai Banda, VOC mendirikan dua

⁹De Barros sebagaimana dikutip dalam Hanna (1983: 4).

¹⁰Orang Banda merupakan kelompok orang pertama dalam jumlah besar yang diatangkan oleh VOC untuk dijadikan penduduk. Mereka ditempatkan di wilayah luar tembok kota Batavia yang dikenal sebagai *ommelanden* (daerah sekitar); lihat Kanumoyoso(2011: 51).

⁸Bahar atau bahara adalah ukuran berat. Satu bahar sama dengan 3 hingga 4,5 pikul atau setara 70 kilogram. Lihat Pudjiastuti (t.t.: 32).

benteng yang kokoh yang diberi nama Benteng Belgica dan Nassau di Pulau Neira. Kedua benteng difungsikan untuk melindungi kepulauan penghasil pala tersebut dari kekuatan asing yang berpotensi mengganggu monopoli pala yang ditegakkan oleh Belanda (Jacobs 2006: 20). Untuk menjamin bahwa komoditi pala hanya diproduksi di bawah pengawasan VOC diperkenalkan sistem *perken*. Daerah produksi pala di Kepulauan Banda dibagi-bagi menjadi petak-petak kebun yang disebut *perk*, yang dikelola oleh orang Eropa, terutama Belanda yang dikenal dengan sebutan *perkeniers*. Sistem *perken* bertahan hingga 1778 ketika Gunung Api meletus dan menghancurkan *perken* dan berbagai bangunan di Banda (Hanna 1983: 97).

JARINGAN PERDAGANGAN

Paling tidak sejak abad ke-14 jalur perdagangan rempah-rempah dari Indonesia ke berbagai belahan Asia dan Eropa dikuasai oleh para pedagang Islam. Jaringan perdagangan Islam membentang dari Samudra Hindia hingga ke Laut Cina Selatan. Jaringan perdagangan ini melibatkan berbagai suku dan bangsa, antara lain orang Arab, Persia, Gujarat, Melayu, Jawa dan Cina. Dengan mengandalkan kota-kota pelabuhan yang dikuasai oleh para penguasa Islam, jaringan perdagangan itu memper-tukarkan berbagai komoditi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jarak yang sangat jauh. Sebagai contoh, tekstil dari India diperdagangkan di Asia Tenggara, sementara rempah-rempah

dari Indonesia diperdagangkan hingga Mesir dan bahkan Eropa.

Kegiatan perdagangan di Samudra Hindia dan laut Cina Selatan menjadi mungkin pada era pramodern karena faktor angin musim. Dengan memanfaatkan angin, kapal-kapal berukuran sedang dan besar dapat berlayar dari arah Asia Barat ke Asia Tenggara dan Timur dan sebaliknya secara teratur. Kata *musim* berasal dari kata bahasa Arab *mawsim* (Burnet), yang menjelaskan bahwa pedagang Arab merupakan pihak yang pertama kali memperkenalkan istilah tersebut kepada orang Asia Tenggara. Dalam perkembangannya, kata *musim* diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *monsoon*. Dari kata terakhir inilah muncul istilah “angin muson” dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya lebih tepat disebut “angin Musim.” Angin ini bertiup karena perbedaan pemanasan Bumi antara belahan bumi utara dan selatan.

Angin Musim berembus secara teratur dan terbagi menjadi dua yaitu Angin Musim Barat dan Angin Musim Timur. Secara geografis Kepulauan Indonesia berada diantara benua Asia dan Australia. Perbedaan tekanan udara pada kedua benua tersebut menjadi penyebab terjadinya Angin Musim. Periode Angin Musim Barat terjadi antara Oktober hingga Februari, sedangkan Angin Musim Timur berembus antara April hingga Agustus (Reid 1999: 85). Angin yang berembus dari Asia adalah Angin Musim Barat dan yang berhembus dari Australia disebut Angin Musim Timur. Keteraturan embusan angin musim menjadi salah satu faktor

yang menjamin kapal-kapal layar untuk melayari sekitar khatulistiwa secara teratur dari arah barat ke timur dan sebaliknya. Berhubung banyak kapal layar yang memanfaatkan angin musim adalah kapal-kapal dagang, angin musim juga dikenal sebagai *trade winds* atau "angin perdagangan."

Faktor lain yang juga mendukung meningkatnya perdagangan rempah-rempah adalah muncul kota-kota emporium di sepanjang jalur perdagangan Islam Asia. Emporium adalah kota dagang besar yang menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan perdagangan jarak jauh seperti pelabuhan, pergudangan, pasar, dan tempat perbaikan kapal. Emporium hanya dapat bertahan dan berkembang jika berlokasi di daerah yang strategis, yaitu di jalur utama pelayaran maritim, di selat yang menghubungkan dua atau lebih wilayah perdagangan, atau berada di dekat daerah penghasil komoditi. Hingga awal abad ke-16, emporium di kawasan Asia Tenggara adalah Malaka.¹¹ Kota pelabuhan itu tumbuh dan berkembang setelah mengkonversi diri menjadi bagian dari jaringan perdagangan Islam. Malaka merupakan pelabuhan tujuan dari komoditi rempah-rempah yang dihasilkan di berbagai wilayah Indonesia barat dan timur sebelum didistribusikan ke seluruh dunia. Secara geografis letak Malaka sangat strategis karena tepat berada di tengah jalur maritim utama yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan. Malaka dapat

berdiri kokoh dan menjadi makmur sebagai emporium karena bertumpu pada jalur pelayaran jarak jauh yang memperdagangkan rempah-rempah.

Selama abad ke-15, pada masa kejayaan Malaka sebagai emporium, rempah-rempah diperdagangkan dari satu emporium ke emporium lainnya. Jalur perdagangan rempah-rempah dari Malaka ke Asia Selatan dan Barat mula-mula menuju ke Bengal, Cochin, Calicut, Gujarat, Ormuz, Aden, dan Alexandria, sebelum kemudian dibawa ke kota-kota pelabuhan di Italia Selatan melalui Laut Tengah. Dari kota-kota pelabuhan di Italia, rempah-rempah kemudian didistribusikan ke seluruh Eropa. Sementara jalur ke Asia Timur adalah dari Malaka melalui Ayuthaya di Siam terus ke Kanton di Cina Tenggara. Sementara jalur perdagangan rempah-rempah intra Kepulauan Indonesia sepanjang abad ke-15 semua bermuara ke Malaka. Jalur untuk cengkih dan pala adalah dari Kepulauan Maluku dan Banda ke Makassar, Pantai Utara Jawa, dan berakhir di Malaka. Sementara jalur perdagangan lada ialah dari daerah Banten dan Lampung ke Malaka, serta pantai barat Sumatera dan Aceh ke Malaka. Jalur perdagangan rempah-rempah yang berpusat di Malaka dapat berlangsung dan berkembang karena kerajaan ini menerapkan kebijakan perdagangan yang terbuka seperti yang dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Malaka (Liaw 1976). Lebih jauh, angkatan laut Malaka secara militer juga mampu menjamin keamanan kegiatan perdagangan di seputar selat yang disebut sama seperti nama kerajaan itu.

¹¹Berbagai faktor yang mendukung kemunculan Malaka sebagai emporium di Asia Tenggara dibahas dalam Freeman(2003: 87-9).

Perubahan mendasar terhadap jalur perdagangan rempah di Kepulauan Nusantara terjadi pada 1511, ketika Portugis berhasil merebut Malaka dan menjadikan kota pelabuhan itu sebagai koloninya. Dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, berakhir pulalah jalur perdagangan rempah-rempah yang berpusat di Malaka. Jatuhnya emporium ini ke tangan kekuatan nonmuslim yang bersikap bermusuhan dengan para pedagang Islam menyebabkan pihak yang terakhir mencari kota-kota dagang lain yang bisa dijadikan emporium baru. Faktor tersebut yang menjelaskan mengapa sejak awal abad ke-16 muncul pusat-pusat perdagangan baru di Kepulauan Indonesia untuk menggantikan Malaka. Sejak saat itu, fungsi sebagai emporium di Asia Tenggara yang semula hanya dijalankan oleh Malaka, juga berjalan paling tidak di tiga kota pelabuhan utama di Indonesia yang dalam perkembangannya juga menjadi emporium, yaitu Aceh di ujung utara Pulau Sumatera, Banten di ujung barat Pulau Jawa, dan Makassar di ujung selatan Pulau Sulawesi.

Ketika Portugis merebut Malaka, Aceh merupakan kerajaan kecil yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pidie. Kejatuhan Malaka ke tangan bangsa Eropa menyebabkan Kerajaan Aceh menemukan momentum untuk menjadi salah satu emporium baru yang menjadi pusat perdagangan lada bagi para pedagang Islam. Di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Syah (1514–28) Aceh muncul sebagai kekuatan yang menjalin kerjasama dengan berbagai kerajaan Islam seperti Johor di

Semenanjung Malaya, Minangkabau di Sumatera Barat, dan Jepara di Pantai Utara Jawa (Freeman 2003: 93). Aceh mencapai masa puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607–38). Dalam masa pemerintahannya, wilayah penanaman lada di Sumatera meluas ke sebagian besar pantai barat Sumatera. Dengan bertambahnya daerah produksi lada, Aceh berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan lada di Asia Tenggara.

Emporium lain yang tumbuh dan berkembang tidak lama setelah Kerajaan Aceh berdiri adalah Banten yang dibangun pada 1523 atau 1524 oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ulama yang disebut terakhir dikirim ke Banten oleh Kesultanan Demak dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam dan membangun pusat kekuasaan politik yang akan dijadikan vasal Demak di wilayah ujung barat Pulau Jawa.¹² Letak Banten di dekat Selat Sunda menjadikan kota pelabuhan tersebut sangat strategis yang menghubungkan Samudera Hindia dan Laut Jawa. Selain Selat Malaka, Selat Sunda merupakan pintu masuk ke dunia maritim di Kepulauan Indonesia. Pelanjut dari Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Banten adalah putranya yaitu Sultan Hasanudin. Ketika Demak runtuh pada 1578, Banten berdiri sebagai kesultanan yang independen dengan wilayah kekuasaan meliputi Jayakarta, Kerawang, Lampung, sebagian wilayah Palembang dan Bengkulu. Komoditi utama yang dihasilkan oleh Banten adalah lada yang dihasilkan dari kebun-

¹²Awal mula berdirinya Banten dibahas secara singkat dalam Guillot (2008: 59–61).

kebun di wilayah Banten dan juga di kebun-kebun lada di wilayah kekuasaan Banten di berbagai tempat yang tersebar di Sumatera.

Jika perdagangan lada setelah kejatuhan Malaka menjadi faktor menentukan munculnya Aceh dan Banten sebagai emporium, maka perdagangan cengkih dan pala menjadi penggerak utama bagi kemunculan kota perdagangan Makassar. Hingga kini kapan Makassar berdiri sebagai sebuah kerajaan belum dapat ditentukan secara pasti. Meski demikian, diperkirakan Makassar berdiri pada masa pemerintahan raja Gowa yang ke-9 yaitu Tumaparissi Kalonna (1510-46).¹³ Kota maritim ini terletak tepat di tengah jaringan perdagangan yang menghubungkan Indonesia bagian barat dan bagian timur. Selain berfungsi sebagai penghubung, Makassar juga menjadi titik simpul jaringan perdagangan di Indonesia timur. Cengkih dari Maluku Utara, pala dari Banda, dan komoditi lainnya dari berbagai wilayah di Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur paling tidak sejak abad ke-16 dibawa terlebih dulu ke Makassar sebelum didistribusikan ke luar wilayah Kepulauan Indonesia. Berbeda dengan Aceh dan Banten yang menguasai daerah produksi lada, Makassar tidak pernah menguasai daerah produksi cengkih ataupun pala. Rempah-rempah yang dibawa ke Makassar

diangkut oleh pedagang Jawa, Melayu dan Makassar sendiri.

Meski Portugis berhasil menguasai Malaka dan berusaha menengakkan monopoli perdagangan cengkih dan pala di Kepulauan Maluku dan Banda, namun upaya mereka tidak pernah berhasil. Sepanjang abad ke-16 perdagangan rempah-rempah tetap berada di tangan para pedagang Islam yang berdagang dari satu emporium ke emporium lainnya di kepulauan Indonesia maupun di dalam jaringan perdagangan Islam Asia. Perubahan yang menentukan baru terjadi pada awal abad ke-17 ketika VOC mulai beroperasi di Asia. Tidak seperti Portugis yang melakukan kegiatan perdagangan di bawah bendera kerajaan, VOC adalah perusahaan yang diberi hak istimewa oleh Republik Belanda. Sebagai salah satu perusahaan multinasional pertama di dunia (didirikan pada 1602), VOC diberi hak oktroi yang berlaku selama 21 tahun dan setiap kali habis dapat diperpanjang kembali. Dalam perkembangannya, hak oktroi VOC terus-menerus diperpanjang hingga mas-kapai dagang ini dinyatakan bangkrut pada 1799. Menurut hak oktroi tidak satupihak pun selain VOC yang diizinkan mengirimkan kapal-kapal dari Belanda ke daerah sebelah timur Tanjung Harapan di Afrika Selatan hingga ke sebelah barat Selat Magellan di ujung selatan Benua Amerika. Selain itu perdagangan orang Belanda yang dilakukan di daerah tersebut hanya dapat dilakukan oleh VOC.¹⁴

¹³ Seperti telah disebutkan, tidak terdapat catatan yang pasti tentang kapan tepatnya Makassar didirikan; lihat Poelinggomang (2016: 19).

¹⁴ Pembentukan dan pengaturan VOC sebagai perusahaan dagang dibahas dalam Gaastra (2007).

Meski VOC tidak memonopoli semua kegiatan perdagangan maritim di Kepulauan Indonesia, namun maskapai dagang ini melakukan monopoli perdagangan terhadap komoditi rempah-rempah terutama cengkih dan pala. Sejak awal didirikan hingga 1619, markas besar VOC di Asia ditempatkan di atas kapal tempat gubernur jenderal berada yang seringkali di perairan di Kepulauan Maluku Utara. Keberadaan gubernur jenderal dan markas besar VOC di daerah itu menunjukkan arti penting komoditi cengkih dalam seluruh kegiatan perdagangan VOC. Untuk menjamin monopoli perdagangan cengkih sejak pertengahan abad ke-17, VOC memindahkan daerah produksi cengkih ke wilayah sekitar Ambon. Dari benteng Victoria di Ambon, VOC mengawasi kegiatan perdagangan cengkih di Pulau Haruku, Saparua, Nusalaut, Manipa, Kelang, Boano, dan Ambelu (Jacobs 2006: 15). Sementara itu, monopoli perdagangan pala di Kepulauan Banda—sebagaimana telah dibahas dalam bagian sebelumnya—dilakukan oleh VOC dengan menguasai kepulauan tersebut pada 1621.

Pada 1619, melalui serangkaian konflik terhadap Pangeran Jayakarta, Banten dan Inggris, VOC berhasil merebut kota pelabuhan Jayakarta. Kota itu kemudian dihancurkan dan di atas reruntuhannya VOC membangun Batavia yang merupakan pusat kegiatan VOC di seluruh Asia. Kota itu menjadi tempat berkumpul kapal-kapal VOC sebelum berlayar ke Negeri Belanda. Sejak Batavia berdiri, jalur perdagangan rempah-rempah, terutama untuk komo-

diti cengkih dan pala diangkut terlebih dulu ke kota pelabuhan itu sebelum didistribusikan ke kota-kota pelabuhan lain di seluruh dunia. Dengan berdirinya Batavia, secara bertahap kota-kota emporium di Kepulauan Indonesia dikuasai oleh VOC, atau tetap berdiri namun posisinya sebagai pusat perdagangan rempah-rempah tidak lagi menentukan seperti sebelumnya. Kasus yang terakhir terjadi dengan Aceh yang terus bertahan hingga akhir abad ke-19 namun arti pentingnya sebagai pusat perdagangan lada telah jauh menurun. Sedangkan Makassar berhasil dikuasai oleh VOC pada 1666 dan Banten pada 1684. Monopoli perdagangan cengkih dan pala yang dilakukan oleh VOC menyebabkan era perdagangan rempah-rempah yang dinamis berakhir. Sementara lada tidak bisa dimonopoli VOC karena daerah penanamannya tersebar luas dan komoditi ini sejak awal tidak hanya diproduksi di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari berbagai komoditi yang dihasilkan Indonesia, rempah-rempah merupakan komoditi utama yang pengaruhnya paling besar dalam menentukan perkembangan sejarah di Indonesia. Sebagai daerah asal tanaman cengkih dan pala, Kepulauan Indonesia dikenal di dunia sebagai akibat dari kegiatan perdagangan kedua komoditi tersebut. Cengkih, pala, dan kemudian juga lada, merupakan mata dagangan yang menjadi wahana interaksi diantara berbagai etnik di Indonesia. Melalui kegiatan perdagangan

rempah-rempah tidak hanya terjadi pertukaran barang dalam konteks ekonomi, tetapi juga penyebaran agama, pertukaran nilai-nilai, dan peningkatan saling memahami. Perdagangan rempah-rempah dan juga komoditi lainnya menjadi sarana awal integrasi diantara berbagai kelompok masyarakat yang manifestasi awalnya dalam bentuk penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan *lingua franca* atau bahasa penghubung dan pergaulan.

Tidak hanya sebatas di Indonesia, rempah-rempah juga menjadi salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya perubahan besar di dunia, terutama sejak era penjelajahan samudera oleh bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-15. Dalam upaya mencari daerah penghasil rempah-rempah, bangsa-bangsa di Eropa melakukan penjelajahan ke berbagai penjuru dunia yang menjadi titik tolak awal globalisasi seperti yang dikenal sekarang. Melalui perdagangan rempah-rempah, berbagai belahan dunia mulai terhubung antara satu dengan yang lain.

Sebelum era penjelajahan samudera, perkembangan sejarah dunia seolah-olah seperti terpisah dan tidak terkait antara satu dengan yang lain. Namun, sejak meningkatnya permintaan pasar dunia akan komoditi rempah-rempah dunia semakin menyatu dan sejarah yang terjadi dalam satu masyarakat mulai dilihat sebagai bagian dari perkembangan sejarah global. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rempah-rempah merupakan salah satu wahana yang mengawali terjadinya integrasi antara berbagai masyarakat di Indonesia dan rempah-rempah pula yang menjadi salah

satu faktor pendorong terbentuknya fenomena globalisasi.

DAFTAR ACUAN

- Abdurachman, P. R. (2008), *Bunga Angin Portugis di Nusantara*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Amal, M. A. (2016), *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Andaya, Leonard (1999), "The Lure of Spices," dalam A. Reid (ed.), *Early Modern History*. Singapura: Archipelago Press.
- Bullbeck, D., dkk. (1998), *Southeast Asian Export Since the 14th Century: Cloves, Pepper, Coffee, and Sugar*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
- Cribb, R. dan A. Kahin (2004), *Historical Dictionary of Indonesia*. Lanham: Scarecrow Press.
- Freeman, D. B. (2003), *The Straits of Malacca: Gateway or Gauntlet*. Québec: McGill-Queen's University Press.
- Gaastra, F. S. (2007), "Organisasi VOC," dalam G. L. Balk, F. Van Dijk, dan D. J. Kortlang (ed.), *The Archives of the Dutch East India Company VOC and the Local Institutions in Batavia Jakarta (29–43)*. Leiden: Brill.
- Guillot, C. (2008), *Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII* (terj.). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hanna, W. A. (1983), *Kepulauan Banda: Kolonialisme dan Akibatnya di Kepulauan Banda* (terj.). Jakarta: Yayasan Obor.
- Jacobs, E. M. (2006), *Merchant in Asia: The Trade of the Dutch East India Company During the Eighteenth Century*, Leiden: CNWS Publications.
- Knaap, G. (2004), *Kruidnagelen en Christenen: De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Bevoëking van Ambon, 1656–1696*. Leiden: KITLV.

- Liaw Yock Fang (1976), *Undang-Undang Malaka*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Pirenne, H. (1996), *Economic and Social History of Mediaval Europe*. New York: Harvest/Harcourt Brace & World
- Pires, T. (2014), *Suma Oriental: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues* (terj.). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Poelinggomang, E. L. (2016), *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Pudjiastuti, T. (t.t.), *Perang, Dagang, Persahabatan: Surat-Surat Sultan Banten*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Reid, A. (1999), *Dari Ekspansi Hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara, 1450-1680* (terj.). Jakarta: Yayasan Obor.
- Talens, J. (1999), *Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater: Staatsvorming, kolontale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West Java (1600-1750)*, Hilversum: Verloren.
- Thomas, L. dan P. Rajeev (2015), "Black Pepper." Kerala: Indian Institute of Spices Research.

Disertasi

- Lape, P. V. (2000), "Contact and Conflict in the Banda Island, Eastern Indonesia 11th-17th Centuries," Disertasi Doktor. New York: Brown University.
- Kanumoyoso, B. (2011), "Beyond the City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia 1684-1740," Disertasi Doktor. Leiden: Rijksuniversitet Leiden.

**Jalur Rempah
dan Keberuntungan Petani Maluku
dalam Perdagangan
Abad Ke-15 Hingga Abad Ke-17**

Helda M. Siahainenia
Guru, SMA Negeri 14 Ambon

Abstract

Spices from Moluccas, especially cloves and nutmeg is an important commodity that has managed to change the economics of this spice island communities through the past and geohistoric, and geopolitics has spawned a new culture of the elements who came from outside as well as from fellow community Nusantara own. Trails spice has also brought a number of changes to the island communities not only in economics, and culture, but the social, political, also get involved. The important stage is the path of the herb has given birth to a new port cities in Moluccas that economically has an important role in the world spice trade. The intent and purpose of this paper to determine the success of farmers spices clove, nutmeg and economic growth particularly the islands of Moluccas. Europe's dependence on exports of nutmeg and clove bring spice island communities have become prosperous although eventually deteriorates rapidly due to the monopoly of Portuguese Spanish and Dutch traders replace the role of the archipelago, Arab, Indian and Chinese, took described in this paper. Areas that were targeted this paper is mainly North Moluccas, Banda Island and Ceram are deemed to play a role in the path of the spice trade and foreign archipelago. It is a descriptive study using a historical approach. At the conclusion of this paper shows that the role path spice to the economic growth of society spice islands in Moluccas by an analysis of export figures cloves and nutmeg in the past, either before and after influx of Europeans to the Moluccas, the results show significant success on the economy spice island communities.

Keywords: *Line Spices, nutmeg and clove farmers, trade in Moluccas.*

Rempah-rempah, seperti merica dan kayu manis dari Sumatera, kayu cendana dari Timor, cengkih, buah pala, dan fuli dari Maluku, merupakan produk dagang ekspor yang sangat laris di pasar Eropa sehingga mendorong banyak pelaut dan pedagang dari berbagai belahan dunia berniaga di wilayah yang dikenal dengan istilah Nusantara itu. Kekayaan wilayah Nusantara itu dilukiskan oleh Tomé Pires, dalam *Suma Oriental*, bahwa “Tuhan menciptakan Timor untuk kayu cendana, Banda untuk pala dan fuli, Maluku dengan cengkihnya,” dan barang dagangan itu tidak dikenal di tempat lain kecuali di wilayah Nusantara. Ungkapan tersebut membuktikan bahwa rempah-rempah merupakan komoditi primadona yang dicari para pedagang dari berbagai penjuru dunia dan sudah dikenal jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara. Selain diperkenalkan oleh orang-orang Arab, Gujarat, dan Venesia, rempah-rempah juga dibawa sendiri oleh pelaut dan pedagang dari daerah Maluku yang berniaga sampai ke “dunia luar” walaupun masih serba terbatas.

Hal tersebut menandakan bahwa jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa di wilayah Nusantara pada paruh pertama abad ke-16, pelaut-pelaut negeri ini telah menguasai teknik berlayar dan tampil sebagai penjelajah samudra. Kronik China serta risalah-risalah musafir Arab dan Persia, menorehkan catatan agung tentang tradisi besar kelautan nenek moyang bangsa Indonesia. Serangkaian penelitian terkini yang dilakukan oleh Robert Dick-Read (2008) memperlihatkan berbagai fakta sejarah yang mengagumkan. Ilmuwan

asal Afrika dari London University itu, antara lain, menyoroiti bagaimana peran pelaut nomaden dari wilayah berbahasa Austronesia, yang kini disebut Indonesia, meninggalkan jejak peradaban yang cukup signifikan di sejumlah tempat di Afrika. Para penjelajah laut dari Nusantara diperkirakan sudah menjejalkan kaki mereka di Benua Afrika melalui Madagaskar sejak masa-masa awal tarikh Masehi, jauh lebih awal daripada bangsa Eropa mengenal Afrika, dan juga sebelum bangsa Arab dan Zhirazi mengenal perahu *dhownya*. Para pelaut nomaden dari Nusantara itu juga telah menemukan kota-kota eksotis di Afrika, seperti Kilwa, Lamu, dan Zanzibar. Meskipun para pelaut Nusantara tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis berupa catatan perjalanan ataupun torehan prasasti mengenai perjalanan mereka, namun sisa-sisa peninggalan mereka di Afrika jauh lebih banyak daripada yang diketahui secara umum. Dick-Read mengajukan hipotesisnya bahwa antara abad ke-5 dan ke-7 kapal-kapal Nusantara telah mendominasi pelayaran di Asia. Pada abad-abad itu juga pedagang bangsa Cina banyak bergantung pada jasa para pelaut Nusantara. Sebagian teknologi kapal dan jung dipelajari oleh para perancang Cina dari pelaut-pelaut Nusantara, bukan sebaliknya (Dick-Read 2008: 7–9).

Pendapat Dick-Read menandakan bahwa para perancang kapal dan jung dari Nusantara telah mampu membuat kapal atau jung dengan kapasitas muat 10–50 ton ke atas, bahkan lebih, sehingga memungkinkan parapelaut dan pedagang di Nusantara berani melayari

samudra luas sebelum Laksaman Cheng Ho, Laksamana Hong Bao, Laksaman Zhou Wen, Laksaman Zhou Man dari Cina, dan Columbus, Magellan, dan lain-lain, dari Eropa membuat sejarah pelayaran mereka yang fenomenal. Para penjelajah laut Nusantara bisa dikatakan sudah melintasi sepertiga bola dunia. Meskipun sejak 500 tahun sebelum Masehi orang-orang Cina sudah mengembangkan beragam jenis kapal dalam berbagai ukuran, namun kecil sekali peran kapal-kapal Cina dalam pelayaran laut lepas. Jung-jung Cina lebih banyak melayani angkutan sungai. Dalam hubungan perdagangan melalui laut antara Indonesia dan Cina juga antara Cina dan India Selatan serta Persia pada abad ke-5 hingga abad ke-7, terdapat indikasi bahwa bangsa Cina hanya mengenal pengiriman barang lebih dominan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. I-Tsing, seorang pengelana dari Cina yang banyak menyumbangkan informasi terkait masa sejarah awal Nusantara, secara eksplisit mengakui peran pelaut Indonesia saat itu. Dalam catatan perjalanan keagamaannya, pada 671–695 Masehi dari Kanton ke Perguruan Nalanda di India Selatan, I-Tsing mengatakan bahwa ia menggunakan kapal Sriwijaya, negeri yang ketika itu menguasai lalu lintas pelayaran di "Laut Selatan." Dengan kata lain, arus perdagangan barang dan jasa menjelang akhir milenium pertamadi Jalur Sutra melalui lautsangat bergantung pada peran pelaut Indonesia. Tesis Dick-Read bahkan lebih meyakinkan lagi dengan uraian hasil penelitiannya bahwa pada awal milenium pertama kapal-kapal Kun Lun

(baca: Indonesia) sudah ikut terlibat dalam perdagangan di Mediterania (Dick-Read 2008: 8–10).

Perdagangan rempah-rempah telah mendorong banyak pedagang dan pelaut dari berbagai Negara, terutama Eropa, berlomba-lomba mencari pusat rempah-rempah di Nusantara, terutama kebun cengkik dan pala di Maluku. Jalur laut yang menghubungkan pulau-pulau penghasil rempah tersebut tidak banyak diketahui oleh pelaut dan pedagang, kecuali pelaut bangsa Cina yang telah melakukan aktivitas perdagangan dengan penduduk Nusantara sebelum kedatangan pedagang Eropa. Pandangan tersebut relevan dengan kajian Menzies (2016) yang menampilkan banyak bukti dari para navigator Cina masa lampau. Dijelaskan bahwa Magellan, pemimpin ekspedisi Spanyol saat mengelilingi dunia, tidak akan pernah tahu mengenai Selat Magellan jika saja bangsa Cina tidak menggambarkan jalur pelayaran tersebut kepadanya. Sebab itu bangsa Eropa sangat berutang budi terhadap bangsa Cina karena telah membuka jalur antara Samudra Atlantik dan Pasifik hingga tiba di pulau rempah-rempah (Menzies 2016: 123).¹ Berbagai literatur

¹Pulau rempah-rempah yang dimaksud Menzies adalah Kepulauan Maluku yang menghasilkan pala, fuli dan cengkik yang sangat mahal di Eropa. Keberadaan selat dari Atlantik menuju Pasifik yang kemudian disebut Selat Magellan sudah diketahui oleh Raja Spanyol dan Magellan sebelum ia melakukan pelayaran. Selat tersebut sebenarnya telah dilalui oleh Hong Bao dalam pelayarannya mengelilingi dunia namun ia tidak memberi nama tertentu pada selat tersebut. Pada waktu pelayaran dilakukan oleh Magellan, ia membawa peta kelautan yang menggambarkan selat itu dan Samudra Pasifik. Selain itu kontrak

atau catatan sejarah hasil penelitian para pakar seperti Dick-Read dan Menzies, kian memperkaya khazanah literatur tentang peran pelaut Indonesia dan Cina dalam merancang kapal dan teknik berlayar mengarungi laut bahkan samudra luas. Kemampuan membaca tanda-tanda alam, khususnya arus laut, arah angin, kedudukan bintang dilangit, itulah yang menjadi patokan bagi para pelaut terutama navigator dan jurumudi dalam mengarahkan tujuan pelayaran mereka. Kemampuan para pelaut Nusantara dalam dunia pelayaran jauh sebelum pelaut Eropa menginjakkan kakinya di Asia.

Bukti-bukti mutakhir tentang penjelajahan pelaut Indonesia pada abad ke-5 yang dibentangkan Dick-Read makin mempertegas pandangan selama ini bahwa sejak lebih dari 1.500 tahun lampau nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut sejati. Latar belakang historis dari penghuni wilayah Nusantara inilah yang memotivasi pidato Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi Ke-9 East Asia Summit (13 November 2014) di Nay Pyi Taw, Myanmar, bahwa Indonesia merupakan Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada lima pilar utama, yaitu membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama, memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim

dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.²

Pidato Presiden Joko Widodo mengingatkan bangsa Indonesia untuk kembali merefleksikan masa lalu yang berjaya di laut karena jauh sebelum Cheng Ho dan Columbus membuat sejarah pelayaran mereka yang fenomenal, pelaut-pelaut Nusantara telah mempraktikkan cara berlayar mereka untuk mengarungi laut dari satu pulau ke pulau yang lain bahkan menjelajah samudra luas. Rupanya pembicaraan anak bangsa tentang bahari lebih sering mengacu pada kejayaan masa lampau, betapa hebatnya (nenek moyang) bangsa Indonesia zaman Sriwijaya, Majapahit, Goa, Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, Banda, dan Seram. Kata *bahari*, menurut Lopian (1987), bermakna ‘zaman dahulu kala’ atau ‘elok sekali’ yang berkaitan dengan laut. Bila dirangkai menjadi satu akan bermakna “suatu kehidupan di laut yang elok sekali pada zaman dahulu.” Lopian mengajak bangsa Indonesia untuk memaknai frase “elok sekali” dari pandangan kebangsaan yang berarti “hebat atau jaya sekali.” Pandangan Lopian sebagai sejarawan maritim Asia Tenggara tentang dunia kemaritiman di Nusantara telah memperluas cakrawala sejarah bahari. Masa lalu “yang elok sekali di laut” semestinya tetap dipertahankan pada masakini dan mendatangi demi kejayaan dan pertahanan bangsa Indonesia.

antara Magellan dengan Raja Spanyol adalah untuk berlayar menuju pulau rempah-rempah dan saling berbagi keuntungan masing-masing

²Lihat rilis Agus Priyanto, peneliti Lingkaran Perjuangan, “Mewujudkan Mimpi Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia” (<http://maritim.go.id>, 2016).

JEJAK NUSANTARA

Jalur Rempah dan Keberuntungan Petani Maluku dalam Perdagangan: Abad Ke-15 Hingga Abad Ke-17

Dick-Read menjelaskan lebih terperinci bahwa pada awal milenium pertama kapal-kapal Kun Lun (Indonesia) sudah ikut terlibat dalam perdagangan di Mediterania. Sebelum kedatangan bangsa Barat, kegiatan perdagangan di wilayah kepulauan Nusantara telah berkembang menjadi perdagangan internasional. Jalur perniagaan darat dimulai dari Cina (Tiongkok) melalui Asia Tengah, Turkestan hingga Laut Tengah. Jalur itu juga berhubungan dengan jalan-jalan kafilah dari India yang dikenal dengan sebutan "Jalur Sutra." Sejauh ini, jalur perdagangan lewat darat itulah yang paling tua, yang menguntungkan Cina dan Eropa. Jalur laut perniagaan rempah-rempah dimulai dari Cina melalui Laut Cina Selatan, Malaka, Calicut (India), terus ke negar-negara Teluk, melalui Syam (Suriah) hingga Laut Tengah; atau melalui Laut Merah ke Mesir, kemudian menuju Laut Tengah. Pada waktu itu komoditas ekspor dari wilayah Nusantara yang sampai di pasaran India dan Kekaisaran Romawi (Byzantium), antara lain rempah-rempah, kayu wangi, kapur barus, kemenyan, gaharu (*lignum aloes*), kayu manis hijau, pala, cengkih yang biasa disebut "dupa kayu" oleh orang Cina.

Para pedagang Asia dapat digolongkan ke dalam dua kelompok. Pertama, kelompok finansir, yaitu orang-orang kaya, hartawan yang memasukkan uangnya ke dalam dunia perdagangan secara insidental. Kedua, kelompok saudagar kelontong atau pedagang keliling. Mereka ini biasanya merupakan pemilik modal yang ikut langsung dalam dunia

perdagangan dengan cara ikut berlayar berkeliling menjajakan dagangannya. Oleh sebab itu bahasa puitis untuk jalur rempah ini disebut *spice route*. Perjalanan dari suatu pelabuhan pemberangkatan ke pelabuhan tujuan perdagangan umumnya memakan waktu relatif lama. Burger menggambarkan pelayaran dari Tonkin ke India memakan waktu sekitar 12 sampai 15 bulan. Dari Kanton ke Palembang ditempuh sekitar 20 hari hingga satu bulan. Adapun dari Aceh ke Cina memakan waktu sekitar 20 hingga 30 hari. Dengan demikian biaya angkut barang dagangan menjadi cukup tinggi sehingga harga jual barang dagangan tersebut menjadi tinggi pula. Ternyata dari harga yang relatif mahal itu, para pedagang memperoleh keuntungan yang cukup tinggi. Tidak dapat disangkal lagi bahwa Maluku, terutama Banda, Ternate, Tidore, Jailolo, Makian, Gebe, ataupun Bacan dan Seram merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar bangsa sehingga memacu pertumbuhan ekonomi masyarakatnya secara cepat.

Rempah-rempah dari Maluku berupa buah pala, fuli, dan cengkih merupakan produk unggulan yang telah mengubah ekonomi masyarakat daerah itu ke tingkat yang membaik. Cengkih dan pala benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku sehingga pada abad-abad ke-4 dan abad ke-5 penduduk kepulauan rempah-rempah cengkih dan pala itu bergeser maju dari sistem ekonomi barter menjadi ekonomi uang. Hasil dari tanah kepulauan itu dibawa oleh para pedagang baik dari Maluku maupun dari Pulau Jawa,

Sulawesi, Sumatera, Malaka dan India, kemudian diambil dari pelabuhan-pelabuhan besar di sebelah barat Nusantara dan diteruskan ke Timur Tengah ataupun Eropa. Keuntungan besar yang didapat petani cengkih dan pala di Maluku tidak terlepas dari jalur perdagangan rempah-rempah yang melintasi daerah tersebut, dan juga berada pada poros jalur perdagangan Asia Tenggara. Selain itu daerah Maluku didukung pula oleh beberapa bandar perdagangan besar di pulau-pulau Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Oleh karena Maluku berada pada jalur perdagangan rempah-rempah maka nama daerah itu ikut tersohor hingga seluruh Nusantara bahkan ke India, Cina, Arab, dan Eropa. Ketersohoran itu mendorong para pelaut Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis, berlayar mengarungi samudra luas mencari pulau-pulau penghasil pala dan cengkih.

Jalur rempah yang menyentuh daerah Maluku sejak abad pertama hingga abad ke-6 turut memengaruhi perekonomian masyarakat di wilayah itu sehingga menarik untuk diungkap apa keberuntungan bagi petani cengkih dan pala di daerah tersebut. Dalam kajian ini dibahas pula berbagai sistem pelayaran dan perdagangan yang berlaku di Nusantara sesuai periodisasi yang dialami oleh para pelaut dan pedagang di Maluku karena implikasinya turut berpengaruh terhadap petani cengkih dan pala saat itu. Oleh karena sejarah tidak terlepas dari berbagai aspek yang ditinggalkan oleh umat manusia, maka tulisan ini diperkaya dengan berbagai aspek kemanusiaan yang ikut terlibat

secara langsung dalam jalur rempah saat itu dengan sasaran melihat pengaruh jalur rempah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku terutama pulau-pulau penghasil rempah-rempah.

MASYARAKAT BAHARI

Secara umum, masyarakat bahari diidentifikasi sebagai orang-orang laut (Lombard, 1996). Komunitas Orang Bajo merupakan contoh kuat tentang masyarakat bahari. Hampir seluruh pulau di Nusantara pernah dirambah oleh suku Bajo yang dianggap sebagai "jembatan penghubung" masyarakat kepulauan dengan keunggulan baharinya (Zacot dan Muljono 2008). Saat ini suku terkemuka itu tinggal tersudut di salah satu kawasan di Sulawesi. Semula mereka berdiam di kawasan Selat Malaka, terutama di sekitar Johor sekarang, sebelum akhirnya menyebar ke berbagai penjuru Nusantara, dan pada sekitar abad ke-14 sebagian besar bermukim di wilayah timur Indonesia. Peran yang dimainkan para pelaut Indonesia pada masa silam tersebut terus berlanjut hingga kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara. Dunia pelayaran secara historis telah dikenal lebih awal dari masa berkembangnya dunia perdagangan rempah-rempah, yaitu dimulai ketika terjadi penyebaran bangsa-bangsa dari Asia selatan ke Nusantara, seperti terlihat pada relief perahu yang berpenumpang pada dinding Candi Borobudur peninggalan Dinasti Syailendra.



Gambar 1: Relief perahu pada Candi Borobudur di Jawa Tengah (Dok. Penulis)

Para penjelajah laut dan pengelana samudra inilah yang membentuk apa yang disebut Lapan (1987) sebagai jaringan hubungan masyarakat bahari di Tanah Air. Masyarakat berbahasa Austronesia itu merupakan perintis yang merajut kepulauan di Asia Tenggara ke dalam sistem perdagangan global (Reid 2004). Akan tetapi, pada abad ke-18 masyarakat Nusantara dengan budaya maritimnya yang kental itu mengalami kemunduran. Monopoli perdagangan dan pelayaran yang diberlakukan pemerintahan kolonial Belanda, walau tidak mematikan, sangat membatasi ruang gerak kapal-kapal pelaut Indonesia. Ironisnya, setelah 68 tahun Indonesia merdeka, setelah PBB mengakui Deklarasi Djuanda (1957) bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, tradisi besar itu masih saja dilupakan. Kebiasaan berlayar dan berdagang yang dilakukan pelaut dan pedagang Nusantara dalam menjajakan rempah-rempahnya secara bebas seperti pada masa keemasan Nusantara telah diganti dengan sistem perdagangan modern yang didominasi oleh pemodal besar. Kini, kemiskinan

dan keterbelakangan masyarakat petani cengkih di Maluku dijumpai di banyak tempat, sementara di sisi lain kekayaan laut kita terus dikuras entah oleh siapa.

PERDAGANGAN DENGAN SRIWIJAYA, SAMUDRA PASAI MAJAPAHIT

Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan pantai yang kekuatan ekonominya bertumpu pada perdagangan internasional. Kerajaan tersebut berhubungan langsung dengan jalur perdagangan internasional dari Cina ke Eropa melalui Selat Malaka. Jalur perdagangan antara Asia dan Eropa dimulai dari Cina melalui Laut Cina Selatan, Selat Malaka, India hingga Teluk Persia. Kemudian dari Persia disambung melalui jalur darat menuju Syam (Suriah) dan diteruskan ke Laut Tengah. Dari Laut Tengah, barang-barang komoditas ekspor Nusantara bersama-sama dengan barang dagangan lainnya disebarkan ke wilayah Eropa. Oleh karena letak yang strategis, Sriwijaya tumbuh dan berkembang sebagai pusat perdagangan di sekitar Selat Malaka.

Pada tahun 767, Sriwijaya menguasai wilayah Tonkin (Indocina, Hindia Belakang), selain Semenanjung Malaka dan Genting Kra. Sebagai kerajaan pantai yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang kuat, Sriwijaya mengembangkan strateginya untuk mengadakan hubungan dengan kerajaan lain di Nusantara termasuk Maluku yang kaya akan hasil rempah-rempah pala dan cengkih. Demikian pula Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Banda, Ambon, dan Seram, yang merupakan pusat rempah-

rempah pala dan cengkih di ujung timur Nusantara, pernah melakukan hubungan dagang secara intensif dengan Sriwijaya. Sayangnya bukti-bukti tertulis mengenai aktivitas perdagangan para pelaut dan pedagang saat itu sangat jarang dijumpai. Namun, dari sumber-sumber lisan dan keterangan para pelaut Portugis diketahui bahwa jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa ke Ternate, para pedagang Melayu yang datang dari Sriwijaya, telah membangun pemukiman mereka di pulau tersebut yang dikenal dengan nama Benteng Malayo.

Perdagangan rempah-rempah juga berlangsung antara Maluku dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, Goa di Sulawesi dan Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera. Dalam berita perjalanan, Marcopolo menyebut Tumasik dan Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan yang mengakui kekuasaan Majapahit. Pada waktu itu, Pasai merupakan kerajaan Islam sedangkan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai dan Majapahit banyak menghasilkan barang dagangan yang tidak diproduksi di Maluku terutama pakaian. Diperkirakan Pasai mengekspor merica sekitar 8000 hingga 10.000 bahar setiap tahun, bahkan sampai 15.000 bahar jika sedang musim panen yang melimpah (Pires 2016: 239). Selain merica, Pasai juga mengekspor sutra, kapur barus, dan emas yang diperoleh dari daerah pedalaman. Kemampuan orang Pasai dalam memproses sutra didapatkan dari orang Cina (Pires 2016: 90).

Pandangan lain mengenai produksi dan perdagangan sutra di Pasai, dijelas-

kan oleh Meilink-Roelofs (1962: 350) bahwa sebelum kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara, Sultan Pasai pernah berjanji akan menyerahkan produksi sutra Pasai kepada mereka untuk diekspor. Sementara itu, dalam *Suma Oriental* Tomé Pires menyebutkan bahwa para pedagang Jawa mendapatkan hak istimewa dalam berdagang di Bandar Samudra Pasai, yakni dalam bentuk pembebasan bea cukai impor ataupun ekspor atas barang dagangan yang mereka bawa. Pada masa itu Majapahit telah menjadi sebuah kerajaan yang lengkap, baik dalam struktur pemerintahan maupun birokrasinya. Sejak 1293 hingga sekitar 1500, Majapahit tampil sebagai pengganti Sriwijaya. Perniagaannya tidak terbatas pada perdagangan dan pelayaran pantai tetapi juga perdagangan seberang laut melalui Malaka ke Samudra Hindia (Pires 2016: 44). Ke wilayah timur Nusantara, Majapahit berupaya menguasai perdagangan rempah-rempah dari Maluku, dan pada saat itu pula banyak petani cengkih dan pala mendapat keuntungan yang besar pula.

MALUKU DALAM POROS JALUR REMPAH

Hingga abad ke-10 pelayaran niaga masih menempuh satu jalur yang tidak terputus-putus dari timur ke barat atau sebaliknya. Sampai dengan abad itu belum ada pelabuhan yang memiliki cukup banyak fasilitas sebagai tempat singgah orang berdagang dalam jalur niaga yang sangat panjang. Sejak abad ke-10 dan abad ke-11 muncul kota pelabuhan yang disebut "emporium,"

yang memiliki fasilitas relatif lengkap sehingga memudahkan para pelaut untuk memperbaiki kapal-kapalnya di samping memudahkan pedagang menggelar barang dagangannya. Berbagai emporium bermunculan sejak abad itu, misalnya Aden dan Mocha di Laut Merah, Muskat, Bandar Abas dan Hormuz di Teluk Persia; Kambai dan Kalikut di Laut Arab; Satgaon di Teluk Benggala; dan Malaka di Selat Malaka, serta Zaiton dan Nanking di Laut Cina. Jaringan pelayaran itu pada abad ke 16/17 telah menyentuh Maluku khususnya dalam perdagangan rempah-rempah.



Gambar 2: Peta jaringan pelayaran di Maluku abad ke-16/17
(Sumber: Pradjoko dan Utomo 2013)

Dalam setiap emporium terdapat pengusaha yang memiliki modal cukup besar. Selain menyediakan fasilitas kredit, mereka juga memiliki usaha dagang sendiri. Kapal-kapal mereka dapat dibeli atau disewa untuk ekspedisi dagang ke berbagai emporium yang lain. Menurut beberapa sumber, pedagang Portugis juga banyak menggunakan fasilitas seperti ini sewaktu berniaga di

kepulauan Nusantara. Namun, seperti yang diungkapkan Meilink-Roelofs, perdagangan yang dilaksanakan oleh para pemodal tersebut, khususnya di wilayah Nusantara, tergolong kelompok yang dinamakan perdagangan *com-menda*, yakni pimpinan ekspedisi dipercayakan kepada nakhoda kapal yang juga dipercaya untuk melakukan perdagangan. Hasil perdagangan itu kemudian dibagi sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Dengan demikian, perdagangan di Samudra Hindia harus dibedakan antara pedagang yang menetap di emporium-emporium dan kaum *peddler* atau penjaja yang mengarungi lautan dengan barang-barang dagangan milik para pengusaha tersebut.

Sistem emporium tidak saja menimbulkan kapitalisme Asia, tetapi juga memudahkan pelayaran niaga. Fasilitas yang lengkap di berbagai emporium telah menyebabkan para pelaut atau pedagang tidak harus mene-mpuh seluruh jalur dari timur ke barat dan sekitarnya. Para pedagang Timur Tengah cukup sampai di Kambai atau Kalikut, kemudian pedagang India akan mengangkut barang-barang dagangan itu terus ke Malaka. Sebaliknya, para pelaut dan pedagang Cina juga tidak perlu terus sampai India atau Timur Tengah, tetapi cukup hingga Malaka. Dengan kata lain, sistem emporium telah menyebabkan jalur perdagangan menjadi lebih pendek. Di Nusantara sendiri, perkembangan kota-kota emporium di pantai utara Jawa menduduki tempat penting dalam hubungan dengan perkembangan perekonomian Nusantara. Kota-kota pelabuhan tersebut telah berperan sebagai

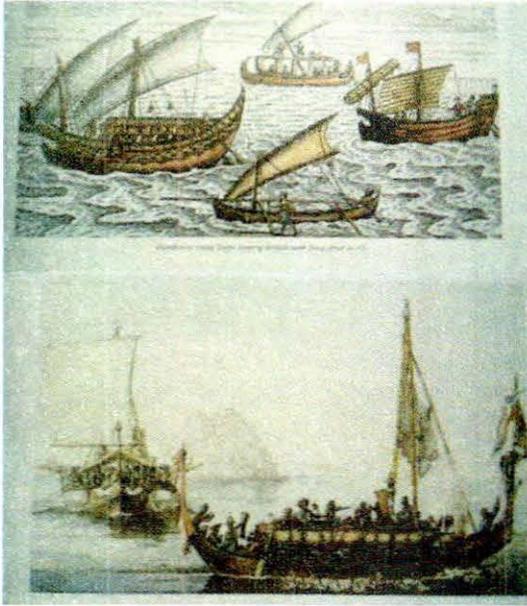
pelabuhan perantara internasional yang menghubungkan Jawa dan daerah produsen rempah-rempah di daerah kepulauan Maluku penghasil cengkih, pala dan fuli serta kayu cendana dari Timor yang keduanya ada di ujung timur Nusantara



Gambar 3: Kayu cendana, pala, fuli dan cengkih dari timur Nusantara (Sumber: Pradjoko dan Utomo)

Perkembangan sistem emporium itu berkaitan erat dengan perluasan Islam dari Timur Tengah ke Asia. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa sejak abad ke-14 di Nusantara juga bermunculan kota-kota dagang dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Selain itu dapat pula dipahami mengapa corak Islam yang muncul sejak saat itu banyak diwarnai oleh budaya Hindu, karena berbagai emporium kecil di Nusantara memiliki hubungan dagang dengan pusat

perdagangan di India. Periode ini disebut Reid sebagai masa "kurun niaga" Asia Tenggara. Masuknya para pedagang Islam dari Timur Tengah ke wilayah Asia Tenggara ikut pula menaikkan permintaan atas barang-barang komoditas dari wilayah itu, terutama cengkih dan pala. Antonio Pigafetta, yang pernah mengunjungi Tidore yang merupakan penghasil cengkih tertua, mengatakan bahwa sampai kedatangan orang Islam di Ternate dan Tidore, yang diperkirakan sekitar tahun 1470, orang Maluku tidak peduli terhadap cengkih. Namun pernyataan ini perlu dikaji ulang karena jauh sebelum orang Eropa datang ke Maluku, telah terjadi perdagangan rempah-rempah cengkih, pala, damar, gaharu, burung cendrawasih, dan mutiara, antara penduduk lokal di Maluku dengan pedagang Cina dan pedagang dari Nusantara sendiri. Banyak peninggalan berupa keramik Cina zaman Kaisar Ming ditemukan di wilayah Maluku Baik di Halmahera maupun pulau Seram yang membuktikan bahwa telah ada perdagangan barter antara orang-orang Cina dan Maluku dalam paruh abad pertama Masehi dan puncaknya pada abad ke-4. Selain bukti sejarah berupa artefak, terdapat sejumlah tuturan lisan yang diturunkan dari mulut ke mulut, dari generasi pendahulu bahwa nenek moyang orang Maluku telah mengenal perdagangan dengan bangsa Cina jauh sebelum orang-orang Eropa menginjakkan kakinya di Maluku. Hal itu dapat dibuktikan dengan berbagai teknologi perkapalan di Maluku yang lebih banyak mengadopsi model perahu atau kapal-kapal tiangkok.



Gambar 4: Jung Jawa abad ke-15 menurut gambaran orang Eropa (kiri)
Gambar 5: Kora-kora dari Gebe, Maluku Utara
(Sumber: Pradjoko dan Utomo 2013)

Dari berbagai keterangan historis diketahui bahwa pada saat perekonomian Asia telah berkembang luas, perekonomian Eropa belum mencapai taraf yang demikian. Pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia pada abad ke-14 hingga awal abad ke-15 adalah imperium Turki Usmani (Ottoman) yang menguasai wilayah-wilayah strategis yang semula dikuasai oleh orang-orang Eropa khususnya Romawi-Byzantium. Penguasaan wilayah-wilayah itu sekaligus menyekat jalur perdagangan dari timur ke barat. Akibatnya, barang-barang dagangan dari timur terutama cengkih dan pala menjadi langka dan mahal. Para pedagang Eropa akhirnya

mencari jalan alternatif ke tempat penghasil rempah-rempah (merica, cengkih pala dan lainnya)(Ricklefs1991: 27–30).Meskipun demikian, tidak berarti minat terhadap komoditas itu menurun. Bahkan sebaliknya, permintaan terhadap rempah-rempah cenderung meningkat. Permintaan tersebut tidak saja dari Eropa, tetapi juga dari Cinaoleh karena itu di wilayah Nusantara, khususnya kepulauan Maluku, terjadi perluasan tanaman produksi, terutama pala dan cengkih.

Selain perluasan pala dan cengkih, di beberapa pulau, seperti di Sumatera dikembangkan komoditas lain, yaitu merica, yang juga sangat diminati orang Eropa. Walaupun harganya hanya separuh rempah-rempah, pada waktu itu merica sudah termasuk komoditas ekspor yang penting dari wilayah Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Menurut beberapa sumber, tanaman ini pada mulanya merupakan barang dagangan dari Kerala, pantai Malabar di India barat daya, yang dikenal oleh orang-orang Arab dan Eropa sebagai “negeri merica.” Sejak kapan merica dibudidayakan oleh penduduk Sumatera belum jelas. Laporan Marcopolo (1292) atau Ibn Battutah (1355) sewaktu mengunjungi Sriwijaya tidak menyebutkan produk merica sebagai barang dagangan dari kerajaan tersebut.

Sejak awal pembentukan Malaka, Raja Parameswara selalu mengirim upeti kepada raja Siam agar kerajaan itu tidak menyerang Malaka. Kemudian sejak awal abad ke-15, Malaka menjalin hubungan baik dengan kekaisaran Cina (Kakaisaran Yuang Lo, 1403–23) deng-

an harapan Siam tidak akan berani menyerang Malaka. Keberhasilan Parameswara menjalin hubungan diplomatik seperti itu membuat Malaka berkembang menjadi sebuah emporium terbesar di Asia Tenggara. Apalagi setelah penguasaan Malaka menjadi Islam pada 1414, semakin banyak pedagang Islam dari Arab dan India terdorong melakukan kegiatan perdagangan di kota itu. Untuk menjaga supremasinya di Selat Malaka, Sultan Malaka juga berusaha agar persediaan barang-barang dagangan atau kebutuhan hidup di Malaka tetap terjamin. Berdasar pertimbangan itu, selain mengiriskan duta-dutanya guna menjalin persahabatan, Malaka juga mengiriskan ekspedisi militernya ke negeri-negeri yang dianggapnya penting untuk dikuasai karena menghasilkan barang-barang yang sangat dibutuhkan Malaka. Sebagai contoh, Kampar di pantai timur Sumatera ditaklukkannya karena daerah itu merupakan penghasil merica dan pintu keluar emas dari daerah pedalaman Minangkabau. Kemudian, Siak juga ditaklukan dan dikuasainya karena menghasilkan emas (Meilink-Roelofs 1962: 30). Dari catatan sejarah tersebut terlihat bahwa walaupun Malaka tidak melakukan intervensi untuk menaklukkan Maluku sebagai pusat produksi rempah-rempah pala dan cengkih, namun secara ekonomi hubungan antara kedua wilayah tersebut selalu dijaga sehingga perdagangan cengkih dan pala dari Maluku atau sebaliknya tetap berjalan baik.

Menurut Tomé Pires, kebijakan yang ditempuh para raja Malaka adalah menumbuhkan sistem birokrasi yang

dapat memenuhi tugasnya dalam mengatur perekonomian Malaka. Salah satu jabatan yang erat kaitannya dengan perdagangan di pelabuhan adalah Syahbandar. Di Malaka waktu itu ada empat orang syahbandar yang dipilih sendiri oleh para pedagang asing dari berbagai kelompok bangsa untuk mengurus kepentingan mereka. Pertama, syahbandar yang mengurus pedagang Gujarat; kedua, syahbandar yang mengurus pedagang Keling, Bengali, Pegu, dan penduduk Pasai; ketiga, syahbandar yang menjaga kepentingan pedagang Jawa, Maluku, Banda, Palembang, Kalimantan, dan Filipina (Sulu dan Mangindanau); dan keempat adalah syahbandar yang menjaga dan mewakili pedagang Cina dan Kepulauan Liu-Kiu (Meilink-Roelofs 1962: 41). Kedudukan Malaka seperti itulah yang mendorong Portugis berusaha menguasainya. Alfonso d'Albuquerque, panglima Portugis, merebut kota pelabuhan itu pada 1511. Dengan merebut Malaka, Portugis yang telah menguasai Ormuz di Laut Merah dan Goa di India mengharapkan akan merampas seluruh perdagangan merica Asia. Namun, rencana itu tidak semuanya berhasil.

Seperti yang telah disebutkan, Malaka pada dasarnya tidak memproduksi apa-apa. Kebesaran terletak pada peranannya sebagai emporium, kota transit bagi para pedagang dari Asia. Malaka ibarat "ayam bertelur emas," dongeng yang cukup terkenal dalam masyarakat Melayu. Seekor ayam yang setiap hari bertelur satu butir telur emas, kemudian disembelih oleh pemiliknya karena tidak sabar menunggu dan

ingin segera mendapatkan telur-telur itu. Ternyata dalam tubuh ayam itu tidak ada telur emas. Portugis menemukan suatu kenyataan bahwa Malaka bukanlah produsen dari semua komoditas ekspor (khususnya merica) yang dicari-cari oleh para pedagang Barat. Politik monopolinya serta upaya kristenisasinya telah mengakibatkan para pedagang Asia, khususnya pedagang Muslim, berusaha menghindari bandar tersebut. Lambat-laun kedudukan Malaka pun semakin merosot dan tidak pernah meraih kembali kebesarannya (Meilink-Roelofs 1962: 172).

Portugis menyadari bahwa arti penting Malaka adalah pada perdagangan merica dan rempah-rempah. Oleh karena itu, untuk mempertahankan perdagangan itu, kapal-kapal Portugis berlayar ke Maluku untuk mengambilnya. Pada waktu itu di Maluku ada dua kesultanan Islam yang besar, yaitu Ternate dan Tidore, dalam kondisi sedang menurun kekuasaan politiknya dan bermusuhan satu sama lain. Portugis mencoba menanamkan pengaruhnya melalui persekutuan dengan salah satu pihak yang bertikai. Demikian pula di Jawa, Portugis berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan Pajajaran, kerajaan Hindu yang kedudukan politiknya juga sedang menurun, yang kemudian tenggelam di tangan Islam. Kondisi semacam itulah yang antara lain memaksa Portugis meninggalkan politik anti-Islam seperti Perang Salib sebab mereka harus menerima kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan disekitarnya adalah Islam, dan perdagangan Islam di Asia Tenggara sampai Timur Tengah

penting sekali. Banyak yang menilai perdagangan Portugis bersifat semi-feodal dan terlalu terikat oleh raja Portugis beserta politiknya. Perdagangan resmi Portugis dapat dianalogikan sebagai seorang raja Eropa yang berdagang, oleh karena itu banyak yang menilai organisasi perdagangannya kurang efisien. Para pejabatnya di Asia bukanlah saudagar melainkan *hidalgo's* yang lebih menyukai perampokan daripada perdagangan resmi mengingat pada waktu itu perampokan, bagi seorang prajurit, merupakan hak penakluk dari pihak yang menang perang sehingga perampokan dianggap terhormat (Meilink-Roelofs 1962: 126-7).

Dibandingkan dengan Belanda dan Inggris yang baru datang ke wilayah itu menjelang akhir abad ke-16, organisasi perdagangan Portugis memang kelihatan kuno dan kurang efisien. Organisasi dagang yang dibentuk para pedagang dan penguasa Belanda, yaitu Verenigde OostIndische Compagnie (VOC), mempunyai tujuan utama yang jelas, yaitu berdagang, meskipun dalam statutenya, khususnya Artikel 35, disebutkan bahwa VOC dapat memperoleh teritori di Timur, mengadakan perdamaian, perjanjian, menyatakan perang, serta berhak memiliki kapal perang, memelihara tentara, dan memiliki benteng-benteng pertahanan. Namun VOC juga sangat mementingkan pemegang buku dan para saudagar. Jabatan "Eerste Koopman" dalam hierarki VOC merupakan jabatan yang sangat penting. Dari jabatan ini seseorang bisa menjadi gubernur jenderal, yang pada awal berdirinya me-

mang tidak banyak mengurus permasalahan politik ataupun administrasi. Sebagai catatan, dalam menanamkan pengaruhnya di Nusantara, baik Portugis maupun Belanda banyak menggunakan pola konflik yang terjadi di Nusantara. Di samping itu, mereka juga membawa konflik mereka di Eropa ke wilayah itu, yang kemudian juga dipergunakan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sejak berdiri, VOC sudah mempersiapkan diri untuk peperangan di kepulauan Indonesia, terutama melawan musuh-musuhnya di Eropa. Pertama melawan Portugis dan Spanyol, kemudian EIC (Inggris). Permusuhan antar-kekuatan Barat itu tidak saja karena pada dasarnya mereka telah bermusuhan di Eropa, melainkan juga karena persaingan dagang di kepulauan Indonesia dan Semenanjung Melayu. Tiap-tiap pihak ingin memperoleh monopoli atas perdagangan tersebut. VOC akhirnya memenangi persaingan dan berhasil menanamkan pengaruhnya di kepulauan Indonesia.

Seperti telah disebutkan, penguasaan atas kota Malaka oleh Portugis telah mengacaukan struktur perdagangan di Asia Tenggara, khususnya kepulauan Indonesia dan Semenanjung Melayu. Namun tidak berarti perdagangan di wilayah itu menjadi hancur sama sekali. Perdagangan masih tetap berkembang, namun banyak pedagang Asia yang menghindari kota Malaka, terutama para pedagang Muslim, yang secara tidak langsung membuat peranan Malaka sebagai pelabuhan transit semakin merosot. Sebaliknya, di beberapa daerah, terutama di jalur perdagangan baru,

tumbuh dan berkembang kota-kota dagang baru, yang beberapa diantaranya berkembang menjadi pusat kekuatan politik baru di wilayah itu. Aceh, misalnya, pada 1511 masih merupakan pelabuhan kecil yang berada di bawah kekuasaan Pidie. Penghidupan utama penduduknya adalah menangkap ikan, sebagai nelayan, dengan pekerjaan sampingan merampok laut, termasuk merampok kapal-kapal Portugis. Dengan kekuatan sekitar 30 kapal (Iankhara), Aceh berhasil menyergap kapal-kapal Portugis dan memperoleh meriam dari hasil rampokan tersebut. Dalam tahun 1530 diberitakan bahwa jumlah meriam yang dimiliki Aceh lebih banyak daripada yang dimiliki Portugis di benteng Malaka.

Dengan meningkatnya kekuatan dan persenjataan Aceh, Pidie, yang semula merupakan tuannya, berbalik ditaklukkan Aceh. Setelah itu, Aceh memperluas hegemoninya ke arah selatan, ke Deli dan Sumatera Barat. Daerah-daerah yang ditaklukkannya itu merupakan penghasil merica, emas, dan produksi lainnya. Untuk sementara ekspansi Aceh dapat ditahan oleh Indrapura dan Johor. Kesultanan Johor adalah pusat kekuatan politik baru dinasti Melayu setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kesultanan itu berhasil mempertahankan eksistensinya dan mampu mempertahankan perdagangan internasionalnya. Dalam pekcmbangannya kemudian, Johor bersekutu dengan VOC. Hingga pertengahan abad ke-17, perdagangan di Selat Malaka dimainkan oleh tiga kekuatan yaitu Portugis, Aceh, dan Johor. Namun Kota Johor berkali-kali

JEJAK NUSANTARA

Jalur Rempah dan Keberuntungan Petani Maluku dalam Perdagangan Abad Ke-15 Hingga Abad Ke-17

diserang dan direbut oleh Aceh, sementara benteng VOC di kota tersebut dibakar. Tekanan Aceh itu juga dilakukan berkali-kali terhadap Malaka-Portugis. Namun, baik Johor maupun Portugis tidak pernah menyerang balik ke Aceh. Tekanan militer Aceh baru terhenti setelah armada laut Aceh menderita kekalahan besar di muka Pelabuhan Malaka.

Di Pulau Sumatera, Aceh terus-menerus menentang kekuasaan Portugis dan Belanda. Oleh karena itu, kesultanan itu dilihat oleh Portugis sebagai kekuatan Islam yang menentang kehadirannya. Satu fakta yang menunjang anggapan itu adalah Aceh memang sering mengibarkan bendera Islam dalam peperangannya melawan Portugis dan VOC. Meskipun demikian tidak selamanya Aceh bertentangan dengan Portugis. Kadang-kadang Aceh juga mengadakan persekutuan dengan Portugis dalam menghadapi Kesultanan Johor atau persekutuan Johor-VOC. Pada dasarnya konflik ataupun persekutuan tersebut merupakan soal yang lazim karena kepentingan tertentu, tidak semata-mata alasan politis melainkan juga ekonomi. Dikaji lebih mendalam terlihat bahwa kebesaran Kesultanan Aceh pada dasarnya disebabkan oleh kemampuannya menjalin hubungan diplomatik dengan Asia Barat, terutama Turki yang disebut oleh masyarakat Aceh sebagai Raja Rum.

Jatuhnya Aden ke tangan Turki Usmani pada 1538, mendorong perdagangan merica ke Timur Tengah melalui Laut Merah—yang sempat terhenti akibat kekuatan maritim Por-

tugis di Lautan Hindia—kembali berkembang. Dari beberapa wilayah di Indonesia pada waktu itu, kemungkinan besar hanya Aceh yang memiliki hubungan internasional, seperti dengan Ratu Elizabeth dari Inggris, bahkan juga Pangeran Maurice dari Negeri Belanda. Di Asia, duta Aceh antara lain berkunjung ke Moghul, India. Dari misi-misi diplomatik itu, hubungan dengan Turki yang paling membawa hasil tetap dan besar karena Turki di Eropa sedang berperang melawan Portugis dan Spanyol. Dengan sendirinya Turki melihat kehadiran Aceh sebagai suatu kesempatan untuk memerangi Portugis-Spanyol di wilayah Timur atau dari belakang. Sebagai bukti dari sejumlah perhatian itu, pada 1567 Turki mengirimkan 500 orang pelatih artileri (meriam) ke Aceh beserta sejumlah meriamnya, antara lain meriam yang diberi nama *Lada Sacupak* yang berukuran sangat besar dan dianggap sebagai pusaka penting waktu itu.

Selain itu, orang Turki mengajarkan cara membuat meriam kepada orang Aceh. Diduga bantuan militer itu dibayar dengan hasil perdagangan merica yang merupakan ekspor utama Aceh yang menguntungkan. Sebaliknya, Portugis melihat berkembangnya kembali perdagangan merica di Laut Merah sebagai ancaman terbesar bagi monopoli dagangnya. Oleh karena itu, kapal-kapal perang Portugis berkali-kali merampok atau menenggelamkan kapal-kapal dagang Aceh. Persekutuan antara Aceh dan Turki merupakan sinergi dua kekuatan Islam. Namun, dalam dunia politik ataupun perdagangan sehari-hari, hubungan dip-

lomatik tidak selalu berdasarkan ideologi yang sama seperti kepentingan Islam, tetapi lebih menonjol karena upaya perebutan hegemoni, seperti perebutan hegemoni di Selat Malaka. Aceh dan Johor tidak segan-segan meminta bantuan kekuatan non-Islam, dalam hal ini Belanda atau Portugis, untuk menyerang kerajaan Islam lainnya. Sebelum Johor bersekutu dengan VOC pada 1600 Aceh pernah meminta ekspedisi Belanda pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman untuk menyerang Johor atas namanya dengan imbalan merica. Juga Iskandar Muda pernah meminta EIC untuk menyerang Pidie.

Kota-kota atau kerajaan di pesisir utara Jawa, seperti Jepara, Kudus, Pati, Tuban, Gresik, Surabaya, dan Jaratan, menjadi ramai dikunjungi pedagang mancanegara, khususnya setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Para penguasa di Jawa melihat Portugis sebagai saingan dan ganjalan dalam perdagangan mereka. Jepara, misalnya, melihat Portugis sebagai saingan utama dalam perdagangan merica, yang keduanya mengambil barang dagangan itu dari Maluku. Kemudian Demak sebagai pengeksport beras ke Malaka menjadi rugi setelah kota tersebut jatuh ke tangan Portugis. Kegagalan kerajaan Islam di Nusantara untuk merebut Malaka pada dasarnya terjadi karena kekuatan Islam di kepulauan Nusantara tidak mau bersatu melawan Portugis atau Belanda (VOC). Bahkan diantara mereka juga saling mencurigai. Malaka sendiri akhirnya jatuh oleh serangan gabungan antara Johor dan VOC. Eksistensi kerajaan maritim Jawa dengan kekecualian

Banten tidak bertahan lama. Kebesaran mereka sebagai kekuatan maritim dan perdagangan terus merosot bukan dikalahkan oleh kekuatan Portugis atau VOC, melainkan oleh kekuatan baru yang muncul di pedalaman Jawa, yaitu Mataram. Kerajaan itu, yang berdiri sejak 1575, terus-menerus melakukan tekanan terhadap kerajaan-kerajaan maritim, khususnya di pantai utara Jawa, bahkan sampai ke Batavia. Bayangan kejatuhan Majapahit yang menghantui para penguasa di Mataram membuat mereka berupaya mematikan sumber-sumber pendukung politik dan ekonomi kerajaan-kerajaan tersebut, yang secara tidak langsung mematikan perdagangan laut mereka.

Kehadiran pendatang baru, termasuk VOC dan EIC, sering membawa harapan baru bagi raja-raja di Nusantara termasuk daerah Maluku. Demikian pula sewaktu Belanda dan Inggris datang pada akhir abad ke-16, mereka disambut dengan baik. Banten, misalnya, mengizinkan VOC dan EIC membuka kantor dagangnya di pelabuhan. Demikian pula Pangeran Jayakarta mengundang masuk VOC untuk membuka kantor dagangnya di kota. Kemudian di Ambon didirikan kantor pusat dagang VOC untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah cengkih, pala, fuli, damar, yang akhirnya memunculkan politik monopoli yang dilancarkan VOC sehingga membuat para penguasa negeri ataupun para pedagang cengkih dan pala merasa dirugikan. Cara VOC menundukkan penguasa negeri-negeri di Maluku adalah dengan membuat aneka perjanjian yang isinya menguntungkan

VOC. Modus itu bisa berjalan dengan baik sehingga pihak kompeni Belanda secara terbuka menyatakan kepada para empat *perdana*³ Tanah Hitu untuk bekerjasama memerangi Portugis yang sudah sejak lama menjadi musuh mereka.

Selain itu, untuk menjalin kerjasama dengan penguasa di wilayah Maluku Utara, dalam hal ini pihak Kesultanan, Warwijk bersama anak buahnya berangkat pada bulan Mei dengan dua kapal ke Ternate. Sedangkan kapal *Hemskerck* bersama dua kapal lainnya, *Gelderland* dan *Zeeland*, pada bulan Maret dikirim ke Banda untuk mencoba mendapatkan muatan pala di sana. Beberapa waktu kemudian Laksamana Steven van der Hagen tiba dan berlabuh di Hitu Lama pada 1599. Van der Hagen bersama dua kapal lainnya yaitu *Zon, de Maan* dan *de Morgenster* berangkat dari Texel. Pada 13 Maret 1600, ekspedisi itu tiba di depan Pelabuhan Banten, dan dari sana berangkat ke Maluku. Menariknya adalah ketika ekspedisi dibawah pimpinan Van der Hagen tiba di Hitu disambut dengan sangat bersahabat oleh para pimpinan di Jazirah Laihitu. Para perdana Hitu minta bantuan kepada Van der Hagen untuk memerangi orang-orang Portugis, dan permintaan itu dikabulkan oleh Vander Hagen (*Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, I, 1856: 105).

³Empat perdana adalah pimpinan tradisional yang berkuasa penuh di negeri-negeri yang terdapat di Jazirah Laihitu, Pulau Ambon bagian utara yaitu Perdana Totohatu, Perdana Nusa Tapi, Perdana Jamilu, dan Perdana . . . [tidak tertulis lengkap; Ed.]

Untuk menguasai Pulau Jawa secara keseluruhan VOC menggunakan kesempatan ketika EIC meninggalkan Banten. Saat itu pulakekuatan utama VOC yang didatangkan dari Maluku datang menyerang Jayakarta sehingga kota itu jatuh dan diubah namanya menjadi Batavia. Setelah berhasil menguasai Batavia, J.P. Coen memindahkan kantor pusat dagang VOC dari Ambon ke Batavia. Namun, untuk menguasai seluruh perdagangan di Nusantara, VOC harus menunggu waktu yang relatif lama. Di sebelah barat, kekuatan maritim di Jawa tampil sebagai saingan berat yang terus-menerus menentang VOC seperti halnya Aceh dan Malaka melawan Portugis. Sementara itu, tantangan dari kekuatan maritim di sebelah timur Pulau Jawa relatif tidak ada karena kerajaan-kerajaan tersebut sedang menghadapi kekuatan Mataram. Bahkan, untuk menjaga kepentingan dagangnya, VOC mengakui kekuatan Mataram di bawah Sultan Agung dan mengirimkan upeti ke kerajaan tersebut. VOC baru dapat menguasai seluruh perdagangan dan politik di Jawa setelah kekuatan kedua kerajaan tersebut melemah, terutama karena intrik yang terjadi di dalam kedua kerajaan tersebut. VOC mengikat penguasa baru dengan perjanjian yang sangat menguntungkan politik monopoli dagangnya. Hal yang sama juga dilakukan VOC dengan raja-raja lain diluar Jawa. Hingga keruntuhan VOC pada 1799, kekuatan maritim di Nusantara yang relatif masih kuat bersaing melawan VOC hanyalah Aceh.

SUMBER DANA DAN ALAT PEMBAYARAN

Para penguasa Mataram telah mempelajari sebab-musabab keruntuhan Majapahit pada awal abad ke-15, yaitu membiarkan Demak, salah satu daerah bawahannya, berkembang menjadi kota dagang yang ramai dan kuat, yang pada gilirannya berbalik menghancurkan pusat kekuasaan Majapahit yang berada di pedalaman Jawa. Peristiwa semacam itu tidak boleh terulang pada Mataram. Sindrom Mataram semacam itulah yang menjadi salah satu faktor yang mendekatkan Mataram ke VOC. Berniat memonopoli perdagangan di kepulauan Nusantara, VOC melihat peluang untuk menyingkirkan salah satu saingannya, yaitu pedagang Jawa. Oleh karena itu, ketika diadakan perjanjian pertama antara Amangkurat I (Mataram) dan VOC, terdapat satu klausul bahwa VOC akan menghalangi sebanyak mungkin perdagangan dari pesisir utara Jawa, khususnya dari Gresik (Giri) dan Surabaya (Sunan Ngampel) (De Graaf dan Th. Pigeaud 1961: 76-7). Sumber VOC mengutip pernyataan Amangkurat bahwa "Raja tidak menghendaki kawulakawulanya pergi berlayar dan berdagang ke tempat-tempat lain, malahan menginginkan bahwa semua pedagang akan datang ke pelabuhannya dan mengunjungi negaranya." Selain itu, disebutkan pula bahwa semua uang yang diperoleh di Jepara langsung dibawa ke Keraton Mataram. Raja juga memerintahkan rakyat menenun tekstil. Rupanya perintah itu cukup efektif yang terbukti dengan menurunnya penjualan tekstil VOC ke Mataram.

Kekayaan kerajaan (atau raja), terutama harta bendanya, menjadi faktor

yang sangat penting dan diperhitungkan waktu itu. Kekayaan itu antara lain menjadi penjamin langsung mata uang yang diterbitkan oleh kerajaan yang bersangkutan. Misalnya pada masa Iskandar Muda, mata uang mas Aceh yang diterbitkan masa itu menjadi terkenal dan diterima oleh para pedagang secara penuh di banyak tempat perdagangan Asia sebagai alat pembayaran. Sewaktu kejayaan perdagangan Aceh mengalami kemunduran, nilai mata uang itu pun semakin merosot, dan ruang lingkup penerimanya pun semakin terbatas. Dengan politik kerajaan seperti itu, keuntungan dari hasil komoditas ekspor yang utama umumnya dimonopoli oleh pihak raja. Sementara itu, keuntungan yang berhasil dihimpun para pedagang atau pengusaha swasta juga sangat sulit untuk ditanam dalam sektor lain, seperti pertanian, industri, dan perbankan, karena dana tersebut sewaktu-waktu dapat diambil oleh raja atau penguasa. Oleh karena itu, umumnya modal yang dihimpun para pedagang atau pengusaha itu hanya berputar di kalangan keluarga saja layaknya sistem *Commenda*. Dalam sistem *Commenda* dikatakan bahwa tidak ada perbedaan tugas antara pemilik modal, pekerja, dan perdagangan itu sendiri. Selain itu, modal baru adakalanya diperoleh dengan cara berutang atau menggadaikan harta milik. Surat jaminan berutang itu ternyata juga dapat diperjualbelikan atau dijadikan jaminan jika sewaktu-waktu perlu dana.

Dalam sistem *Commenda* tidak ada perbedaan yang tegas antara pemegang saham, pekerja, dan pedagang. Hal itu

berbeda dengan organisasi perdagangan Portugis atau Belanda (VOC). Pada VOC ada pembedaan yang tegas antara pelaut, pegawai, dan pemilik saham atau pemilik modal yang terikat dengan perseroan besar atau bank-bank pemberi atau pemberi pinjaman bagi usaha dagang mereka. Hak individual sudah kelihatan dalam pembagian keuntungan. Selain itu, perlindungan dari raja juga tampak jelas. Sebagai contoh, hampir semua ekspedisi perdagangan pertama dari para pedagang Barat datang ke Timur atas nama raja atau mendapat restu raja masing-masing. VOC jelas mendapat hak oktroi dari raja Belanda. Dengan demikian, selain harta kekayaannya relatif lebih terjamin daripada pedagang Indonesia, VOC juga mempunyai kesempatan lebih luas dalam menginvestasikan keuntungan yang diperoleh, baik dalam bidang yang sama maupun dalam bidang lain, termasuk perbankan. Kondisi semacam itu pula yang menjadi salah satu faktor berkembangnya dunia perbankan di Eropa.

Satu hal yang cukup menarik dari dunia perdagangan waktu itu adalah tidak adanya sistem pembayaran yang baku, yang dijadikan standar. Selain itu, tidak ada pula lembaga yang menjamin mata uang. Jaminan atas mata uang datang dari bahan baku uang itu sendiri. Selain itu, jaminan datang dari kebesaran kerajaan yang menerbitkan mata uang, contohnya mata uang masa Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh. Kadangkala mata uang itu juga dijadikan komoditas perdagangan, baik karena nilai logamnya maupun karena bentuk atau seninya.

Tidak sedikit mata uang yang dijadikan perhiasan bernilai lebih tinggi daripada nilai nominal mata uang tersebut. Misalnya, mata uang kepeng Cina yang beredar di Nusantara sejak masa Majapahit masih terus dicari oleh berbagai kelompok dan pedagang di Nusantara, terutama karena mata uang tersebut juga dijadikan salah satu pelengkap dalam upacara adat atau keagamaan. Di Bali, hingga kini, masih banyak yang menggunakan mata uang kepeng Cina dalam upacara keagamaannya. Mungkin karena itu, penguasa Majapahit kemudian menerbitkan mata uang kepeng Cina sendiri.

Di kota-kota di sekitar Selat Malaka dan sepanjang pantai utara Jawa, selain mata uang Cina dan lokal (dalam arti mata uang kerajaan Nusantara), berbagai jenis mata uang asing juga banyak digunakan dalam transaksi perdagangan. Meski demikian, belum terungkap secara pasti sejak kapan masyarakat di kepulauan Nusantara mulai menggunakan mata uang sebagai alat pembayaran. Dari beberapa temuan arkeologis di Pulau Jawa ditemukan sejumlah mata uang perak yang berangka tahun 674 M. Selain mata uang, juga ditemukan benda-benda tertentu yang diduga digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran, misalnya manik-manik dan gelang. Jika dilihat dari jenis dan bentuknya, alat pembayaran itu ada yang sederhana, seperti manik-manik (dari Bengkulu dan Pekalongan), gelang (dari Majalengka dan Sulawesi Selatan), belincung (dari Bekasi), moko (dari NTT), dan kerang (dari Irian). Yang

lebih maju digunakan bentuk mata uang logam, misalnya Kerajaan Kediri (terbuat dari emas), Kerajaan Aceh (emas), Bangka (timah), Sulawesi (emas), dan Maluku (tembaga). Adapun mata uang asing yang juga banyak beredar ialah mata uang Cina, Jepang, India, dan Persia. Tomé Pires, dalam bukunya *Suma Oriental*, melaporkan bahwa di Pasai terdapat mata uang yang terbuat dari timah dan tertera nama raja. Selanjutnya, ia menyebutkan bahwa di negeri itu terdapat mata uang emas yang berukuran kecil yang disebut *dramas* (di Pasai dan Aceh disebut *dirham* atau *mas*). Sembilan *dramas* sama dengan satu *cruzado*, dan satu *cruzado* sama dengan 500 *cash*. Disebutkan pula bahwa negeri itu mempunyai debu emas (*gold dust*) dan perak. Sebagai catatan, *cruzado* adalah mata uang emas yang dikeluarkan oleh Portugis di Goa.

Selanjutnya, Pires menyebutkan bahwa harga cengkih di Malaka sangat bervariasi. Jika sedang musim panen dan persediaan cengkih cukup melimpah, berharga antara 9–10 *cruzados* per bahar (1 bahar = 4 kuintal); sedangkan pada saat cengkih langka di pasaran, harganya naik mencapai 12 *cruzados* per bahar. Di Pasai, satu bahar cengkih berharga 90 dirham. John Davis, seorang pelaut Inggris yang bekerja pada kapal Belanda, pada Juni 1599 melaporkan bahwa di Aceh terdapat berbagai macam alat pembayaran, seperti *casehes* (bahasa Aceh *keueh*; Portugis *caxa*), *mas*, *cowpan* (kupang), *perdaw*, dan *tayel* (tihil). Ia membuat semacam daftar kurs mata uang di Aceh pada waktu itu sebagai berikut.

1600 *cash*es = 1 *mas*

400 *cash*es = 1 *kupang*

4 *kupang* = 1 *mas*

5 *mas* = 4 *shilling sterling*

4 *mas* = 1 *perdaw* (di Aceh disebut *pardu*)

4 *perdaw* = 1 *tahil*

Dari sumber lain disebutkan bahwa satu *tail* (tihil) setara dengan 16 *mas* (dirham). Satu ringgit Spanyol (terkenal dengan sebutan Real Spanyol) setara dengan 16 *mas* (dirham). Sementara itu, Van Langen seorang pejabat tinggi Belanda pada 1888 menyebutkan bahwa nilai dirham Sri Sultanah Ta jai-Alam Safiat ad-Din Syah (1641–75) di Kesultanan Aceh adalah £ 0.625 (enam puluh dua setengah sen) Hindia Belanda.

PENUTUP

Jalur rempah dan dunia kemaritiman merupakan aspek yang sangat vital dalam dunia perdagangan rempah-rempah cengkih dan pala di Maluku sejak masa-masa kerajaan Nusantara prakolonial. Pada masa kejayaan raja-raja di Nusantara, peranan kepulauan rempah-rempah sepanjang jalur perdagangan sangat penting karena posisi politiknya dan harta kekayaan yang bersumber dari hasil buminya yang melimpah. Posisi strategisnya juga menguntungkan Maluku dalam pelayaran lokal antara pulau yang menghubungkan satu kerajaan dengan kerajaan lain di Nusantara sehingga menambah posisi tawar rempah-rempah semakin tinggi. Hubungan dagang dengan kerajaan di sebelah barat Nusantara membuat petani cengkih dan pala di Maluku sangat diuntungkan dan semakin maju.

JEJAK NUSANTARA

Pengaruh Jalur Rempah terhadap Pertumbuhan Budaya Maritim Masyarakat Maluku

Kejayaan petani cengkih dan pala pada masa lalu didukung pula oleh banyak armada dagang dari berbagai pulau penghasil cengkih dan pala di Maluku sehingga dapat mengangkut barang dagangannya dengan mudah ke berbagai pelabuhan dagang lain di Nusantara. Namun, sejak kedatangan bangsa Barat ke Nusantara pada abad ke-5 dan abad ke-6, ketika mereka mulai melakukan monopoli perdagangan cengkih dan pala secara besar-besaran, kehidupan petani setempat merosot. Politik monopoli membuat masyarakat wilayah itu semakin terpuruk.

DAFTAR ACUAN

- Dick-Read, R. (2008), *Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika* (terj. E. Aswaldi). Bandung: Mizan Pustaka.
- de Graaf, H. J. dan Th. G. Th. Pigeaud (1961), *De eerste Moeslimse vorstendommen op Java*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Lombard, D. (1996), *Nusa Jawa Silang Budaya*, Bagian 2: Jaringan Asia (terj.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Meilink-Roelofs, M. A. P. (1962), *Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara: Sejarah PERNIAGAAN 1500-1630* (terj.). Depok: Komunitas Bambu.
- Menzies, G. (2016), *Saat Cina Menemukan Dunia* (terj.). Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Pires, T. (2016), *Suma Oriental: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues* (terj.). Yogyakarta: Ombak.
- Pradjoko, D. dan B. B. Utomo (2013). *Atlas Pelabuhan-pelabuhan Bersejarah di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.
- Reid, A. (2004). *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara* (terj. S. Siregar, H. Amini, D. Setiawan). Jakarta: LP3ES.
- Ricklefs, M. C. (1991), *Sejarah Indonesia Modern* (terj. Dharmono Hardjowidjono). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zacot, F. dan Fida Muljono (2008), *Orang Bajo: Suku Pengembara Laut* (terj. I. B. Paranoto). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Disertasi

- Lapian, A. B. (1987), "Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX," Disertasi Doktor. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Surat Kabar/Majalah

Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië 1856.

Internet

<http://maritim.go.id>, diunduh 11 September 2016.

Pengaruh Jalur Rempah terhadap Pertumbuhan Budaya Maritim Masyarakat Maluku Kasus Orang Banda dan Gorom

Sem Touwe

Pengajar, Universitas Pattimura

Abstract

The spices lane of Archipelago and foreign had given the contribution positively toward the growth and the development of maritime culture of Banda island and Gorom as well as Moluccas society in general. The purpose and the objective of this research is to reveal the role of Banda islands and Gorom society in the lane spices toward the growth and the development of maritime culture and another local potency. These two areas have been selected as the representative of another area of spices producer in Moluccas and are considered to have a role in the spices trade lane both Archipelago and foreign. To understand the role of seller and sailor in both island in the spices trade lane in past, the historical aspect, socioeconomic, and politics that ever experienced by the society in both island need to be revealed deeply and systematically. This study is descriptive by using historical approach. The conclusion of this study shows that the role of the society in both island in the spices trade lane in past is very useful and being the economic capital that still used until now.

Keywords: *Spices lane, maritime culture, Banda islands, Gorom.*

Kajian mengenai jalur rempah telah banyak ditulis dalam berbagai literatur asing dan lokal. Dari sekian literatur yang sangat menarik adalah naskah Cina, yang dikisahkan oleh W.P. Groeneveldt dalam karyanya tentang Nusantara menurut catatan Tiongkok. Berdasar-

kan karya berharga tersebut dapat diketahui bahwa Maluku sebagai poros jalur rempah telah dicatat oleh para ahli geografi Tiongkok dalam Sejarah dinasti Tang (618–906) dan catatan sejarah dinasti Ming (1368–1643) yang menyebut Maluku dengan istilah ‘Mi-

JEJAK NUSANTARA

Pengaruh Jalur Rempah terhadap Pertumbuhan Budaya Maritim Masyarakat Maluku

Li-kiu'dan sangat berperan dalam jalur perdagangan rempah-rempah.¹ Sumber lain yang terkait langsung dengan jalur perdagangan rempah-rempah adalah karya Anthony Reid mengenai hubungan antara perdagangan dan perubahan budaya dalam masa Kurun Niaga abad ke-15 hingga abad ke-17 di Asia Tenggara. Dalam studinya itu Reid menjelaskan bahwa jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Asia Tenggara, sistem perdagangan di wilayah itu telah terjalin melalui dua jalur yaitu jalur sutra melalui darat yang berawal dari negeri Cina melintasi Asia Tenggara dan berakhir di Laut Tengah, dan jalur laut menggunakan kapal-kapal yang mengandalkan angin musim. Dari April hingga Agustus angin musim bertiup ke utara menuju daratan Asia. Dari Desember hingga Maret angin bertiup ke selatan, dari daratan Asia ke Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Arah angin itulah yang menentukan pola perdagangan maritim Asia (Reid 2015: 78).

Sumber lain mengenai jalur perdagangan rempah-rempah yang mengisahkan hubungan Maluku dengan dunia luar adalah catatan dari Wang

Ta-Yuan(1371–1435) seperti dikutip oleh Reid, bahwa hubungan perdagangan langsung antara Cina dan Maluku sudah dimulai pada pertengahan abad ke-14 dan setelah itu tidak ada hubungan perdagangan lagi karena digantikan oleh pedagang dari Jawa, Sumatera, Makasar, dan Tagalok (Filipina). Argumentasi mengenai terputusnya hubungan perdagangan antara Cina dan Maluku tersebut mungkin ada benarnya bila dikaitkan dengan kisah ekspedisi pelayaran Cina mencari daerah baru di beberapa benua terutama Amerika dan Australia seperti yang dikisahkan oleh Gavin Menzies (2016). Kisah mengenai ambisi besar Kaisar Zhu Di yang membuat program pelayaran untuk mencari daerah baru dan kemudian dijalankan oleh para laksamana Cina seperti Cheng Ho, Hong Bao, Zhau Man, Zahau Wen, dan Yang Qing sekitar 1421, memberikan lompatan berharga dalam dunia pelayaran mengelilingi dunia. Karya tersebut telah memperkuat catatan sejarah dunia bahari mengenai eksplorasi bangsa Cina dalam mengelilingi dunia dan mencari daerah baru diluar negeri Cina.

Yang menarik tentang ekspedisi tersebut adalah pelayaran Laksamana Zhao Man dan Laksamana Hong Bao dari Cina menuju benua Australia dan Amerika. Ketika dalam perjalanan pulang ke Cina, kedua armada yang dinakhodai oleh kedua laksamana tersebut sempat melewati kepulauan rempah-rempah yaitu Maluku dan beberapa pulau lain di Nusantara yang menghasilkan rempah-rempah. Pela-

¹Dijelaskan oleh Groeneveldt (1880) bahwa Maluku terletak di samudra tenggara dan memiliki reputasi sebagai wilayah yang kaya raya. Disana terdapat gunung dupa dan ketika musim hujan datang dupa [cengkih] itu berguguran. *Yang dimaksud dengan gunung dupa oleh Groeneveldt adalah gunung-gunung berapi di Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan yang banyak ditumbuhi oleh tanaman cengkih, khususnya dilereng-lereng gunung yang subur* (huruf miring dan terjemahan dari penulis; ST).

yanan itu jauh sebelum orang Eropa mengelilingi dunia (Mensies 2016: 163–77). Sayangnya ambisi besar Kaisar Zhu Di berakhir dengan pemusnahan berbagai dokumen atau catatan ekspedisi tersebut sehingga tidak dapat dipublikasikan. Akibatnya, orang-orang Eropa-lah yang dianggap sebagai bangsa yang pertama kali mengelilingi dunia. Karya Reid (2015) yang telah disebut, lebih terpaku pada masalah ekspor rempah-rempah di Asia Tenggara secara umum, dan tidak sama sekali menyoroti perkembangan perdagangan di Maluku Utara ataupun seluruh Maluku, namun tetap berharga sebagai referensi tentang jalur rempah atau aktivitas perdagangan di Asia Tenggara.

Dalam karya klasiknya, *Nagara-kertagama* (1365), Mpu Prapanca telah menyinggung soal “Maloko” yaitu empat pusat kekuasaan kesultanan di Maluku Utara atau lazim disebut Maloko Kie Raha, pulau penghasil rempah-rempah terutama cengkih (Leirissa 1996: 56–60; Lombato 1998: 93).²Sumber Portugis, terutama Tome Pires dengan karyanya *Suma Oriental*, juga memberikan gambaran secara terperinci mengenai aktivitas perdagangan rempah-rempah di Nusantara dan terutama berbagai komoditi cengkih dan pala serta fulinya yang banyak ditemukan di pulau-pulau seperti Banda, Seram dan Maluku

(Pires 2016: 265–87).³Berarti daerah Maluku yang terkenal dengan rempah-rempah seperti pala dan cengkih juga telah dikenal luas oleh para pedagang mancanegara karena berada tepat pada poros maritim Nusantara dan jalur rempah dunia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jalur rempah secara politik maupun ekonomi telah memacu perdagangan dan pelayaran antara pedagang Maluku dengan pedagang Nusantara ataupun mancanegara terutama Cina, India Arab, Eropa, dan lain-lain. Pengaruh langsung yang diperoleh dari jalur rempah tersebut juga telah memberikan sumbangan besar bagi tumbuhnya peradaban bahari masyarakat di Maluku terutama di Kepulauan Banda, Gorom, Ternate, Tidore, Makian, dan lain-lain. Selain itu, rempah-rempah hasil Maluku, pala dan cengkih, merupakan petunjuk penting untuk mengetahui kapan daerah Maluku, khususnya Banda dan Gorom, mengadakan hubungan dagang dengan dunia luar. Petunjuk tersebut akan menjadi bukti sejarah dan argumen penting untuk merekam jejak pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Maluku yang bersentuhan langsung dengan jalur rempah sejak masa lalu. Banyak ahli sejarah mengungkapkan bahwa pulau-pulau penghasil rempah-rempah di Maluku adalah Kepulauan

²Lombato (1998) menjelaskan bahwa dalam kronik Jawa *Nagarakertagama* telah disebut nama ‘Malaia’ dan ‘Molocas’.

³Maluqko yang dimaksudkan Pires dalam *Suma Oriental* adalah gugusan kepulauan Ternate, Tidore (Tidora), Jailolo (Bato Chyna), Bacan (Pacham), Moti (Motci), Makian (Maquiaem), dan Maitara.

Banda dengan komoditi pala sedangkan Maluku Utara dengan komoditi cengkih.

Kedua komoditi tersebut telah menarik perhatian bangsa-bangsa luar untuk mencarinya tanpa menghiraukan ganasnya gelombang, badai, dan maut yang setiap saat bisa terjadi. Selat, tanjung, pulau, dan sungai diseberangi hanya untuk mencari rempah-rempah cengkih dan pala di Kepulauan Maluku. Disisi yang lain, perdagangan rempah-rempah telah memacu pengetahuan dan teknologi masyarakat kepulauan penghasil rempah untuk mengembangkan alat pengangkut berupaperahu atau jung dan sebagainya untuk mengangkut hasil panen mereka ke berbagai pelabuhan dagang lain di Nusantara terutama Makasar, Jawa, Sumatera dan Malaka. Dari pelabuhan tersebut komoditi dikirim melalui jalur perdagangan rempah-rempah Asia, mulai dari Malaka ke Cina melalui Selat Malaka terus menyusuri Laut Cina Selatan, dan ada juga dari Malaka ke India sampai ke teluk Persia. Kemudian dari Persia disambung melalui jalur darat menuju Syam (Suriah) terus ke Laut Tengah. Dari laut Tengah, hasil rempah-rempah komoditi Asia ini disebarkan ke wilayah Eropa terutama oleh para pedagang Venesia.

Kebutuhan akan alat transportasi laut untuk mengangkut hasil rempah-rempah dari pulau-pulau di Maluku, baik Banda, Gorom, Ternate, Tidore, Makian, dan lain-lain, telah memacu para pelaut dan pedagang membuat perahu yang berkapasitas 10–20 ton atau lebih untuk mengangkut rempah-rempah. Telah terbukti bahwa para pedagang Banda

turut melakukan pelayaran niaga pada abad ke-16. Tome Pires memasukkan pedagang Banda dalam daftar orang-orang yang berkunjung ke Malaka. Sementara, Meilink-Roelofs melukiskan bahwa di Malaka ada seorang syahbandar yang bertugas untuk mengurus kepentingan orang Banda dan pedagang yang lain. Namun kapal-kapal mereka yang digunakan berlayar hanya berkapasitas kecil dan para awak kapalnya mudah meninggalkan kapal jika terjadi bahaya di laut (Pires 2016: 265–81; Meilink-Roelofs 2016: 94–5).⁴

Pelayaran dan perdagangan dari Ternate, Tidore, Makian, dan Bacan ke Banda maupun Seram, atau sebaliknya, sangat ramai karena sistem barter di wilayah itu didominasi oleh kedua kelompok pedagang tersebut. Berarti perahu-perahu pengangkut cengkih, pala, damar, gaharu, yang berasal dari kepulauan di Maluku saat itu sangat

⁴Menurut Pires, jalur pelayaran dan perdagangan di Nusantara turut diramaikan kaum pedagang dari Maluku karena para sultan atau raja di daerah itu memiliki *jung* atau perahu yang cukup banyak. Sultan Ternate Bayan Sirullah (berkuasa pada 1500–22), misalnya, memiliki kapal seratus unit. Begitu pula dengan Sultan Tidore Almansyur yang memiliki 80 unit perahu. Almansyur juga menguasai Pulau Moti sehingga rempah-rempah, terutama cengkih, diangkut dari kedua daerah itu ke Pelabuhan Makian. Pelabuhan itu ramai dikunjungi pedagang asing. Sultan Bacan, yaitu Cucuf, saudara tiri dari sultan Ternate, ternyata memiliki perahu lebih banyak daripada milik sultan Ternate, dan penduduk di pulau itu lebih banyak bila dibandingkan dengan Ternate, Tidore dan Moti. Begitu pula dengan sultan atau raja di Jailolo.

mungkin turut menguasai jalur perdagangan rempah-rempah karena mereka turut aktif mendistribusikan hasil panennya ke berbagai pelabuhan dagang di Nusantara bahkan ke Malaka dan daerah Asia lainnya. Tak bisa dipungkiri pula bahwa jalur rempah Nusantara saat itu turut diramaikan oleh pedagang dan pelaut dari Maluku. Dengan demikian, seperti telah disebutkan, terdapat dua rute perjalanan niaga internasional masa lalu yaitu, pertama, jalur sutramelalui daratan Cina, Asia Tengah dan berakhir di Laut Hitam; kedua jalur rempah dimulai dari Maluku, terus ke Borneo, Jawa, Srilanka dan menyeberang Samudra Hindia ke laut Arab. Rute ini berakhir dengan jalan darat lewat para kafilah yang mengangkut rempah-rempah ke kota Alexandria dan Syria.

Selain kedua jalur tersebut, terdapat jalur perdagangan rempah yang lain di Nusantara dari Malaka menuju Maluku. Pertama, jalur tercepat melalui Singapura terus ke Kalimantan Barat, menyusuri pesisir Kalimantan Selatan, kemudian berlanjut ke Pulau Buton dan berakhir di Maluku, khususnya di pulau-pulau penghasil cengkih dan pala. Kedua, dari Malaka ke Jawa, terus ke Bima dan Sumbawa, kemudian berlanjut ke Maluku (Pires 1916: 283).⁵ Rempah-

⁵Menurut penulis, jalur kedua yang dijelaskan Pires—dalam *Suma Oriental*—merupakan rute perdagangan Nusantara bagian selatan yang menyentuh Kepulauan Maluku di barat daya ataupun tenggara. Jalur tersebut dimulai dari Malaka, menyusuri pesisir Sumatera, terus ke Jawa, Bali, Sumba, Sumbawa, Flores, Timor, Alor, Kisar, Sermata, Luang, berlanjut ke kepulauan Kei, Toyando, berakhir di Kepulauan Keping dan Gorom. Setelah di

rempah berupa cengkih dan pala dari Kepulauan Banda, Gorom, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, dan Seram dibeli atau ditukar dengan barang dagangan lain kemudian dibawa ke pelabuhan dagang seperti Majapahit di Pulau Jawa, Gresik, Tuban, Sedayu, dan Jaratan. Dari pelabuhan-pelabuhan itulah pedagang Gujarat dan Arab mengangkutnya melalui Laut Merah terus ke Timur Tengah, dan akhirnya tiba di Eropa.

Bandar niaga lain yang cukup berpengaruh dalam perdagangan rempah-rempah dari Maluku adalah Sriwijaya dan Malaka. Hal itu dapat dibuktikan karena jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara telah berkembang kerajaan-kerajaan maritim di wilayah barat dengan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Sriwijaya di Sumatera, Majapahit di Jawa, dan Malaka di Tanah Sempadan. Menurut Reid, mula-mula pala dan cengkih dari Maluku ditampung pada beberapa pelabuhan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Para pedagang dari Jawa dan Maluku menjadi pemasok utama komoditi tersebut yang dipasarkan di Asia. Namun, setelah kerajaan tersebut runtuh pada abad ke-16, pusat perdagangan di Asia Tenggara beralih ke Malaka yang terletak pada jalur perdagangan antara India dan Tiongkok sehingga rempah-rempah dari Maluku juga disalurkan melalui kota pelabuhan itu. Perubahan jalur dan pusat

Gorom ada yang kembali menggunakan jalur tersebut dan ada yang melewati Kepulauan Banda terus ke Ambon, dan melanjutkan pelayaran menuju Makassar, Jawa, Sumatera dan berakhir di Malaka.

perdagangan tersebut disebabkan oleh pergeseran dari pembelian cengkih langsung oleh orang Cina di Maluku menjadi permintaan orang Cina melalui perantara pedagang Melayu dan Jawa (Reid 2015: 8–9).

Yang menarik dari jalur rempah adalah kontak yang terjalin antara manusia tidak saja pada aspek ekonomi dan politik, namun juga dari aspek keragaman, latar belakang etnis dan agama sehingga pada gilirannya terbentuklah keterpaduan masyarakat Nusantara yang menyatu dalam bingkai kebhinnekaan sebagai akibat positif yang diserap lewat jalur rempah sejak dahulu kala. Kehadiran berbagai etnis ke Kepulauan Maluku terutama orang Tionghoa, Arab (Hadrami), Bugis, Jawa, Melayu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris turut memberikan pengaruh yang signifikan untuk tumbuh dan berkembangnya peradaban bahari masyarakat Maluku. Melalui fase-fase dalam sejarah, masyarakat kepulauan Banda, Gorom, Ternate, Tidore Ambon, Seram, dan lainnya di kepulauan rempah-rempah, tergodok oleh berbagai pengetahuan dari luar sehingga memperkaya kearifan lokal yang mereka miliki.

Jalur rempah telah menghadirkan daerah Maluku menjadi sebuah tamadun di Asia Tenggara yang tidak kalah terkenal dengan warisan peradaban dunia lain seperti Mesopotamia, Mesir, Inka, Konstantinopel, Venesia, dan Tionghok. Banyak pendapat ahli mengenai peradaban awal di Maluku belum begitu jelas. Namun, dari aktivitas perdagangan melalui jalur rempah yang

melibatkan wilayah Maluku dengan dunia luar, terutama Mesir, Saudi Arabia, India, Tionghok, dan berbagai daerah di belahan dunia Barat, menjadikan Maluku sebagai wadah bagi pertukaran budaya antara suku bangsa, etnis, dan berbagai agama. Dengan demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan peradaban maritim di Maluku tidak bisa lepas dari jalur perdagangan rempah-rempah yang ditunjang oleh sumber daya alam ataupun kekayaan budaya yang tidak kalah hebatnya dengan wilayah-wilayah di Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara pada umumnya.

Koneksitas antara Maluku sebagai wilayah penghasil rempah-rempah dengan daerah lain di Nusantara ataupun dunia luar turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kepulauan penghasil rempah-rempah, yaitu Banda, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Makian, Seram (Huamual, Gorom), dan Ambon. Dengan demikian untuk merekonstruksi sejarah peradaban masyarakat yang dilatarbelakangi oleh budaya bahari, seperti masyarakat Banda dan Gorom di Maluku, berbagai unsur budaya yang tersosialisasi lewat jalur rempah perlu dijelaskan agar dapat mengungkapkan berbagai aktivitas manusia baik di Kepulauan Banda maupun Gorom dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya.

Dari sisi geohistoris, Kepulauan Banda dan Gorom di Pulau Seram bagian timur merupakan daerah yang memiliki pelabuhan bersejarah di

Nusantara dan sangat berpengaruh dalam jalur rempah. Dalam *Suma Oriental*, Tome Pirestelah memetakan beberapa pelabuhan penting di Maluku, yaitu Banda, Gule-gule⁶ di Pulau Gorom,⁷ dan Luhu di Pulau Seram; selanjutnya pelabuhan-pelabuhan Dobo di Kepulauan Aru, Luang⁸ di Maluku Barat Daya, Makian, Baçan, dan Jailolo di Maluku Utara. Sayangnya sumber-sumber arkeologi maritim mengenai beberapa pelabuhan penting tersebut sangat langka bahkan belum tersentuh sama sekali padahal bisa menjadi sumber berharga untuk mengungkapkan aktivitas kemaritiman dari masyarakat di Maluku, khususnya yang berkaitan langsung dengan jalur rempah Nusantara. Sebagai wilayah yang pernah bersentuhan langsung dengan jalur perdagangan rempah-rempah, banyak aspek kehidupan masyarakatnya ikut tersosialisasi secara langsung dengan berbagai unsur

budaya luar sehingga memacu pertumbuhan dan perkembangan budaya bahari masyarakat, baik teknologi, kesenian, maupun sistem pengetahuan astronomi tradisionalnya.

Mengingat laut sebagai jalur utama perdagangan rempah-rempah, dengan sendirinya laut berfungsi juga sebagai media penghubung dan perekat bagi komunikasi lintas budaya warga masyarakat baik ditingkat lokal, regional, maupun global. Namun, yang lebih utama bahwa disepanjang jalur rempah tersebut telah terjadi pertukaran berbagai unsur budaya yang bersifat halus, seperti wacana lisan, musik, tari-tarian, berbagai jenis seni pertunjukan dan adat kebiasaan; ataupun yang sama sekali tidak terlihat secara kasatmata seperti gagasan, nilai, kaidah, mitos, legenda, pantun, dan jenis kandungan sastra lainnya. Laut, selat, tanjung, muara dan sungai, merupakan jalur-jalur penghubung dan pertemuan serta dialog yang sangat mempengaruhi proses saling membuahi antara satu budaya dengan budaya lain. Jaringan perdagangan Asia yang berpengaruh dalam perkembangan kebudayaan Indonesia sudah berlangsung sejak awal terjadi kontak perdagangan yang dibuktikan lewat bukti-bukti tertulis hingga abad ke 20. Struktur jaringan perdagangan Asia yang rumit telah membentuk kebudayaan Indonesia. Lebih dari sekadar pengaruh Barat tapi juga pengaruh resistensi budaya lokal, budaya India, budaya Islam, dan budaya Cina (Lombard [2] 1996).

Kajian tentang jalur-rempah yang melibatakan para pedagang di kepulauan Banda dan Gorom menjadi

⁶Berdasarkan peta yang dibuat oleh Rodrigues setelah ia bersama Abreu melayari Kepulauan Maluku pada 1512, ia menempatkan Pelabuhan Gule-gule di ujung tenggara Pulau Seram yang terletak disebuah laguna yang memisahkan ujung tenggara Seram dengan dataran utamanya. Gule-gule atau Gocle-Goele menurut Rodrigues terbentang diujung barat daya sebuah laguna yang memisahkan ujung tenggara Seram dengan dataran utamanya.

⁷Pulau Gorom terletak di ujung tenggara Seram. Nama pulau itu sebenarnya mencakup tiga gugusan kepulauan yaitu Gorom, Pulau Panjang dan Manaoka yang berada tepat pada peta jalur rempah-rempah seperti diungkapkan oleh Van Leur (1955).

⁸Luang merupakan daerah yang tereletak di Kabupaten Maluku Barat Daya dan merupakan pelabuhan penting dalam jalur perdagangan Asia Tenggara melalui jalur selatan Nusantara.

sangat penting untuk mengungkapkan berbagai aktivitas kehidupan masyarakatnya. Pertumbuhan dan perkembangan budaya bahari kedua masyarakat kepulauan tersebut tidak terlepas dari jalur rempah yang secara langsung ikut memperkaya budaya bahari masyarakatnya. Selain menelusuri jejak kebaharian masyarakat Banda dan Gorom, aktivitas perdagangan rempah-rempah dan pelayaran mendapat perhatian, terutama menyangkut peran pedagang Banda dan Gorom dalam jalur rempah nusantara, teknologi rancang bangun perahu tradisional, sistem birokrasi pelabuhan di Banda, hubungan sosial, pola pelayaran, dan perdagangan yang mereka miliki sejak dahulu. Para pedagang dan pelaut dari pulau-pulau penghasil rempah-rempah seperti Ternate, Tidore, Jailolo, Makian, Moti, dan Bacan, ikut juga mewarnai dinamika perdagangan rempah-rempah Nusantara bahkan dunia sehingga patut mendapat perhatian dalam tulisan ini.

PEDAGANG BANDA DAN GOROM

Sebagai wilayah penghasil rempah-rempah, Banda dan Gorom telah melakukan hubungan dagang baik dengan Asia Barat, Asia Selatan, Asia Timur maupun Eropa. Dalam *Suma Oriental*, Pires mengungkapkan bahwa salah satu kelompok pedagang di Maluku dalam paroh abad ke-4 adalah orang-orang Banda dan Maluku.⁹ Selain

menjual pala dan fuli mereka juga memiliki armada dagang sendiri yang mengangkut cengkih dan pala ke pelabuhan lain di Nusantara dan kemudian ditukarkan dengan barang dagangan lainnya untuk diangkut ke Banda (Burger dan Prajudi 1962: 52).¹⁰ Jauh sebelum kedatangan orang Eropa ke Maluku, para pedagang Banda dan Gorom telah menguasai perdagangan rempah-rempah dan bersaing ketat dengan pedagang dan pelaut Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan dan Makian. Mereka juga bersaing dengan para pemilik modal dan jung dari Malaka seperti Curia Deva, seorang pedagang dari Chetti dan Pati Cucuf di Pulau Jawa yang menguasai pelayaran dan perdagangan di Pelabuhan Gresik. Selain itu ada juga pedagang lain yang berasal dari India, Gujarat, Arab, Sumatera, Jawa, dan Makasar. Selain orang-orang Banda, Gorom, Geser, dan Huamual di Seram, sultan-sultan di Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, dan Makian memiliki perahu dan *kora-kora* dalam jumlah yang sangat banyak (Pires 2016: 270–85).¹¹

adalah pulau-pulau penghasil cengkih yaitu Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan di Maluku Utara.

¹⁰Barang-barang yang ditukarkan dengan pala, fuli, dan cengkih yang dimaksudkan oleh Pires tidak lain adalah kebutuhan pokok yang tidak ada di Banda ataupun pulau-pulau penghasil cengkih seperti beras, garam, pakaian, dan lain-lain.

¹¹Menurut Pires, jalur pelayaran dan perdagangan di Nusantara turut diramaikan oleh pedagang dari Maluku karena para sultan atau raja di daerah itu memiliki jung atau perahu yang cukup banyak (lihat kembali catatan kaki 4).

⁹Menurut tafsiran penulis, Maluku yang dimaksudkan Tome Pires dalam *Suma Oriental*

Dalam struktur sosial masyarakat dan lembaga-lembaga sosial tradisional di Kepulauan Banda diketahui bahwa penduduk yang mendiami Pulau Lontor (Banda Besar) merupakan orang-orang yang tergolong berkedudukan sosial rendah dan tidak memiliki peran penting serta tidak diistimewakan bila dibandingkan dengan masyarakat di pulau lainnya. Namun, mereka merupakan pelaut-pelaut tangguh yang bisa berlayar menggunakan jung, perahu, *sope-sope*, dan *kora-kora* ke berbagai daerah di Nusantara bahkan hingga Malaka. Pola pelayaran dan perniagaan rempah-rempah para pedagang Banda telah menjadikan mereka sebagai perantau di wilayah orang lain selama beberapa bulan bahkan tahun, dan pada gilirannya mereka akan pulang ke kampung halaman dengan membawa hasil yang diperoleh selama pelayaran berlangsung. Para pedagang maupun pelaut dari Kepulauan Banda bukan saja melayari Nusantara bagian barat, namun juga berlayar dan berdagang hingga Papua menyusuri pesisir Pulau Seram dan Kepulauan Gorom di bagian tenggara Pulau Seram.

Yang menarik dari aktivitas perdagangan dan pelayaran orang-orang Banda dan Gorom adalah terbentuknya sistem perdagangan tradisional yang dikenal dengan istilah *sosolat*, yaitu suatu sistem *warlaba* yang dibentuk oleh pemimpin tradisional di Kepulauan Gorom untuk mengatur jalur-jalur pelayaran orang-orang pribumi khususnya pelaut dan pedagang yang berasal dari kepulauan Banda, Seram, dan Papua. Begitu kuatnya peraturan yang

dibuat dalam sistem *sosolat* tersebut sehingga hanya diperbolehkan bagi pelaut dan pedagang dari Kepulauan Banda maupun Seram untuk berlayar menuju Papua melewati perairan di sekitar Kepulauan Gorom. Selain itu para pedagang asing dilarang berlabuh atau turun mengisi air dan perbekalan di sepanjang pesisir Kepulauan Gorom. Sistem itu ternyata sangat menguntungkan pedagang dari Banda sehingga dalam pelayaran ke Gorom ataupun ke Papua mereka bisa singgah di pelabuhan yang terdapat di Gorom ataupun dipesisir Seram Timur, baik untuk berdagang, mengisi air minum maupun mengambil perbekalan lainnya.

Sebenarnya sistem *sosolat* bertujuan mengisolasi wilayah perairan di sekitar Kepulauan Gorom dan pesisir timur Pulau Seram dari pelaut dan pedagang asing terutama orang-orang Eropa.¹² Disisi lain sistem *sosolat* bukan saja merupakan suatu sistem birokrasi pelayaran lokal yang meng-

¹²Menurut penulis, sistem *sosolat* yang dibentuk sebagai aturan pelayaran dan perdagangan bagi para pedagang Banda, Gorom Seram dan Papua, benar-benar dipertahankan oleh seluruh kelompok etnis tersebut sehingga pada awal kedatangan orang-orang Eropa ke daerah Maluku, mereka tidak bercokol lama di daerah Seram bagian timur terutama Kepulauan Gorom. Mungkin saja ada kaitannya dengan persoalan penyiaran ajaran agama karena berdasar kenyataan Kepulauan Gorom ataupun sebagian besar wilayah Seram Timur bebas dari penyiaran agama Kristen. Kemungkinan lain, masyarakat di Kepulauan Gorom telah memeluk agama Islam sebelum kedatangan orang Eropa di Maluku sehingga mereka menolak bersahabat dengan orang-orang Eropa yang membawa agama Kristen ke wilayah mereka.

atur para pedagang Banda, Gorom, dan Papua, namun pada akhirnya berkembang menjadi suatu ikatan kekerabatan lintas pulau antara orang-orang Banda, Gorom dan Papua hingga kini. Ikatan *sosolat* juga memberikan peluang yang besar bagi para pelaut dan pedagang dari kepulauan Banda dan Gorom sehingga mereka bisa berlayar hingga pesisir Papua Barat terutama di pulau-pulau Arobi, Karawatu, Kilimata, Kaimana, dan Misol. Secara politik, sosial atau ekonomi, ikatan *sosolat* antara masyarakat yang berbeda pulau, suku dan ras ini ternyata membawa manfaat positif bagi para pedagang dan pelaut Banda, Gorom, Seram dan Papua. Contohnya pada masa berkecamuknya bajak laut diperairan Seram Utara hingga Papua Barat, para pelaut dan pedagang dari ketiga daerah yang terikat dalam sistem *sosolat* tidak pernah diserang atau dirampok oleh bajak laut dari Papua terutama negeri-negeri pesisir wilayah kekuasaan Raja Salawati yang bergabung dengan bajak laut dari Tobelo dan Galela. Tentang aktivitas bajak laut tergambar dalam kutipan berikut (Leirissa 1996: 165-7).

Armada-armada orang Papua penduduk pesisir kepulauan Raja Ampat yang dipimpin oleh para rajanya terutama raja Salawati dan raja Misol pada 1794 pernah bergabung bersama pasukan bajak laut dari Halmahera khususnya orang-orang Tobelo Galela yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin dengan kekuatan 250 perahu dari berbagai ukuran bersiap-siap untuk menyerang Pulau Keping dibagian tenggara Seram Timur. Selain itu berita yang lain menjelaskan bahwa 100 buah perahu jenis *kora* juga telah disiapkan dari berbagai negeri yang ada di pesisir kepulauan Raja Ampat juga akan ikut

menyerang Pulau Keping. Kekuatan tempur laut di Pulau Misol yang dikabarkan akan menyerang Pulau Keping itu ternyata hanya desas-desus dan tidak pernah terwujud bahkan tidak pernah ada laporan resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Kecuali ditahun 1805 pernah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh kekuatan tempur laut gabungan termasuk *kora-kora* dari kepulauan Raja Ampat yang dikuasai Raja Jailolo. Mereka berhasil menyerang Kepulauan Sula dan Kepulauan Banggai yang dikomandai oleh Kimelaha Sungi atau Mohammad Asgar.

Dari data historis tersebut terlihat bahwa kerja sama orang-orang Kepulauan Banda, Kepulauan Gorom, Seram, dan penduduk pesisir Papua Barat, khususnya pulau-pulau Raja Ampat, dalam ikatan *sosolat* benar-benar berfungsi dan terbukti sebagai alat perekat hubungan solidaritas baik dalam ekonomi, sosial, maupun politik. Hubungan itu tampak juga dalam sistem perdagangan barter antara masyarakat di daerah-daerah tersebut karena mereka saling menukar barang dagangan, bahkan pelaut-pelaut Banda sering memesan perahu dan *kora-kora* dari orang-orang Geser di Seram Timur yang pandai merancang perahu atau *kora-kora*. Orang-orang Banda juga sering menukarkan barang dagangan yang mereka bawa dari luar Maluku seperti Jawa, dan Sumatera dengan bahan makanan sagu, kelapa, umbi-umbian dan kopra dari Papua dan Seram.

TEKNOLOGI RANCANG BANGUN KAPAL KAYU

Teknologi rancang bangun kapal di Kepulauan Banda perlu diteliti lebih

mendalam karena diduga kuat perahu-perahu besar yang dapat melayari samudra luas dengan kapasitas muat rata-rata 5–10 ton itu diperoleh dari orang-orang Seram Timur, khususnya Geser, Gorom, dan Kian Laut, yang dikenal pandai membuat perahu berukuran besar. Ada dua petunjuk yang mendasari dugaan tersebut; pertama, di Kepulauan Banda sulit diperoleh jenis kayu keras seperti *lenggua* dan *gupas* sebagai bahan baku pembuatan perahu dalam jumlah banyak. Kedua, keterikatan dalam dunia perdagangan dengan sistem *sosolat* diantara orang-orang Banda dan Gorom berkembang menjadi hubungan kekerabatan sehingga memungkinkan pedagang Banda memesan perahu atau jung dari orang-orang Gorom. Ketiga, ketika terjadi pembantaian besar-besaran pada masa Jan Pieterszoon Coen menjadi gubernur VOC pada 1621 membuat orang-orang Banda harus menunggu kedatangan armada dari Geser dan Gorom di Seram Timur menjemput mereka dengan puluhan *kora-kora* berukuran besar dan kecil untuk eksodus dari Kepulauan Banda.

Dugaan tersebut tidak mengurangi sama sekali teknologi rancang bangun kapal buatan orang Banda karena hingga sekarang mereka yang eksodus ke Kepulauan Kei di Maluku Tenggara selama 395 tahun masih tetap membuat perahu, *kora-kora*, ataupun kapal berkapasitas 10–20 ton untuk dijual kepada pedagang Makassar yang berniaga di Kepulauan Aru. Selain itu ada di antara pedagang Banda yang memiliki perahu atau kapal tetapi tidak

jelas apakah kapal yang mereka miliki dikerjakan di Banda ataukah dibeli dari orang-orang Geser, Gorom dan Kian di Seram Timur. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan ahli arkeologi guna lebih mendalami dan merekonstruksi secara pasti. Yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana teknologi rancang bangun perahu atau jung dan *kora-kora* itu dimiliki oleh orang-orang Gorom dan Banda di Kepulauan Maluku.

Akibat dari hubungan dengan daratan Asia Tenggara dalam perniagaan rempah-rempah telah mendorong masyarakat pesisir di Kepulauan Maluku membuat perahu dalam berbagai ukuran dan model. Di seluruh perairan Nusantara banyak ditemukan runtuhannya perahu yang tenggelam atau kandas. Dari reruntuhan itu, pakar perahu dapat mengidentifikasi teknologi pembuatan perahu. Para pakar telah merumuskan teknologi tradisi pembangunan perahu berdasarkan wilayah budayanya, yaitu wilayah budaya Asia Tenggara dan wilayah budaya Cina. Perahu yang dibuat dengan teknologi tradisi Asia Tenggara mempunyai ciri khas, antara lain badan (lambung) perahu berbentuk seperti huruf V sehingga bagian lunasnya berlinggi. Sementara bagian haluan dan buritan lazim berbentuk simetris. Tidak ada sekat-sekat kedap air di bagian lambungnya. Dalam proses pembangunannya sama sekali tidak menggunakan paku besi serta kemudi berganda di bagian kiri dan kanan buritan.

Teknik yang paling mengagumkan adalah cara mereka menyambung papan. Selain tidak menggunakan paku besi,

cara menyambung satu papan dengan papan lainnya adalah dengan mengikatnya memakai tali ijuk. Sebilah papan, pada bagian tertentu dibuat menonjol. Di bagian yang menonjol ini diberi empat lubang yang menembus di bagian sisi tebal. Melalui lubang-lubang itu tali ijuk dimasukkan dan diikat dengan bilah papan lain. Di bagian sisi yang tebal, diperkuat dengan pasak-pasak kayu atau bambu. Teknik penyambungan papan seperti ini dikenal dengan istilah "teknik papan ikat dan kupingan pengikat" atau *sewn-plank and lashed-lug technique*. Pada 1544, Antonio Galvao, seorang Portugis, telah menguk tabir pembangunan perahu di Nusantara sebelah timur (daerah Maluku dan sekitarnya) terutama dalam teknik pembangunan kapal orang Maluku. Menurutnya, bentuk kapal orang Maluku yang menyerupai telur dengan kedua ujung dibuat melengkung ke atas dimaksudkan supaya kapal dapat berlayar maju dan mundur ke belakang (Kartodirdjo, Poesponegoro, Notosusanto[ed.]1976: 112-3). Di bagian dalam terdapat bagian yang menonjol dan berbentuk cincin sebagai tempat memasukkan tali ijuk pengikat. Papan-papan disambung dengan pena (pasak) kayu atau bambu yang dimasukkan pada lubang kecil di ujung depan. Sebelumnya, pada bagian sambungan papan diolesi *baru* (semacam damar) agar air tidak dapat masuk. Kemudian papan disambung berapit-apit dengan kemahiran tinggi sehingga orang yang melihat akan mengira bahwa bentuk itu terbuat dari satu bilah papan. Pada bagian haluan kapal dibuat hiasan ular naga bertanduk.

BIROKRASI PELABUHAN DI KEPULAUAN BANDA

Beberapa sumber tertulis dan tradisi lisan—berupa syair tradisional yang disebut *Onotan Sarawandan* yang berasal dari Pulau Banda Naira—banyak mengisahkan masa kejayaan Orang Kaya (bangsawan) dan syabandar pelabuhan laut di Banda sebelum kedatangan bangsa Eropa ke daerah itu. Dalam syair-syair tradisional tersebut dikisahkan bahwa sistem perdagangan dan pemerintahan yang berlaku di Kepulauan Banda pada awalnya diatur oleh lima orang ratu yaitu Ratu Iyako Salamon, Ratu Boisili Lewetaka, Ratu Langgawar, Ratu Lakley Roseggin, dan Ratu Boiratan. Kelima penguasa itu masing-masing memiliki wilayah kekuasaan dan kelompok masyarakatnya sendiri, seperti Ratu Iyako Salamun berkuasa atas kelompok masyarakat Rery Salamun, Ratu Bisili Lewetaka berkuasa atas kelompok Lakuy di wilayah Lewetaka, Ratu Langgawar berkuasa di wilayah Banda Besar atau Pulau Lontor berkuasa atas kelompok Latar, Ratu Lakley Rosanggin dengan kelompok Rosanggin dan yang terakhir Ratu Boiratan di Pulau Banda Naira (Kubangun 2016: 2-4).

Kelima pemimpin tersebut saling bekerja sama dalam perdagangan rempah-rempah terutama buah pala dan fuli yang dicari para pedagang dari Nusantara ataupun mancanegara terutama orang-orang Cina Gujarat, dan Arab. Masing-masing pemimpin menjaga dan mengatur jalannya perda-

gangan, baik menyangkut birokrasi pelabuhan berupa pajak pelabuhan maupun pajak barang berharga seperti kain kasar dari Cambay dan kain putih *balachos* dari Indiyang didatangkan melalui Pelabuhan Malaka. Dalam *Suma Oriental*, Pires menyebut hanya empat pemimpin tradisional di Kepulauan Banda, “Pada awal abad ke-16, Kepulauan Banda dikuasai oleh empat raja yaitu Lebetaka, Seranggon, Wayer, dan Rosingin. Keempat pemimpin tersebut menguasai wilayah pelabuhan seperti Selaman (Calamom), Ortatan (Olutatam), Waer (Comber), dan Lontor (Bomtar) yang ramai disinggahi pedagang asing” (Pires 2016:266).

Tidak lama kemudian kekuasaan keempat raja tersebut disingkirkan oleh Orang Kaya yang pada waktu tertentu bersidang atau bermusyawarah dalam lembaga yang disebut *Ortatan* Raja-raja yang disingkirkan dalam pemerintahan ternyata dialihfungsikan untuk menguasai pelabuhan dagang yang berada pada masing-masing wilayah kekuasaannya dengan gelar ‘syahbandar’ atau kepala pelabuhan. Yang menarik adalah pada saat itu kepala pelabuhan di kepulauan Banda telah mendapat gelar syahbandar yang identik dengan kepala pelabuhan. Diduga kuat istilah tersebut diadopsi dari Malaka yang telah maju dalam dunia pelayaran dan perdagangan terutama dalam mengurus birokrasi pelabuhan. Dugaan ini didasarkan pada Undang-Undang Malaka yang dibuat pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syah pada (1423–44), dan ditambahkan oleh Sultan Muzaffar Syah (1445–58). Dari 44 pasal pada

bagian kedua dari Undang-Undang Malaka ini terdapat penjelasan mengenai undang-undang laut.

Undang-Undang tersebut dimulai dengan penjelasan tentang kekuasaan orang-orang besar seperti raja, syahbandar, tumenggung, penghulu, dan bendahara, serta penjelasan mengenai tugas mereka masing-masing. Hampir semua daerah pelabuhan di Nusantara mengurus birokrasi pelabuhannya dengan berpatokan pada Undang-Undang Laut Malaka (Liaw Yock Fang 2011: 522–9).¹³ Dengan demikian birokrasi pelabuhan di Kepulauan Maluku termasuk Banda, Gorom, Ternate, Tidore, dan lain-lain, tidak menutup kemungkinan mengadopsi aturan undang-undang laut Malaka yang berlaku umum di Nusantara saat itu. Sayangnya tidak ada bukti tertulis yang memperkuat dugaan tersebut. Selain itu ada pula Undang-undang laut Malaka versi Aceh, Patani dan Minangkabau yang sama-sama menjelaskan tentang aturan selama berlayar, baik untuk mualim, nakhoda maupun anak buah kapal yang turut dalam pelayaran dan perdagangan.

PENUTUP

Tulisan ini telah memberikan pemahaman berharga tentang pengaruh jalur rempah terhadap pertumbuhan dan perkembangan budaya bahari masya-

¹³Menurut Liaw Yock Fang, undang-undang laut yang berasal dari Malaka memiliki arti yang penting sekali di Nusantara. Pada 1818, Raffles sudah menyusun isinya dalam sebuah makalah berjudul “On the Malay Nation with a Translation of its Maritime Institutions.”

rakat Maluku khususnya Banda dan Gorom yang belum banyak dikenal dalam wacana tentang jalur rempah Nusantara ataupun mancanegara. Usaha untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dunia, dan daerah Maluku sebagai porosnya, bukan merupakan slogan semata karena sejak kekuasaan kerajaan Nusantara telah tergambar bahwa kebesaran bangsa ini terletak di laut. Dinamika pelayaran dan perdagangan di Nusantara pada masa lalu menunjukkan kemajuan pesat dalam dunia perdagangan rempah-rempah baik di Maluku maupun daerah lain di Indonesia.

Sebagai negara yang luas wilayah lautnya lebih besar daripada daratan, peran pemerintah sebagai motor dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, harus lebih diarahkan pada pembinaan pelayanan masyarakat laut pesisir di Indonesia secara terpadu. Sasarannya adalah menjadikan masa lalu yang penuh kemajuan dalam dunia perdagangan rempah-rempah tersebut dapat dikembangkan oleh masyarakat baik di kepulauan Banda, Gorom, maupun daerah lain di Indonesia.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran masa lalu itu ialah, pertama, kejayaan para pendahulu negeri ini ditumbuhkan oleh kemampuan mereka membaca potensi wilayah. Ketajaman visi dan kesadaran mereka terhadap posisi strategis Nusantara telah membawa bangsa ini disegani negara-negara lain. Sudah saatnya negeri ini kembali menyadari dan membaca ulang narasi besar maritim Indonesia sebagaimana pernah

diikrarkan Patih Gajah Mada ataupun pemimpin kerajaan lain di Nusantara. Sejak lampau telah termaktub peluang besar Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun, lemahnya perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap kemaritiman—yang mencakup laut, pesisir dan perniagaan rempah-rempah, merupakan kerugian besar.

Kedua, Pemerintah Republik Indonesia perlu mengatur dan meningkatkan peran pedagang dan pelaut lokal supaya lebih bergairah dalam perdagangan rempah-rempah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kepulauan. Demikian juga untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat (monopoli, kartel), lembaga seperti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha seharusnya mempunyai peraturan yang berpihak kepada petani dan pedagang rempah-rempah terutama cengkih dan pala di Maluku sehingga perniagaan rempah-rempah kembali subur dan berjaya seperti masa lalu.

DAFTAR ACUAN

- Burger, D. H. (1962), *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* (terjemahan dan saduran Prajudi Atmosudirdjo). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Groeneveldt, W. P. (1880), *Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources*. Batavia: BVG.
- Kartodirdjo, S. M. D. Poeponegoro, N. Notosusanto (ed.) (1976), *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Kubangun, N. (2016), *Onotan Sarawandan: Tradisi Lisan Masyarakat Banda Ely Elat*. Ambon: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Leirissa, R. Z. (1996), *Halmahera Timur dan Raja Jailolo: Pergolakan Sekitar Laut Seram Awal Abad 19*. Jakarta: Balai Pustaka.
- van Leur, J. C. (1955), *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History*. The Hague, Bandung: W. van Hoeve.
- Liaw Yock Fang (2011), *Sejarah Kesusastran Melayu Klasik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lombard, D. (1996), *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Bagian 2: Jaringan Asia (terj.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lombato, M. (1998), *Politika e comercio dos Portugueses na Insulindia Malaka e AS Molucas de 1575 A 1603*. Saldhana Macau Instituto Portugues de Macau.
- Meilink-Roelofs, M. A. P. (2016), *Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara: Sejarah Perniagaan 1500–1630* (terj.). Depok: Komunitas Bambu.
- Menziés, G. (2016), *Saat Cina Menemukan Dunia* (terj.). Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Pires, T. (2016), *Suma Oriental: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues* (terj.). Yogyakarta: Ombak.
- Reid, A. (2015), *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680*, Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global (terj. R. Z. Leirissa dan P. Soemitro). Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Melacak Jalur Rempah Pelayaran dan Migrasi Orang Buton di Kepulauan Maluku

Tasrifin Tahara

Pengajar, Universitas Hasanuddin

Abstract

Seafaring tradition and the migration of Buton is essential in tracking down the spice trail in the archipelago, especially in the Maluku Islands. The area is not conducive to agricultural activity and social structure implication to pressure on migration on a large scale and has been going on since the 17th century to the present. This article is a qualitative research with data collection techniques literature study, field observation and interviews with informants conducted in Buton as the origin of migrants, Ambon City and District of West Seram in Maluku Province. The presence of Buton in Maluku since colonial times as laborers clove plantations to be the owner of the estate is currently implication to the socio-economic and political Maluku Islands. Another very important role is the ability to cruise Butonese result that serves as distributor of spices is essential to trace the spice as a civilization in the archipelago.

Keywords: *Trace Spice, Sailing and Migration People Buton*

Tradisi maritim orang Buton dan migrasi hingga kini merupakan kekuatan budaya yang penting dikaji, tidak hanya karena latar historisnya tetapi juga dapat menjadi sumber nilai kehidupan bagi mereka dalam menata masa depannya. Tradisi ini telah melampau berbagai

zaman dan generasi, dengan segala tantangannya, telah mengukuhkan orang Buton sebagai suku bangsa bahari Indonesia bersama dengan suku bangsa lainnya yakni Bajo, Bugis, Makassar, Mandar, dan Madura (Horridge 1986).

Kemampuan menjalani lakon hidup sebagai pelayar tidak mudah dilaluinya tanpa landasan nilai kehidupan yang kuat diyakininya. Segala upaya pemerintah kolonial pada akhir abad ke-19 untuk menyempurnakan wilayah kekuasaannya, dengan mengoperasikan maskapai pelayaran Koninklijke Paketvaart Maatschappij tampak tidak mampu menutup ruang pelayaran pribumi (Lapian 2009). Pelaut Buton mampu menunjukkan eksistensinya. Aktivitas mereka sulit dikontrol, selain karena kepriawaian mereka membaca ruang samudra, juga karena kekuatan nilai budaya yang dianutnya. Bagi mereka, laut dan perahu merupakan representasi kehidupan, seperti halnya di darat, meminjam istilah dari Hamid (1994), bahwa perahu adalah sebuah desa kecil yang mengapung di laut. Bagi pelayar, perahu (*bangka/wangka*) memiliki peran yang sangat penting dalam rona kehidupan mereka di laut. Bahkan, karena pentingnya, istilah *sabangka* 'perahu' pun digunakan sebagai sapaan kepada kehidupan di darat, untuk menyebut kawan/teman/sahabat.

Kesatuan kata dan langkah dalam usaha pelayaran dan perdagangan maritim merupakan unsur utama penguat tradisi maritim. Dengan semangat selalu bersama atau satunya kata dan perbuatan, segala tantangan kehidupan di laut, baik yang bersumber dari ruang samudra maupun dari manusia, dapat dihadapi. Itulah sebabnya, ketika perahu telah dilayarkan dan meninggalkan pantai, pantang bagi pelayar untuk mengubah haluan, apalagi kembali lagi ke pantai. Semangat yang dimaksud adalah *asarope*, diambil dari kata *rope* yakni bagian

depan atau haluan perahu, diawali dengan kata *asa* yang bermakna satu atau sama (Tahara, dkk. 2015).

Semangat hidup dalam pelayaran merupakan nilai-nilai utama kebudayaan masyarakat Bugis di pulau-pulau. Nilai budaya inilah yang menjadi penopang utama kelangsungan tradisi bahari orang Buton dari waktu ke waktu dan dari satu tempat (ruang) ke tempat yang lain. Mereka berlayar melintasi ruang samudra (laut) dan dari satu pulau ke pulau lain. Aktivitas ini membawa mereka lebih dekat mengenal komunitas dan budaya lain, dan yang tidak kalah pentingnya adalah "negeri baru" yang kelak dijadikan tempat bagi mereka mencari nafkah dan tinggal atau menetap di sana. Secara perlahan, mereka kemudian membangun permukiman di sepanjang rute pelayarannya, terutama di kawasan timur Indonesia. Maluku adalah salah satu daerah tujuan utamanya. Hasil bumi Maluku berupa kopra, cengkih, dan (belakangan) jambu mente merupakan komoditi utama yang dibeli dan diangkut, kemudian dibawa dan dijual di Jawa dan Singapura. Dari daerah tujuan itu kemudian mereka membeli barang-barang kelontong untuk memenuhi kebutuhan penduduk di Maluku dengan cara menjual atau menukar (barter) dengan hasil bumi (La Malihu 1998). Aktivitas tersebut membangun dan memperkuat jaringan maritim orang Buton di Indonesia.

Sebaran orang Buton di berbagai daerah di kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku, merupakan warisan tradisi bahari yang telah berlangsung cukup lama (Zuhdi 2002). Dengan kata

lain, untuk memahami perantauan atau diaspora Buton ke berbagai penjuru Nusantara tak dapat dipisahkan dari nilai budaya bahari, *sabangka-asarope*. Tentunya, nilai budaya itu lahir dan berkembang awalnya di kampung halaman pertamanya, Buton, kemudian dibawa serta dalam perantauan sehingga berkembang dan menjadi nilai budaya mereka di tanah rantau (Tahara, dkk. 2015).

Catatan antropolog menyebutkan bahwa pada 1987 sebanyak 1.281 kapal perdagangan lokal (perahu *lambo*) ada di Kabupaten Buton, 467 di Pulau Tukang Besi, dan jumlah ini berlanjut dalam pola yang panjang. Pada 1919, menurut perkiraan seorang militer Belanda, terdapat sekitar 300 perahu di Pulau Buton, 200 perahu di Pulau Tukang Besi, dan setengahnya di Pulau Binongko. Sebagai pelaut pedagang orang Buton, seperti halnya Suku Bugis Makassar, merupakan suku yang melakukan diaspora ke berbagai kawasan wilayah Indonesia seperti Makassar, Papua, Maluku, Kalimantan, Kepulauan Riau, dan lain-lain. Di Makassar, migran Buton yang telah datang sejak beberapa abad pada masa kesultanan Buton membangun perkampungannya sendiri yang disebut Kampung Butung (Poelinggomang 2002). Migran Buton ke Ambon dalam skala besar diduga dimulai pada akhir abad ke-19, sebagian besar berasal dari Binongko dan bekerja pada perkebunan di berbagai tempat di Kepulauan Maluku (Chauvel 1990; Winn 2008).

Eksistensi orang Buton di Nusantara khususnya di kawasan timur Indonesia sejak dulu menjadi bagian penting dari

wilayah-wilayah yang menjadi tujuan migrasi orang Buton. Artikel ini menguraikan peran orang Buton dengan tradisi pelayaran dan diaspora di Kepulauan Maluku sebagai isu penting dalam menelusuri jejak-jejak rempah—meski berawal dari pekerja kasar (buruh perkebunan) hingga menjadi pemilik perkebunan cengkih di Kepulauan Maluku sebagai implikasi dari diaspora ekonomi orang Buton di Kepulauan Maluku. Jadi, rempah-rempah sebagai obyek materiel dalam pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan kondisi geografi Pulau Buton, tradisi pelayaran dan migrasi. Inilah yang menjadi masalah utama yang diuraikan dalam artikel ini.

Kajian ini merupakan penelitian etnografi yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada kasus pelayaran dan migrasi orang Buton di Kepulauan Maluku. Melalui pendekatan ini dilakukan suatu proses pengkajian dan pengumpulan data—baik kepustakaan maupun lapangan—secara mendalam dan terperinci seputar kejadian khusus sebagai kasus yang dipilih di lokasi penelitian di Buton dan wilayah Ambon dan Pulau Seram di Maluku. Wawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, agama, masyarakat, pemuda, dan pelayar serta aparat pemerintah yang pernah bertugas dalam wilayah tersebut.

TENTANG BUTON

Buton adalah nama pulau di sebelah tenggara jazirah Pulau Sulawesi. Pulau itu diapit oleh lautan yaitu Laut Banda di sebelah utara dan timur, Laut Flores di

sebelah selatan, dan Selat Buton serta Teluk Bone di sebelah barat. Dulu, di pulau itu pernah berdiri sebuah kerajaan atau kesultanan yang disebut Buton atau Wolio. Selain Pulau Buton, daerah kekuasaan Kesultanan Buton pernah meliputi beberapa pulau di kawasan antara Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Pusat pemerintahannya terletak di pesisir barat bagian selatan Pulau Buton, sekitar Kota Bau-Bau sekarang, yang dikenal dengan nama Wolio atau Keraton Buton.

Selama ini, studi tentang Buton banyak dilakukan berdasarkan catatan penjelajah dan pegawai pemerintah Belanda, misalnya Ligvoet (1878) hingga Van Den Berg (1937, 1939, 1940). Mereka bercerita tentang banyak hal mulai dari ritual, konsepsi kesultanan serta masyarakatnya, hingga catatan tentang berbagai peristiwa penting di Buton. Ligvoet dan Berg merupakan perwakilan pemerintah kolonial Belanda yang ditugaskan di Buton untuk merekam kejadian penting seperti pelantikan sultan dan situasi keamanan di wilayah itu. Mereka juga menelaah sejumlah catatan penjelajah sebelumnya yang pernah singgah ke Buton seperti Jan Pieterszoon Coen,¹ Appolonius

Scotte,² dan lain-lain. Sebagai pegawai pemerintah kolonial, catatan Ligvoet dan Berg penuh nuansa penaklukan yang penuh bias etnosentrik yang memahami kebudayaan Buton dalam perspektif kebudayaan Barat. Akibatnya, sering terjadi perbedaan konsepsi antara para penulis tersebut dengan warga lokal—yang sayangnya suara mereka harus menjadi suara yang lirih dan tidak senyaring para penulis tersebut.

Salah satu contoh pandangan yang sangat etnosentrik adalah pernyataan Coen yang sinis ketika melihat Buton. Ia mengatakan, “Di sini terdapat rakyat miskin, budak murah, dan orang tidak banyak dapat berdagang di sini. Di sini, penduduk makan ubi yang disebut calabi.” Pernyataan itu khas para penjelajah yang melihat satu wilayah hanya dari sisi *resource* atau sumber daya yang harus dikuasai. Masyarakat Buton bukanlah rakyat miskin atau budak murah seperti yang ia maksudkan, namun karena pandangannya bias sebagai orang Barat yang menggunakan kebudayaannya sebagai indikator tingkat kehidupan.

Dilihat dari aspek politik eksternal, posisi Buton sebagai kerajaan di Nusantara yang berada di kawasan timur berada dalam ketegangan yang tarik-menarik antara kekuatan Gowa dan Ternate. Ekspansi kedua kerajaan besar di bagian timur Nusantara itu men-

¹Jan Pieterszoon Coen (1587–1629) dikenal sebagai orang Belanda yang menemukan jalur perdagangan ke Asia Timur. Ia menjadi Gubernur Jenderal VOC ke-4 yang berkedudukan di kota yang ia dirikan yaitu Batavia pada 1617. Meski terlahir dari keluarga penganut Calvinist yang taat, Coen justru dikenal karena tindakannya yang membantai ratusan penduduk Pulau Banda pada 1621 (lihat *Encarta Encyclopedia*, 2006).

²Seorang kapten yang memimpin armada Belanda (VOC) yang pertama datang di Buton pada 1613. Ia mengadakan perjanjian dengan sultan Buton yang ke-4, Dayanu Ikhsanuddin, untuk menjalin hubungan kerjasama di bidang pertahanan, ekonomi, dan perdagangan.

jadikan kondisi Buton—digambarkan Schoorl—seperti "shuttle cock" yang dipukul ulang alik, sesekali ke Gowa dan kali yang lain ke Ternate dalam periode yang lama. Secara jelas, bisa dilihat dalam kutipan berikut,

. . . Dalam persetujuannya yang pertama dengan Buton pada 1613, VOC memujuknya supaya jangan melakukan kegiatan bermusuhan dengan raja Buton atau terhadap warganyayangmanapun. . . Sejak saat itu hingga 1667, Kerajaan Buton serupa bola bulu tangkis (*shuttle cock*) dalam suatu pertandingan antara Makassar, Ternate, dan VOC. . . (Schoorl 1994).

Tradisi lisan banyak mengisahkan bagaimana Buton senantiasa berada dalam tarik-menarik antara dua kekuatan tersebut. Sikap ekspansif Gowa—yang ditunjang armada persenjataan yang perkasa—untuk menguasai kawasan timur menjadi ancaman bagi banyak bangsa termasuk Buton. Di sisi lain, banyaknya bajak laut yang berasal dari Tobelo (Ternate) yang menguasai perairan kawasan timur juga menjadi kekhawatiran yang harus segera diatasi.

Dalam sejumlah tradisi lokal dinyatakan, "*Ane akowii ngalu bhara, tajagaka Gowa, ane akowii ngalu timbu, tajagaka Taranate*" atau kalau tiba musim barat kita [Buton] bersiap-siap menghadapi Gowa, dan kalau tiba musim timur kita [Buton] bersiap-siap menghadapi Ternate. Secara metaforik, kondisi Buton bisa dibayangkan seperti perahu (Zuhdi 2010), yang juga dapat berarti kenyataan sesungguhnya, "barata Buton" terombang-ambing tiada mementu. Ke arah haluan (*rope*) Buton menghadapi ancaman Gowa sedangkan

ke arah buritan (*wana*) harus berhadapan dengan ancaman Ternate. Dalam ketegangan terus-menerus itulah, kehadiran VOC yang "membebaskan" Buton dari ancaman bahkan serangan armada kuat Gowa beberapa kali dilakukan dalam dekade pertengahan abad ke-17.

PELAYARAN DAN PERNIAGAAN REMPAH

Dalam melakukan pelayaran, para pelaut Batuatas menjalankan kegiatan dagang. Barang komoditi ekspor yang dibawa oleh pelayar niaga dan pelayar Buton pada umumnya adalah rotan, damar, agel, kopra, cengkeh, pala, teripang, dan berbagai hasil laut lainnya. Komoditas rotan, damar, kopra, cengkih, pala, kulit binatang, dan teripang diekspor ke Singapura dan Malaysia, sedangkan ke Cina diekspor agel dan teripang. Sejak 1926, dimulai perdagangan kopra, cengkih, dan pala dari Kepulauan Maluku yang dibawa ke kawasan barat Nusantara sampai ke mancanegara yakni Singapura dan Malaysia. Pada mulanya perdagangan tersebut mendapat rintangan dari pemerintah Belanda karena keuntungannya berlipat ganda sehingga para pedagang harus melakukan pelayaran secara ilegal terutama ke Singapura dan Malaysia. Fenomena tersebut berlanjut hingga akhir abad ke-20 ketika pelayar niaga orang Batuatas, orang Buton, dan Buton Selatan pada umumnya, tetap melakukan pelayaran niaga ke Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, dan wilayah Pasifik lainnya.

Pada awal abad ke-20 barang komoditi impor dari mancanegara masih terbatas pada keramik dan tekstil. Kemudian pada pertengahan abad ke-20

meningkat baik volume maupun jenis barang termasuk berbagai jenis elektronik. Keramik (guci, mangkuk, dan piring) didatangkan dari Cina dan Thailand yang ditukar atau imbal beli dengan agel dan kopra. Hal itu berlangsung hingga pertengahan abad ke-20. Elektronik, tekstil yang lebih dikenal dengan akronim RB 'rombengan' atau pakaian bekas didatangkan dari Singapura dan Malaysia (Johor, Pulau Penang, dan Tawau di Sabah) secara ilegal. Barang-barang komoditi impor dijual di wilayah Buton, Kendari, Muna, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Timor-Timur.



Gambar 1: Jenis perahu yang digunakan orang Buton

Dalam proses transaksi dagang dan pergaulan dengan orang-orang dari berbagai suku bangsa lain yang dijumpainya, pelayar Buton sejak awal berusaha keras menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Dalam percakapan ternyata mereka lebih mampu berbahasa Indonesia daripada orang-orang dari komunitas petani, peternak, pedagang, dan perantau Buton lainnya yang hidup di pulau atau daratan. Diakuinya bahwa kelancaran transaksi dagang yang

mereka kelola banyak ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan mitra dagang dan konsumen, buruh-buruh pelabuhan, aparat pemerintah, dan sebagainya.

Diasumsikan bahwa segenap pengalaman pelayaran, pengalaman berinteraksi dan saling kenal dengan orang-orang Indonesia yang berbeda suku bangsa terlibat secara mendalam dan mematuhi segala peraturan dengan memahami keberagaman atau keseragaman simbol-simbol budaya itulah yang menumbuhkan wawasan kebhinekaan, kesatuan Tanah Air, kesatuan bahasa, dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi pelayar Buton, pengalaman pengembaraan yang panjang diakuinya telah memperkaya pengetahuan dan wawasan ruang samudra dan dunia internasional serta sikap keterbukaan.

Para pelaut niaga Buton lebih dominan memperdagangkan kopra dan cengkih di wilayah Jawa, sedangkan untuk wilayah Jakarta adalah hasil laut, yakni teripang laut. Sementara hasil yang dibawa pulang kembali dari hasil perdagangan itu adalah barang kebutuhan pokok seperti pakaian, semen, gula dan beras. Hal itu menunjukkan bahwa dalam berusaha mencari nafkah, khususnya di bidang pelayaran niaga atau perdagangan antarpulau, pelaut Buton menggunakan perahu dan/atau kapal.

MIGRASI ORANG BUTON DI KEPULAUAN MALUKU

Pulau Buton bukanlah wilayah yang subur, tidak seperti wilayah lain di Pulau Sulawesi yang cukup subur sebagai

lahan pertanian. Secara geologi, tanah adalah bahan lapukan dari batuan induk, karena batuan induk dari tanah di lokasi penelitian ini merupakan batuan kapur (karst) sehingga tanahnya pun banyak mengandung kapur dan kurang subur ditambah dengan curah hujan yang cukup rendah dan hanya mencapai 500–700 milimeter pertahun. Hujan banyak terjadi hanya pada bulan Desember hingga Maret.

Jika dilihat lebih teliti, tanah dalam artian sebagai hasil pelapukan batuan induk, sangatlah sedikit. Lahan di Pulau Buton yang merupakan lokasi penelitian ini lebih didominasi oleh batuan kapur yang cukup resisten atau kompak. Lapisan tanah—kalau masih bisa ditemukan—terlihat hanya beberapa sentimeter. Tanah itu hanya terdapat pada sela-sela batuan yang masih keras. Kurangnya lapisan tanah ini diduga diakibatkan oleh kurang efektifnya tenaga eksogen dalam pelapukan batuan induk, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya curah hujan. Jika di tempat lain di Nusantara dikenal tanah yang berbatu, dalam artian tanah lebih dominan, maka pada lokasi penelitian ini tampak sebaliknya, yakni batu yang bertanah, artinya batu yang lebih dominan dibanding lapukan yang gembur.

Selain kondisi tanah yang sebagian besar tidak subur dan sedikit kemungkinan untuk aktivitas pertanian, akses terhadap lahan sangat dikuasai oleh kelompok lapis atas pada masa kesultanan.³ Akibat tekanan struktur dan

akses sumber-sumber ekonomi, tradisi berlayar dan bermigrasi menjadi solusi dalam mempertahankan hidup. Bahkan pada abad ke-17, orang Buton sebagai pekerja kasar sudah dijumpai di Kepulauan Maluku terutama di Pulau Seram dan Ambon. Situasi itu berlanjut pada 1870-an dengan adanya larangan perdagangan budak yang berimplikasi pada kekurangan buruh tenaga kerja di Kepulauan Banda di Maluku. Hal itu mengakibatkan peningkatan yang cukup signifikan kedatangan migran asal Binongko. Saat itu, Gubernur Maluku meminta kepada Gubernur Sulawesi dan Sultan Buton untuk mengizinkan penduduk Kepulauan Tukang Besi bekerja di Banda. Sultan Buton pada waktu itu setuju menambah orang Buton di wilayah Residen Banda. Kemudian migrasi dari Buton ke Ambon terus berlanjut hingga terjadi kerusuhan Ambon pada 1999 (Palmer 2004).

Informasi tentang orang Buton di Ambon masih kurang. Pada 1930, terdapat sekitar 10 persen orang Buton dari 107.000 penduduk Ambon (Chauvel 1990: 3). Saat itu, orang Buton merupakan kelompok imigran terbesar di Ambon. Kebanyakan orang Buton tersebut berasal dari Pulau Binongko, yang datang pada era terakhir abad ke-19 (Chauvel 1990). Orang-orang Buton membuka kebun di bukit-bukit di belakang desa pesisir orang Ambon (Ouwering dalam Chauvel 1990). Pada waktu itu mereka tidak diperkenankan memiliki tanah pertanian di Ambon (Benda-Beckmann 1996).

³ Pembahasan lengkap tentang kelompok strata pada masyarakat Buton masa kesultanan

diuraikan oleh Rudyansjah (1997); Tahara (2014).

Pada umumnya orang Buton bekerja sebagai pembuat makanan dan buruh di kota. Orang Buton yang bermigrasi ke Maluku umumnya berpendidikan rendah sehingga mereka bersedia melakukan pekerjaan yang dianggap rendah pula oleh orang Ambon. Orang Buton juga tidak terlibat dan tidak memiliki banyak pengaruh terhadap politik daerah (Chauvel 1990). Dalam proses interaksi dengan orang lokal, status sosial yang lebih rendah disematkan oleh orang Ambon terhadap orang Buton. Bahkan orang Buton dikesankan “inferior” dan “kuno” dibandingkan orang Ambon (Bartels 2000: 21). Namun, keadaan itu tidak menghalangi proses interaksi sosial yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi dan hingga sekarang sebagian besar orang Buton telah menempati posisi-posisi sosial yang mantap di Maluku baik dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun politik.

DARI BURUH PEMETIK MENJADI PENGUASA LAHAN REMPAH

Kehadiran migran Buton di Kepulauan Maluku yang berawal sebagai buruh perkebunan rempah-rempah sangat membantu produktivitas perkebunan itu. Orang Buton di Maluku merupakan pekerja keras, pintar berdagang, dan tidak boros. Orang Buton di Maluku bisa keluar dari kehidupan yang sulit di Buton dan bersedia bekerja apa pun untuk menyambung hidup di Maluku. Kisah sukses pekerja orang Buton di perkebunan cengkih di Kepulauan Maluku tergambar dalam kasus berikut.

Kasus Haji La Mili, migran dari Buton yang berasal dari subetnik Ciacia;

merupakan generasi ketiga ketika kakek Buyutnya datang di Pulau Seram. Haji La Mili menuturkan bahwa pada mulanya ia hanyalah buruh yang mengelola lahan dan pemetik cengkih. Tidak pernah menerima gaji karena tidak berlaku sistem gaji melainkan sistem bagi hasil. Jika lahan kebun cengkih yang dikelola 10 hektar, misalnya, maka hasil penjualan dibagi dua; masing-masing 50 persen kepada pemilik (orang Ambon), dan buruh. Lambat-laun proses itu mengubah kehidupan ekonomi La Mili. Kini, ia memiliki ratusan hektar kebun cengkih, bisa menyekolahkan anak hingga jenjang sarjana, dan menunaikan ibadah haji.

Kasus La Isa, migran Buton dari Pulau Binongko yang datang di Pulau Seram pada 1978. Awalnya ia hanya mengolah lahan/kebun milik orang Ambon; dari hasil kerja yang diperolehnya selama bertahun-tahun ia berhasil membeli beberapa bidang kebun dan mengolahnya sendiri. Dilihat dari perkembangan ekonominya, kini La Isa tergolong berada dalam tingkat ekonomi menengah ke atas. Bahkan menurut penuturannya, apabila musim panen tiba dan harga cengkih naik, ia membeli aneka perabot dan kendaraan (mobil) untuk menunjang aktivitas keluarga.

Kasus La Nasiri, migran Buton dari Tomia; pada awalnya sebagai pemetik cengkih di Seram dan Ambon kemudian berhasil memiliki lahan dan pendidikan. Dalam proses dinamika politik lokal, ia ikut pemilihan umum daerah dan berhasil menduduki jabatan politik.

Ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa eksistensi migran Buton dalam jejak rempah-rempah di Kepulauan Maluku sangat penting dan menjadi bagian dari peradaban di Maluku. Orang Buton telah berdiaspora dan ikut menjadi bagian dari proses sosial-politik dan ekonomi. Kondisi itu sangat memungkinkan karena populasi migran Buton di Kepulauan Maluku cukup besar.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, populasi orang Buton sebesar 10,59 persen dari 1.163.122 penduduk Maluku. Populasi itu menempati urutan kedua setelah Kei 10,59 persen [*sic.*], disusul etnik Ambon pada peringkat ketigasebesar 10,53 persen, selanjutnya Seram 6,88 persen dan Saparua 5,94 persen. Orang Buton di Maluku Utara juga cukup “mewarnai” karena masuk urutan keempat besar yakni sebesar 6,30 persen setelah Galela 7,87 persen, Makian 9,12 persen, dan Sula 9,46 persen dari total penduduk sebesar 1.895.575 jiwa (Suryadinata, dkk., 2003).



Gambar 2: Komunitas migran Buton di Seram bagianbarat

Sebagai suku bangsa yang bermigrasi di Kepulauan Maluku, orang Buton merupakan pekerja keras hingga berhasil dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang ekonomi dan penguasaan lahan perkebunan cengkih atau rempah-rempah, mereka menguasai pasar-pasar di Kota Ambon dan pemilikan lahan perkebunan cengkih. Di bidang politik dan kekuasaan, dua wakil bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi

Maluku, adalah putra Buton yakni Haji La Kadir dan Haji Muhammad Husni. Selain itu, di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, putra Buton juga menduduki posisi sebagai bupati. Dengan demikian, anggapan atau stereotipe orang Buton yang pernah digambarkan sebagai “orang bawahan,” “kotor,” dan sebagainya, terjawab “tidak benar” dengan mengacu pada keberhasilan diaspora orang Buton di Kepulauan Maluku sebagai bagian terpenting dalam rona kehidupan di wilayah itu..

PENUTUP

Menelusuri jejak rempah-rempah di Nusantara khususnya di Kepulauan Maluku tidak terlepas dari tradisi pelayaran dan migran orang Buton di kepulauan itu. Pelayaran dan migrasi yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun merupakan bagian terpenting dalam peradaban Nusantara. Orang Buton yang hadir di Kepulauan Maluku sebagai kelompok migran akibat keterbatasan sumberdaya dan tekanan struktur kini memiliki andil dalam proses pembangunan ekonomi, sosial dan politik.

Dalam konteks jejak rempah-rempah di Nusantara, orang Buton sangat berperan dalam proses produksi dan distribusi rempah-rempah di seluruh wilayah Nusantara. Dalam hal produksi, orang Buton telah menjadi buruh atau pekerja perkebunan cengkih pada hampir seluruh wilayah Maluku sejak ratusan tahun yang lalu. Proses itu berlangsung sejak masa kolonial hingga migrasi atas keinginan pribadi atau kelompok yang

meninggalkan wilayah leluhurnya di Buton. Proses itu tidak hanya pada proses produksi sebagai pekerja atau buruh, namun dalam perkembangannya migran Buton telah menjadi pemilik lahan perkebunan cengkik di Kepulauan Maluku.

Tidak hanya itu, peran orang Buton dalam menelusuri jejak rempah-rempah juga sangat strategis dalam distribusi hasil rempah yang dijalaninya sejak ratusan tahun melalui tradisi pelayaran lintas samudra ke berbagai wilayah penjuruk Nusantara. Dalam konteks itu, tradisi pelayaran telah menjadi moda perekonomian Nusantara karena tradisi itu ibarat "tol laut"—seperti wacana kebijakan poros maritim dalam era pemerintahan Jokowi-JK saat ini.

DAFTAR ACUAN

- Bartels, D. (2000), "Your God is No Longer Mine: Moslem-Christian Fratricide in the Central Moluccas (Indonesia) After a Half-Millennium of Tolerant Co-Existence and Ethnic Unity," www.maluku.org/hain/english.
- von Benda-Beckmann, K. (1996), "The Practice of Care: Social Security in Moslem Ambonese Society," dalam D. Mearns dan C. Healey (ed.), *Remaking Maluku: Social Transformation in Eastern Indonesia* (121-39). Darwin: Northern Territory University.
- van den Berg, E.J. (1937), "De viering van den raraja hadji in de kota Wolio (Boeton)," *Tijd*, LXXVII (650-60).
- (1939), "Adatgebruiken in verband met de sultansinstallatie in Boeton," *Tijd*, LXXIX (469-528).
- (1940), "Een rijsfeest in Lawela," *Tijd*, LXXX (530-43).
- BPS (1980), *Sensus Penduduk 1961: Penduduk Desa Sulawesi dan Maluku*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada dan Biro Pusat Statistik.
- Chauvel, R. H. (1990), *Nationalists, Soldiers and Separatists: The Ambonese Islands from Colonialism to Revolt 1880-1950*. Leiden: KITLV Press.
- Hamid, A. (1994), *Pasompe*. Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Hamid, A. R. (2011), *Orang Buton: Suku Bangsa Bahari Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Horridge, A. (1986), *Sailing Craft of Indonesia*. Singapura: Oxford University Press.
- Lapian, A. B. (2009), *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Palmer, B. (2004), "Migrasi dan Identitas: Perantau Buton yang Kembali ke Buton Setelah Konflik Maluku 1999-2002," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Th. XXVIII, No. 74.
- Poelinggomang, E. L. (2002), *Makassar. Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rudyansjah, T. (1997), "Kaomu, Walaka, dan Papara: Satu Kajian mengenai Struktur Sosial dan Ideologi Kekuasaan di Kesultanan Wolio," *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 52.
- Schoorl, J. W. (1994), "Power, Ideology, and Change in the Early State of Buton," dalam G. J. Schutte (ed.), *State and Trade in the Indonesian Archipelago (17-57)*. Leiden: KITLV Press.
- Suryadinata, L., dkk. (2003). *Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Tahara, T. (2014), *Melawan Stereotip: Etnografi, Reproduksi Identitas, Dinamika Masyarakat Katobengke Buton yang Terabaikan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tahara, T., dkk. (2015), *Sabancı Asarope: Nilai-nilai Budaya Bahari Orang Buton*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.
- Winn, P. (2008), "Butonese in the Banda Islands: Departure, Mobility, and Identification," dalam P. Graham (ed.), *Horizon of Home: Nation, Gender, and Migrancy in Island Southeast Asia*. Clayton: Monash Asia Institute.

Zuhdi, S.(2002), "Jejak Orang Butun dalam Sejarah Maritim Indonesia,"Makalah Seminar Eksplorasi Sumberdaya Budaya Maritim Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.

— (2010). *Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope, Labu Wana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tesis

La Malihu (1998), "Buton dan Tradisi Maritim: Kajian Sejarah tentang Pelayaran Tradisional di Buton Timur 1957-1995," Tesis Magister. Depok: Universitas Indonesia.

Jejak Globalisasi Lada

Perdagangan Lada Aceh ke Massachusetts 1797–1846

Tyson Tirta

Alumnus, Kingston University

Abstract

This essay discusses a short period in the history of colonial pepper trading in the 19th Century, in relation with Aceh, a conflicting colonial territory in the island of Sumatra, which massively produced pepper. This particular commodity was one of the eminent aspects that linked many worlds' nations. Looking closely to the early globalization period, this essay tries to investigate how the distribution of pepper to America led to a large number of profitable income. Furthermore, this essay questioned many other aspects such as who and how this kind of trading could be developed in the shadow of Dutch colonialism. The research shows that these trading activities had initiated a more globalized economic atmosphere, as well as, became a part of an early-modernized image and character of European Imperialism in Southeast Asia.

Keywords: Pepper, Massachusetts, Salem, Imperialism, Globalisation

Penelitian mengenai sejarah perdagangan masyarakat Eropa dan dunia pada abad ke-18 dan ke-19 membuktikan bahwa rempah-rempah telah menjadi faktor penting yang menggerakkan eksplorasi, eksploitasi serta imperialisme secara umum. Di Eropa saat itu, rempah-rempah merupakan sumber daya yang bernilai sangat tinggi. Beragam upaya yang berujung kompetisi ekonomi telah

dilakukan untuk mencapai sumber-sumber produksi dengan ongkos yang terjangkau. Sementara itu, pada sekitar akhir abad ke-18, imperialisme Inggris mulai giat melakukan ekspansi ke seluruh dunia. Baik secara geografis maupun ekonomis, kekuatan Inggris Raya cukup diuntungkan. Hal itu bisa terlihat pada kekuasaan imperialnya yang hampir sepertiga dari wilayah

dunia pada pertengahan abad, serta penarikan pajak yang dilakukan oleh East India Company (EIC). Tidak berlebihan jika pada masa itu, imperialisisme Inggris yang terpusat di India sangat menentukan arah utama perdagangan berbagai komoditas penting di dunia.

Khusus dalam urusan rempah-rempah, berbagai jalur distribusi ke Eropa telah berusaha dikembangkan dan dikuasai sedemikian rupa mulai dari usaha pelaut Spanyol dan Portugis untuk menemukan rute laut, pembukaan kanal Suez, hingga monopoli perusahaan dagang Belanda yang menjadi penentu perdagangan kolonial. Tidak ketinggalan, pelaut dan pemilik kapal dagang di Amerika juga melihat keuntungan besar yang bisa diraih dari perdagangan rempah-rempah. Mereka ikut serta dalam kompetisi memperebutkan keuntungan dagang. Esai ini mendiskusikan latar belakang suatu babak penting distribusi rempah-rempah yang kerap luput dari pengamatan sejarawan Indonesia yaitu perdagangan lada Sumatera (Aceh) ke Salem, daerah bandar laut di Massachusetts. Konstelasi politik, perdagangan internasional, serta perebutan pengaruh imperial menentukan arah sejarah distribusi rempah-rempah dari Nusantara ke dunia Barat. Penelitian dalam esai ini menemukan bahwa para pelaut dan pemilik kapal dagang Amerika telah lebih awal melihat keuntungan besar dan kemudian dengan masif ikut serta dalam distribusi lada Sumatera ke Amerika dan Eropa. Lebih jauh, esai ini menghasilkan argumentasi bahwa pada awal abad ke-19, perdagangan lada Salem-Sumatera

ini merupakan salah satu tonggak awal penting globalisasi ekonomi di wilayah Nusantara.

DUNIA BARAT DAN REMPAH-REMPAH

When I discovered the Indies, I said that they were the richest dominion that there is in the world. I was speaking of the gold, pearls, precious stones, and spices, with the trade and markets in them, and because everything did not appear immediately, I was held up to abuse.

Dalam catatan atas pelayaran ketiga, ditulis di Jamaika, 7 Juli 1503, Christopher Columbus.¹

Penelitian mengenai perdagangan rempah-rempah dunia tidak pernah lepas dari sejarah imperialisme Barat. Sejak awal, bangsa Eropa melakukan berbagai upaya mencari jalur yang paling singkat dan menguntungkan. Hal itu secara langsung membuat konstelasi politik Eropa memainkan peran penting dalam perdagangan. Pada awalnya, ratu Inggris Elizabeth I mengeluarkan surat perintah yang dikenal dengan *English Charter* pada 1600. Tujuan utamanya adalah mengatur perdagangan Inggris Raya di seberang lautan, yang secara langsung, mewadahi persaingan mereka dengan bangsa Eropa lain. Sebagai bagian dari sejarah imperialisme Inggris, perintah ini melandasi berdirinya EIC. Langkah ini ditanggapi oleh Belanda, sebagai sesama bangsa Eropa yang menyadari perlunya

¹Lihat Turner (2004).

“mengamankan” perdagangan mereka dengan wilayah Hindia. Maka, dua tahun kemudian (1602) Belanda mendirikan persekutuan dagang VOC.

Sebagai latar belakang, baik kekuatan Inggris maupun Prancis, telah mengambil langkah perlawanan terhadap Belanda yang terlebih dulu mendominasi wilayah Asia. Konflik pun terjadi berulang kali. Pada 1652–54, 1672–74, serangkaian peperangan militer pun terjadi (Blanning 2008: 102). Awalnya, para pelaut Inggris memaksakan diri berkompertisi dengan Belanda untuk memperebutkan jalur-jalur perdagangan di Asia Tenggara, akan tetapi dengan cepat mereka menyadari bahwa peperangan itu justru akan merugikan mereka. Maka pada 1688, perwakilan Belanda diundang ke London. Perundingan dimulai dan ketika pangeran Belanda William of Orange menjadi salah satu pemegang saham terbesar di EIC, beberapa kesepakatan dibuat. Salah satu yang penting adalah memberikan dominasi perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara kepada Belanda dan tekstil India ke Inggris. EIC memperkirakan bahwa permintaan akan rempah-rempah pada tahun-tahun selanjutnya akan tidak lebih besar daripada kebutuhan akan kain dan kapas. Bagi EIC, kesepakatan itu justru agak menguntungkan karena mereka bisa lebih leluasa menjangkau wilayah Asia Tenggara (Ferguson 2007: 24).

Walau demikian, secara umum peperangan itu tidak mengganggu dominasi Belanda. Pada permulaan abad ke-18, VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) telah melakukan perda-

gangan tekstil dari Asia. Mereka menjadi penguasa dagang yang lebih baik dari kompetitor Inggris yang baru memulai kegiatan dagang dengan India. Sejak pertama kali dibentuk pada 1602, VOC menjadi ujung tombak kapitalisme Eropa di dunia. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Portugis yang sejak 1511 telah lebih dulu mendarat di pulau rempah-rempah Malaka, penghasil utama cengkih. Secara bertahap VOC menguasai dua jalur laut utama yaitu Selat Malaka yang terletak di antara Pulau Sumatera dan Kepulauan Malaya, dan Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Sumatera (Braudel 1995: 264). Baru sejak 1731 orang-orang Inggris menunjukkan usaha ekspansi perdagangan tekstil. Di luar urusan tekstil, teh dan kopi merupakan sumber keuntungan VOC yang kala itu tetap menjadi importir utama. Para kompetitor Eropa mereka tidak sanggup menyaingi ledakan keuntungan dagang ini di antara tahun 1734 dan 1785. Teh menjadi komoditas utama yang paling menguntungkan bagi Belanda (Boxer 1988: 198).

Selama paruh kedua abad ke-18, EIC menjadi kekuatan dominan di Bengal, India. Sementara itu persaingan mereka dengan VOC sempat terjadi juga di wilayah itu. Sejarah mencatat pada November 1759, Robert Clive, pejabat EIC yang menaklukkan Bengal, pernah menggagalkan usaha VOC untuk membentuk kedudukan militer (Boxer 1983: 113). Persaingan memperebutkan jalur rempah-rempah menghasilkan kekalahan besar VOC atas Inggris. Sejak 1799, VOC dinyatakan bangkrut karena kekalahan persaingan ini serta korupsi

yang merajalela di dalam organisasinya sendiri. Pada saat itulah, dunia menyaksikan awal kejayaan imperialisme Inggris. Hasrat bangsa Inggris dalam ekspansi imperial setidaknya didorong oleh empat faktor utama yaitu kolonisasi, perebutan pengaruh, agama, dan perdagangan. Faktor yang terakhir, perdagangan, terutama berkaitan erat dengan komoditas yang tinggi nilainya yaitu rempah-rempah. Bagi peradaban Barat, komoditas ini pada awalnya digunakan untuk pewangi dan obat-obatan. Baru di kemudian hari penelitian mengenai rempah-rempah serta pelajaran dari Asia membuatnya digunakan juga sebagai penyedap,

Pada masa itu, kekuatan kolonial Inggris yang berpusat di India, dan kekuatan Belanda di Jawa, merupakan dua penguasa utama perdagangan rempah dan tekstil. Belanda dan EIC menjadi kaya dengan lalu-lintas perdagangan komoditas tersebut. Akan tetapi kekuatan imperial Inggris dengan jelas telah mendominasi hampir seluruh wilayah laut dunia. Setelah kemenangan mutlak di Waterloo, Belgia, pasukan Inggris secara bertahap menegaskan dominasi imperialnya. Sejarawan Michael Duffy, dalam *World-Wide War and British Expansion 1793-1815*, melihat awal dominasi imperial Inggris. Iamenuliskan,

Britain's long wars against Revolutionary France and against Napoleon resulted in the most complete triumph in the great age of European imperial warfare and left her as the predominant maritime and imperial power.

Keadaan itu membuat hubungan dagang antara bangsa-bangsa Eropa dan

Asia secara umum banyak dipengaruhi oleh persaingan imperial di antara bangsa-bangsa Eropa sendiri. Persaingan itu terus terjadi dan mewarnai relasi lain di luar urusan perdagangan hingga pertengahan abad ke-19 (Tarling 2001: 89).

LADA

Para pedagang Eropa memiliki obsesi tersendiri untuk mencapai pusat produksi tanaman lada (Schaffer 2013: 14). Imperium Romawi dipercaya telah berabad-abad menemukan dan menggunakan lada sebagai bahan baku obat. Dalam bahasa Sanskrit, lada hitam dikenal sebagai "maricha" atau "marica" yang bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menghilangkan racun. Pengertian ini membuat lada digunakan untuk meredakan penyakit, memperbaiki nafsu makan, menghangatkan badan, menghilangkan batuk, dan berbagai khasiat lain. Sementara itu, pada abad Pertengahan, orang-orang Eropa menggunakan lada sebagai bumbu masakan. Dengan demikian, lada menjadi barang mewah yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang dengan kondisi finansial yang kuat.

Dalam dunia perdagangan, tampaknya orang-orang Eropa justru agak terlambat mengambil keuntungan finansial. Peradaban Gujarat, Bengal, Tamil, Arab, Asia Tenggara, dan Cina telah ratusan tahun lebih dulu menguasai lalu lintas perdagangan lada ketimbang orang-orang Eropa. Pada akhir abad ke-15, bangsa Portugis merupakan orang Eropa pertama yang melakukan komunikasi langsung dengan India, kala Vasco da Gama menyeberangi amudera Hindia.

Seratus tahun sejak itu, bangsa Portugis terus berupaya menguasai jalur-jalur laut untuk menguasai perdagangan lada Asia. Kegagalan mereka disusul oleh persaingan ketat pelaut Belanda dan Inggris pada abad ke-17/18, dan sejak itulah monopoli perdagangan lada diperebutkan oleh VOC dan EIC.

Di Asia Tenggara, runtuhnya pengaruh VOC pada 1800 menghasilkan tatanan kekuatan ekonomi baru. Pengaruh Revolusi Industri (1750) dan Revolusi Prancis (1789) sedikit-banyak membentuk tatanan baru itu termasuk di kawasan Asia Tenggara. Diaspora dalam perdagangan mendorong sesama bangsa Asia turut andil dalam perdagangan modern. Khusus untuk urusan perdagangan ini, bangsa Cina menempati posisi penting. Populasi Cina yang melonjak pesat membutuhkan pasar yang luas. Di sisi lain, mereka juga memiliki kekuatan besar dalam bentuk tenaga kerja. Tidak ketinggalan dengan bangsa Eropa, mereka juga datang ke Asia Tenggara, khususnya Pulau Sumatera untuk mencoba peruntungan dalam komoditas gula dan lada. Maka, datanglah sejumlah besar tenaga kerja dari Guangdong dan Fujian (Lieberman 2009: 868). Awalnya, dalam perdagangan teh Cina telah melakukan hubungan dagang dengan Inggris yang kala itu telah menguasai produksi dan distribusi katun dan opium India. Eratnya hubungan antara pedagang swasta Inggris dengan EIC membuat mereka dengan mudah menyusup ke dalam usaha-usaha EIC untuk mengambil keuntungan dari timah dan lada Sumatera. Hal itu

membuat kompleksitas urusan dagang semakin rumit.

LADA SUMATERA DI SALEM

Tradisi pertanian modern peradaban Eropa dimulai oleh raja Prancis Charlemagne (742–814), yang memulai suatu area pertanian produktif yang salah satu produksinya adalah tanaman adas. Tradisi itu dibawa oleh orang-orang Eropa yang bermigrasi ke Amerika. Oleh karena itu perdagangan internasional sebetulnya bukan sumber pendapatan yang pertama kali menjadi prioritas utama dalam tradisi masyarakat Amerika pada masa awal. Penggerak utama kehidupan ekonomi mereka adalah sektor pertanian. Kelompok petani inilah yang secara aktif membuka lahan, dari Lexington ke Boston dan Saratoga yang pada akhirnya membe-rontak kepada pemerintahan imperialis Inggris Raya (Wasserman 1972: 63).

Kota Salem terletak di negara bagian Essex, Massachusetts, di bawah pemerintahan negara bagian New England di Amerika Serikat. Sejak awal, daerah Massachusetts memang tidak menguntungkan dalam bidang agraria. New England terletak di kawasan timur laut. Karakter tanahnya tipis dan berbatu. Tanah datarnya relatif sedikit dan musim dinginnya panjang sehingga sulit untuk mencari penghidupan dari pertanian. Sektor ini dimodifikasi oleh penduduk di sana dengan menggunakan tenaga air untuk kebutuhan penggilingan gandum. Kayu yang berkualitas tinggi mendorong

mereka memproduksi kapal. Oleh karena itu, barang ekspor kota itu terutama adalah hasil laut dan hasil pengolahan kayu, termasuk produksi kapal laut. Ikan kod kemudian menjadi komoditas yang melimpah. Sektor ini memberikan kemakmuran pada penduduk dan dengan cepat, daerah Boston menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Amerika.

Sejak pertengahan abad ke-17, dengan membangun kapal sendiri dan melayarkannya ke pelbagai pelabuhan penting di seluruh dunia, para ahli perkapalan di Massachusetts meletakkan dasar yang penting bagi kegiatan perdagangan yang semakin penting pada masa-masa selanjutnya. Dari sisi ini, meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja tidak berbanding lurus dengan peningkatan populasi kotanya secara umum. Di sinilah motif Puritan Inggris dan semangat mencari keuntungan dagang mengambil peran penting. Pada 1629 Massachusetts Bay Company didirikan. Perusahaan dagang itu mendorong lebih banyak lagi jumlah pendatang dari Eropa khususnya Inggris untuk bekerja di sana. Pada 1640, kota Massachusetts menjadi sangat ramai. Mereka yang datang berusaha mencari bidang-bidang usaha lain selain perikanan dan hasil laut. Sekitar 20 ribu orang menetap di sana, terutama untuk mengembangkan pertanian (Ferguson 2007: 63).

Di sisi lain, kehidupan perdagangan laut di wilayah Asia Tenggara telah berkembang cukup pesat. Pada awal abad ke-16, Aceh mengeksport 40–50 ribu kuintal rempah-rempah ke Jedah setiap tahun melalui kapal Gujarat

(Boxer 1969: 59). Perkembangan perniagaan laut ini membuat raja-raja lokal turut mengambil untung dari perdagangan. Seorang Prancis yang berhasil mengunjungi Aceh mencatat bahwa Sultan Iskandar Muda adalah juga sebagai pedagang (Lapian 2008: 62). Sebagai wilayah yang mayoritas berupa pulau-pulau besar dan kecil, jalur laut pada masa ini adalah jalur utama yang menghubungkan komunikasi antar pulau. Akan tetapi bagi bangsa-bangsa Eropa, untuk mencapai daerah itu diperlukan usaha yang sangat berat. Untuk menjangkau daerah Banda Aceh, misalnya, banyak kesukaran yang harus dihadapi. Pada abad ke-17, daerah itu merupakan pusat perdagangan dan pelayaran di Sumatera Utara.

Teluk Aceh yang posisi geografisnya terlindungi oleh pulau-pulau Waih, Breueh, dan Bunta, bisa dijangkau melalui tiga jalur. Pertama jalur Surate, yang biasa digunakan oleh pedagang dari Gujarat. Kedua, jalur Benggal yang digunakan oleh kapal-kapal yang hendak berlayar menuju Bengal dan pantai timur India. Sedangkan jalur ketiga adalah jalur yang digunakan untuk mencapai Malaka (Lapian 2008: 97). Selain kesulitan geografis, para pedagang asing yang akhirnya berhasil mencapai Aceh tidak bisa begitu saja langsung melakukan kegiatan dagang. Sultan Iskandar Muda memberlakukan penarikan pajak khusus. Para pedagang diwajibkan membayar 10 persen untuk sultan, yang menurut naskah *Bustanus Salatin* hal itu baru berlaku pada zaman Sultan Iskandar Muda (Lombard 1967:103). Di luar itu, adat di Aceh memberlakukan pajak seba-

gai berikut (Lapian 2008: 118).

1. *Adat cap* atau *adat lapik cap*, dibayar dalam bentuk barang atau dengan uang untuk memperoleh cap yaitu izin raja untuk berlayar.
2. *Adat kain, kain segulung (sekayu)* yang harus diberikan oleh pedagang-pedagang dari India dan Eropa pada waktu mereka mendapatkan cap.
3. *Adat kain yang ke dalam*, yaitu kain yang diberikan untuk istana.
4. *Adat memohon kunci*, untuk mendapatkan izin menurunkan barang dari kapal sesudah pajak lainnya dilunasi.
5. *Hadiah langgar*, sebagai izin berlabuh (120 tahlil 10 mas bagi sebuah kapal bertiang tiga dari Gujarat).
6. *Adat mengawal*, untuk orang-orang tua bangsa Aceh yang naik ke kapal untuk menjaganya selama kapal berlabuh.
7. *Adat hak ul-kalam*, yakni semacam bea registrasi.

Sumber-sumber sejarah awal mengenai jejak awal perdagangan lada Sumatera ke Salem tidak diketahui secara pasti. Data yang berhasil ditemukan berasal dari kapten Jonathan Carnes, yang menemukan Pulau Sumatera dan jalur perdagangan yang langsung, tanpa melalui perantara orang Belanda yang punya klaim otoritas di daerah itu. Kapten Carnes adalah orang Amerika pertama yang membawa lada dari Sumatera Utara. Ia tidak menjadi bagian dari pedagang elit di daerah Salem sejak awal, namun melalui Jonathan Peele, pamannya, ia mendapat koneksi khusus sebagai pemilik kapal yang cukup kaya

(Schaffer 2013: 229).

Keberhasilan pertama Kapten Carnes dalam usaha pengiriman kargo lada Sumatera ke Salem terjadi pada 1797. Ia berhasil menyembunyikan keuntungan besar itusetidaknya sampai satu pengiriman kargo lagi, dan akhirnya para pemilik kapal laut dan pengusaha di Amerika yang iriberkompetisi memperebutkan keuntungan dari lada Sumatera. Bandar laut yang menjadi tujuan mereka adalah Bandar Qualah Batoos (sekarang Kuala Batee), yang pada masa kini terletak di Provinsi Aceh. Antara 1799 hingga 1846, sekitar 179 kapal berlayar antara Salem dan Sumatera. Beberapa kapal lain berlabuh ke bandar lain di luar Salem. Akan tetapi, data statistik menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah kargo lada tersebut kemudian dikirim lagi untuk memenuhi pasar Eropa, selain memenuhi permintaan di Amerika.

Sumber lain menyebutkan bahwa pada 1684, Elihu Yale, orang asli Boston yang bekerja untuk perusahaan di Madras, mengirim dua karyawannya Ralph Ord dan William Cawley ke Aceh untuk menjalankan perdagangan lada (Schaffer 2013: 149). Mereka berdua berusaha meminta perlindungan kepada Kerajaan Aceh untuk menjalankan perdagangan lada dari “gangguan” pasukan Belanda. Muatan lada terakhir memasuki Salem, Massachusetts, dari Sumatera pada 6 November 1846, diangkut oleh kapal “Lucilla”. Di antara tahun 1797 dan 1846, wilayah Salem mengambil keuntungan besar dari perdagangan lada Sumatera terutama dari faktor penjualan dan pajak. Sebagian besar dari lada yang diekspor dari

Sumatera itu kemudian dikirim kembali melalui jalur laut ke bandar-bandar pelabuhan dagang di Eropa seperti Stockholm, Gothenburg, Hamburg, Copenhagen, dan Antwerp. Sementara itu di Amerika sendiri, lada Sumatera diperjualbelikan di Philadelphia, Boston, dan Baltimore untuk kepentingan redistribusi. Pengangkutan terbesar dari Sumatera yang tercatat dalam sejarah kegiatan dagang itu adalah kapal "Eliza," kapal dagang yang mengangkut 512 ton lada pada 1806. Pada masa puncak kejayaan perdagangan lada, dewan kota Salem sempat menginisiasi pembuatan segel logo kota. Di dalam logo itu bisa ditemukan unsur tertentu yang mirip dengan suasana di Hindia Timur, wilayah penghasil lada.

Di sisi lain, pada pergantian abad ke-19, ratusan ton lada diproduksi di Sumateradan dikirim ke Eropa dan Cina. Dari Minangkabau di Sumatra Barat, sampai batas timur Jambi, Aceh di utara, dan Palembang di selatan, distribusi ladamelibatkan hampir seluruh wilayah Pulau Sumatera. Produksi yang masif itu terutama disebabkan oleh penggunaan lada yang berperan ganda yaitu sebagai kebutuhan pokok dalam obat-obatan, maupun kebutuhan tambahan seperti bumbu penyedap masakan (Nair 2011: 35). Lada telah secara langsung membuka babak baru dalam sejarah perdagangan wilayah itu. Pada masa itu, tercatat 967 kapal Amerika mendarangi pulau Sumatera (Schaffer 2013: 227).

Kejayaan ekonomi itu baru mencapai puncak pada 1846, ketika produksi berlebih justru menurunkan nilai ekonomisnya. Sejak 1829, karena harga lada di

pasaran internasional merosot, jumlah kapal Amerika yang datang ke pelabuhan Aceh mulai menurun. Kemudian pada 1861, keuntungan dari kegiatan dagang itu benar-benar habis menyusul perang sipil pada 1861. Selain itu, intrik perdagangan juga menyebabkan retaknya hubungan dagang Salem-Sumatera. Menurut berbagai sumber sejarah Eropa dan Amerika, jalur laut menuju Sumatera merupakan jalur yang penuh risiko. Bajak laut menguasai wilayah laut secara ilegal. Mereka melawan otoritas Belanda di daerah itu dan melakukan perampokan atas semua kapal asing yang melintas. Akan tetapi banyaknya jumlah kapal Amerika yang melakukan perdagangan di wilayah itu menunjukkan bahwa risiko itu terus diambil atas dorongan meraih keuntungan yang besar. Pada masa itu, perdagangan tekstil hampir merupakan perdagangan yang tidak mungkin mereka lakukan dengan besar, mengingat basis kekuatan imperialism Inggris berpusat di India, dan tekstil telah menjadi komoditas andalan mereka yang memberikan kekuasaan besar di hampir seluruh dunia.

PENUTUP

Perdagangan lada Aceh ke Salem merupakan cuplikan singkat dari narasi sejarah ekonomi global. Walaupun berlangsung singkat, perdagangan itu merupakan bukti bahwa hubungan antara Kepulauan Nusantara dengan Benua Amerika, khususnya dalam bidang ekonomi telah menjadi tonggak awal era globalisasi ekonomi modern. Imperialisme Eropa menjadi faktor yang

memungkinkan kontak antara dua pihak pedagang, yakni pedagang lokal di Aceh dan pelaut-pedagang Salem, di Massachusetts, Amerika. Akan tetapi, imperialisme itu juga yang memutar-balik arah perdagangan rempah-rempah dari sebuah komoditas paling penting dan berharga di dunia, menjadi komoditas kelas dua, dikalahkan oleh tekstil. Dalam hal ini, imperialisme Inggris punya tanggung jawab paling besar.

Fenomena perdagangan lada itu juga memperlihatkan bahwa pada abad ke-18, para pedagang lokal di Sumatera memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh pedagang asing sebagai syarat untuk melakukan perdagangan di wilayah utara Sumatera. Keberhasilan pedagang Amerika melakukan kontak langsung tanpa melalui perantara Belanda ataupun Inggris hanya merupakan awal dari proses panjang yang masih harus dilalui untuk berdagang di Aceh. Seperti para pedagang Inggris, mereka harus bekerjasama dengan agen-agen lokal yang berfungsi menyelaraskan kegiatan dagang mereka dengan sistem perdagangan lokal yang berjalan. Ini berarti, walaupun rentan akan intrik serta peperangan fisik, pedagang lokal di Aceh memiliki wibawa dan nilai jual yang harus dihormati oleh pedagang asing. Namun, di sisi lain, pungutan dan upeti yang diberlakukan sejak zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda justru membuka ruang besar untuk intrik-intrik dalam bentuk awal korupsi, sebuah kegiatan ekonomi ilegal yang pada 1799 membuat VOC bangkrut.

DAFTAR ACUAN

- Blanning, T. (2008), *The Pursuit of Glory: Europe 1648–1815*. London: Penguin Books.
- Boxer, C.R. (1969), *The Portuguese Seaborne Empire 1415–1825*. London: Alfred Knopf.
- (1983), *Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602–1799* (terj. Bakri Siregar). Jakarta: Sinar Harapan.
- (1988), *The Dutch Seaborne Empire 1600–1800*. London: Pelican Books.
- Braudel, F. (1995), *A History of Civilizations*. New York: Penguin Books.
- Ferguson, N. (2007), *Empire: How Britain Made the Modern World*. London: Penguin Books.
- Lapian, A. B. (2008), *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*. Depok: Komunitas Bambu, 2008.
- Lieberman, V. (2009), *Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c 800–1830*, Vol. 2, Mainland Mirrors: Europe, Japan, China, South Asia, and the Islands. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lombard, D. (1967), *Le Sultanat d'Atjeh au temps d'Iskandar Muda 1607–1636*. Paris: École Française d'Extrême Orient, 1967.
- Nair, K.P. P. (2011), *Agronomy and Economy of Black Pepper and Cardamom: The King and Queen of Spices*. London: Elsevier.
- Schaffer, M. (2013), *Pepper: A History of the World's Most Influential Spice*. New York: Thomas Dunne Books, 2013.
- Tarling, N. (2001), *South East Asia: A Modern History*. Melbourne: Oxford University Press, 2001.
- Turner, J. (2004), *Spice: The History of a Temptation*. New York: Alfred Knopf.
- Wasserman, H. (1972), *Harvey Wasserman's History of the United States*. New York: Perennial Library.

Memoar Ince Abdul Wahab Daeng Masikki

Keturunan Melayu-Makassar di Bandar Pelabuhan

Makassar

1876–1910

Amrullah Amir

Pengajar, Universitas Hasanuddin

Abstract

The role and activities of Makassar Malays in the Dutch colonial bureaucracy in the late nineteenth- and early twentieth-century South Sulawesi have never been published by any historian, might be for want of a source. However, a memoir of Ince Abdul Wahab Daeng Masikki might well be filling in the gap. The memoir tells about his experiences as a teacher, Malays captain, as well as a public prosecutor in the Dutch colonial bureaucracy. This writing seeks to present and assess the role of the Makassar-Malays in the Dutch colonial bureaucracy in the late nineteenth- and early twentieth-century South Sulawesi.

Keywords: *Makassar-Malays, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki, Dutch colonial bureaucracy, South Sulawesi*

Keturunan Melayu-Makassar adalah anak keturunan Melayu yang bermukim di wilayah Makassar, terutama di wilayah yang berhadapan dengan Selat Makassar sepanjang wilayah selatan hingga barat daya yang berbatasan dengan wilayah pemukiman suku Bugis. Pemukiman tersebut antara lain berada

di wilayah Kerajaan Sandrabone, Kerajaan Gowa dan Tallo, Kerajaan Siang, termasuk wilayah Pangkajene dan Tanete (wilayah ini merupakan permukiman suku Bugis namun merupakan taklukan Kerajaan Gowa sekitar abad ke-16). Para pendatang Melayu yang mula-mula bermukim di wilayah kerajaan tersebut

berperan sebagai pedagang dan juga sebagai ulama. Mereka ditandai dengan gelaran 'datuk', 'tuan', dan 'ince'¹ atau 'encik' didepan nama mereka. Mereka berasal dari bagian barat Nusantara terutama dari Sumatera dan negeri-negeri Semenanjung seperti Minangkabau, Patani, Johor, Melaka, Pahang, dan Campa (Cummings 2007: 33; 67-9).

Berkat peran mereka mengembangkan perdagangan dan menurunkan berbagai keterampilan seperti dalam pelayaran, pertukangan, pandai besi, pembuatan senjata, perkapalan dan juga usaha menyebarkan Islam di kalangan raja, bangsawan, dan rakyat di wilayah tersebut sepanjang abad ke-16/17 telah membuat orang-orang Melayu masuk menjadi bagian dari kelompok masyarakat terhormat dalam tingkatan sosial di Sulawesi Selatan. Lantaran prestasi sosial dan pengetahuan serta keterampilan yang mereka miliki, atau melalui perkawinan, beberapa di antara mereka dapat menyandang gelar 'daeng' pada namanya. Dalam kronik Kerajaan Gowa disebutkan bahwa antara abad ke-16-17 terdapat sejumlah orang Melayu menjadi bagian dari birokrasi Kerajaan Gowa baik sebagai syahbandar, pembesar istana, juru tulis, ulama, kadi maupun dalam ketentaraan (Cummings 2007: 67-9; 75).

Sumber Melayu dan *lontarak* menyebutkan beberapa tokoh Melayu

¹Dalam arsip/dokumen asli, sebutan ini ditulis *intje*. Mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, dalam artikel ini ditulis *ince*, kecuali ejaan nama diri yang tetap dipertahankan sesuai dengan aslinya; sehingga Intje Tjalla Daeng Mabate, misalnya, ditulis Ince Tjalla Daeng Mabate.

yang menjadi moyang keturunan Melayu-Makassar diantaranya adalah Datuk Makotta dari Minangkabau dan Datuk Leang asal Patani yang bermukim di wilayah Sandrabone sekitar 1600. Keduanya dikenali sebagai tokoh bangsawan Melayu dan penyiar Islam di wilayah tersebut dan memiliki pengaruh dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Demikian pula dengan Datuk Panlautia, seorang pedagang peranakan Melayu-Cina² yang juga menetap di Sandrabone, kemungkinan sekitar abad ke-17. Tokoh itu kawin dengan seorang putri bangsawan Makassar dan keturunannya menjadi bagian dari keluarga terhormat di Makassar. Terdapat pula nama Datuk Maharaja Lela, seorang pengungsi politik dan keturunan bangsawan tinggi kerajaan Patani yang meninggalkan negerinya dan kemudian diterima bermukim di Kaluku Bodoa wilayah Kerajaan Tallo sekutu Gowa sekitar 1632 (Cummings 1998: 115; *Adatrechtbundel* XXXI 1929: 110; Cense 1978: 425-6; Sutherland 2001: 400). Tokoh tersebut diangkat sebagai *punggawa* atau pemimpin masyarakat Melayu di Makassar dan merupakan salah satu pejuang utama dalam Perang Makassar melawan VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) dan sekutu Bugis-nya hingga kejatuhan Gowa pada 1669 (Skinner [ed.] 2008).

Setelah kejatuhan Makassar oleh VOC, orang-orang Melayu yang menjadi sekutu Gowa meninggalkan Makassar karena takut akan pembalasan, terutama

²Mengikuti sumber primer yang digunakan, dalam tulisan ini sebutan *Cina* dipertahankan, alih-alih *Tionghoa*.

dari orang-orang Bugis yang menjadi sekutu utama VOC. Namun, melihat peran penting para pedagang Melayu, kuasa VOC di Makassar, yaitu Cornelis Janzsoon Spelman, membujuk mereka kembali dan memberi jaminan keamanan dan keselamatan kepada mereka. Mereka yang bersedia kembali diberi lokasi permukiman di sebelah utara benteng Ujung Pandang—disebut Fort Rotterdam ketika VOC berkuasa—di bekas hutan Bulekang dan kemudian disebut Kampung Melayu Bandar Makassar (Abdurrahim 1953: 147–8; lihat juga Sutherland 2001: 403).

VOC kemudian mengangkat seorang pemimpin untuk mengatur komunitasnya yang bertanggung jawab kepada kongsi dagang itu. Pemukim Melayu di Kampung Melayu dipimpin oleh seorang Kapitan Melayu seperti halnya komunitas lain di bandar Makassar yang dipimpin oleh kapitan atau ketua masing-masing—komunitas Cina di bawah Kapitan Cina, komunitas Arab di bawah Kapitan Arab, atau orang-orang Wajo dipimpin oleh seorang *matoa*. Kapitan Melayu pertama yang dilantik oleh VOC pada 1705 bernama Ince Cukka Abdulrasoel. Dalam perkembangan selanjutnya tugas Kapitan Melayu dibantu oleh seorang Letnan Melayu yang diangkat pada 1751 untuk menyokong tugas Kapitan Melayu ke-7 Ince Bungsu (1750–52). Letnan Melayu pertama tersebut bernama Ince Morsideng atau Ince Mursidin.³

³Sumber arsip VOC (29 Mei 1705) melaporkan kematian Kapitan Abdul Nazul dan komunitas Melayu meminta agar diangkat

Salah satu keluarga Melayu-Makassar yang mendominasi jabatan Kapitan Melayu dan berbagai jabatan lain dalam masyarakat Melayu—seperti Letnan dan Imam—sepanjang separuh abad ke-18 hingga awal abad ke-20 di bandar Makassar adalah keluarga Ince Ali Asdullah. Ince Ali Asdullah sendiri adalah syahbandar Makassar antara 1776–89 dan merupakan salah seorang tokoh terhormat dan orang kaya di bandar pelabuhan Makassar. Perkawinannya dengan Putri Ratna Kasian anak Kapitan Melayu ke-3 Ince Bendak pada 1739 telah menyatukan tiga keluarga utama Melayu-Makassar yaitu keluarga Datuk Maharaja Lela, Datuk Panlautia, dan Datuk Sabutung. Ince Ali Asdullah sendiri adalah anak laki-laki dari Ince Abdurrahman Datuk Sabutung sedangkan istrinya adalah keturunan dari kekerabatan melalui perkawinan dari keturunan keluarga Datuk Panlautia dari Sandrabone dan keturunan Datuk Maharaja Lela.

Sumber-sumber VOC, Inggris, kolonial Belanda, *Iontarak*, dan naskah keluarga Melayu-Makassar, memperlihatkan dominasi anak keturunan Ince Ali Asdullah dalam berbagai jabatan

kapitan yang baru yaitu Ince Cukka (dikutip oleh Sutherland 2001: 407). Sementara sumber lain yang berasal dari naskah Wajo menerangkan tentang perjanjian antara Matoa Wajo Amanna Gappa, Kapitan Cina I Wakko, dan Kapitan Melayu Ince Cukka pada Februari 1698 (dalam Noorduyn 2000: 481); sedangkan sumber dari naskah Kerukunan Keluarga Indonesia Keturunan Melayu menerangkan bahwa Ince Cukka diangkat menjadi Kapitan Melayu pada 28 Mei 1706 atau Kamis, 13 Muharram 1117 H (lihat KKIKM1987: 5).

dalam masyarakat Melayu dan berperan membantu VOC hingga serikat dagang itu bangkrut pada 1799. Keluarga itu pun tetap memainkan peranannya pada masa kekuasaan Inggris di Sulawesi Selatan pada 1811–16 (Amir 2015). Adapun Ince Abdul Wahab Daeng Masikki merupakan generasi keempat keturunan Ince Ali Asdullah dan seperti halnya dengan pendahulu dan kerabatnya, Intje Abdul Wahab Daeng Masikki sendiri menjadi bagian dari birokrasi kolonial Belanda dan pernah bertugas sebagai guru, wakil jaksa, jaksa, dan sempat menjabat sebagai Kapitan Melayu ke-15 pada 1906. Memoarnya yang dipublikasikan dalam surat kabar *Pemberita Makassar* (1914) merupakan sumber penting untuk melihat dan mengetahui kehidupan masyarakat Melayu-Makassar di bandar pelabuhan Makassar pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

KETURUNAN MELAYU-MAKASSAR DALAM BIROKRASI KOLONIAL

Masuknya keturunan Melayu-Makassar dalam birokrasi kolonial Belanda di Sulawesi-Selatan tidak lepas dari dinamika sosial politik di wilayah itu sekitar pertengahan abad ke-19. Setidaknya terdapat tiga aspek yang melatarbelakangi masuknya keturunan Melayu-Makassar dalam birokrasi kolonial Belanda di Sulawesi Selatan. Pertama, masuknya anak keturunan Melayu-Makassar yang berkarier dalam pemerintahan kolonial Belandanya tidak terlepas dari usaha mereka untuk keluar dari kesulitan ekonomi yang mendera wila-

yah tersebut akibat kebijakan perdagangan Belanda yang menyulitkan usaha perdagangan pribumi. Pajak perdagangan yang tinggi, larangan perdagangan senjata (sebagai alat pertahanan diri dari perompak dan bajak laut), serta monopoli Belanda atas komoditi yang berharga tinggi di pasaran merupakan faktor-faktor yang melemahkan perdagangan di Makassar yang ramai dijalani oleh keturunan Melayu (Poelinggomang 2002: 205–6). Keadaan itu diperparah oleh musibah kebakaran besar yang melanda Kampung Melayu Makassar pada 1874 yang memusnahkan sekitar 300 rumah sehingga keluarga Melayu-Makassar yang sebelumnya hidup makmur menjadi jatuh miskin.⁴ Selain itu, semakin berkurangnya sumber barang dagangan—seperti rumput laut, di wilayah pulau-pulau di pesisir Selat Makassar yang menjadi satu mata dagangan utama pedagang Melayu-Makassar—menyebabkan berkurangnya minat keturunan Melayu-Makassar dalam meneruskan usaha di bidang perdagangan dan pelayaran dan berputar haluan menjadi birokrat atau menjadi guru yang memberikan peluang karier yang baik dan kedudukan sosial dalam masyarakat kolonial.

Aspek kedua adalah perkembangan pendidikan modern di Makassar terutama sekitar pertengahan abad ke-19 yang didasari oleh kebijakan Politik Etis

⁴Dikisahkan oleh Ince Abdul Wahab Daeng Masikki dalam memoarnya yang diterbitkan dalam *Pemberita Makassar*, 23 April 1914; lihat uraian lebih lanjut tentang *Pemberita Makassar* dan memoar Ince Abdul Wahab Daeng Masikki dalam tulisan ini.

pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Sebenarnya, pendidikan zaman kolonial bertujuan mendidik calon pegawai pribumi untuk mendukung jalannya pemerintahan Belanda. Dalam Memoir Ince Abdul Wahab Daeng Masikki disebutkan bahwa pendidikan modern telah berjalan di Kampung Melayu di bandar Makassar dengan berdirinya Sekolah Melayu. Para siswa di sekolah tersebut selain mendapatkan pendidikan Islam juga belajar bahasa Belanda dan aksara latin, *lontarak* dan Arab (*Pemberita Makassar*, 23 April 1914). Pada 1876, B.F. Matthes, seorang sarjana dan pendeta dari Negeri Belanda, merintis pembukaan *Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzer* atau Sekolah Guru untuk pribumi untuk mempersiapkan tenaga guru dan tenaga administrasi dalam birokrasi kolonial. Mereka yang terdaftar adalah anak-anak dari keturunan keluarga bangsawan dan dari kalangan terhormat di Sulawesi Selatan. Sejumlah keturunan Melayu-Makassar tercatat sebagai siswa di sekolah tersebut yaitu Ince Abdul Wahab Daeng Masikki yang terdaftar sebagai murid pada 1879 bersama lima orang kawannya dari Sekolah Melayu. Dua orang saudara kandungnya bernama Ince Benda dan Ince Pamase telah lebih dulu diterima di Sekolah Guru tersebut (*Pemberita Makassar*, 25 April 1914).

Terakhir, aspek ketiga, yang memungkinkan keturunan Melayu-Makassar masuk kedalam birokrasi kolonial Belanda tidak terlepas dari situasi dan perkembangan pemerintahan di Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19. Gubernur Johannis Antonius Bakkers

(1846–76) menyatakan bahwa para pegawai pemerintahan (*Binnenlandsch Bestuur*) tidak cukup hanya memahami teori pemerintahan belaka tetapi harus memiliki ilmu pengetahuan tentang masyarakat pribumi dan wilayah pemerintahannya serta dapat berkomunikasi dengan bahasa masyarakat setempat. Pada mulanya kebijakan tersebut dijalankan dengan memberi kesempatan kepada keturunan Eropa yang berstatus warga merdeka dan bukan bagian dari pemerintahan Belanda. Di Sulawesi Selatan, keluarga Mesman, Brugman, Voll, dan Trouerbach merupakan keluarga keturunan Eropa yang telah berdiam di wilayah itu sejak masa VOC pada abad ke-18. Selain sebagai warga merdeka dan menjadipedagang, agen perniagaan atau pemilik kapal, terdapat beberapa anggota dari keluarga tersebut berperan dalam pemerintahan antara lain sebagai juru bahasa dalam pelbagai ekspedisi militer Belanda di Sulawesi Selatan (Bosma dan Raben 2008: 1500–1920).

Selain dari keluarga-keluarga tersebut, pegawai pemerintahan juga didatangkan dari Negeri Belanda dan merupakan tamatan 'Koninklijke Akademie tot Opleiding van Burgerlijke Ingenieurs, zoo voor 's Lands Dienst als voor de Nijverheid en van Kweekelingen voor de Handel' yang didirikan pada 1846 atas perintah Raja Belanda untuk mengisi pekerjaan pemerintahan di Hindia-Belanda. Mula-mula mereka bertugas sebagai *Aspirant Controleur* dalam membantu jabatan *Controleur* yang mengepalai pemerintahan terendah dalam pemerintahan kolonial di Hindia

Belanda yang disebut *onderafdeeling* (Warmenhoven 2001: 12–3). Biasanya mereka dibantu oleh pegawai pribumi yang berpendidikan dan mampu berbahasa Melayu dan bahasa setempat. Peran ini biasanya diisi oleh orang-orang keturunan Melayu-Makassar. Selain pertimbangan faktor pendidikan, mereka juga berasal dari keluarga-keluarga yang telah menjadi sekutu atau penyokong kekuasaan Belanda di Sulawesi Selatan. Adapun keturunan bangsawan setempat tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan Belanda karena mereka dipandang rendah oleh bangsawan lainnya dan juga rakyatnya sehingga kesempatan ini diambil oleh keturunan Melayu-Makassar yang melihat peluang membangun karier mereka dalam pemerintahan.

Hingga 1880-an, jabatan yang dipegang oleh keturunan Melayu-Makassar di pemerintahan kolonial Sulawesi hanyalah pada jabatan tradisional mereka sejak masa VOC yaitu sebagai Kapitan Melayu, Letnan Melayu, dan *Karaeng* atau kepala wilayah adat karena mewarisi keturunan bangsawan dari perkawinan orangtuanya. Para *karaeng* itu merupakan anak keturunan campuran dari bapak keturunan bangsawan setempat dan ibu dari keturunan Melayu. Kapitan Melayu, misalnya, adalah Ince Abdul Husain (Abdullah Husain) sebagai Kapitan Melayu ke-12 (1839–80) dan Damang yang tercatat sebagai Letnan Melayu. Sementara itu, *karaeng* keturunan Melayu-Makassar yang berasal dari garis patrilineal atau dari garis ayah keturunan bangsawan Bugis—yang merupakan pemimpin wilayah adat di

Daerah Utara (*Afdeling Noorder-Distrikten*)—adalah I Pappé Daeng Masiki yang menjadi *Karaeng* di wilayah Pangkajene (dilantik pada 4 Agustus 1857), La Wewang Daeng Pasampa menjabat *Karaeng* ri Lau (dilantik pada 19 November 1855), dan Pallawa Rukka Daeng Malawa sebagai *Karaeng* Mandalle sejak 1861.⁵ Ketiga *karaeng* tersebut merupakan anak dari pasangan La Mattotorangpage' I Ali Abdul Wahab Daeng Mamangung.

Adapun La Mattotorangpage' I Ali Abdul Wahab Daeng Mamangung adalah anak dari pasangan bangsawan Bugis La Mauraga Daeng Malliunggang Sultan Adam Datu Mario ri Wawo dengan seorang perempuan keturunan Melayu-Makassar bernama Putri Johor Manikam anak dari Ince Ali Asdullah. La Mauraga merupakan putra La Mappa Sunra Arung Lamuru dan We Penangngareng Arung Pao-Pao (Tanete). We Penangngareng sendiri adalah anak perempuan We Tenrileleang Pajung ri Luwu (Raja Luwu) dan Datu di Tanete dari perkawinannya dengan La Mallarangngeng Datu Lompulle Datu Mario ri Wawo. Beberapa tahun kemudian, sejumlah keturunan Melayu-Makassar mulai masuk menjadi pejabat Jaksa atau Asisten Jaksa dalam pengadilan negeri atau *landraad* di berbagai wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan. Tercatat nama Ince Abdoel Rachman Intje Benda sebagai jaksa di Balangnipa yang dilantik pada Mei

⁵Lihat daftar dalam *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië; Tweede Gedelte, Kalender en Personalia 1880* (250–1).

1886, Ince Moehammad Alie Ince Mannoeang sebagai jaksa di Maros sejak 1888 dan Ince Tjalla Daeng Mabate yang menjabat jaksa di Allu sejak Juli 1888.

“PEMBERITA MAKASSAR” DAN MEMOAR INCE ABDUL WAHAB DAENG MASIKKI

Surat kabar *Pemberita Makassar* merupakan koran berbahasa Melayu yang terbit di kota Makassar selama 39 tahun (1903–42), dan koran berbahasa Melayu kedua di Makassar setelah penerbitan surat kabar *Mata-Hari* yang berumur relatif pendek (1882–83). Adapun surat kabar pertama di kota Makassar adalah koran berbahasa Belanda *Macassarch Weekblad* yang terbit pertama kali pada Januari 1861 (Wiryawan 2013: 49–82). *Pemberita Makassar* diterbitkan oleh NV Handelsdrukkerij en Kantorhandel Celebes pada 1903 dan sahamnya dimiliki oleh campuran beberapa orang pemodal, yaitu empat orang Belanda, seorang Ambon, 17 orang Cina, dan seorang Makassar. Disebutkan bahwa pemilik saham tersebut adalah para pedagang elite di bandar Makassar. Surat kabar itu tidak hanya memuat tulisan wartawannya, namun juga memuat iklan pedagang, laporan pembaca, dan juga berita-berita perkumpulan. Ketika memoar Ince Abdul Wahab Daeng Masikki dimuat dalam *Pemberita Makassar* pada 1914, nama direktornya adalah W.C. van Wijk dan redaktornya bernama Th. Dias. Adapun kantor koran beralamat di Passerstraat (Jalan Pasar); terbit setiap Senin hingga Sabtu, kecuali jatuh pada hari raya dan hari Minggu.

Harga berlangganan surat kabar itu, sebesar 3 gulden, harus dibayarkan untuk 6 bulan ke depan untuk wilayah kota Makassar, sedangkan diluar kota dikenakan bayaran 3,50 gulden untuk jangka waktu yang sama. Disebutkan pula terdapat agen di Negeri Belanda yaitu J.H. de Bussy di Amsterdam (Wiryawan 2013: 171–2). Daya tahan koran itu hingga 39 tahun menandakan bahwa masyarakat di kota Makassar memiliki kemampuan membaca dan menulis yang telah berkembang dan menjadi penyokong keberadaan surat-surat kabar setempat.

Memoar Ince Abdul Wahab Daeng Masikki dimuat secara berseri hampir setiap hari pada halaman pertama *Pemberita Makassar* sejak April hingga Juli 1914. Seri pertama memoar tidak ditemukan; dimulai dari Seri 2 bertanggal 23 April 1914. Demikian pula Seri 20 tidak ditemukan dan diteruskan oleh Seri 21 bertanggal 22 Mei 1914 melanjutkan Seri 19 bertanggal 19 Mei 1914. Terdapat nomor ganda Seri 24 dengan tanggal yang berbeda yaitu 30 Mei 1914 dan 2 Juni 1914, sedangkan isinya saling melanjutkan sehingga pemberian nomor seri yang berulang itu merupakan kekhilafan. Seterusnya Seri 31 tidak ditemukan dan berlanjut Seri 32 bertanggal 12 Juni 1914; demikian juga dengan Seri 42 dan 43 tidak ditemukan lagi dan diteruskan dengan Seri 44 pada 7 Juli 1914 melanjutkan Seri 41 bertanggal 3 Juli 1914. Memoir Ince Abdul Wahab Daeng Masikki berakhir pada Seri 45 pada 8 Juli 1914 dan tidak ditemukan lagi kelanjutannya. Namun, mengikuti penerbitan hari-hari selan-

jutnya, kemungkinan besar tidak banyak lagi seri yang tersisa atau menurut perkiraan memoar itu mungkin berakhir pada Seri 46 (yang tidak ditemukan edisinya) berdasarkan isi memoar dan lanjutan dari penerbitan *Pemberita Makassar*. Secara keseluruhan terdapat 40 seri memoar Ince Abdul Wahab Daeng Masikki secara bersambung yang dapat ditemukan pada surat kabar tersebut sepanjang April hingga Juli 1914.

Menurut silsilah keluarga Ince Ali Asdullah, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki adalah anak keturunan Melayu-Makassar dari pasangan Ismail Bapa yang kawin dengan sepupunya yang bernama Putri Nila Kandi. Adapun bapak dari Ince Ismail bernama Abdul Rahman Datuk Kadhi dan ayah dari Putri Nila Kandi adalah Ince Abdullah Husain, Kapitan Melayu ke-12 (1839), dan keduanya merupakan saudara kandung anak dari Ince Ismail. Akan halnya Ince Ismail merupakan anak laki-laki dari Ince Ali Asdullah.⁶ Dari keturunan tersebut, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki mewarisi darah kalangan terhormat dalam masyarakat Sulawesi Selatan karena itulah dirinya boleh menyandang gelar 'daeng' pada namanya. Seri 2 memoarnya dibuka dengan kalimat, ". . . maka *Regent* itu berkata: terima sahaja namaku, kamu bergelar Daeng Masikki, menjadi kebencianku konon jika kalau orang tiada menyebut nama Daeng Masikki

(angkuk hamba!) maka tetaplah nama hamba Daeng Masikki terlindunglah nama-nama yang lain yang sudah lalu sebutnya" (*Pemberita Makassar*, 23 April 1914; Seri 4 Memoar; kutipan langsung dengan EYD).

Dalam budaya Sulawesi Selatan, gelar 'daeng' bermakna bahwa pemakainya merupakan golongan *tubaji* atau orang terhormat dalam masyarakat. Golongan orang terhormat memiliki dua nama, yaitu nama diri dan nama 'daeng'-nya (*padaengngang*). Ince Abdul Wahab Daeng Masikki menggunakan gelar 'Daeng Masikki' yang bermakna "yang mengapit, mengayomi." Gelar ini, menurutnya, diberikan oleh *regent* atau kepala suatu wilayah adat (masyarakat setempat menyebut mereka *karaeng* atau *arung*). Kemungkinan *regent* tersebut berasal dari Pangkajene yang banyak terdapat keturunan bangsawan Bugis-Makassar-Melayu yang dilantik oleh pemerintah kolonial sebagai *regent* dan sebagian besar masih berkerabat dengan keluarga Melayu-Makassar di Kampung Melayu bandar pelabuhan Makassar. Disebutkan, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki kawin dengan seorang perempuan keturunan Melayu-Makassar bernama Putri Djohra Manikam, anak dari Daeng Paboeang yang masih berkerabat dengan keluarganya dan dari pihak disebelahnya masih berkerabat dekat dengan raja Gowa Abdul Husain Karaeng Lembang Parang. Mereka kawin pada November 1885 dan hubungan itu memperlihatkan bahwa keturunan Melayu-Makassar memiliki tingkatan yang tinggi dan terhormat dalam tingkatan sosial masyarakat Sulawesi

⁶Lihat silsilah keturunan Ince Djamilah Daeng Bombe dalam KIKM (1987: 70).

Selatan (*Pemberita Makassar*, 27 April 1914; Seri 5 Memoar).

INCE ABDUL WAHAB DAENG MASIKKI SEBAGAI GURU

Pada 1879, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki menjadi siswa *Kweekschool* setelah melewati ujian seleksi yang dilakukan oleh B.F. Matthes. Bersama empat orang kawannya di Sekolah Melayu, yaitu Daoed, Haroena, Noeroeddin, dan seorang lagi yang juga bernama Abdul Wahab, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki dinyatakan lulus pada 1884 setelah diuji oleh R. M. Ismangoen Dano Winoto. Para siswa yang dinyatakan lulus di Sekolah Guru tersebut mendapat uang belanja makan dan pakaian sebesar 12 gulden setiap bulan dan termasuk kamar dengan fasilitas tempat tidur, meja, kursi, lampu, dan lemari. Setelah mereka mencapai pangkat keempat, mereka mendapatkan tambahan uang belanja menjadi 15 gulden dan dilantik menjadi guru bantu di Sekolah Externen, yaitu sekolah rendah yang berhubungan dengan Sekolah Guru tersebut. Mereka memperoleh ijazah Diploma dan boleh menjadi guru di sekolah-sekolah pribumi di wilayah Sulawesi Selatan (*Pemberita Makassar*, 25 April 1914; Seri 4 Memoar).

Kesempatan menjadi guru di sekolah pribumi di Maros terbuka bagi Ince Abdul Wahab Daeng Masikki setelah Ince Moehammad Thahir dipindahkan sebagai guru bahasa Makassar di Sekolah Guru, dan ia ditunjuk untuk menggantikannya dengan gaji sebesar 50

gulden. Namun, Ince Abdul Wahab Daeng Masikkimelepas peluang tersebut karena orang tuanya tidak mengizinkan-nya mengajar di Maros. Rekannya yang bernama Lambo kemudian dilantik menjadi guru di sana. Sementara itu, ketika kemudian Ince Abdul Wahab Daeng Masikki menjadi guru bantu di Sekolah Nomor 1 di Makassar, ia hanya mendapat gaji sebesar 20 gulden. Ia menyesali keadaan pada waktu itu. Apalagi pada 1885 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai gaji guru, dari 50 gulden per bulan sebagai gaji permulaan seorang kepala guru yang baru dilantik menjadi 40 gulden per bulan. Namun, ketika pekerjaan menjadi guru terbuka di Bima pada Januari 1886, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki mengambil tawaran tersebut.

Pada 25 Januari 1886, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki berangkat ke Bima bersama istri dan kerabatnya dengan menumpang kapal *Maatschappij Sumbawa* yang menempuh perjalanan satu hari satu malam dari Pelabuhan Makassar. Berhubung terjadikerusakan pada kapal, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki baru tiba pada 28 Januari 1886. Dua hari kemudian, 30 Januari, sekolah dibuka, dihadiri 28 murid yang mendaftar, terdiri atas anak Melayu, Arab, Cina, dan Belanda (*Pemberita Makassar*, 27 April 1914; Seri 5 Memoar). Selanjutnya, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki berkisah tentang kesulitannya yang tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa Bima sedangkan kebanyakan muridnya menggunakan bahasa negeri tersebut. Selain itu, tidak

banyak murid yang mau masuk sekolah karena dirinya dianggap bukan orang Islam sehingga mendapat julukan 'Guru Belanda'. Keadaan itu membuat Ince Abdul Wahab Daeng Masikki sering mengunjungi masjid, surau, dan orang-orang alim untuk mengenalkan pengajarannya sehingga terbukalah hati orang setempat menyekolahkan anaknya. Empat setengah tahun Ince Abdul Wahab Daeng Masikki mengajar di Bima dan setelah itu ia kembali ke Makassar berhubung dilantik sebagai kepala guru di Sekolah Nomor 1 di Kampung Melayu menggantikan La Mangewa Daeng Pasaoe. Adapun pengganti dirinya di Bima adalah Siradjoeddin bin Hadji Oemar (*Pemberita Makassar*, 28 April 1914; Seri 6 Memoar).

Sekitar satu tahun dan empat bulan Ince Abdul Wahab Daeng Masikki mengajar di Sekolah Nomor 1, ia kemudian dilantik menjadi guru bahasa Melayu di *Kweekschool*. Pada 1 April 1892, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki memulai pekerjaannya sebagai guru bersama H.W. Bosman sebagai kepala guru, A.C. Cramer, Ince Ibrahim sebagai guru bahasa Bugis, dan Ince Moehammad Thahir sebagai pengajar bahasa Makassar dengan jumlah murid sebanyak 25 orang. Malangnya, setelah mengajar sekitar dua setengah tahun sekolah itu ditutup oleh pemerintah kolonial pada 1895 (*Pemberita Makassar*, 1 Mei 1914; Seri 7 Memoar). Sekolah pengganti *Kweekschool*, yaitu *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren* atau Sekolah untuk Pangreh Praja Pribumi, baru dibuka pada 1910 (Sarkawi 1997: 109).

Sebagaimana dikisahkan oleh Ince Abdul Wahab Daeng Masikki, penutupan sekolah tersebut merupakan awal dari masa-masa sulit dalam beberapa tahun kehidupannya. Sejak Maret 1895, dirinya tidak lagi mendapatkan gaji sehingga memutuskan membawa keluarganya menumpang di rumah saudaranya perempuannya yang bernama Nila Kasoemah karena dirinya tidak lagi memiliki uang untuk membayar sewa rumah. Ince Abdul Wahab Daeng Masikki kemudian melelang perkakas rumahnya sehingga terkumpul uang sebanyak 50 gulden untuk keperluan sehari-hari. Setelah tiga bulan menumpang di rumah saudara perempuannya, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki dan keluarganya pindah ke rumah sewa karena istrinya tengah mengandung dan akan melahirkan. Disebutkan bahwa istrinya melahirkan anak laki-laki pada 30 Juli 1895 yang kemudian diberi nama Moehammad Kaimoeddin.

Kemungkinan besar, penutupan Sekolah Guru disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat, terutama kalangan bangsawan, untuk memasukkan anaknya ke sekolah itu. Kaum bangsawan berpandangan jika mereka mengadopsi nilai-nilai Barat melalui pendidikan akan membuat otoritas mereka akan menjadi lemah di kalangan rakyatnya, dan pandangan itu ternyata diikuti oleh rakyat. Hal lain yang mendasari sikap itu adalah karena pemerintah Belanda telah memberikan jaminan atas kekuasaan para raja dan bangsawan selama mereka menyatakan kesetiaan kepada Belanda. Sikap itu terutama dipegang oleh para raja dan

kaum bangsawan di wilayah-wilayah yang berstatus dikuasai tetapi tidak diperintah langsung oleh Belanda (Amal 1988: 23–4). Sebaliknya, sebagian besar masyarakat di wilayah yang berstatus diperintah langsung oleh Belanda mengambil kesempatan bersekolah dan sebagian di antara mereka kemudian menjadi tokoh terkemuka dan terdidik dalam masyarakat di Sulawesi Selatan. Tetapi jumlah mereka tidaklah banyak dan mereka terserap ke dalam pemerintahan kolonial Belanda (Mattulada 1998: 401).

Berbagai usaha Ince Abdul Wahab Daeng Masikki untuk mencari dan memperoleh pekerjaan selalu mengalami kegagalan. Pekerjaan sebagai jaksa di Bulukumba yang dimohonkannya ternyata diberikan kepada Abdulkarim, demikian pula jabatan jaksa di Bikeru (Sinjai) di tangan Ince Boejoeng (*Pemberita Makassar*, 5 Mei 1914; Seri 8 Memoar). Pekerjaan sebagai Imam di Kampung Melayu—yang tentu dirasakan oleh Ince Abdul Wahab Daeng Masikki sebagai “hak” karena ayahnya pernah menjadi Imam Melayu—ternyata jatuh kepada Haji Abdulkarim. Ince Abdul Wahab Daeng Masikki juga mengajukan permohonan pekerjaan kepada Gubernur Celebes Van Braam Morris. Ia kemudian diminta bekerja di kantor polisi untuk membantu Jaksa Alie dan mempelajari pekerjaan jaksa. Namun, berhubung tidak mendapatkan gaji, ia memutuskan berhenti dari pekerjaan tersebut. Kemudian Ince Abdul Wahab Daeng Masikki membuka kedai setelah menjual perhiasan emas perak milik istrinya sebagai modal berjalan rempah-rempah dan

barang makanan. Kedai itu berjalan sekitar enam bulan kemudian dihentikannya kerana modalnya susut. Rupanya ia tidak biasa melakukan pekerjaan jual-beli. Keluarganya kemudian berpindah lagi menumpang di rumah saudaranya.

Saudara sepupunya mengusulkan kepada Ince Abdul Wahab Daeng Masikki untuk membuka sendiri sekolah bagi anak-anak pribumi dan Cina. Mengikuti usulan itu, ia membuat meja dan bangku dari bekas peti minyak tanah. Sekitar dua minggu setelah sekolah dibuka, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki berhasil mendapatkan 20 murid anak Melayu dan Cina serta lima atau enam orang berumur yang ingin belajar membaca. Pekerjaan itu memberikan penghasilan sekitar 40 gulden yang membantunya bertahan hidup. Ketika jumlah murid sekolahnya bertambah ramai, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki menyewa rumah Ince Karie sebagai tempat belajar-mengajar.

Selain itu, pada Oktober 1897, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki bersama kerabatnya, yaitu W.A. Ince Oentoeng, Ince Kasim, Ince Sitoea, dan Ince Lele mendirikan sebuah komedi stambul⁷ bernama Poespa-Sari yang menghabiskan dana sebesar 2000 gulden (*Pemberita Makassar*, 6 Mei 1914; Seri 9

⁷Komedi stambul umumnya mengangkat kisah-kisah dari Hikayat 1001 Malam; ada pula cerita dari kisah-kisah Eropah seperti Putri Salju. Sebagai pelengkap biasanya ditampilkan lagu-lagu Melayu, waltz, polka, dan lagu populer lainnya. Untuk mengisi masa yang kosong dalam pergantian babak diisi dengan cerita lucu atau nyanyian. Lebih jauh lihat Cohen (2006: 20–1).

Memoar). Selama dua-tiga malam komedi stambul berpentas, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki berhasil meraup sekitar 200 gulden dalam semalam. Namun, pada malam keempat pendapatannya berkurang karena di sebelah komedi stambul terdapat komedi sulap sehingga terjadi persaingan. Akhirnya, komedi stambul itu bubar sekitar satu bulan kemudian karena tiada keuntungan yang diperoleh.

Nasib malang masih menyertai perjalanan hidup Ince Abdul Wahab Daeng Masikki ketika dirinya menerima panggilan untuk bekerja sebagai Wakil Jaksa di kantor polisi di luar tanggungan atau tanpa menerima gaji (*Pemberita Makassar*, 7 Mei 1914; Seri 10 Memoar). Ia menerima pekerjaan itu karena dirinya dijanjikan akan dilantik sebagai jaksa menggantikan Abdulkarim di Bulukumba dalam satu atau dua bulan berikutnya. Ia pun mendapat tawaran menjadi jaksa di Mataram, Lombok, oleh seorang rekannya di Buleleng, Bali, karena Residen Bali dan Lombok menghendaki jabatan tersebut dipegang oleh orang dari Makassar berhubung banyak orang Bugis mencari penghidupan sebagai pedagang di Mataram. Namun, tawaran sebagai jaksa di Mataram ditolaknya karena ia menunggu pekerjaan jaksa di Bulukumba yang masih dalam wilayah Sulawesi Selatan. Permohonan sebagai jaksa di Mataram kemudian diajukan oleh Moekaddin anak Kepala Jaksa Alie. Ince Abdul Wahab Daeng Masikki bekerja di kantor polisi sejak Februari 1898 hingga 16 Juli 1898, sampai suatu saat ia membaca surat kabar *Pemberita Betawi* bahwa

yang dilantik sebagai jaksa di Bulukumba adalah Intje Heroeddin yang sebelumnya menjabat sebagai jaksa di Bangkala. Kabar tersebut membuat Ince Abdul Wahab Daeng Masikki menulis dalam memoarnya bahwa: "Sekiranya hamba tiada beriman, niscaya kubunuh diriku." Apalagi pekerjaannya mengajar anak-anak di sekolah telah diberikan kepada rekannya yang bernama Djalahong.

MENJADI JAKSA

Perjalanan hidup Ince Abdul Wahab Daeng Masikki mulai berubah ketika ia memustuskan ke Batavia untuk menemui pejabat pemerintahan kolonial Belanda di sana. Berbagai kesusahan dihadapinya hingga bulan Juli 1898 ia mendapatkan *besluit* atau surat keputusan akan dilantik menjadi guru di sekolah Nomor 2 di Segeri. Pada saat yang hampir bersamaan, pada 14 Juli 1898 ia diusulkan sebagai jaksa di Bangkala. Ia diminta melaksanakan terlebih dulu pekerjaannya sebagai guru di Segeri kemudian setelah dilantik sebagai jaksa barulah ia bertugas di Bangkala. Ia juga menerima uang jasa sebesar 100 gulden dari pejabat *Rekenkamer* dan mendapat uang jalan dari pejabat *Departement van Binnenlandsch Bestuur*. Pada 18 Juli, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki berangkat ke Surabaya menunggu kapal 'Van Swool' yang akan menuju ke Makassar pada 22 Juli 1898 dan tiba di Makassar dua hari kemudian. Pada 27 Juli 1898, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki berangkat ke Segeri dan esoknya menemui kepala wilayah di

sana yaitu Kontrolir Hartogh Hijes. Ia bertugas sebagai guru di Segeri hingga 19 Agustus 1898, kemudian dilantik menjadi jaksa di Alloe (*Pemberita Makassar*, 15 Mei 1914; Seri 17 Memoar).

September 1898, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki beserta keluarganya di Alloe, sebuah negeri di wilayah pemukiman orang Makassar di pesisir selatan Sulawesi. Penduduk tempatan disebut Turatea yang berbahasa Makassar tetapi memiliki lagu pengucapan yang khas. Penduduk Turatea bermukim di wilayah Bangkala, Binamu dan Laikang, dan hidup dari perladangan seperti menanam ubi, kacang hijau, dan jagung. Kege- maran orang di sana adalah meminum air tuak dari pohon lontar dan bersama-sama makan dengan ikan panggang yang banyak tersedia di pasar (*Pemberita Makassar*, 18 Mei 1914; Seri 18 Memoar).

Ince Abdul Wahab Daeng Masikki menggambarkan pengalamannya bertugas di Bangkala seperti "seorang berjalan di dalam kelam malam . . . merangkak di sana, meraja di sini." Hal itu disebabkan oleh ketiadaan orang yang dapat ia tanyai mengenai pekerjaannya dan hubungannya dengan pembesar Belanda di sana, yaitu Kontrolir Heaviside, tidak begitu baik. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena pada 22 Desember 1898, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki dilantik menjadi jaksa tinggi di Takalar menggantikan Abdul Salam. Ia digaji sebesar 75 gulden dan mendapat empang ikan dan udang yang disebut 'Paria Lau'. Ia merasa senang bertugas di Takalar karena pegawai-

pegawai Belanda dan orang pribumi menjadi rekan di kantornya. Selain itu, banyak pula orang Belanda dan Cina yang bermukim di kampung sehingga kesunyian seperti di Bangkala tiada lagi dirasakannya. Perkara hukum yang dihadapinya di Takalar pun berlipat ganda tiga atau empat kali dibandingkan dengan di Bangkala, seperti perkara pencurian kerbau dan kuda serta perkara pembunuhan yang banyakterjadi akibat cemburu soal perempuan diantara kerabat (*Pemberita Makassar*, 19 Mei 1914; Seri 19 Memoar).

Satu kasus besar yang dihadapi Ince Abdul Wahab Daeng Masikki selama bertugas di Takalar adalah mengenai penangkapan Badong Daeng Mattimoeng, seorang tokoh kriminal di wilayah Takalar (*Pemberita Makassar*, 22 Mei 1914; Seri 21 Memoar). Badong Daeng Mattimoeng dan kelompoknya sering melakukan perampokan, pencurian, dan pembunuhan. Mereka sering berbuat jahat kepada pedagang atau tukang pikul barang, dan orang-orang yang melintas di wilayah dekat rumahnya diperbatasan antara Gowa dan Tanah Gubernemen selalu dimintai barang 'upeti'. Barangsiapa menolak akan dirampas atau dibunuh oleh komplotannya terutama yang dipimpin oleh Basoelloe dan Tongke yang merupakan kemenakannya dan berperan seperti panglima. Badong Daeng Mattimoeng selalu gagal ditangkap oleh pemerintah kolonial karena dirinya berkerabat dan dilindungi oleh bangsawan tempatan di wilayah tersebut.

Kronologi penangkapan Badong Daeng Mattimoeng dikisahkan bermula pada hari Jumat, 5 Juni 1903, ketika Ince

Abdul Wahab Daeng Masikkidan J.H. Gilles yang merupakan pegawai pemungut pajak, dipanggil secara rahasia oleh Kontrolir Logeman untuk menangkap tokoh kriminal tersebut. Setelah dipertimbangkan dengan baik rencana penangkapan tersebut, maka pertamanya diutus mata-mata yang berpura-pura sebagai pembeli belulang kerbau ke tempat Badong Daeng Mattimoeng yang memang berdagang kulit kerbau. Setelah diketahui bahwa kepala begal itu berada dirumahnya maka sekitar enam orang pegawai pemerintah bersenjata tombak dan bedil dan berpakaian pemburu rusa segera memasuki wilayah batas Kerajaan Gowa ke kampung Bontonmpo melalui Kampung Dejole kemudian menyeberang Kampung Lassang. Di Kampung Lassang, mereka meminta *glarang* atau kepala wilayah Lassang untuk menjadi penunjuk jalan ke Kampung Laua tanpa menyebutkan maksud tujuan mereka ke wilayah itu. Barulah sekitar jam 12 tengah malam rombongan menanyakan arah rumah Daeng Mattimoeng yang dengan terpaksa ditunjukkan oleh *glarang* Lassang.

Pada pukul 5 pagi, rumah Badong Daeng Mattimoeng telah dikepung di bagian muka dan belakang. Namun, ternyata begal itu sudah kabur dari rumahnya karena sekitar satu jam sebelum rombongan penangkap datang ia diberitahu oleh seseorang dari Kampung Bontonmpo. Lalu *Glarang* Lassang dipaksa memberitahukan tempat Daeng Mattimoeng biasa pergi di sebuah rumah kebun. Namun, lagi-lagi rumah itu baru saja ditinggalkan pemiliknya. *Glarang* Lassang kemudian meneriaki

nama Daeng Mattimoeng yang kemudian mendapatkan balasan sehingga dilakukan pengepungan. Ketika berhasil ditangkap, Daeng Mattimoeng didapati bersama dua lelaki lainnya serta seorang perempuan yang tidak lain istri Daeng Mattimoeng. Saat ditangkap Daeng Mattimoeng menjerit-jerit, menangis, dan memanggil-manggil kerabatnya yang segera berkumpul dari segala tempat dengan tombak dan keris. Namun, petugas mampu menguasai keadaan sehingga Daeng Mattimoeng dapat dibawa ke Takalar dan selanjutnya dipenjarakan di Makassar. Hanya sekitar sepuluh hari Daeng Mattimoeng dalam penjara, kemudian meninggal dunia karena sakit dan dikuburkan di Makassar. Adapun kemenakannya, Basoella dan Tangke, setelah beberapa lama buron akhirnya ditangkap dan dihukum buang selama 15 dan 20 tahun.

Berperan dalam mengakhiri perkara perampokan, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki, bersama Djabaka Daeng Mangempang, Samang Bapa Oenoese, dan *glarang* Lassang, mendapat hadiah uang polisi rahasia (*geheime politie fonds*). Selain itu, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki juga dianugerahi surat terima kasih (*dankbetuiging*) dari Gubernur Sulawesi dan Daerah Taklukannya yang diwakili oleh Residen Brugman (*Pemberita Makassar*, 29 Mei 1914; Seri 23 Memoar).

MENJADI KAPITAN MELAYU

Sekitar empat bulan setelah penaklukan Gowa pada 1906, Intje Abdul Wahab

Daeng Masikki dan kontrolir Tideman bertugas di wilayah tersebut. Pada April 1906, *besluit* atau surat keputusan tentang pelantikan Intje Abdul Wahab Daeng Masikki sebagai Kapitan Melayu terbit. Ia menggantikan sepupunya, Ince Lele, yang telah memangku jabatan ini cukup lama. Penggantian itu juga karena Ince Lele menderita sakit dan minta pensiun. Pelantikan Ince Abdul Wahab Daeng Masikki sebagai Kapitan Melayu pada 30 April 1906 berdasarkan keputusan Assiten Residen van Senden. Penggantinya sebagai jaksa adalah Ince Abdul Gani (*Pemberita Makassar*, 30 Mei 1914; Seri 24 Memoar).

Ince Abdul Wahab Daeng Masikki menggambarkan dirinya sebagai Kapitan Melayu bagaikan “serasa hamba tiada berpekerjaan” tetapi dengan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu mengumpulkan cukai mata pencarian dan cukai pekerjaan rodi (*heerendienst*). Pekerjaannya itu membuatnya laksana “burung sahaja sebentar disini sebentar disana yang tiada tentu pelerangannya.” Ince Abdul Wahab Daeng Masikki tidak melanjutkan pekerjaannya sebagai kapitan, dan hatinya tetap ingin kembali menjadi jaksa (*Pemberita Makassar*, 2 Juni 1914; Seri 24/25 Memoar).

Tampaknya jabatan sebagai Kapitan Melayu pada akhir abad ke-19 hingga masa awal abad ke-20 tidak lagi memberikan penghasilan yang besar kepada pemangkunya. Akibat kesukaran ekonomi yang diderita pemerintah kolonial Belanda, terutama dalam membiayai belanja militer pada paruh masa terakhir abad ke-19 sebagai akibat perlawanan raja-raja tempatan di ber-

bagai wilayah jajahan. Sejak 1839, pemerintah kolonial di Sulawesi Selatan tidak lagi memberikan gaji tetap kepada Kapitan Melayu melainkan hanya memberikan pembayaran berdasarkan pekerjaan kapitan memungut cukai pasar dan cukai kampung serta hasil laut. Pada 1862 hingga 1880, pemerintah Belanda membuat lagi peraturan yang menghapuskan pendapatan Kapitan Melayu dari pekerjaan memungut cukai pasar dan kampung, dan hanya diberikan gaji sebesar 250 rupee dan tambahan 8 rupee bagi *sari-sariang* atau pembantunya (KKIKM 1987: 80).⁸

Keadaan tersebut tidak berlangsung lama bagi Ince Abdul Wahab Daeng Masikki karena pada Agustus 1906 ia dilantik sebagai jaksa di Maros setelah menemani kontrolir Tideman mengantar sejumlah kepala desa di Gowa melihat-lihat perkembangan pembangunan di Tanah Jawa. Pada 13 Agustus 1906, atas usulan dan kemurahan hati Tideman, Ince Abdul Wahab Daeng Masikki memperoleh anugerah Bintang Perak (*Zilverenster*) karena kesetiaan, kehor-matan, dan tanggungjawab atas segala pengabdianya yang diberikan oleh pemerintah kolonial. Ince Abdul Wahab

⁸Jabatan *sariang* merupakan pembantu kepala distrik yang bertugas meneruskan perintah kepala distrik kepada rakyat. Dalam birokrasi tradisional Makassar fungsi *sariang* dapat disamakan dengan jabatan *jannang suro* yang umumnya dipegang oleh kalangan *tusamara* atau orang ramai. Memasuki 1920, jabatan itu mengalami kemerosotan hanya sebagai pengantar surat atau orang suruhan untuk menyampaikan pesan lisan atasannya—hal yang sebelumnya hanya dilakukan oleh lapisan hamba atau *ata*; lihat Paeni, dkk. (1984: 78–9).

Daeng Masikki menerima penghargaan tersebut yang digantungkan di dadanya oleh Residen E.E. de Clerks dihadapan para kepala negeri dan pembesar Belanda di Maros.

KESIMPULAN

Penaklukan Belanda atas Sulawesi Selatan memerlukan pegawai yang mampu memahami keadaan masyarakat daerah tersebut yang memiliki beragam bahasa dan budaya yang tidak dipahami oleh pegawai pemerintahan kolonial berbangsa Belanda. Untuk memenuhi keperluan itu, pemerintah kolonial mendidik sejumlah tenaga pribumi sebagai pegawai yang terlatih dan berpendidikan serta memahami permasalahan masyarakat tempatan dalam menjalankan roda pemerintahan modern.

Masuknya anak keturunan Melayu menjadi pegawai dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda pada akhir abad ke-19 disebabkan oleh semakin menurunnya minat mereka terhadap aktivitas perdagangan yang secara tradisional diwariskan secara turun-temurun. Sektor ekonomi yang terlalu dimonopoli oleh Belanda mengakibatkan perdagangan tradisional di Sulawesi Selatan merosot. Selain itu, kekayaan yang dimiliki oleh keturunan Melayu-Makassar berkurang akibat kebakaran besar pada 1874 yang memusnahkan harta dan modal mereka. Keadaan itu dapat dilihat pada pengalaman Ince Abdul Wahab Daeng Masikki yang merupakan sebuah keluarga Melayu-Makassar berharta dan berasal dari keluarga kaya raya dari

keturunan Ince Ali Asdullah. Keluarga Ince Abdul Wahab Daeng Masikki sempatjatuh miskin akibat kebakaran tersebut sehingga perlu berjuang keras untuk memulihkannya. Akhirnya, Intje Abdul Wahab Daeng Masikki menjadi seorang pegawai yang sukses dan memperoleh penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda.

DAFTAR ACUAN

- Abdurrahim (1953), "Kedatangan Orang Melayu di Makassar," dalam H. D. Mangemba (ed.), *Kenalilah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Amal, I. (1988), *Hubungan Pusat dan Daerah: Kasus Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Pusat Antar Universitas.
- Bosma, U dan R. Raben (2008), *Being "Dutch" in the Indies: A History of Creolization and Empire 1500-1920*. Singapura: National University of Singapore Press.
- Cense, A. A. (1978), "Malaise invloeden in het oostelijk deel van de Indonesische Archipel," *BKI*, 134, No. 4 (415-32).
- Cohen, M. I. (2006), *The Komodie Stamboel: Popular Theater in Colonial Indonesia 1891-1903*. Ohio: Ohio University Press.
- Cummings, W. (1998), "The Melaka Malay Diaspora in Makassar c. 1500-1669," *JMBRAS*, 71, No. 1 (105-55).
- (2007), *A Chain of Kings: Makassarese Chronicles of Gowa and Talloq*. Leiden: KITLV Press.
- KKIKM (1987), *Sejarah Keturunan Indonesia-Melayu*. Ujung Pandang: Kerukunan Keluarga Indonesia Keturunan Melayu.
- Mattulada (1998), *Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Noorduyn, J. (2000), "The Wajorese Merchant Community in Makassar," dalam *Authority and Enterprise among the People of South Sulawesi*. Leiden: BKI 156.

- Paeni, M., dkk. (1984), *Sejarah Sosial Sulawesi Selatan: Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900–1950*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Poelinggomang, E. L. (2002), *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Skinner, C. (ed.) (2008), *Enci' Amin, Syair Perang Mengkasar*. Jakarta: KITLV.
- Sutherland, H. (2001), "The Makassar Malays: Adaption and Identity c. 1660–1790," *Journal of Southeast Asian Studies*, No. 32 (397–421).
- Warmenhoven, A. A. J. (2001), "Pendidikan Amtenar Pemerintahan Belanda di Indonesia," dalam S. L. Van der Wal (pnyt.), *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920–1942* (terj. Team Perwakilan KITLV Jakarta). Jakarta: Djambatan.
- Wiryanan, Y. (2013), *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar dari Abad Ke-17 hingga Ke-20*. Jakarta: Gramedia.
- Penerbitan Resmi/Dokumen**
- Adatrechtbundels* (1929), Jilid XXXI: Celebes.
- Pemberita Makassar* (surat kabar) (1914).
- Regerings-Almanak voor Nederlansch-Indië 1880–1942* (1906). Weltevreden: Landsdrukkerij.
- Tesis, Disertasi**
- Amir, A. (2015), "Sejarah Masyarakat Melayu di Sulawesi Selatan 1600–1942: Identiti dan Autoriti," Disertasi Doktor. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Sarkawi, H. (1997), "Perkembangan Pendidikan Kolonial di Makassar 1876–1942," Tesis Magister. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Dinamika Kota Pesisir dan Kesehatan Masyarakat Situasi Cirebon pada Masa Kolonial 1906-40

Imas Emalia

Pengajar, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

This paper tries to provide about health history in Cirebon, West Java, during the colonial period. Geographically, Cirebon located in the coast of Java's north coast, so it influenced the economics development of the Dutch government, therefore in 1906 Cirebon was made as gemeente and replaced the position of the city of Sultanate. The center of Cirebon City administration was moved from the Keraton which was located in hinterland to the area which was close to the port to facilitate the control of economics activities. The changes of the city function then raise impacts on the people beside the impact of the economy and politics, it also had an impact on health. The influence of urban development on public health even before the end of the Dutch Indies administration. The population explosion that occurred as a result of urbanization raised new problems in the city. The emergence of slum settlements in cities or kampongs populated by migrants became a portrait of urban poverty. People who lived in kampongs was often neglected their health while their energies were needed to work on the plantations, port and station. They were often hit by malaria, plague, typhus, dysentery and severe influenza that brought to death. Until 1940, public health in the city of Cirebon was ver alarming even experienced a high mortality rate in Java due to severe influenza disease.

Keywords: *history of health, dynamics of coastal city, Cirebon, colonial period.*

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia selain sandang, pangan dan papan. Seperti banyak dinyatakan di berbagai negara bahwa perhatian atas kesehatan adalah hak semua warga negara. Pada 1978, World Health Organization mencanangkan program "kesehatan untuk semua pada tahun 2000." Artinya, seluruh masyarakat di dunia dapat mencapai derajat

kesehatan yang baik. Sejalan dengan hal itu, Indonesia menetapkan program pembangunan kesehatan yang disebut “Kesuma”—akronim kesehatan untuk semua. Program ini bertujuan mencapai derajat kesehatan bagi setiap penduduk secara optimal, yaitu sesuai standarisasi sehat berdasarkan indikator tertentu—angka kelahiran dan kematian menurun, umur harapan hidup meningkat, sebagian penyakit menular telah dapat dihilangkan, dan jumlah sarana pelayanan masyarakat semakin banyak (Broto-wasisto 1990). Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sebagai salah satu unsur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2009).

Dalam kajian Braudel (1988), tentang peradaban Eropa dan dunia, dijelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi hal penting bagi perkembangan peradaban. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah tingkat pertumbuhan penduduk, perbedaan lingkungan geografis, dinamika ekonomi, perang, konflik, dan kesehatan.

Selain itu, kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pengobatan, pencegahan penyakit, dan penyelenggaraan sistem pendidikan bagi tenaga kesehatan (Sciortino 2007). Dalam hal ini masyarakat diperkenalkan cara pengobatan modern dan meninggalkan cara lama seperti melakukan pengobatan ke dukun dan budaya yang irasional. Kebijakan pemerintah tentang tata lingkungan yang bersih dan permukiman sehat bagi penduduk padat di kota dapat menjadi upaya pencegahan

terhadap munculnya berbagai jenis penyakit dalam kehidupan masyarakat. Begitu pula upaya propaganda hidup sehat baik dalam pencegahan penyakit maupun pengobatan memerlukan banyak tenaga kesehatan terlatih yang berbekal pendidikan kesehatan. Upaya tersebut tentu untuk seluruh masyarakat secara merata.

Tulisan ini bertemakan sejarah kesehatan di salah satu kota pesisir pantai utara Pulau Jawa, yaitu Cirebon, pada masa Hindia Belanda. Walaupun tidak terhitung sebagai kota besar di Jawa—seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya—pada waktu itu, wilayah Cirebon sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi Hindia Belanda. Letak geografis Kota Cirebon yang strategis menjadikan daerah itu sebagai bagian dari pusat pengembangan ekonomi yang menguntungkan Belanda. Oleh karena itu, Cirebon dijadikan *gemeente* atau kotapraja pada 1906 menggantikan kota kesultanan. Dengan dalih pengembangan ekonomi, pemerintah Hindia Belanda memindahkan pusat pemerintahan Kota Cirebon dari Keraton Cirebon di pedalaman ke kantor pemerintahan Kolonial Belanda yang berdekatan dengan Pelabuhan Cirebon. Perubahan fungsi kota itu membawa pengaruh terhadap berbagai segi kehidupan masyarakat di Kota Cirebon dan sekitarnya, baik dalam politik, sosial, ekonomi maupun kesehatan.

DINAMIKA KOTA PESISIR CIREBON

Menurut naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari* yang ditulis Pangeran

Aria Cirebon pada 1720 dan disusun kembali oleh P. S. Sulendraningrat (1972), sebutan *cirebon* bermula dari kata "sarumban" yang berarti *centrum* atau pusat percampuran penduduk dari berbagai tempat, bangsa, dan agama. Bahkan tertulis bahwa pada masa Wali Sanga, Cirebon disebut sebagai "Nagari Puser Bumi" yang bermakna negara di tengah-tengah Pulau Jawa. Dalam naskah itu dijelaskan bahwa pada 1382 Masehi atau 1312 tahun Jawa nama Cirebon disebut dengan "Caruban Larang" yang terdiri atas wilayah pantai atau pesisir (*caruban pantai*) dan wilayah darat atau pedalaman (*caruban girang*). Wilayah pesisir berpusat di Pasambangan (Alas Konda sekarang, yang merupakan kompleks pemakaman Gunungjati), sedangkan wilayah darat atau pedalaman berpusat di Wanagiri (Wanasaba sekarang, yang merupakan kompleks Lemah Wungkuk) (Sulendraningrat 1984: 13-4).

Sejak abad ke-14, Cirebon telah banyak menghasilkan produk olahan hasil laut. Ki Gedeng Alang-alang atau Walangsungsang atau Cakrabumi, yang disebut sebagai nelayan pertama yang menghuni daerah itu, banyak memproduksi ikan dan rebon (udang kecil) yang menjadi komoditi utama pesisir Cirebon. Pencarian ikan dan rebon saat itu menggunakan jukung atau perahu kecil namun menghasilkan banyak tangkapan sehingga dapat diolah menjadi terasi berkualitas untuk diekspor ke luar Cirebon, yaitu kepada Prabu Rajagaluh, raja Padjajaran. Hal itulah yang kemudian ditetapkan sebagai upeti nelayan rebon sebanyak satu pikul atau

61,76 kilogram dalam satu tahun (Sulendraningrat 1972: 9-15; Lubis 2000: 27-8).¹

Kualitas hasil laut dari daerah Cirebon membuat daya tarik bagi masyarakat di luar Cirebon. Proses pertukaran hasil bumi dari masyarakat luar Cirebon inilah yang membuat perkembangan pesat daerah Cirebon. Didukung dengan hasil-hasil bumi dari pedalaman Cirebon dan sekitarnya seperti Majalengka dan Kuningan yang subur pertaniannya, membuat Cirebon semakin banyak dikunjungi pendatang untuk berdagang. Daerah pelabuhan Pasambangan banyak dikunjungi orang dari berbagai negara seperti, Cina, Arab, Persia, India, Malaka, Singapura, dan daerah Nusantara sendiri. Pada abad ke-16 hampir seluruh wilayah Cirebon menjadi daerah lintasan dan imbasan perdagangan internasional sehingga sejak abad itu Cirebon dikenal sebagai bagian dari jalur sutra. Cirebon juga dijadikan sebagai pusat perniagaan terutama untuk daerah antara Batavia dan Jepara karena pelabuhannya mampu menjadi pangkalan tempat pelaut berlabuh dan bermukim. Lebih jauh, Pelabuhan Cirebon dapat menjadi pusat penampungan barang dagangan baik yang datang dari penduduk lokal maupun pedagang asing. Berita Tomé Pires menyebutkan bahwa keramaian Cirebon disebabkan oleh kesuburan daerah sekitarnya yang menghasilkan beras berkualitas dan diekspor hingga Malaka (Rahardjo 1998: 55).

¹Satu pikul setara 61, 76 kilogram; lihat Suhartono (1991: 215).

Wilayah Cirebon terletak di sebelah utara ujung paling timur Jawa Barat. Batas wilayah keresidenan ini adalah Laut Jawa di sebelah utara; Brebes (Jawa Tengah) di sebelah timur dan timur laut; Ciamis di sebelah selatan; Subang dan Sumedang di sebelah barat. Di bagian tengah wilayah menjulang Gunung Ciremai dengan ketinggian 3.070 meter yang dilingkari dataran rendah dan perbukitan. Yang paling mencolok adalah rangkaian bukit karang pada kaki gunung kapur yang terletak di daerah Palimanan, sebelah barat Kota Cirebon yang berderet dengan jalan raya menuju Sumedang (*Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jilid VII, 1989: 138, 149, 226).

Kehidupan dan kegiatan perekonomian masyarakat Kota Cirebon disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah itu. Selain hidup di sekitar pelabuhan, banyak penduduk Cirebon tinggal di sekitar sungai seperti Sungai Cimanuk, Sungai Pekik, Sungai Kasunan, dan Sungai Losari. Sungai-sungai itu penting sebagai jalur transportasi yang menghubungkan dengan daerah pedalaman. Dengan demikian, masyarakat Cirebon sudah terbiasa dengan dunia kemaritiman baik dalam hubungan perekonomian, politik, maupun agama. Keberadaan penduduk asing bisa dihubungkan dengan kedatangan kaum *musyafir* pada masa lalu ketika Dinasti Abbasiyah di Tanah Arab runtuh sehingga kaum ulama dan para pedagang mengembara ke arah timur untuk membuka wilayah baru bagi penyebaran Islam dan perdagangan. Akibat kontak itu tumbuh kantong-kantong permukiman muslim di Nusantara, baik di

pesisir maupun pedalaman termasuk di daerah Cirebon (Ambary 1997: 66).

Kebudayaan pesisir Cirebon berpusat di daerah Indramayu dan Cirebon Barat. Pada akhir paroh pertama abad ke-20, masyarakat di daerah itu umumnya bekerja sebagai nelayan yang menggantungkan ekonominya pada laut. Hal itu disebabkan oleh pantai Cirebon yang kaya akan ikan di lingkungan pantai utara Pulau Jawa (Masyhuri 1996: 32). Namun, dalam hal menangkap dan mengolah ikan, nelayan kedua daerah itu masih mengandalkan sistem tradisional meski bisa dikategorikan sebagai nelayan komersial. Sangat sedikit di antara mereka yang menggunakan mayang dan jaring *payang* dalam proses penangkapan ikan seperti yang dilakukan nelayan Jawa Tengah dan Jawa Timur (Masyhuri 1996: 47-8). Sesungguhnya penggunaan mayang dan jaring payang itu dapat menghasilkan banyak ikan karena mampu dilakukan di laut lepas, namun hanya sedikit para nelayan Cirebon yang berlayar ke laut lepas.

Hingga awal abad ke-20, Cirebon masih dikenal sebagai penghasil ikan yang berkualitas. Namun penguasaan atas hasil laut dan pengelolaannya berada di bawah pengawasan pemilik modal atau *pachter* yang mempunyai relasi luas hingga daerah pedalaman. Kebanyakan mereka adalah orang Cina, dan hanya sedikit orang pribumi. Hasil dari penangkapan ikan pun dengan sendirinya lebih banyak diraup oleh pemodal tersebut, sekitar 58 persen, dan sisanya dibagikan kepada nelayan penangkap ikan. Hingga awal abad ke-20 itu kondisi masyarakat Cirebon

berada dalam garis kemiskinan. Apalagi ketika terjadi kemerosotan penangkapan ikan dekat pantai seperti pengalaman pada sekitar 1920-an saat daerah Indramayu dan Cirebon mengalami *over-fishing* (Masyhuri 1996: 155-6).

Selain itu, kebijakan pemerintah kolonial menaikkan harga garam membuat nelayan harus mengeluarkan biaya tinggi untuk pengasinan ikan. Akibatnya harga ikan asin meningkat dari 20 sen per kati menjadi 40 sen per kati (Masyhuri 1996 : 41) sehingga membebankan penduduk pedalaman seperti Majalengka dan Kuningan. Kemunduran golongan pedagang pribumi berakibat pada berbagai gejala social (Koentjaraningrat dan Loedin 1985) termasuk buruknya kesehatan masyarakat di Cirebon. Kemiskinan yang mengakibatkan kelaparan dan munculnya berbagai wabah penyakit di Kota Cirebon membuat derajat kesehatan masyarakat semakin menurun, dan angka kematian meningkat. Masyarakat di seluruh Keresidenan Cirebon banyak yang terserang berbagai wabah penyakit seperti tifus, demam, malaria, kolera, dan cacar.

Perubahan fungsi kota dari tradisional ke modern sejak awal abad ke-20 banyak memengaruhi kehidupan masyarakat di Cirebon. Sejak pembentukan *gemeente* pada 1906 (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1906, No. 122), daerah itu terus mengalami perubahan baik fisik maupun sosial. Wilayah itu mengalami proses modernitas dan industrialisasi untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Hindia Belanda dalam pengembangan perekonomiannya. Peme-

rintah Kota Cirebon mengawasi luas wilayah perkebunan tebu di wilayah keresidenan itu seluas 13.000 *bau*.² Perluasan wilayah perkebunan membuat kebutuhan tenaga kerja meningkat dan wilayah pertanian yang menjadi lahan garapan petani berkurang. Akibatnya, masyarakat yang semula memiliki wilayah garapan kehilangan hak atas tanah dan beralih menjadi tenaga kerja perkebunan, buruh pelabuhan, pabrik, dan sebagainya. Mereka yang pindah ke kota, tetapi dengan sedikit modal, yang tidak mampu tinggal di tempat yang layak. Umumnya, mereka tinggal mendekati lokasi kerjanya, seperti di sekitar pelabuhan, pabrik olahan, dan stasiun kereta api.

Dengan demikian, setelah difungsikan sebagai *gemeente*, Kota Cirebon semakin dipadati penduduk pendatang, baik pribumi maupun Eropa, Cina, dan Arab. Pada saat dibentuk menjadi *gemeente*, luas wilayah Cirebon 1.100 hektar dengan kepadatan penduduk sebanyak 20.000 jiwa; terdiri atas 22 kelurahan dan lima kecamatan yaitu Kecamatan Harjamukti, Kejaksan, Kesambi, Lemahwungkuk, dan Pekalipan. Kepadatan penduduk di Kota Cirebon membantu meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja di berbagai sektor di perkotaan. Namun, di sisi lain, kepadatan penduduk di kota perlu menjadi perhatian utama dalam

²*Bau* merupakan satuan ukuran luas tanah di wilayah Jawa; 1 *bau* setara 0,7 hektar atau 7096,5 meter persegi; lihat Breman (1983: xv).

upaya pemenuhan kebutuhan pokok mereka baik sandang, pangan, papan, dan kesehatan sehingga tidak mengganggu produktivitas kerja mereka. Pemerintah Hindia Belanda terus melakukan pengembangan kota di berbagai sektor perekonomian, dan infrastruktur di Kota Cirebon. Pada 1926, status Gemeente Cheribon ditingkatkan menjadi *stadsgemeente* atau kota kolonial dengan otonomi yang lebih luas untuk mengatur pengembangan kota. Peningkatan status Kota Cirebon itu semakin membawa pengaruh pada berbagai aktivitas kehidupan. Perubahan fungsi kota berdampak serius terhadap pemenuhan berbagai kebutuhan dalam proses birokratis politik kolonial, sosial-ekonomi, dan juga kesehatan.

Pengembangan ekonomi yang menguntungkan pemerintah melalui pengelolaan perkebunan tebu berpengaruh terhadap pengembangan fisik kota dan sistem pemerintahan. Berbagai perbaikan infrastruktur seperti jalan dan sarana transportasi dilakukan agar dapat mendukung proses distribusi barang dengan baik. Sejak pembangunan jalur kereta api (*staatsspoor*) di Cirebon pada 1912 yang menghubungkan Cikampek-Cirebon untuk memudahkan hubungan dengan Batavia, dan tahun 1916 jalur Cirebon-Kroya untuk memudahkan hubungan Cirebon ke arah timur, yaitu ke Ketanggungan di Pekalongan, aktivitas sosial-ekonomi di daerah itu semakin meningkat (ENI 1917: 474). Pembangunan prasarana diarahkan untuk pengangkutan masal dari perkebunan tebu ke pelabuhan, kemudian didistribusikan ke daerah lain di luar Kota

Cirebon (Sulistiyono 1997: 93-4). Pembangunan fisik kota dilengkapi dengan berbagai pabrik, gudang dan kantor dagang terutama di kawasan pelabuhan. Kantor pemerintah dibangun mendekati kawasan pelabuhan, yaitu di daerah Tangkil, sebelah utara Keraton Cirebon. Upaya ini dimaksudkan untuk memudahkan kontrol perekonomian selain juga sebagai upaya menjauhkan dari kekuasaan Keraton Cirebon.

Hingga 1930, perbaikan jalan di Kota Cirebon dilakukan dengan pengaspalan. Sepanjang 28,37 kilometer jalan di Kota Cirebon berhasil dikeraskan dengan aspal. Upaya ini untuk memudahkan transportasi menuju pedalaman dalam pendistribusian berbagai hasil perkebunan dan pertanian. Pengadaan prasarana air bersih, penerangan jalan, dan prasarana kesehatan juga dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat kota. Pengadaan air bersih melalui pembuatan saluran dan sumur artesis dengan maksud mengantisipasi kekurangan air bersih di kota setelah terjadi peningkatan jumlah penduduk. Seperti pada 1930, misalnya, Gemeenteraad Cheribon membangun sebuah proyek air bersih yang diambil dari sumber air Cipaniis Kuningan (KIT 994/90). Program kebersihan kota melalui pembuatan saluran air, penghilangan genangan air limbah dan hujan, pembuangan sampah dan kotoran, serta pembuatan kakus dan pemandian umum dilakukan untuk menjaga timbulnya bibit penyakit menular.

Sejak akhir abad ke-19, sungai yang mengalir ke Kota Cirebon terkenal sebagai sungai yang kotor dan berbau

busuk yang diduga sebagai awal kemunculan bibit penyakit malaria, kolera, dan disentri yang berkembang dalam masyarakat (Gedenkboek 1906-31: 93). Masyarakat menyebutnya Kali Bacin yang berarti sungai kotor. Oleh karena itu, pemerintah Kota Cirebon pada 1917 menutup kali itu melalui pengurugan, dan area bekas kali tersebut difungsikan sebagai jalan, gedung perkantoran, dan pabrik rokok British American Tobacco. Jalan bekas Kali Bacin kemudian dinamakan Jalan Bahagia. Upaya pemerintah itu agar dapat menjadi sebagian dari kebahagiaan masyarakat setelah terhindar dari polusi sungai tersebut dan mengurangi tersebarnya wabah penyakit. Program itu dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kesehatan bagi masyarakat Kota Cirebon.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon, pemerintah kota melakukan kerja sama dengan pihak swasta yang memiliki balai pengobatan. Di Kota Cirebon terdapat sebuah perkumpulan yang disebut Pamitran (Perkumpulan Akan Menolong Ibu Terus Rawat Anak Nusunya), di bawah Yayasan Pamitran dan memiliki Rumah Sakit Bersalin yang didirikan pada 1916. *Doorgangshuis voor Kraamvrouwen* atau Rumah Sakit Bersalin itu dirintis oleh dr. H. Van der Hoeve.³ Selain menangani kesehatan ibu hamil dan persalinannya, Rumah Sakit Bersalin Pamitra juga menyelenggarakan pengobatan untuk umum yang sifatnya masih sederhana. Berdasarkan pengalaman kerja sama itu, pemerintah Dewan Kota,

pada 1919, mengusulkan kepada pemerintah pusat di Batavia untuk pembangunan Rumah Sakit Umum di Kota Cirebon. Usulan itu mendapat tanggapan yang baik dari pemerintah Hindia Belanda sehingga pada 14 Maret 1920 dilakukan peletakan batu pertama di Jalan Kesambi. Pembangunan Rumah Sakit Umum selesai pada 31 Agustus 1921, peresmian pembukaan oleh walikota Cirebon, J. H. Johan, dan diberi nama *Oranje Ziekenhuis* atau Rumah Sakit Oranje. Rumah Sakit itu kemudian difungsikan sebagai Rumah Sakit Kota (*Gemeentelijk Ziekenhuis*) pada 1 September 1921 di bawah pimpinan dr. E. Gottlieb sebagai kepala rumah sakit yang pertama.⁴

Dengan demikian, pemerintah kolonial di Kota Cirebon sesungguhnya menaruh perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Namun, hingga pertengahan abad ke-20 berbagai wabah penyakit di Kota Cirebon terus menyebar ke seluruh masyarakat kota dan sekitarnya, dari malaria, pes, kolera, sampai influenza. Bahkan pada 1940, Kota Cirebon disebut sebagai kota yang mengalami tingkat kesehatan yang buruk akibat wabah penyakit influenza yang mematikan sejumlah penduduk. Dalam hal ini tentu banyak faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat di Kota Cirebon masa itu, baik lingkungan, kebijakan politik kesehatan pemerintah, maupun budaya atau perilaku hidup sehat masyarakatnya yang saling terkait.

³Lihat www.cirebonkota.go.id, diunduh 7 Mei 2016.

⁴Lihat www.cirebonkota.go.id, diunduh 7 Mei 2016

KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA CIREBON 1906–40

Hingga 1930, Kota Cirebon dipadati oleh 18.123 penduduk pendatang atau sekitar 42,5 persen dari penduduk asli. Mereka kebanyakan bekerja sebagai buruh di pelabuhan, pabrik-pabrik, dan pedagang atau pekerja pembuatan jalan kereta api (Sulistiyono 1997: 96). Pertumbuhan penduduk di Kota Cirebon pada awal abad ke-20 tercatat sebagai pertumbuhan yang pesat (Wahid 2009: 45–6). Hal itu terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk Kota Cirebon
1820–1930

NO.	GOLONGAN PENDUDUK	1890	1920	1930
1.	Pribumi	15.561	25.339	42.667
2.	Eropa	398	971	1.653
3.	Tienghoa	2.537	5.451	8.191
4.	Penduduk Asia lainnya	846	1.290	1.568
Jumlah Total		19.342	33.051	33.051

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Cirebon disebabkan oleh migrasi dari luar Cirebon, baik orang Eropa, Cina, dan penduduk lokal. Pertumbuhan penduduk juga meliputi hampir seluruh Keresidenan Cirebon. Dalam *Kolonial Verslag* (1881) disebutkan jumlah penduduk di Keresidenan Cirebon sebelum dibentuk menjadi *gemeente* adalah 1.047 orang Eropa, 15.740 orang Cina, 1.230 orang Arab, dan 97 orang asing lain; sementara orang pribumi 1.609.228

orang (*Kolonial Verslag* 1883–1884). Setelah status kota berubah menjadi *gemeente*, jumlah penduduk meningkat pesat dengan perhitungan kenaikannya adalah Eropa 1.653 orang, Cina 8.191 orang, dan Asia 1.568 orang (Wahid 2009: 45–6).

Akibat kepadatan penduduk di kota karena arus urbanisasi tersebut, masyarakat pribumi semakin tergeser kepemilikan tanahnya. Jumlah petani yang tidak memiliki tanah garapan di Cirebon dari 527.434 orang pada 1903 bertambah menjadi 732.202 orang pada 1930 (Breman 1983: 126). Ketika diberlakukan Pembaharuan Agraria (*Land Reform* 1918) pun, masih didapati banyak petani miskin yang mengalami kemerosotan kesejahteraan akibat kepadatan penduduk selain karena pembagian hasil yang tidak seimbang.

Akibat ledakan penduduk di kota pula, lahan hunian sulit diperoleh sehingga terjadi perebutan ruang kota (Basundoro 2013). Banyak pendatang tinggal di tepian sungai, stasiun, pelabuhan, dan tempat kumuh lainnya sekadar untuk tidur. Dengan demikian, mereka tidak dapat meningkatkan keamanannya baik untuk investasi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Ledakan penduduk yang terjadi seperti itu dengan sendirinya membuat kebutuhan pangan semakin meningkat, sementara lahan pertanian semakin tergeser karena digunakan sebagai perkebunan milik perusahaan swasta asing, permukiman, pertokoan, perkantoran, pasar, dan pembangunan infrastruktur lainnya (Gedenkboek 1906–30: 108). Akibatnya, kemiskinan di kota meningkat dan

bencana kelaparan pun tidak terhindarkan. Bencana kelaparan membuat derajat kesehatan masyarakat menurun dan banyak memunculkan berbagai wabah penyakit.

Tampak bahwa persebaran wabah penyakit disebabkan oleh faktor lingkungan kota. Hingga 1940, lingkungan tempat tinggal masyarakat di Kota Cirebon kotor dan berbau. Fasilitas umum serba-kurang, jarak ideal antara tempat tinggal, sumber air, dan tempat buangan kotoran juga tidak diperhatikan. Akibatnya mereka sering dijangkiti penyakit kolera dan disentri (Hasyim 2002: 105-6; lihat juga Hurgronje 1996: 23-41). Masyarakat seperti itu termiskinkan karena mutu modalnya yang rendah, baik modal pendidikan, kesehatan, maupun keamanan sehingga mereka tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatannya (Ananta dan Budhiarso 1990: 23). Padahal secara kebutuhan di bidang perekonomian, pemerintah kolonial Hindia Belanda sangat membutuhkan tenaga kerja pribumi untuk mendapatkan nilai perekonomian yang tinggi. Akan tetapi, sebagai imbalan yang didapat oleh masyarakat tidak sebanding dengan tenaganya yang digunakan untuk kemakmuran pemerintah.

Pelayanan kesehatan telah dilakukan melalui Dinas Kesehatan Militer (*Militaire Geneeskundige Dienst*, 1818-1942). Akan tetapi pelayanan kesehatan dari lembaga itu khusus diberikan kepada tentara atau militer Belanda di Jawa dan tentara Belanda asal pribumi

(Boomgaard, dkk. 1996: 8-10),⁵ sementara bagi masyarakat sipil baik asal pribumi maupun Belanda bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tetapi harus melalui izin khusus dari pemerintah Hindia Belanda. Sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat sipil di lembaga itu memang telah berjalan sejak 1818 hingga pemerintah membentuk institusi kesehatan bagi masyarakat sipil pada 1820 yang disebut Dinas Kesehatan Sipil (*Burgelijk Geneeskundige Dienst*). Namun, sampai awal abad ke-20 pelayanan kesehatan dari lembaga itu tidak dapat dijangkau oleh masyarakat sipil (Tesch 1941: 626). Masyarakat beranggapan bahwa pelayanan kesehatan menjadi beban hidup yang berat. Kondisi seperti itu dapat mempengaruhi perilaku atau budaya hidup sehat mereka yaitu melakukan pengobatan tradisional dengan mengandalkan bahan-bahan ramuan tetumbuhan yang tersedia di lingkungannya sendiri, atau bahkan melakukan pengobatan melalui dukun yang dianggap bisa mengusir penyakit yang dideritanya. Kecenderungannya, masyarakat hanya akan mencari pengobatan modern bila penyakit yang dideritanya sangat membahayakan dan itu pun mendapatkan kesulitan ketika

⁵Disebutkan bahwa setelah 1850 jumlah petugas militer termasuk petugas militer kolonial Belanda lulusan *Dutch Military Medical School* di Utrecht semakin meningkat, dan antara 1816 hingga 1855 jumlah presentasi dari petugas kesehatan tersebut adalah 20-40 persen dari orang-orang German.

didapati pelayanan kesehatan yang rumit yang penuh dengan persyaratan yang mengikat (Jeffers 1990: 6). Kondisi seperti itu membuat masyarakat tidak percaya dan ragu untuk melakukan pengobatan modern. Kondisi itu pun akhirnya mempengaruhi terhadap percepatan penularan penyakit.

Wajah *Gemeente Cheribon* sampai pertengahan abad ke-20 masih menampilkan apa yang disebut kampung,⁶ sebagai lingkungan 'muka' kota kolonial. Dalam koran *Koemandang Masjarakat* (21 Juli 1940) dilukiskan bahwa masyarakat, khususnya buruh asal pribumi, banyak yang menempati lokasi yang tidak sehat atau sanitasinya buruk, dipenuhi kubangan yang berbau tidak enak, yang dapat menyebabkan munculnya penyakit malaria. Lingkungan Kota Cirebon sampai pertengahan abad ke-20 disebut sebagai kota yang jorok dan dilecehkan atau *het geminachte strandnest* (*Weekblad voor Indië*, No. 15, 1918–19: 407). Keadaan lingkungan kota tidak teratur, kotor, becek, penuh lumpur, dan tidak mempunyai saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Apabila musim hujan sering terjadi banjir dengan ketinggian mencapai satu meter dan kelancaran aliran air sungainya sangat tergantung pada pasang-surut air laut sehingga ketika air laut

pasang, sampah dan kotoran masuk ke dalam sungai dan kemudian menumpuk di muara sungai. Lingkungan pesisir atau sekitar pantai sangat gersang dan panas.⁷ Lingkungan yang sering dilanda banjir seperti itu dapat menjadi faktor penyebab munculnya berbagai wabah penyakit, selain kegagalan panen yang berujung pada kelaparan dan menyusul wabah penyakit lainnya.

Dengan demikian, faktor perilaku hidup sehat masyarakat, kebijakan kesehatan, dan lingkungan penduduk, dapat menjadi faktor penyebaran wabah penyakit dan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Perilaku masyarakat yang tergeser akibat perubahan fungsi kota seperti tidak lagi mepedulikan kebutuhan kesehatan bagi diri dan lingkungannya. Pergeseran fungsi kota bagi masyarakat pribumi yang telah kehilangan kepemilikan tanahnya hanya menjadi arena untuk dapat mempertahankan hidup tanpa memikirkan kualitasnya. Perilaku mandi, minum, dan mencuci dengan air sungai yang sama menjadi sebuah pengabaian atas kualitas kesehatan—seperti terjadi di desa-desa di Semarang sebagai bandingan (Suryo 1989).

Sementara itu, ditemukan perilaku hidup tidak sehat masyarakat di Kota Cirebon yaitu mereka sering membuang sampah ke kali, memandikan binatang peliharaannya di kali yang sama, tidak terbiasa membersihkan kandang binatang, membuang kotoran binatang peliharaannya ke kali, sementara airnya sering pula digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor itu yang

⁶Kampung adalah lokasi tempat bekerja para pekerja di perkotaan yang dihuni para migran atau pendatang dari desa untuk mencari pekerjaan di kota. Lokasi ini terlihat sangat ramai, padat, miskin, kumuh, dan kotor. Lokasi ini muncul akibat adanya perubahan lingkungan dan sosial di kota; lihat Wertheim dan The Siaw Giap (1962: 233–4), <http://www.jstor.org/stable/2753184>, diunduh 4 Maret 2015.

⁷Lihat www.cirebonkota.go.id

menyebabkan persebaran penyakit semakin meningkat ke wilayah sekitar Kota Cirebon seperti gatal-gatal, wabah penyakit kolera, diare, pes dan disentri (*Koloniale Studiën*, 1916: 21; *Tijdspiegel*, t.t.: 393). Bahkan penyakit pes merebak di Kota Cirebon dan menjadi epidemi bagi daerah-daerah sekitarnya. Pada 1925, pemerintah Kota Cirebon membentuk Dinas Pemberantasan Pes (*Pesbestrijding Dienst*) yang bertempat di Kuningan sebelah selatan Cirebon. Dinas itu berada di bawah Kesehatan Sipil (*Dienst der Volksgezondheid*) atau yang sebelumnya disebut *Burgelijk Geneeskundige Dienst* yang berfungsi melakukan kontak langsung dengan masyarakat dalam menangani kesehatan masyarakat, baik bersifat kampanye melawan endemi dan epidemi penyakit pes (Boomgaard 1993: 87). Upaya pemerintah membantu pembasmian penyakit pes dilakukan dengan mengirim dokter pemerintah untuk memimpin laboratorium pemeriksaan tikus. Pada 1929, di daerah Kuningan ditempatkan pemimpin pemberantasan penyakit pes yang daerah tugasnya meliputi Cirebon, Indramayu, dan Tasikmalaya; selain itu ditempatkan sembilan orang penyuluh penyakit pes. Mereka juga dibantu pegawai Dinas Penyuluhan Pes dari Jawa Tengah yang sudah tidak banyak tugas sehingga diperbantukan di daerah Jawa Barat (ANRI 1976: CXLVI). Jumlah kematian akibat penyakit pes di Cirebon pada awal abad ke-20 sangat tinggi.

Selain wabah penyakit pes yang sangat parah pada 1922-30, masyarakat di Kota Cirebon juga sering dilanda

wabah penyakit malaria. Dalam koran *Bintang Tjirebon* (12 Mei 1914) dilaporkan wabah penyakit malaria yang sering disebut masyarakat Cirebon sebagai "penyakit demam maut" atau "mengijrail" menjalar di kampung-kampung di Kota Cirebon, seperti di Kejaksan, Cangkol, dan Kanggraksan hingga kemudian menyebar ke seluruh Karesidenan Cirebon (*Gedenkboek* 1906-31: 93-127). Penyakit lainnya yang mengancam kesehatan masyarakat Kota Cirebon antara 1929-40 adalah influenza yang paling berat dibandingkan masa-masa sebelumnya dan banyak menimbulkan kematian dalam masyarakat (ENI 1917: 477).

Walau perhatian pemerintah kolonial terhadap kesehatan di Kota Cirebon boleh dikata cukup besar, namun hingga 1940-an berbagai wabah penyakit bermunculan. Upaya pembasmian penyakit pes dilakukan oleh pemerintah termasuk perbaikan rumah penduduk yang terkena penyakit tersebut. Tetapi seperti terdapat dualisme dalam menghadapi permasalahan kesehatan masyarakat ini. Ketika pemerintah mengadakan perubahan atas fungsi kota, dari kota tradisional ke kota modern, sekaligus memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat modern untuk masyarakat, namun hal itu bisa memberatkan masyarakat karena berbagai persyaratan yang dibebankan. Begitu pula ketika masyarakat diperkenalkan hidup sehat dan pengobatan modern, terdapat penolakan atas upaya pemerintah tersebut. Masyarakat lebih mengikuti cara pengobatan yang diyakininya sendiri baik melalui dukun, atau hanya berdiam dirawat di rumah,

atau meramu obat-obatan tradisional, atau bahkan tetap beraktivitas sosial sekalipun dalam keadaan sakit sehingga memudahkan penularan bibit penyakit. Permasalahan ini tampak seperti tidak ada pemecahan. Faktor-faktor yang terkait baik lingkungan, kebijakan, dan budaya hidup sehat menjadi sulit diurai untuk masa itu.

KESIMPULAN

Pengkajian sejarah kesehatan tidak bisa lepas dari keterkaitannya dengan faktor geografi, lingkungan, politik, dan budaya masyarakat. Asumsi semakin tinggi tingkat kemajuan suatu daerah akan semakin dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya sesungguhnya dapat membantu menganalisis tingkat kesehatan masyarakat di kota. Derajat kesehatan masyarakat dapat menjadi faktor penentu tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu daerah atau kota. Upaya meningkatkan derajat kesehatan pun selayaknya dilakukan tanpa diskriminasi tetapi dengan perlindungan terhadap masyarakat secara merata karena bagaimanapun mereka merupakan sumber daya manusia yang diharapkan atau sebagai investasi negara.

Masa kolonialisme Belanda di Indonesia banyak memengaruhi segi kehidupan masyarakat. Ketidakadilan atau diskriminasi berbagai kebijakan untuk masyarakat pribumi membuahkan penderitaan panjang yang dialami masyarakat pribumi. Kebijakan politik kesehatan di Kota Cirebon, contohnya, telah memberikan gambaran dari wajah kota kolonial dengan masyarakatnya

yang tidak diperhatikan kesehatannya, sementara tenaga mereka dimanfaatkan untuk kemakmuran Negeri Belanda. Dari Kota Cirebon, Negeri Belanda mendapatkan keuntungan yang besar yang dihasilkan dari produksi gula. Namun keuntungan yang didapat Negeri Belanda tidak sebanding dengan kemakmuran masyarakat Kota Cirebon.

DAFTAR ACUAN

- Ambary, H. M. (1997), "Peranan Cirebon sebagai Pusat Perkembangan dan Penyebaran Islam," dalam S. Zuhdi (ed.), *Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutera: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ananta, A. dan I. Budhiarso (1990), "Kesehatan, Sumberdaya Manusia dan Pembangunan Ekonomi," *Prisma*, Th. XIX, No. 6.
- Basundoro, P. (2013), *Merebut Ruang Kota: Aksi Miskin di Kota Surabaya 1900-1960*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Boomgaard, P. (1993), "The Development of Colonial Health Care in Java: An Exploratory Introduction," *BKI*, Deel 149, No. 1.
- Boomgaard, P., dkk. (1996), *Health Care in Java: Past and Present*. Leiden: KITLV Press.
- Braudel, F. (1988), *Civilization and Capitalism 15th-18th Century: The Structures of Everyday Life, The Limits of Possible*, Vol. 1 (terj. dari Prancis oleh Sian Reynold). London: Collins/Fontana Press.
- Breman, J. (1983), *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial* (terj.). Jakarta: LP3ES.
- Brotowasisto (1990), "Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Masalah dan Prospeknya," *Prisma*, Th. XIX, No. 6.
- ENI (1917), *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*, Jilid I (ed. J. Paulus). Leiden: 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, E. J. Brill.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia* (1989), Jilid VII. Jakarta: PT Cipta Adikarsa.

- Hasyim, R. (2002), "Epidemi Kolera di Keresidnan Semarang 1900-1920," *Lembaran Sejarah*, Vol. 4, No. 2.
- Hurgronje, C. S. (1996), *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, Jilid V (terj. Soedarso Soekarno, dkk.). Jakarta: INIS.
- Jeffers, J. R. (1990), "Pengaruh Faktor-faktor Penawaran, Permintaan dan Ekonomi Sosial terhadap Pembuatan Kebijakan di Bidang Kesehatan," *Prisma*, Th. XIX, No. 6
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2009), *Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta: t.p.
- Koentjaraningrat dan A. A. Loedin (1985), *Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Kesehatan*. Jakarta: Gramedia, 1985
- Lubis, N. H. (2000), *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*. Bandung: Alqaprint.
- Masyhuri, *Menyisir Pantai Utara Jawa: Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940*, Jakarta: Yayasan Pustaka Nusantara-KITLV, 1996.
- Rahardjo, S. (1998), *Kota Dagang Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutera*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Sciortino, R. (2007), *Menuju Kesehatan Madani*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suhartono (1991), *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sulendraningrat, P. S. (1972), *Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari*. Jakarta: Bhratara.
- (1984), *Babad Tanah Sunda Babad Cirebon*. Cirebon: t. p.
- Sulistiyono, S. T. (1997), "Dari Lemahwungkuk Hingga Cheribon: Perkembangan Kota Cirebon sampai Awal Abad XX," dalam S. Zuhdi (ed.), *Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutera: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Suryo, D. (1989), *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Pusat Studi Antar Universitas.
- Tesch, J. W. (1941), "De ontwikkeling van de zorg voor de volksgezondheid in Nederlandsch-Oost Indië," *Koloniale Studiën*.
- Wahid, A. (2009), *Bertahan di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon*. Yogyakarta: Ombak.
- Wertheim, W. F. dan The Siaw Giap (1962), "Social Change in Java 1900-1930," *Pacific Affairs*, Vol. 35, No. 3, Autumn.
- Dokumen/Penerbitan Resmi**
- ANRI (1976), *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat)*, khususnya Memorie Resident Cheribon J. van der Marell, 22 April 1922. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Gedenkboek 1906-1931, *Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906-1931*.
- KIT 994/90, *Wapen van de Gemeente Cheribon. Kolonial Verslag 1883-1884*.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, 1906, No. 122.
- Surat Kabar/Majalah**
- Bintang Tjirebon* 1914.
- Koemandang Masjarakat* 1939-1940.
- Koloniale Studiën* 1916, 1941.
- Tijdspiegel* t.t.
- Weekblad voor Indië* 1918-1919.
- Internet**
- <http://www.jstor.org/stable/2753184>, diunduh 4 Maret 2015.
- www.cirebonkota.go.id, diunduh 7 Mei 2016.
- www.cirebonkota.go.id, diunduh 7 Mei 2016.

Menuju Asimilasi yang Wajar Wacana tentang Pembauran Golongan Tionghoa di Indonesiadalam “Star Weekly” 1946–61

Retnowati Subarno
Alumnus, Universitas Indonesia

Abstract

This article is about Star Weekly, a weekly magazine that had been published in Jakarta since Indonesia independence and was closed fifteen years later. That magazine was published by Chinese decendants in Indonesia and was aimed to their companions too. Although has a short period of the operation (1946–61), the magazine bring the assimilation mission of Chinese colleagues to become Indonesian citizens—a strategic issue in that age. It has been revealed that Star Weekly supported and bridged the idea of assimilation. The discussion of the topic is expected to be beneficial in order to understand the effort of Chinese groups in seeking the certainty of their citizenship status. This asticle is written using history method such as heuristic, critique, interpretation and historiography phases. The primary source is Star Weekly during its publication period and secondary literatures as suppoters.

Keywords: *history of media; Star Weekly; assimilation issues; citizenship; Chinese groups.*

Studi ini membahas tentang majalah mingguan *Star Weekly* yang terbit di Jakarta antara 1946–61. Pengkajian tentang *Star Weekly* dipandang penting berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, majalah itu diterbitkan oleh orang-orang keturunan Tionghoa¹ di

Indonesia dan secara sosiologis dapat dilihat sebagai representasi golongan masyarakat itu. Demikian pula jika

¹Terdapat dualisme istilah untuk menyebut golongan Cina yaitu ‘Cina’ dan ‘Tionghoa’. Dalam tulisan ini, istilah ‘Tionghoa’ mengacu kepada orang Cina yang digunakan sebagai

sebutan identitas mereka di Indonesia sejak abad ke-20. Istilah itu dipopulerkan oleh pers Melayu-Tionghoa pada awal abad itu. Akan halnya istilah ‘Cina’ juga digunakan dalam tulisan ini untuk menyebut negara Cina yang merupakan nama resmi negara itu sejak kemerdekaannya pada 1911 (Tan 2008: 1–2). Kadang-kadang juga digunakan ‘Tiongkok’ untuk menyebut negara Cina.

ditilik pada sasaran terhadap pembacanya, majalah itu membidik terutama golongan keturunan tersebut tanpa mengabaikan kelompok pembaca dari golongan keturunan yang lain. Kedua, secara politis, *Star Weekly* menampakkan kecenderungan akomodatif terhadap proses politik nasional yang tengah berlangsung tidak lama setelah Indonesia merdeka. Di tengah situasi yang belum menentu sepenuhnya saat itu, sikap *Star Weekly* sedikit-banyak menyumbang terhadap proses pembangunan bangsa yang belum lama lahir. Akhirnya, ketiga, dalam banyak materi tulisannya *Star Weekly* mempromosikan gagasan asimilasi yang terkait dengan masalah kewarganegaraan golongan keturunan Tionghoa di Indonesia pasca kolonial. Dalam suasana "kegelisahan kultural" pada sebagian orang Tionghoa di Indonesia kala itu, *Star Weekly* tampil sebagai peretas yang menawarkan alternatif jawaban, setidaknya wacana, terhadap masalah mendasar kewarganegaraan golongan keturunan.

Fokus pembahasan dalam studi ini diarahkan pada wacana tentang asimilasi dalam *Star Weekly* dan bagaimana perbincangan itu memperoleh tanggapan dari sejumlah pihak pembacanya. Lalu lintas wacana itu menunjukkan bahwa asimilasi merupakan isu yang sangat relevan bagi golongan keturunan Tionghoa di Indonesia pada masa itu —bahkan secara kultural kemungkinan besar masih bertemali hingga kini. Sumber utama penulisan ini adalah majalah *Star Weekly* yang, setelah diverifikasi, diyakini merupakan edisi asli, dan kini tersimpan sebagai koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indo-

nesia di Jakarta. Beberapa edisi majalah itu tidak ditemukan, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap upaya penulisan ini. Sangat disayangkan bahwa wawancara yang mestinya dilakukan terhadap beberapa mantan pengasuh *Star Weekly* yang masih hidup tidak dapat dilaksanakan karena terkendala usia lanjut pada yang bersangkutan.

GAGASAN DAN UPAYA AWAL ASIMILASI

Gagasan tentang asimilasi sebenarnya telah bersemi di Hindia Belanda setidaknya sejak 1930-an. Namun, dalam situasi kolonial yang sedang "matang-matang"-nya, konsep asimilasi kala itu belum terumuskan secara jelas. Ide asimilasi ketika itu diwadahi dalam Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang dibentuk pada 1932. Partai yang didirikan oleh Liem Koen Hian itu bertujuan membantu Indonesia membangun ekonomi, sosial maupun politik menuju suatu negara yang rakyatnya dapat menikmati hak yang sama. Mereka menyatakan bahwa orang Tionghoa harus menyatukan diri dengan gerakan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan.

Perkembangan PTI tidak luput dari dinamika masyarakat Indonesia pada masa kolonial kurun 1930-an. Pada waktu itu tampak gejala munculnya suatu "masyarakat baru" di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, yang sudah sanggup membedakan antara identitas suku dan kepentingan nasional. Ciri-ciri masyarakat baru itu tampak dalam alam pikiran mereka yang tidak lagi tradisional. Cita-cita mereka meng-

arah pada suatu satuan politik yang lepas dari ikatan tradisional ataupun kolonial Belanda. Indonesia merdeka adalah semboyan paling ekstrem dari cita-cita itu (Leirissa 1985: 69). Perkembangan itu disadari oleh sebagian orang Tionghoa yang merasakan bahwa “nasib” mereka terkait erat dengan pribumi. Dalam pemikiran etnis Tionghoa peranakan² juga muncul kesadaran bahwa tidak seperti warga etnis Tionghoa totok yang masih memiliki keluarga di Tionghoa, kaum peranakan menganggap bahwa Indonesia adalah Tanah Air mereka. Terlebih karena mereka tidak lagi memiliki saudara atau relasi di Tanah Daratan sehingga nasib mereka akan sama dengan pribumi.

PTI merupakan cikal bakal usaha pembauran masyarakat Tionghoa di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Liem Koen Hiam, pendiri PTI, mulai menganjurkan nasionalisme Indonesia di kalangan etnis Tionghoa (Suryadinata 1986: 53). Akan tetapi usahanya kurang berhasil karena banyak keraguan tokoh Indonesia. Mereka ragu apakah masyarakat Tionghoa dapat mengidentifikasi dirinya sebagai orang Indonesia (Suryadinata 1986: 87). Pergerakan nasional Indonesia sebelum Perang Dunia II cenderung menolak minoritas Tionghoa ikut dalam gerakan tersebut sehingga berarti pula menolak mereka masuk dalam proses penciptaan bangsa Indonesia. Baik nasionalis Islam maupun sekuler cenderung memberikan

batasan bangsa Indonesia dalam arti rakyat Indonesia “asli.” Keanggotaan partai politik pribumi hanya terbuka untuk orang Indonesia asli. Walaupun partai-partai politik kecil sayap kiri (seperti Gerindo) membuka keanggotaan untuk Tionghoa peranakan, mayoritas organisasi pergerakan nasional tidak mau melakukan hal tersebut (Suryadinata 1986: 39).

Selain itu, ide asimilasi belum berkembang sepenuhnya karena pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, golongan Tionghoa masih terpecah antara mereka yang ingin diakui sebagai warga Cina/Tiongkok dan yang ingin diakui setara dengan golongan Eropa. Artinya, mereka tidak sepenuhnya menghendaki pembauran dengan golongan pribumi. Hal itu berubah ketika Indonesia merdeka. Tatanan masyarakat berdasarkan ras praktis hilang, golongan Eropa yang awalnya berkuasa meninggalkan Indonesia dan pilihan bagi golongan Tionghoa yang tersisa hanyalah menjadi warganegara Cina atau berbaur dengan menjadi warga negara Indonesia atau WNI.

Setelah Indonesia merdeka, *Star Weekly* menjadi salah satu media yang “getol” menyuarakan asimilasi. Redaksi majalah itu memandang bahwa seiring dengan batas waktu masa penolakan kewarganegaraan Indonesia pada akhir Desember 1951 maka golongan minoritas Tionghoa yang telah menyatakan diri sebagai WNI harus mulai mencari solusi agar diterima dalam masyarakat dan meminimalisasi diskriminasi. Melalui tulisan semacam tajuk rencana yang berjudul “Omong-omong tentang Asimilasi” (*Star Weekly*, 2 Februari 1952), ide

²Istilah *peranakan* mengacu pada orang Tionghoa yang lahir di Indonesia; sedangkan *totok* merujuk pada orang Tionghoa yang asli atau bermigrasi dari Cina daratan.

asimilasi golongan Tionghoa di Indonesia mulai tersebar luas. Bentuk tulisan berupa tanya-jawab—sepanjang tiga halaman majalah *Star Weekly*—dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami maksud penulis. Tidak disebutkan siapa penganggit artikel itu, namun menurut Harjoko Trisnadi, mantan pekerja *Star Weekly*, penulis tersebut adalah Auwjong Peng Koen—juga dikenal sebagai P.K. Ojong.³

Intinya, tulisan tersebut memaparkan bahwa secara sosiologis asimilasi dapat terjadi seperti di Amerika Serikat yang dihuni oleh imigran dari berbagai bangsa di dunia. Orang-orang Eropa di Amerika tidak merasa menjadi orang Eropa lagi dan membentuk *nation* baru sebagai bangsa Amerika. Hal itu bisa juga terjadi pada golongan Tionghoa di wilayahlain, misalnya di Filipina dan Thailand. Namun, proses asimilasi yang sukses di negara-negara tersebut bukan semata-mata diakibatkan oleh percampuran darah. Asimilasi merupakan proses panjang yang sukses atau tidaknya lebih dipengaruhi oleh komitmen rasionalataupun emosional baik pada golongan minoritas maupun mayoritas untuk membentuk suatu *nation* baru sebagai kesatuan bangsa. *Star Weekly* menyimpulkan, "... bahwa bukan darah yang menetapkan apakah orang Tionghoa berasa seperti orang Tionghoa tapi pikiran dan perasaan. Jang

menetapkan itu pikiran dan perasaan itu ditetapkan oleh pendidikan . . ."⁴

Tulisan tersebut juga menjelaskan langkah-langkah menuju asimilasi. Langkah pertama ialah bahwa orang Tionghoa harus memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Hal itu merupakan asimilasi yuridis. Langkah selanjutnya ialah menghilangkan prasangka, kebencian dan memandang rendah satu sama lain. Penulis artikel menjelaskan bahwa prasangka rasialis berasal dari peraturan kolonial yang membedakan antara golongan pribumi dan Tionghoa yang harus dihilangkan. Penulis itu memuji sikap pemerintah Indonesia yang mengambil keputusan untuk mempermudah golongan Tionghoa menjadi WNI karena mereka hanya perlu berdiam dan diakui sebagai warga negara sejak 1951. Menurutnya pemerintah Republik yang baru tidak ingin melestarikan regulasi kolonial yang menghambat asimilasi golongan Tionghoa di Indonesia.

Namun, kebijakan pemerintah Indonesia yang membentuk rancangan undang-undang baru dan mulai bernegosiasi dengan pemerintah RRT (Republik Rakyat Tiongkok) tentang dwi-kewarganegaraan, yang justru akan mengakibatkan banyak warga keturunan Tionghoa di Indonesia menjadi warga negara asing, membuat redaksi *Star Weekly* kecewa. Hal itu dinilai sebagai upaya menghambat asimilasi yuridis golongan Tionghoa di Indonesia. Auwjong Peng Koen tidak serta-merta

³Di kemudian hari, P. K. Ojong bersama Jakob Oetama dikenal sebagai pendiri *Kompas* (1965), harian nasional terkemuka di Indonesia hingga saat ini.

⁴Lihat "Omong-omong tentang Asimilasi," *Star Weekly*, 2 Februari 1952; Tajuk Rencana. Kutipan langsung dalam ejaan asli.

menganjurkan golongan Tionghoa menjadi warga negara asing. Ia tetap menganjurkan golongan Tionghoa menjadi WNI yang baik. Ia juga mengimbau agar golongan Tionghoa di Indonesia tidak asosial sehingga asimilasi bisa berjalan. Dalam rubrik Timbangan (*Star Weekly*, 13 November 1954), Auwjong antara lain menulis,

Cap yang diperoleh peranakan Tionghoa tergantung dari cara hidup mereka. Jika sebagian besar diantaranya asosial, cuma mementingkan diri sendiri dan ingin hidup menyendiri, cap yang kita dapat pasti tidak terlalu bagus. Jika di antara golongan-golongan kita banyak menunjukkan sifat-sifat lain yang tidak baik, seperti korup, pengecut dan sebagainya pasti cap itu akan menempel berpuluh-puluh tahun pada golongan kita sehingga akan menyukarkan anak cucu kita untuk hidup bebas dan beruntung. Kami khawatir banyak peranakan Tionghoa yang asosial. Jumlah orang yang mau mencurahkan tenaga untuk pekerjaan-pekerjaan yang berguna bagi masyarakat masih sedikit. Banyak gerakan yang perlu bagi golongan Tionghoa kekurangan tenaga pimpinan. . . .⁵

Pada 1958, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Kewarganegaraan baru yang bila disandingkan dengan isi Undang-Undang Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRT mengharuskan golongan Tionghoa aktif menanggalkan kewarganegaraan RRT-nya. Menanggapi hal itu, *Star Weekly*, sebagai media peranakan menyatakan sikapnya melalui tulisan dalam rubrik Intisariberjudul "Kewarganegaraan Tunggal" sebagai berikut.

Keberatan kita bukan terhadap perjanjian itu, bukanlah terletak pada isinya yang mewajibkan orang-orang yang dianggap

mempunyai kewarganegaraan lain disamping kewarganegaraan Indonesia untuk melepaskan kewarganegaraan lain (kewarganegaraan RRT) itu. Kita bersedia untuk menjatakan menanggalkan kewarganegaraan RRT itu, meskipun sebetulnya itu tidak perlu lagi, sebab dalam hati kewarganegaraan RRT itu sudah lama kita lepaskan, dengan sendirinya Jang merupakan keberatan prinsipil ialah bahwa dengan mengadakan perjanjian Sunario-Chou itu, pihak kita mengakui suatu negara asing yang sebetulnya bisa dipetjahkan sendirian, karena soal kewarganegaraan itu dapat dianggap suatu hal dalam negeri (soal intern). Inilah keberatan kita, Vietnam, Filipina, Thailand, Birma, India, Malaya menentukan sendiri siapa yang adalah warganegarannya, karena pemerintah Indonesia menghendakinya kita akan melakukannya juga (*Star Weekly*, 21 November 1959).⁶

Tajuk "Kewarganegaraan Tunggal" tersebut dipublikasikan secara berseri dan menandai pemikiran asimilasi yang banyak dimuat di *Star Weekly* setelah Undang-Undang Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRT mulai berlaku pada 1960. Hal itu menunjukkan bahwa majalah tersebut memiliki perhatian yang besar terhadap masalah pembauran golongan Tionghoa di Indonesia di tengah umur Republik yang masih muda.

Dalam rangkaian tulisan itu, *Star Weekly* mempersoalkan sebutan "warga negara keturunan Tionghoa" di Indonesia. Penggunaan istilah itu, menurut *Star Weekly*, merupakan "istilah yang tidak jitu" karena hanya pantas bagi Mao Tse-tung atau Chiang Kai Shek seandainya mereka meminta dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia menurut hukum Indonesia. Lebih lanjut

⁵Dikutip dari Iswara(2014:122).

⁶Kutipan langsung dalam ejaan asli.

ditulis bahwa pemakaian istilah tersebut tidak tepat jika ditujukan bagi golongan Tionghoa peranakan di Indonesia karena (akan) menghilangkan identitas asli golongan itu (*Star Weekly*, 13 Februari 1960).⁷

Peranakan Tionghoa di Indonesia yang telah memilih menjadi warga negara Indonesia sesungguhnya telah menjadi keturunan Indonesia karena nenek moyang totok pertamanya yang tinggal di Indonesia menikahi wanita setempat. Oleh karena itu, golongan peranakan, berdasarkan garis keturunan ibu, seharusnya disebut "warga negara keturunan Tionghoa-Indonesia." Menurut *Star Weekly*, penetapan keturunan Tionghoa berdasarkan ilmu pengetahuan, yakni mengikuti penggolongan darah, juga tidak relevan.

Menurut ilmu hayat (biologi), ilmu kedokteran, ilmu antropologi, soal darah itu (darah Tionghoa, darah Ningrat, darah Indonesia dsb.) adalah omong kosong, nonsens. Ilmu pengetahuan hanya mengenal golongan darah (*bloedgroep*) A, golongan B, golongan O, golongan AB.⁸

ASIMILASI YANG WAJAR

Tajuk *Star Weekly* berjudul "Warga Negara Tunggal III" mengulas tentang peta politik golongan Tionghoa di Indonesia. Menurut majalah itu, mereka dapat dikelompokkan, pertama, ke dalam golongan yang percaya bahwa masalah minoritas Tionghoa dapat diatasi, dan, kedua, yang tidak percaya bahwa masalah minoritas Tionghoa dapat

diatasi. Golongan kedua—yang tidak percaya penyelesaian masalah kewarganegaraan keturunan—telah menolak menjadi warga negara Indonesia sebelum batas akhir penggunaan hak repudiasi pada 1951 dan beremigrasi keluar negeri. Di antaranya terdapat golongan peranakan Tionghoa yang sebenarnya sangat berdedikasi terhadap Indonesia seperti Liem Koen Hiam yang merupakan ketua PTI. Meski keputusan Liem harus dihormati namun hal itu dilihat oleh redaksi *Star Weekly* sebagai "sesuatu yang tragis." Bagi golongan yang tetap ingin mempertahankan kewarganegaraan Indonesia setelah 1951, yang berarti harus memilih kewarganegaraan Indonesia berdasarkan perjanjian RI-RRT, redaksi *Star Weekly* mencoba menjabarkan solusi asimilatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah minoritas.

Pada waktu itu, pemerintah mulai menganjurkan asimilasi seperti diungkapkan Presiden Sukarno di hadapan mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Dalam orasinya, Presiden menyatakan agar dilakukan perkawinan antarsuku di antara masyarakat Indonesia. Pernyataan serupa disampaikan Menteri Achmadi dalam seminar koperasi Baperki yang mengemukakan bahwa untuk mengurangi jarak pemisahan antarsuku atau ras, maka salah satu jalan adalah dengan sedikit demi sedikit meninggalkan usaha-usaha yang bersifat eksklusif dan menjalankan asimilasi kultural, ekonomis dan biologis, di kalangan keturunan asing. Namun Baperki menolak anjuran itu. Dalam peringatan ulang tahun Baperki, 3 Februari 1960, Ketua Umum Baperki

⁷Lihat juga dalam Jahja (1999: 7).

⁸Dikutip Jahja (1999: 7).

Siauw Giok Tjan menegaskan bahwa penyelesaian masalah golongan minoritas dengan cara asimilasi biologis dan ganti namatidak bijaksana, tidak demokratis, melanggar hak-hak asasi manusia, dan tidak dapat dilaksanakan.

Berbeda dengan Baperki, *Star Weekly* justru menyatakan sikapnya mendukung asimilasi. Majalah itu memulai gerakan asimilasi dengan mengumpulkan sepuluh tokoh terkemuka Tionghoa di Indonesia untuk menandatangani pernyataan "Menuju ke Asimilasi yang Wajar." Kesepuluh tokoh itu ialah Ong Hok Ham (kontributor *Star Weekly*), Auwjong Peng Koen (Pemimpin Redaksi *Star Weekly*), Lauw Chuan Tho (Junus Jahja), Kwee Hwat Djien, Tjing Tin Jan, Tjia Djie Siong, Tan Bian Seng, dan Tantekhian. Dengan demikian, selain sebagai sikap resmi *Star Weekly*, pernyataan "Menuju Asimilasi yang Wajar" dapat dilihat sebagai tekad kolektif sejumlah tokoh Tionghoa di Indonesia yang menghendaki berasimilasi. Mereka mengemukakan sikapnya untuk tiga hal. Pertama, mendukung sepenuhnya pendirian Presiden Sukarno; kedua, masalah minoritas hanya dapat diselesaikan dengan jalan asimilasi sukarela dalam segala lapangan secara aktif dan bebas; dan, ketiga, tidak membenarkan tindakan dan ucapan yang menghambat proses asimilasi dan juga tidak menyetujui tindakan yang memaksakan asimilasi.

Sebaliknya, menurut *Star Weekly*, asimilasi yang wajar dan suka rela telah berabad-abad terjadi di Indonesia. Percampuran darah telah terjadi di antara penduduk asli dengan orang-orang asing yang berasal dari Cina, Arab, dan Eropa.

Asimilasi yang natural ini menghasilkan penduduk peranakan Tionghoa, peranakan Arab dan peranakan Tionghoa. Bahkan mayoritas penduduk yang dikatakan sebagai "asli" pun sebenarnya merupakan hasil dari proses asimilasi dengan pendatang asing beragama Hindu dari India atau dari bangsa yang lain. Namun, kebijakan kolonial yang menerapkan politik segregasi telah menghambat proses asimilasi yang wajar tersebut sehingga golongan Tionghoa menjadi terasing dari golongan "asli." Berhubung pemerintah kolonial tidak lagi berkuasa sejak Indonesia merdeka, maka golongan Tionghoa, sebagai warga negara Indonesia, harus kembali mendukung langkah menuju asimilasi.

WACANA GANTI NAMA

Anjuran *Star Weekly* kepada golongan Tionghoa di Indonesia agar mereka berganti nama diri dapat dilihat pada tulisan Ong Hok Ham berjudul "Tentang Nama-nama Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa."⁹ Artikel itu menjelaskan sejarah pergantian nama bagi golongan Tionghoa di Indonesia yang diawali dengan meninjau sistem penamaan yang berlaku di Indonesia khususnya di Jawa. Sistem sosial masyarakat Jawa tidak mengenal nama keluarga bagi anak-anak mereka namun dalam perkembangannya terdapat pula penduduk Jawa yang menamakan anak mereka dengan mengikutsertakannama

⁹Terbit secara bersambung dalam dua edisi *Star Weekly*, yakni 6 Februari 1960, dan 13 Februari 1960.

JEJAK NUSANTARA

Menuju Asimiliasi yang Wajar Wacana tentang Pembauran Golongan Tionghoa di Indonesia "Star Weekly" 1946-61

ayahnya sehingga sebenarnya pemberian nama pada orang Jawa bersifat fleksibel.

Ong Hok Ham menjelaskan bahwa pada abad ke-17 telah banyak orang Tionghoa memeluk agama Islam dan mengganti nama mereka dengan sebutan yang bernuansa Islam. Hal itu terbukti pada Kapten Tionghoa terakhir di Batavia yang bernama Mohammad Jafar. Hal yang sama terjadi di Sumenep, Madura, ketika suatu golongan Tionghoa dianggap "Indonesia asli" karena mereka tidak berbeda dengan golongan Indonesia asli lainnya. Mereka tidak lagi menggunakan nama Tionghoa dan dapat dijadikan sebagai contoh bukti bahwa orang Tionghoa dapat berasimiliasi dengan mengindonesiakan nama mereka.

Setelah kemerdekaan, banyak orang Tionghoa di Indonesia yang tetap menggunakan nama Tionghoa tetapi sebenarnya mereka tidak memahami (sistem) penamaan tersebut. Banyak diantara mereka menggunakan tiga kata dalam namadiri tetapi tidak mengandung unsur nama keluarga sesuai dengan tradisi penamaan orang Tionghoa. Ketiga kata nama yang dipasang itu hanya didasarkan pada kebutuhan agar mudah diucapkan atau enak didengar. Cara lain "pengindonesiaan" nama orang Tionghoa ialah menggabungkan tiga penggal nama—sesuai tradisi mereka itu—menjadi satu kesatuan nama. Contohnya tidak lain adalah Ong Hok Ham sendiri yang di kemudian hari mengeja namanya menjadi Onghokham (tanpa spasi).¹⁰ Ada pula yang

menambahkan alias di belakang nama Tionghoa mereka. Untuk itu Ong Hok Hammenganjurkan agar pemerintah membentuk regulasi resmi agar orang Tionghoa di Indonesia yang ingin mengganti namanya dapat diakomodasi.

Masih dalam artikel yang sama, Ong Hok Ham menyarankan agar penggantian nama Tionghoa dengan nama "asli" Indonesia dilakukan dengan beberapa cara. Sebaiknya nama mereka diganti dengan nama-nama yang berlaku di daerah-daerah tertentu sebab penggantian nama ini bertujuan untuk mempercepat asimiliasi dengan penduduk lokal. Misalnya, mereka yang tinggal di lingkungan budaya Jawa dapat mengambil nama dari bahasa Sanskerta, Kawi atau bahasa Jawa modern. Bagi yang tetap ingin mempertahankan nama keluarga dapat "menerjemahkan" dan menyambungkannya dengan nama kecil. Nama juga dapat diindonesiakan berdasarkan suara seperti *tan* menjadi *tanoyo*, *han* menjadi *handoyo*, *lie* menjadi *lina*, dan sebagainya.

Star Weekly memandang perlu langkah menuju asimiliasi yang wajar dengan memberi nama anak-anak Tionghoayang lahir di Indonesia langsung dengannama Indonesia. Dalam liputan bertajuk "Tentang Nama Indonesia untuk Anak-anak Peranakan," majalah itu mewawancarai sejumlah orang Tionghoa yang memberi nama anaknya dengan nama Indonesia. Tan Tek Hian, misalnya, menamai anaknya Iskandar Engguat. Alasannya ialah

¹⁰Tidak diketahui persis sejak kapan Onghokham menggunakan ejaan nama tunggal ini. Paling tidak dalam disertasinya di Yale

University pada 1975, nama tunggal itu sudah dipakai; demikian pula dalam berbagai publikasi tulisannya setelah itu.

bahwa kaum peranakan harus menyesuaikan diri. "Penyesuaian diri ini haruslah menuju ke arah asimilasi," kata Tan seperti dikutip *Star Weekly*. Keluarga Oei Koen Hian memberi nama anaknya Misha Maria Wibachman atas dasar bahwa anaknya lahir di Indonesia. Indonesia adalah tanah airnya. "Dengan pemberian nama ini kami bukannya bermaksud untuk mencari keuntungan-keuntungan, semata-mata karena kami ingin menyesuaikan diri dengan keadaan." Terdapat pula motivasi dari Siek Tjin Kwan yang mengatakan, "Saya menjadi warga negara Indonesia maka hal ini harus dinyatakan dalam semua lapangan termasuk dalam nama-nama kita" (*Star Weekly*, 20 Februari 1960).

Artikel tersebut disusul oleh penjelasan Ong Hok Ham dalam risalah berjudul "Asimilasi Golongan Peranakan" (*Star Weekly*, 27 Maret 1960). Dalam artikel tersebut Ong mengemukakan bahwa golongan minoritas peranakan Tionghoa cenderung mempertahankan kedudukannya sebagai minoritas. Mereka ingin menjadi warga negara Indonesia yang baik tetapi masih mempertahankan cara-cara hidup mereka sendiri. Mempertahankan kebudayaan sendiri dalam kondisi stabil sebenarnya tidak menjadi masalah namun apabila terjadi dalam suatu situasi krisis, baik sosial maupun politik, konflik dan diskriminasi terhadap minoritas tidak akan bisa dihindari. Oleh karena itu menurut Ong dalam artikel tersebut [sesuai dengan ejaan aslinya],

Satu-satunya jalan menurut penulis ialah asimilasi atau peleburan seratus persen, djadi menjadi orang-orang Indonesia "asli" Asimilasi berarti menghilangkan

identifikasi sebagai anggota golongan minoritas. Salah satu jalan yang sekarang dihebohkan ialah penggantian nama. Ini hanyalah salah satu jalan. Sesudah penggantian nama maka juga harus didjalankan integrasi dalam lapangan ekonomi, politik dan lain-lain. Pendeknja segala eksklusivitas dari minoritas harus dihapuskan. Tentu ini tidak dapat didjalankan dengan sekaligus tiba-tiba tetapi tergantung dari perseorangan anggota-anggota minoritas Apa yang hanya dapat ditjiptakan ialah mentjiptakan suasana dimana anggota-anggota minoritas ini dapat meleburkan diri dengan jalan mudah, umpamanja dengan jalan perubahan nama, suasana pendidikan, djadi sekolah-sekolah tjampuran dan lain-lain.

PERKAWINAN CAMPUR

Wacana tentang perkawinan campur antara golongan Tionghoa di Indonesia ditulis oleh Ong Hok Ham berjudul "Perkawinan Indonesia-Tionghoa Sebelum Abad ke-19 di Pulau Jawa" (*Star Weekly*, 15 Februari 1958). Artikel ini memberikan gambaran kepada pembaca *Star Weekly* bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka perkawinan campuran antara golongan Tionghoa dan pribumi telah terjadi. Orang Tionghoa yang datang ke Indonesia umumnya laki-laki, berurusan dengan perdagangan dan harus tinggal dalam waktu yang lama sehingga tidak jarang mereka mengawini perempuan setempat. Biasanya, wanita yang dikawin oleh orang Tionghoa berasal dari suku Bali karena mereka tidak keberatan makan daging babi. Perkawinan antara orang Tionghoa dan penduduk setempat terjadi karena sebelum abad ke-17 tidak ada wanita Tionghoa totok di Indonesia. Tidak

jarang pula orang Tionghoa di Indonesia kawin dengan wanita muslimah dan menganut agama Islam

Artikel tersebut memberikan pengertian kepada pembaca *Star Weekly* bahwa perkawinan campur merupakan hal yang wajar dan mendorong asimilasi dengan golongan pribumi. Dalam artikelnya, Ong Hok Ham mengutip catatan Ong Tae Hae, seorang pelancong Tionghoa pada awal abad ke-18, bahwa

Bila seorang Tionghoa telah berada di rantau untuk beberapa generasi tanpa kembali pulang ke leluhurnya, mereka sering lupa adjaran-adjaran kebidjaksanaan kita (Tionghoa) dalam bahasa makanan dan berpakaian, mereka meniru tjara-tjara penduduk pribumi; dalam mengkadji buku-buku asing, mereka tidak segan-segan mendjadi orang Djawa dan menjebutkan diri muslim (*Star Weekly*, 15 Februari 1958).

Untuk menuju asimilasi yang wajar *Star Weekly* memuat kembali artikel tentang anjuran untuk melakukan perkawinan campuran di kalangan Tionghoa dan Indonesia. Artikel yang berupa imbauan itu ditulis oleh Auwjong Peng Koen berjudul "Asimilasi dan Bhineka Tunggal Ika" (*Star Weekly*, 26 Maret 1960), seminggu menyusul tulisan Ong Hok Ham tentang ganti nama. Dalam artikel itu Auwjong memaparkan bahwa asimilasi paksaan memang seharusnya ditentang. Segala sesuatu yang bersifat paksaan harus ditolak, sebaliknya menolak asimilasi wajar adalah tindakan negatif. Asimilasi secara wajar sebenarnya telah berlangsung alami sebelum kedatangan kolonial, namun peraturan kolonial pada waktu itu menghambat asimilasi wajar yang telah berlangsung antara pribumi dan orang Tionghoa.

Ketika kolonialisme telah lenyap, maka sewajarnya bila golongan Tionghoa kembali melakukan asimilasi yang wajar.

Tentang paham Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan, banyak orang Indonesia mengakui perbedaan tetap ada di alam tubuh bangsa Indonesia. Namun, menurut Auwjong, paham tersebut bukanlah bermaksud untuk mempertahankan perbedaan. Antara lain ia menulis,

Paham bhineka Tunggal Ika itu bukanlah bermaksud untuk secara kukuh mempertahankan, mengkonservir perbedaan-perbedaan itu sampai kiamat, dengan andjuran untuk djangan mengadakan pernikahan antar-suku dan antar-golongan, menentang pernikahan di luar suku, di luar golongan. Ini tidak sekali-kali dapat dibatja dalam paham Bhineka Tunggal Ika. Tujuan Bhineka Tunggal Ika ialah persatuan. Paham itu hendak mendamaikan perbedaan-perbedaan jang ada, tapi paham itu bukan menjokong usaha untuk mengabadikan perbedaan dengan tjara *kustmatig* (*Star Weekly*, 26 Maret 1960).

Dalam artikel tersebut Auwjong juga mengingatkan pembaca tentang pidato Presiden Sukarno di depan mahasiswa di Yogyakarta, beberapa tahun sebelumnya. Dalam pidato itu Bung Karno menyatakan harapannya agar Megawati Sukarno Putri menikah dengan orang Sulawesi dan agar warga negara Indonesia secara suka rela kawin antarsuku. Ia juga mencontohkan bahwa Bung Hatta menikah dengan orang dari suku bangsa lain. Menurut Auwjong, perkawinan antar suku merupakan salah satu jalan agar prasangka rasial dan etnosentrisme dapat dihilangkan secara bertahap.

Auwjong Peng Koen juga melihat kecenderungan orang Tionghoa peranakan yang kawin dengan sesama peranakan. Hal itu menurutnya merupakan usaha yang kurang lebih sama dengan “pemurnian darah Jerman” yang pernah diterapkan oleh Hitler. Menurut Auwjong, tidak seharusnya orang Tionghoa menolak perkawinan antarsuku.

Redaksi *Star Weekly* menyadari bahwa anjuran tentang perkawinan campur dan pergantian nama bagi golongan Tionghoa akan menimbulkan polemik. Oleh karena itu, pada 2 April Ong Hok Ham menulis tajuk berjudul “Asimilasi dan Manifesto Politik.” Artikel tersebut menekankan bahwa anjuran untuk melakukan asimilasi bukanlah sebuah pemaksaan. Ia mengungkapkan bahwa yang harus dilakukan adalah “asimilasi terpimpin” yakni bahwa setiap elemen masyarakat baik minoritas maupun mayoritas beserta pemerintah menciptakan situasi yang kondusif demi terciptanya asimilasi yang wajar. Asimilasi dengan perkawinan campur dapat dikatakan sebagai pemaksaan bila pemerintah dengan otoriter memilihkan jodoh bagi orang Tionghoa di Indonesia. Namun, bila pemerintah memajukan hubungan kedua golongan sehingga menciptakan kondisi minoritas dapat bertemu dengan mayoritas maka itu adalah sebuah asimilasi terpimpin. Hal itu harus didukung. Ong Hok Ham juga mendukung pemerintah untuk melarang orang asing belajar di sekolah asing dan pemerintah mengarahkan seluruh perhatian anak-anak warga Indonesia untuk berorientasi ke tanah airnya. Menurutnya asimilasi merupakan satu-satunya jalan untuk menghilangkan diskriminasi dan

masalah Tionghoa di Indonesia. Berikut kutipannya:

Kecuali bahwa asimilasi adalah sesuai dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” dan haluan negara dalam “Manifesto politik” maka asimilasi juga merupakan pemecahan masalah minoritas. Asimilasi berarti melenyapkan perbedaan-perbedaan antara golongan satu dengan golongan lainnya. Sehingga diskriminasi dengan sendirinya lenyap karena tidak ada perbedaan lagi. Golongan minoritas hanya selalu menekankan soal diskriminasi mengesankan bahwa seolah-olah letak kesalahannya adalah pada mayoritas yang mendiskriminir. Sedangkan duduk perkaranya juga mempunyai gambaran lain, yaitu minoritas yang menjauhkan diri dari masyarakat dan tidak mau ikut serta dalam usaha-usaha negara.¹¹

[...]

Halangan terbesar bagi masyarakat minoritas untuk meleburkan diri ialah kurangnya mereka berorientasi ke Indonesia. Pikiran ini dipengaruhi oleh jalan pikiran zaman kolonial ketika memang pemerintah kolonial memberi kesan bahwa perbaikan kedudukan hanya bisa datang dari Tiongkok. Sekarang pikiran ini harus ditinggalkan karena sudah tidak sesuai zaman.¹²

BERAGAM TANGGAPAN

Serangkaian tajuk *Star Weekly* yang secara gamblang menganjurkan asimilasi tersebut memantik tanggapan dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang menolaknya. Siauw Giok Tjan, pemimpin Baperki, misalnya, berbeda haluan dengan Auwjong Peng Koen. Ia menulis dua artikel yang dimuat dalam *Star Weekly* pada 2 April 1960 dan 23

¹¹Dikutip dari Jahja (1999: 43).

¹²Dikutip dari Jahja (1999: 45).

April 1960. Artikel pertama Siauw berjudul "Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Adil dan Makmur" antara lain menyatakan,

Memaksakan penggantian nama, memaksakan perkawinan tjampur atau asimilasi biologis dan pergantian agama adalah bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Lagi pula andjuran perkawinan tjampuran, ganti nama dan ganti agama tidak mendjamin dalam waktu singkat masalah minoritas (golongan ketjil) dengan bidjaksana dan dihapusnja praktek-praktek diskriminasi rasial. Penjelesaian masalah minoritas dengan bidjaksana dan praktek-praktek diskriminasi rasial dapat ditjapai dalam waktu jang lebih singkat dengan terwujudnja masyarakat adil dan makmur dan berakhimja sistem "manusia menindas manusia" . . .

Siauw menegaskan bahwa meskipun asimilasi "versi" *Star Weekly* tidak bersifat memaksa namun dalam praktiknya anjuran yang disokong oleh sebagian masyarakat tidak jarang berubah menjadi pemaksaan. Dalam hal ini Siauw mengungkapkan bahwa asimilasi bukanlah istilah yang tepat. Menurutnya yang harus dilakukan ialah integrasi.¹³

Dalam artikel selanjutnya Siauw kembali menegaskan bahwa integrasi dapat tercapai dengan kemakmuran dan kestabilan politik. Ia mendukung peranan Tionghoa menjadi WNI namun tetap menganjurkan agar kebudayaan Tionghoa tidak serta merta dihilangkan.

¹³Haluan integrasi artinya adalah Indonesia terdiri dari banyak ras dan orang Tionghoa termasuk salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia tetap mempertahankan identitas kesukuan mereka seperti nama, bahasa dan kebudayaannya tetapi tetap bekerja sama dengan suku bangsa lainnya dalam membangun Indonesia (lihat Soyomukti 2012: 152).

Namun, langkah yang paling tepat bagi penyelesaian masalah Tionghoa adalah mewujudkan masyarakat tanpa kelas seperti di Rusia.

Tanggapan kedua datang dari Yap Tiam Hien¹⁴ yang memiliki pandangan yang lebih netral. Ia setuju bahwa kemajemukan dalam masyarakat tetap harus dipertahankan. Ia tidak setuju pendapat Ong Hok Ham bahwa asimilasi merupakan satu-satunya jalan bagi pemecahan masalah Tionghoa. Pandangannya lebih terbuka. Menurut Yap, masalah minoritas dapat dipecahkan dengan cara lain yakni, pertama, perlu dibentuk Undang-Undang yang melarang dan menghukum setiap tindakan yang memberikan hak istimewa kepada suatu golongan etnis atau yang melakukan dan menganjurkan diskriminasi rasial. Kedua, perlupendidikan umum tentang arti kebangsaan yang luas, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokratis. Akhirnya, ketiga, perlu *policy* yang menciptakan dan memelihara hubungan yang baik antarsuku dan antar-golongan.

Namun, Yap Tiam Hien tidak setuju dengan banyak pokok yang disampaikan Siauw Giok Tjan. Menurut Yap, "terapi" Siauw lebih condong kepada komunisme sementara penduduk Indonesia terdiri dari mayoritas Muslim dan Kristen yang akan menentang komunisme. Bagi Yap, jalan keluar yang ditawarkan Siauw terlalu naif karena menekankan pada perombakan kelas sosial yang tidak jelas kapan akan terjadi.

¹⁴Di kemudian hari Yap Tiam Hien dikenal sebagai salah seorang pengacara hukum terkemuka hingga masa Orde Baru di Indonesia.

Selanjutnya, Yap Tiam Hien menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi di kalangan minoritas adalah akibat dari “dominant group” yang menekan minoritas. Asimilasi seharusnya merupakan upaya timbal-balik dari mayoritas dan minoritas. Menurut Yap, saat itu WNI keturunan Tionghoa masih mengalami berbagai hambatan dari mayoritas untuk berasimilasi dan masyarakat saat itu belum kondusif untuk menumbuhkan asimilasi. Bagi Yap, yang harus dilakukan adalah “membersihkan hati” mayoritas penduduk untuk menerima golongan minoritas, menjadikan masyarakat minoritas lebih memahami perbedaan dan kasih-sayang seperti ajaran Kristen, bukan penghapusan perbedaan fisik dan kultural melainkan penghapusan prasangka rasial dan egosime mayoritas.

Pada 12 April 1960, redaksi *Star Weekly* menerima sebuah telegram dari Voorschoten, Negeri Belanda, yang dikirim oleh Ferry Sonnevillie yang menyokong asimilasi bebas dan aktif. Pernyataan persetujuan juga dikirim oleh sekelompok orang yang menyetujui konsep asimilasi yang wajar. Mereka adalah Mr. Padmo Soemasto, Siek Tjin Kwan, Lie Twie Gwan dan Tan Ten Kok, Siauw Tjioe Liang. Persetujuan juga dikirim oleh kelompok akademis. Mereka menyetujui bahwa warga negara Indonesia keturunan Tionghoa harus menyesuaikan diri dengan masyarakat Indonesia dan menuju ke arah asimilasi. Persetujuan tersebut mengatasnamakan sejumlah tokoh termuka yaitu Drs. F.J.E.Tan, rektor Universitas Indonesia, M.A. Lapien (Ketua organisasi Sehati), M.E. Lapien (Kepala Pengurusan KRIS

Jakarta), Profesor Mr. Soediman Kartohadiprodjo, Drs Nugroho Notosusanto, R.A.K. Sosrodanukusumo, Oen Bing Tiat, Junus Amir Hamzah, Wiratmo Soekito, Ir. J. P. Cho, A. Soemandar, dan Ang Liang Tjan.

Selain itu, *Star Weekly* memilih surat kiriman yang rutin diterbitkan di antaranya dari Lauwchuanto, Lie Gwie Siang, dan Muharjo. Surat Lauwchaunto menanggapi Yap Tiam Hien, berjudul “Untuk Direnungkan Bersama.” Ia mengemukakan bahwa secara prinsip Yap menyetujui asimilasi yang wajar. Hanya saja, menurut Lauw, Yap keliru jika menyatakan bahwa golongan mayoritas tidak mendukung asimilasi. Justru banyak menteri yang mengajurkan asimilasi. Menurut pembaca tersebut, Yap hanya menyalahkan mayoritas sedangkan pihak minoritas tidak pernah disalahkan padahal seperti yang dilon-tarkan Yap, hubungan bangsa adalah persoalan kedua belah pihak (*Star Weekly*, 1 Mei 1960).

Adapula kritik terhadap terapi “asimilasi yang wajar” yang berasal dari Lie Gwie Siang. Dalam suratnya yang berjudul “Bhineka Bakti” (*Star Weekly*, 14 Mei 1960), Lie antara lain menyatakan,

Sdr. Ong Hok Ham dalam tulisannya di *Star Weekly* tanggal 2 April 1969 menganjurkan agar minoritas hantjur dan lenjap. Menurut saya, sedjarah penghidupan adalah sedjarah perjuangannya mempertahankan djenisnja sendiri-sendiri. Bangsa bangsa berjuang melawan bangsa lain adalah perjuangannya mempertahankan diri agar tidak lenjap dari muka bumi. Dalam bentuk lebih ketjil lagi maka apabila dalam negara itu ada suku-suku, mereka pun berjuang untuk mempertahankan sukunja.

Terlihat bahwa Lie Gwie Siang menolak konsep asimilasi yang diajukan Ong Hok Ham. Menurut Lie, asimilasi telah berlangsung sejak lama namun diskriminasi terhadap golongan Tionghoa tetap terjadi, jadi asimilasi bukanlah solusi. Pembaca tersebut juga menilai bahwa anjuran Ong untuk menghilangkan suku adalah upaya yang tidak mungkin karena sama saja dengan upaya bunuh diri. Ia menekankan bahwa penghapusan diskriminasi tergantung pada *goodwill* pemerintah yang berkuasa dan kesediaan menerima dari golongan mayoritas. Lie juga menegaskan bahwa golongan Tionghoa akan menjadi WNI yang mencintai Tanah Air asalkan tidak ada diskriminasi.

Sementara itu, Muharjo, pembaca yang lain, menanggapi sinis ketiga solusi yang telah diketengahkan. Dalam suratnya berjudul "Serahkanlah pada Waktu," pembaca itu pada dasarnya mendukung asimilasi dan menentang pandangan integrasi. Namun, ia merasa bahwa semua solusi yang telah diperdebatkan dalam *Star Weekly* memang sewajarnya terjadi dan tidak jelas mana yang akan berhasil. "Biarlah seperti sekarang ini, waktu yang membereskan sendiri," tulisnya (*Star Weekly*, 21 Mei 1960).

Sanggahan terhadap surat Lie Gwie Siang juga datang dari Drs. Lo Siang Hien. Ia menulis surat berjudul "Bhakti Dagang Bukan Tjinta dan Tak Bersjarat." Menurut Lo, seruan Lie membuat kesan seolah-olah golongan Tionghoa akan menukar nasionalisme dengan keamanan golongan, padahal cinta kepada Tanah Air seharusnya tidak bersyarat. Golongan Tionghoa harus lebih dulu menunjukkan baktinya ter-

hadap negara dengan asimilasi yang wajar, baru kemudian diskriminasi akan berangsur-angsur hilang.

PIAGAM ASIMILASI

Polemik soal asimilasi bagi golongan Tionghoa di Indonesia tetap mewarnai majalah *Star Weekly* hingga akhir riwayat majalah itu pada 1961. Dari pemberitaannya dapat disimpulkan bahwa *Star Weekly* memiliki pendirian yang tetap yakni mendukung asimilasi. Sejumlah artikel diterbitkan untuk mendukung argumennya, antara liputan berupa *interview* dengan sejumlah orang yang memilih untuk tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia dan mendukung asimilasi.¹⁵ Wawancara dilakukan terhadap Drs. Tan Goan, Tjia Siong alias Darmastjiadi, Pastor Marinus Oei Goan Tjiang, Oei Hong Kie, dr. Te Bek Siang, dan seorang buruh yang bernama Yap Ek Seng. Pertanyaan yang diajukan sama yakni mengapa memilih menjadi WNI dan apa yang dilakukan sebagai seorang WNI setelah pilihan dijatuhkan. Wawancara ini merupakan upaya *Star Weekly* mengkampanyekan sikap asimilatif.

Tan Goan memilih menjadi WNI atas dasar cinta Tanah Air, ia tidak pernah merasa menjadi warga negara keturunan Tionghoa sejak awal kemerdekaan Indonesia. Tan juga menjelaskan bahwa sebagai warga negara ia

¹⁵Hasil wawancara ini dihimpun dalam liputan bertajuk "Tetap WNI dan Tindakan Selandjutnja" (*Star Weekly*, 4 Juni 1960).

mendukung proses asimilasi. Berikut kutipan jawabannya,

Memang benar proses asimilasi yang diperlukan untuk memperoleh bangsa yang homogen adalah suatu *two-way process*. Hal ini berlaku juga dengan untuk kita di Indonesia. Tetapi jangan diadakan sebagai syarat agar pihak lain sebaiknya memulai dahulu proses itu, melainkan marilah memulai proses itu dengan bertolak daripada dirinja sendiri. Dalam hal yang menurut kejakinan kita benar, baiklah kita jangan ragu-ragu melakukan kebenaran itu lebih dulu daripada yang lain (*Star Weekly*, 4 Juni 1960).

Demikian pula dengan Tjia Siong alias Darmastjadi, Pastor Marinus Oei Goan Tjiang, Oie Hong Kie, dan Te Bek Siang. Mereka memilih kewarganegaraan Indonesia dan menyatakan akan menyumbangkan segenap kemampuannya dalam bidang masing-masing serta menerima konsekuensi sebagai WNI di antaranya dengan melakukan asimilasi dan menyatukan diri dengan rakyat Indonesia. Mereka menyatakan akan melakukan setiap kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Tulisan lain yang memuat pesan asimilasi terlihat dalam seri "Mero-bahkan Dinding Prasangka Rasial."¹⁶ Tulisan itu berisi ulasan ilmiah yang menjelaskan bahwa darah manusia adalah sama, kecuali golongan darah. Darah manusia berdasarkan penelitian tidak memegang peranan apapun dalam menentukan sifat seseorang. Dalam artikel berjudul "Darah Tidak Menentukan Ras" dijelaskan pula bahwa masing-

masing ras tidak menentukan golongan darahnya sehingga baik orang dari ras Melayu, Negro atau Tionghoa bisa saja memiliki golongan darah yang sama. Artikel selanjutnya berjudul "Tes Intelligence Tidak Membuktikan Suatu Golongan Ras" yang berisi penjabaran bahwa kecerdasan seseorang tidak ditentukan berdasarkan rasnya namun lebih dominan dipengaruhi oleh pengajaran dan kondisi sosialnya. Melalui artikel ini redaksi ingin menyampaikan bahwa golongan Tionghoa tidak selamanya lebih pintar, dan semua golongan bisa memperoleh kecerdasan yang sama.

Bagaimanapun, *Star Weekly* telah membentuk opini publik untuk mendukung asimilasi. Kelompok pendukung asimilasi (yang sebagian suratnya diterbitkan dalam majalah itu) mulai menghimpun suatu gerakan untuk mencapai asimilasi yang wajar. Kemudian, pada 14-15 Januari 1961, mereka mengadakan seminar di Bandung, Ambarawa, Jawa Tengah. Salah satu bukti keberpihakan *Star Weekly* terhadap asimilasi ialah ikut menandatangani Piagam Asimilasi yang dihasilkan oleh seminar tersebut. Penandatanganan dilakukan oleh Ong Hok Ham yang hadir dalam seminar dan praktis mewakili *Star Weekly*.

Intinya, Piagam Asimilasi mendasarkan cita-cita bangsa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda untuk mengukuhkan keyakinan bahwa satu-satunya cara untuk mengejawantahkan cita-cita masyarakat adil dan makmur adalah dengan proses asimilasi. Asimilasi yang dimaksudkan adalah proses penyatu-gabungan pelbagai golongan yang memiliki sikap mental, adat istiadat

¹⁶Diterbitkan berturut-turut dalam *Star Weekly* edisi 20 Mei 1961, 27 Mei 1961, dan 3 Juni 1961.

dan pernyataan menjadi satu kebulatan sosiologis yang harmonis dan bermakna yakni bangsa Indonesia. Khusus untuk WNI keturunan Tionghoa, asimilasi berarti masuk dan diterimanya orang-orang yang berasal dari keturunan ke dalam tubuh bangsa Indonesia tunggal sedemikian rupa sehingga akhirnya golongan yang semula khas menjadi tidak ada lagi.

Bagi yang menerima kewarganegaraan Indonesia konsekuensinya ialah bertekad untuk mengabdikan kepada nusa dan bangsa Indonesia dengan seluruh jiwa dan raga. Menjadi Warga Negara Indonesia berarti meninggalkan golongan keturunan Tionghoa dan tidak ingin mempertahankan golongan tersebut sebagai golongan. Bagi negara Indonesia yang memberikan kewarganegaraan itu harus menyambut asimilasi tersebut yakni dengan menganjurkan dan melancarkan asimilasi. Bagi mayoritas rakyat Indonesia diharapkan menerima dengan wajar dan hati terbuka serta turut membantu proses asimilasi. Piagam asimilasi ditandatangani oleh 30 orang golongan Tionghoa pendukung asimilasi (*Star Weekly*, 21 Januari 1961).

PENUTUP

Peran *Star Weekly* sebagai media yang menyuarakan asimilasi golongan Tionghoa harus berakhir ketika pemerintah mengeluarkan larangan terbit bagi *Star Weekly* pada Oktober 1961. Tidak begitu jelas mengapa *Star Weekly* ditutup pemerintah. Namun, menurut Thian

Hian Lay, wakil pemimpin redaksi, rubrik Tinjauan Luar Negeri majalah itu dipandang terlalu berani mengkritik kebijakan pemerintah. Bagi Auwjong Peng Koen, khususnya, dan seluruh awak *Star Weekly* pada umumnya, pembredelan majalah itu merupakan pukulan telak. Bagi mereka, masa terbit 15 tahun majalah itu merupakan proses pembelajaran yang sangat berharga dan juga wadah mata pencarian bagi banyak orang.

Kendati demikian, pemikiran asimilasi terus berkembang pada golongan Tionghoa di Indonesia yang akhirnya membuat mereka membentuk organisasi politik untuk mengkampanyekan asimilasi. Organisasi tersebut adalah Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa yang didirikan pada 1963. Pada tahun yang sama, P. K. Ojong, bersama Jakob Oetama, mendirikan bulanan *Intisari*—nama majalah ini tampaknya merupakan kenangan kepada salah satu rubrik dalam *Star Weekly* yang telah terkubur.

DAFTAR ACUAN

- Iswara, H. (2014), *P.K. Ojong: Hidup Sederhana, Berpikir Mulia*. Jakarta: Kompas.
- Jahja, J. (1999), *Masalah Tionghoa di Indonesia: Asimilasi vs Integrasi*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran.
- Leirissa, R. Z., (1985). *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soyomukti, N. (2012), *Sukarno dan Cina*. Yogyakarta: Garasi.
- Tan, M. G. (2008), *Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Yayasan Obor.

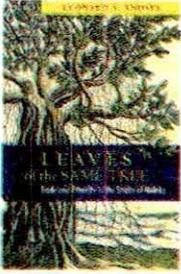
Tulisan/Liputan *Star Weekly* yang Dibahas (Kronologis)

“Omong-Omong tentang Asimilasi” (2 Februari 1952, Tajuk Rencana).
Auwjong Peng Koen (13 November 1954, Timbangan).
“Serahkanlah pada Waktu” (21 Mei 1960, Surat Kiriman).
“Kewarganegaraan Tunggal (I)” (13 Februari 1960).
“Kewarganegaraan Tunggal (II)” (20 Februari 1960).

“Warga Negara Tunggal (III)” (12 Maret 1960).
“Perkawinan Indonesia–Tionghoa Sebelum Abad ke-19 di Pulau Jawa” (15 Februari 1958).
“Tentang Nama-nama Warga Indonesia Keturunan Tionghoa” (13 Februari 1960).
“Bhineka Bakti” (14 Mei 1960, Surat Kiriman)
“Tetap WNI dan Tindakan Selandjtnja” (4 Juni 1960).
“Merobohkan Dinding Prasangka Rasial” (20 Mei 1961, 27 Mei 1961, 3 Juni 1961).

Resensi Buku

Daun dari Pohon yang Sama



Judul : *Leaves of The Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*

Penulis : Leonard Y. Andaya

Tahun : 2008

Kota : Honolulu

Penerbit : University of Hawai'i Press

Jumlah Halaman : 352 (Hardcover)

ISBN : 978-0-8248-3189-9

‘**D**aun-daun dari pohon yang sama’, Leonard Y. Andaya menggunakan pameo sederhana untuk menggambarkan kompleksnya hubungan antar manusia di Selat Malaka. Di dalam bukunya, Andaya membawa pembaca mengarungi Nusantara melalui melalui kacamata sejarah untuk menyingkap masa lalu Asia Tenggara, terutama Selat Malaka. Berbagai data dan analisa ia gunakan secara cermat untuk menghadirkan karya sejarah yang menyeluruh, baik itu untuk memahami masa lalu maupun mencerna masa kini.

Terdapat dua hal utama yang menjadi kajian Andaya, etnisitas dan perniagaan. Terkait etnisitas, Andaya menggarisbawahi dua unsur penting: *pertama*, pembentukan identitas etnis adalah suatu proses yang masih berlangsung hingga saat ini, dan bersifat sangat dinamis; *kedua*, batasan dari suatu identitas etnik, tidak serta merta *rigid*, melainkan terus beradaptasi dengan perubahan. Unsur-unsur di atas

dapat terlihat ketika satu kelompok etnik mengafiliasikan dirinya dengan suatu kelompok etnik lain yang lebih besar ataupun lebih kecil, jika didapati bahwa upaya afiliasi tersebut menguntungkan bagi kelompoknya. Dalam hal ini, Selat Malaka merupakan wilayah yang paling tepat dengan keragaman manusia dan sejarahnya untuk ditelusuri kompleksitas permasalahan etnisitasnya.

Adapun perdebatan pandangan di dalam studi mengenai etnisitas, Andaya memilih untuk tidak memihak salah satunya. Pandangan *primordialist*, *situationist*, *instrumentalist*, *constructivist*, maupun *circumstantialist* disajikan oleh Andaya dengan seimbang. Andaya berupaya untuk memahami kondisi masa lalu dan mekanisme sosial yang membentuk beragam etnisitas di Selat Malaka. Hal yang ingin ditekankan oleh Andaya adalah tidak stabilnya pengertian identitas etnik baik di Selat Malaka, maupun di Nusantara.

Buku ini terbagi menjadi tujuh bagian, yang masing-masing bagiannya

menampilkan narasi sejarah yang tidak terlepas dari analisa yang mendukungnya. Di dalam setiap bab, Andaya memaparkan kisah sejarah dari proses-proses pembentukan etnik dengan berfokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti kapan, di mana, dan mengapa etnik tersebut dapat hadir di masa lalu. Di bagian awal, Andaya menyajikan berbagai perdebatan di dalam studi etnisitas. Selain itu, Andaya juga menampilkan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami perdebatan-perdebatan yang terjadi di dalam studi mengenai etnisitas.

Pada bab yang berjudul *Melayu Antecedents*, Andaya berupaya untuk mengeksplorasi jaringan pertukaran yang terjadi di wilayah Nusantara. Pertukaran dalam pembahasan ini mencakup (tetapi tidak terbatas pada) bahasa, budaya, hingga manusia dan komunitasnya. Eksplorasi yang dilakukan oleh Andaya mencakup wilayah Selatan India dan Sri Lanka ke bagian Utara Sumatera, bagian Utara Semenanjung Malaya, Teluk di Siam (Thailand), bagian Selatan Kamboja, hingga bagian Selatan Vietnam. Cakupan geografis yang luas tersebut, tidak mengubah fokus Andaya dalam mengkaji etnik Melayu, sebagai etnik yang paling dominan di Nusantara.

Etnik Melayu adalah ulasan utama Andaya pada bab pertama. Sebagai langkah awal, Andaya mencoba mendebat anggapan umum bahwa sejarah orang-orang Melayu bermula ketika abad kelima belas dari Kesultanan Malaka atau dari abad ketujuh hingga sebelas, ketika Sriwijaya berjaya. Hal ini ia lakukan untuk memberikan pema-

haman bahwa asal muasal etnik Melayu, dapat ditarik mundur jauh ke belakang dengan didukung oleh penelitian linguistik dan arkeologis. Hal tersebut dilakukan oleh Andaya tanpa bermaksud untuk hanya menceritakan kisah terkait awal mula keberadaan orang Melayu, melainkan untuk memberikan pemahaman bahwa suatu kelompok masyarakat dapat muncul sebagai suatu kelompok etnik, meskipun istilah etnisitas sendiri dianggap belum relevan pada masa itu.

Andaya berpendapat bahwa peristiwa yang sedang berlangsung di masyarakat khususnya dari India, *mainland* Asia Tenggara, bagian Utara Semenanjung Melayu, dan pesisir Laut Cina Selatan menciptakan suatu koridor pelayaran bersama dan pola interaksi yang menjadi dasar bagi identitas bersama. Ia menamakan koridor itu sebagai "*Sea of Melayu*" yang didasarkan pada hubungan yang dijalankan oleh kelompok-kelompok yang kemudian diidentifikasi sebagai "Melayu". Melalui bukti-bukti yang didapat, Andaya memberikan pernyataan awal bahwa kelompok Melayu yang tersebar di koridor tersebut kemungkinan besar adalah keturunan dari orang-orang Funan (orang-orang China di Lembah Sungai Mekong). Poin penting yang menjadi penutup bab pertama adalah penyebaran itu didukung dengan adanya kepentingan ekonomi sebagai pertimbangan penting, dan perdagangan dalam skala internasional adalah sesuatu yang mengikat masyarakat di koridor tersebut.

Beranjak ke bab kedua, Andaya berupaya untuk mengkaji perkembangan

budaya Melayu antara abad ketujuh hingga abad keempat belas. Melalui Sriwijaya yang dianggap sebagai tempat kelahiran budaya Melayu, Andaya melakukan observasi terhadap karakteristik budaya setempat, yang kemudian diidentifikasi sebagai budaya Melayu. Melalui penelitian yang mendalam, Andaya berhasil menemukan pada awal abad ketujuh, terdapat sebuah toponim 'Melayu' yang muncul di catatan rencana perjalanan dari utusan China yang dikirim antara tahun 607 dan 610 Masehi oleh Kaisar Sui. Utusan dari Chinaitu berangkat dengan tujuan untuk membuka hubungan dengan Asia Tenggara. Di pembahasan ini, Andaya menyinggung sejarawan Inggris, O.W. Wolters, yang menyatakan bahwa di awal abad ketujuh, orang-orang Melayu tinggal di Jambi dan mengontrol wilayah Palembang.

Melihat Sriwijaya di abad keempat belas, terdapat beberapa hal yang menjadi karakteristik pemerintahan ala 'Melayu'. (1) Negara yang menjadi tempat penyaluran barang, akan terlibat dalam perdagangan maritim internasional; (2) Penguasa di dalam negara, memiliki atribut kesucian dan kekuatan; (3) Pemerintahan dijalankan berdasarkan hubungan kekerabatan; (4) Terdapat populasi campuran dengan peranan khusus dan memberikan keuntungan dalam perekonomian; dan (5) Wilayah kekuasaan tidak ditentukan oleh batasan territorial, melainkan kekuasaan penguasa itu sendiri. (h. 67-8)

Di dalam bab kedua, Andaya bermaksud untuk mengikuti evolusi sejarah dari istilah 'Melayu'. Iaberupaya

untuk memberikan landasan untuk memahami mengapa 'Melayu' menjadi dorongan terhadap proses etnisasi dari kelompok-kelompok lain di Selat Melaka, seperti Minangkabau (bab ketiga) dan Aceh (bab keempat). Poin penting yang ditekankan oleh Andaya di dalam proses ini adalah perdagangan dalam skala internasional, merupakan stimulus utama untuk perubahan di wilayah tersebut. Bab kedua dari buku Andaya ini memiliki sifat yang informatif dalam menyusuri jejak 'Melayu' di Sumatera.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Andaya kembali menegaskan bahwa Melayu merupakan kelompok etnik yang paling berpengaruh di Selat Malaka. Etnik Melayu mengacu kepada orang-orang yang berasal dari daerah Sumatera bagian Tenggara yang kemudian menyebar dan bermukim ke wilayah utara, termasuk Selat Malaka.

Pembahasan berlanjut ke bab ketiga. Pada bab ini, Andaya melacak perkembangan identitas Minangkabau dari abad 15 hingga abad 18. Di abad-abad tersebut, Minangkabau adalah salah satu dari beberapa kelompok yang ingin memisahkan diri dari identifikasi etnik Melayu. Bagi kelompok etnik Minangkabau, pemisahan itu semata-mata memiliki maksud untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan politik yang dimiliki oleh mereka. Minangkabau dikenal dengan sistem sosialnya yang berbentuk matriarki dan memiliki konsep *merantau* dalam kehidupan masyarakatnya.

Adapun William Marsden, seorang intelektual pertama yang menulis

mengenai Sumatera dalam bahasa Inggris di tahun 1783, mengatakan bahwa orang-orang Minangkabau mengidentifikasi bahwa diri mereka berbeda dengan orang-orang Melayu meskipun mereka memiliki banyak kesamaan. Andaya mendukung pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa orang-orang Melayu dan orang-orang Minangkabau memiliki hubungan sejarah yang erat. Hal ini sesuai dengan gagasan Bruce Kapferer, seorang antropolog Australia, bahwa tidak ada tradisi yang dibangun atau diciptakan tanpa adanya sejarah.

Andaya mengawali bab ketiga dengan mengantar pembacanya mengeksplorasi sejarah dan tradisi Minangkabau. Nama Minangkabau pertama kali tertulis di kitab *Negarakertagama* karya Mpu Prapanca. Melihat dari lokasi yang dimaksud oleh Mpu Prapanca, wilayah Minangkabau terletak di Sumatera bagian tengah. Satu karakter penting di dalam etnik Minangkabau adalah konsep 'merantau'. Akar kata "rantau" memiliki arti "mencapai sungai" atau "garis pantai." Dalam penggunaannya di Minangkabau, merantau berarti pergi seorang laki-laki untuk menetap di luar dari wilayah pedalaman di dataran tinggi Sumatera bagian tengah. Bagi orang-orang Minangkabau, tradisi merantau erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian, sehingga salah satu tujuan utama dari tradisi ini adalah Selat Malaka.

Di dalam bab ini, Andaya menemukan suatu korelasi antara orang-orang Minangkabau dengan Kerajaan Pagaruyung. Ketika pertengahan abad ketujuh belas, terdapat banyak utusan

Kerajaan Pagaruyung yang menyebarkan pesan tertulis bahwa orang-orang Minangkabau berada di bawah perlindungan Kerajaan Pagaruyung. Pengaruh Kerajaan Pagaruyung, memberikan keleluasaan dan perlindungan bagi orang-orang yang mengidentifikasi dirinya beretnik Minangkabau. Seiring dengan kuasa yang diberikan oleh VOC (Perusahaan Dagang Hindia Timur milik Belanda) terhadap Kerajaan Pagaruyung untuk memperdagangkan emas dan rempah, tentulah ini memberikan nilai tambah bagi etnik Minangkabau yang diidentikkan dengan Kerajaan Pagaruyung. Andaya menjelaskan bahwa menjadi 'Minangkabau' pada dasarnya berarti mengindahkan keinginan penguasa Pagaruyung. Hal tersebut merupakan persyaratan ringan untuk keanggotaan dalam sebuah etnik yang dapat menjamin perlindungan dan memberikan keuntungan ekonomi.

Diamati secara mendalam, pada bab ketiga buku ini, Andaya berupaya menjelaskan kenapa dan bagaimana etnik Minangkabau hadir sebagai suatu entitas etnik yang memisahkan diri dari etnik Melayu, dan bagaimana etnik Minangkabau menciptakan batas-batas yang membedakan mereka dengan etnik Melayu. Situasi ekonomi dan politik di sepanjang Selat Melaka (seperti kedatangan bangsa Eropa) mengakibatkan terjadinya proses etnisasi dari Minangkabau. Situasi ini juga terjadi terhadap identitas etnik di Aceh.

Pada bab selanjutnya, Andaya menjadikan Aceh sebagai fokus utama. Di bab keempat ini, Andaya mengkaji kemunculan Aceh sebagai pusat baru

dari peradaban maupun kebudayaan 'Melayu' di abad keenam belas dan ketujuh belas, terutama setelah jatuhnya Malaka. Aceh yang sebelumnya merupakan bagian dari etnik Melayu, kemudian memisahkan identitas mereka dengan Melayu. Andaya beranggapan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Aceh terletak pada ikatan kebudayaan dan jaringan perekonomian yang kuat dengan kerajaan-kerajaan muslim di India dan Timur Tengah.

Semasa abad keenam belas dan abad ketujuh belas, Aceh menentukan batas maupun aturan baru terhadap kebudayaan Melayu. Batas dan aturan yang ditentukan oleh Aceh, mengacu kepada ajaran-ajaran Islam. Selain itu, terdapat banyak praktik hukum yang mencerminkan sistem peradilan di kerajaan-kerajaan muslim besar di India dan Timur Tengah. Aturan-aturan yang dibuat oleh Aceh, diterapkan secara luas terutama di sepanjang pesisir barat dan timur Pulau Sumatera, Pantai Barat Semenanjung Melayu, hingga Pantai Timur Pahang. Andaya beranggapan bahwa, keberhasilan Aceh yang terbesar adalah mengintegrasikan Islam ke dalam masyarakat, yang mana hal tersebut merupakan warisan terbesar dari peradaban Melayu di Asia Tenggara.

Di akhir abad ketujuh belas, posisi Aceh sebagai pusat peradaban Melayu digantikan oleh Johor. Pusat peradabanbaru itu mengadopsi perilaku Islam yang sudah ditanamkan Aceh dengan lebih kuat, akan tetapi Johor menggunakan kembali sistem peradilan yang sama dengan Melaka. Identitas etnik Aceh mulai bergeser di akhir abad

kedelapan belas, peradaban Aceh mulai berpusat di wilayah pedalaman dan hidup dalam kegiatan agraris, tidak lagi di daerah pesisir dengan melakukan perdagangan internasional. Identitas Aceh yang baru, tidak lagi menggunakan bahasa Melayu di dalam literature-literturnya. Hal ini sesuai dengan masyarakat Aceh di pedalaman, yang lebih banyak menggunakan bahasa Aceh, dibandingkan dengan masyarakat Aceh di wilayah pesisir yang lebih banyak menggunakan bahasa Melayu di dalam kehidupan sehari-hari.

Andaya berpendapat, konstruksi identitas yang dilakukan masyarakat Aceh dalam memasukkan komponen-komponen Islam di dalam etnik Melayu, didorong oleh dua tulisan, *Taj al-Salatin* dan *Hikayat Aceh*. *Taj al-Salatin* berarti cermin para raja, yang ditulis pada tahun 1603 oleh Bukhari al-Jauhari. Tulisan ini mengandalkan sumber-sumber yang berasal dari Persia dan membahas keteladanan di dalam masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Narasi yang bersifat kronologis ini, menggambarkan sosok muslim yang ideal sebagai raja, pejabat, maupun masyarakat biasa. Tulisan ini memungkinkan penciptaan kondisi masyarakat ideal Aceh dengan unsur Melayu yang mencapai puncak keemasan di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda.

Sementara itu, *Hikayat Aceh* merupakan tulisan yang berisi pujian-pujian. Tulisan yang dibuat sekitar tahun 1612 oleh Syams al-Din ini sarat akan lagu-lagu pujian untuk Sultan Iskandar Muda. Isi dari pujian-pujian tersebut mengacu pada Malayu, Mughal, dan

tradisi Persia untuk menggambarkan asal-usul supranatural Sultan Iskandar Muda yang dianggap keturunan langsung dari pahlawan Islam yang legendaris, Iskandar Zulkarnain.

Dari kedua literatur di atas, baik Taj al-Salatin maupun Hikayat Aceh, kedua tulisan tersebut sarat dengan nilai-nilai Islam di dalamnya. Andaya menekankan bahwa Aceh sebagai pusat peradaban Melayu, mempromosikan dan memperkuat kehadiran Islam di masyarakat. Dengan demikian, Islam menjadi komponen penting dari identitas etnik Melayu.

Setelah membahas Aceh, Andaya menampilkan proses pembentukan etnik Batak di wilayah Sumatera antara abad kelima belas hingga abad kedelapan belas. Selain Minangkabau dan Aceh, Batak merupakan salah satu dari etnik yang berada di dalam karya *Bumi Melayu*.

Pada awal pembahasan, Andaya memiliki pendapat yang bertentangan dengan pendapat umum, ia memandang bahwa etnik Batak tidak pernah terisolasi dari dunia luar karena mereka adalah pemasok utama komoditas yang sangat berharga, kamper dan benzoin. Kedua komoditas ini tumbuh subur di Sumatera Utara tepatnya sekitar Danau Toba. Kedua komoditas ini dicari dan diminati di pasar internasional. Untuk memenuhi permintaan, masyarakat pedalaman Batak mengorganisir kelompok-kelompoknya untuk mengumpulkan dan mengangkut komoditas-komoditas tersebut ke Melayu melalui pesisir pantai Sumatera.

Hinggaperistiwa penghancuran Sriwijaya oleh Chola di tahun 1025,

produk-produk tersebut dibawa ke pelabuhan-pelabuhan di pesisir tenggara Sumatera. Selanjutnya, Batak membawa komoditas tersebut ke Kota Cina dan negara-negara lainnya di Pantai Timur Laut Sumatera, termasuk Barus, sebuah kota pengedaran komoditas yang terletak di Pantai Barat Laut Sumatera bagian Utara. Menurut Andaya, sebagai hasil dari interaksi perdagangan yang panjang, terdapat persinggungan antara Batak dan Melayu. Proses etnisasi kembali dijawab oleh Andaya dengan adanya kepentingan perekonomian.

Semenjak abad kelima belas, pengenalan dengan tanaman lada di Sumatera, telah menyediakan kesempatan bagi etnik Batak untuk terlibat di dalam perdagangan internasional. Kebutuhan akan tenaga kerja yang intensif, sangat diperlukan di dalam budidaya lada. Hal tersebut mengakibatkan semakin sedikitnya waktu yang dimiliki oleh masyarakat untuk membudidayakan tanaman padi. Beras telah menjelma menjadi suatu komoditas berharga di daerah penghasil lada. Banyak orang-orang Batak yang terdorong untuk pindah dari daerah asal mereka di sekitar Danau Toba untuk mencari lahan baru untuk penanaman padi. Penyebaran orang-orang Batak ke berbagai daerah menyebabkan terpisahnya budaya Batak. Selain itu, terdapat modifikasi dari kebudayaan-kebudayaan Batak yang kemudian terbentuk menjadi komunitas etnik yang lebih kecil lagi yang kita kenal hari ini, seperti Karo, Pakpak-Dairi, Simalungun, Toba, Angkola, dan Mandailing. (h. 16)

Namun, pada zaman dahulu istilah 'Batak' digunakan sebagai identitas etnik terhadap orang-orang yang tinggal di sekitaran wilayah Danau Toba. Mereka menganut agama asli mereka, berupa sistem kepercayaan kuno yang dimanifestasikan melalui mitos dan simbol-simbol yang merepresentasikan ide-ide Batak di dalamnya. Keterlibatan dalam perdagangan internasional mendorong orang-orang Batak tanggap terhadap perubahan politik dan ekonomi yang memberikan dampak secara langsung pada mata pencaharian mereka. Kembali lagi, Andaya mengatakan bahwa Batak sama dengan kelompok etnik lainnya, yakni bersandar pada perhitungan keuntungan ekonomi yang optimal yang bisa diperoleh dari perdagangan internasional Selat Melaka, sehingga etnisasi dapat terwujud.

Di akhir uraian, Andaya membahas mengenai hubungan antara Melayu dengan 'Orang Laut' dan 'Orang Asli' pada bab keenam dan ketujuh. Orang Laut dan Orang Asli memainkan peran penting dalam pemerintahan Melayu. Mereka dihormati karena pengetahuan khusus dan keterampilan mereka dalam memperoleh sumber daya alam, yang sangat berperan dalam perdagangan internasional. Ekspansi kolonial dan pergeseran ketergantungan perekonomian Melayu dari ekstraksi hutan ke industri pertanian dan pertambangan, mengubah sifat hubungan mereka dengan Melayu. Menurut Andaya, tradisi Melayu mengakui jasa-jasa Orang Laut dan Orang Asli yang memberikan dan memperkuat hubungan yang menguntungkan bagi orang-orang Melayu.

Andaya mengungkapkan bahwa meskipun awalnya dihormati, Orang Laut dan Orang Asli menjadi terpinggirkan dan didiskriminasi. Dengan dilemahkannya posisi politik dan ekonomi mereka, interpretasi akan peran penting mereka dalam Melayu mulai berubah bagi Orang Laut dan Orang Hutan, dari yang sebelumnya sebagai pengumpul hasil laut dan hutan, menjadi terpinggirkan.

Awalnya, kontribusi Orang Laut yang paling berharga untuk para penguasa Melayu adalah kemampuan mereka untuk menjaga keamanan di jalur laut dan 'membujuk' kapal-kapal milik pedagang internasional untuk singgah di pelabuhan-pelabuhan Melayu. Sebagai imbalan dari jasa mereka, Orang Laut dihormati dengan diberikannya gelar, status sosial, dan akses terhadap perdagangan komoditas-komoditas asing. Perubahan aktivitas perekonomian orang-orang Melayu ke sektor agrikultur dan ekstraksi hasil bumi, akhirnya mengubah hubungan orang-orang Melayu dengan Orang Laut. Demikian pula yang terjadi pada Orang Asli atau dikenal dengan 'Suku Terasing'. Orang Asli merupakan kelompok yang tinggal di pedalaman Sumatera yang mengadopsi gaya hidup nomaden. Dua bab terakhir Andaya berupaya menggambarkan bahwa kekuasaan dan lembaga penting dalam memahami perumusan identitas etnis dan batas-batasnya. Kedua kelompok terakhir menjadi contoh terjadinya pergeseran dalam perekonomian dan dampaknya dalam hubungan antar kelompok, yang mengarah terhadap pertimbangan ulang batas-batas etnik.

Di dalam kesimpulan, terdapat dua elemen penting yang menjadi inti dari karya ini. Pertama, perlu pemahaman yang luas di dalam melihat identitas etnik. Kedua, etnisitas tidak memiliki sifat yang *rigid*, bahkan selalu berubah. Etnisitas suatu kelompok selalu berubah mengikuti perkembangan lingkungan dan kebutuhan dari anggotanya sendiri, Andaya telah menjelaskan dengan berbagai contoh melalui bukti-bukti dan analisa yang logis di dalam tulisannya.

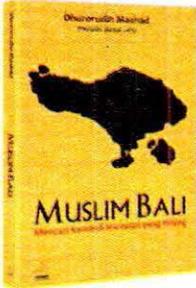
Secara umum, buku ini merupakan upaya luar biasa yang dilakukan oleh Andaya dalam memberikan teori-teori tentang etnisitas. Meskipun begitu, pembahasan mengenai perdagangan internasional yang dikaji oleh Andaya, terkesan sempit dan bersifat regional. Semestinya, berbagai data yang digunakan oleh Andaya, mengantarkan pembaca melihat fakta yang begitu mendalam dalam berbagai dimensi. Selain itu, aspek-aspek seperti agama, jumlah penduduk, arus migrasi, hingga tingkat pendidikan tiap-tiap etnik, mungkin perlu ditelusuri lebih jauh lagi. Pemahaman masa lalu pembaca akan Asia Tenggara, akan lebih lengkap dengan didukung oleh analisa data yang saksama.

Terlepas dari hal-hal di atas, Andaya telah berhasil menyajikan karya yang mendorong sejarawan untuk melihat secara utuh mengenai identitas etnik dan politik. Ia jugamengingatkan sejarawan, bahwa perlu sudut pandang tersendiri dalam melihat etnisitas di masa lalu, yang berbeda dengan pemahaman etnisitas pada masa kontemporer. Andaya juga mengajak pembacanya, untuk memahami karakteristik dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap kelompok etnik. Menurut Andaya, melalui pengetahuan yang menyeluruh, masa lalu Asia Tenggara dapat dibangun sepenuhnya, untuk memahami masa kini. Buku ini tidak hanya ditujukan oleh kalangan sejarawan, tetapi kepada seluruh pembaca yang memiliki minat pada masa lalu Asia Tenggara dengan kisah yang begitu menarik di dalamnya.

T. Reza Fadli
*Alumnus School of Oriental and
 African Studies
 University of London*

Resensi Buku

Pembelajaran Toleransi Dari Generasi ke Generasi



Judul Buku: Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang
Pengarang: Dhurorudin Mashad
Penerbit: Pustaka Al Kautsar
Tahun Terbit: 2014 Cetakan Pertama
Dimensi Buku: 24 cm
Jumlah Halaman: 340
Harga Buku: Rp.62.000,-

Buku berjudul *Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang* merupakan sebuah karya yang muncul di saat yang tepat untuk dibaca oleh pemeluk Islam di Indonesia sekaligus patut dibaca oleh kalangan non muslim yakni di saat keberadaan dan intensitas konflik antar agama baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain tengah meningkat. Tidak hanya itu, adanya generalisasi di beberapa Negara Eropa Barat dan Amerika Serikat terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sebagai Islam garis keras dan bertanggung jawab atas aktivitas terorisme menyudutkan keberadaan penganut Islam di seluruh dunia dan berdampak terhadap sikap diskriminatif yang merugikan penganut Islam itu sendiri.

Buku yang mengetengahkan perjalanan sejarah keberadaan orang Islam di Bali disusun secara kronologis berdasarkan sumber-sumber sejarah yang

dipadukan dengan data-data kependudukan kekinian. Penulis bahkan mengawali Bab Pertama dengan memaparkan langsung data jumlah masing-masing penganut agama yang dipeluk masyarakat di Bali berdasarkan Kabupaten/Kota pada tahun 2011 yang bersumber dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali 2011 untuk kemudian mengelaborasi bab pertama tersebut dengan menunjukkan betapa kuatnya masyarakat Bali memegang teguh adat dan ajaran agama Hindu. Di tengah masyarakat yang kuat memegang teguh adat dan ajaran agama Hindu di Bali itulah sebuah kelompok masyarakat pemeluk agama lain yakni pemeluk Islam yang berjumlah kurang dari 10 persen dapat tinggal berdampingan dengan damai.

Di awal Bab Dua penulis menelusuri sejarah keberadaan pemeluk Islam di Bali yang diawali dengan penyebaran Islam di Nusantara pada abad VII.

Periode perkembangan Islam di Nusantara abad VII dibuktikan dengan adanya berbagai peninggalan arkeologis sekaligus sebagai titik masuk bagi penulis untuk mengkerucutkan masuk dan berkembangnya ajaran Islam di Bali. Namun secara khusus penulis mengaitkan perkembangan Islam di tanah Jawa khususnya pada masa kejayaan hingga runtuhnya Kerajaan Majapahit untuk menjadi titik tolak perkembangan awal Islam di Bali serta dinamika hubungan Hindu-Islam sebagai sebuah bukti bahwa kedua komunitas berbeda keyakinan tersebut telah hidup berdampingan dalam masyarakat Bali. Penulis cenderung pada keterangan yang menyebutkan bahwa sebuah komunitas muslim lama di Kerajaan Gelgel pada masa pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir yakni sekitar abad 15 M merupakan komunitas muslim pertama di Pulau Bali (hlm. 131).

Kemunduran Kerajaan Majapahit akibat perang saudara membuat wilayah-wilayah di pesisir utara Jawa melepaskan diri dari pengaruh kerajaan ini. Seiring dengan berkembangnya Islam di tanah Jawa diantaranya berkat kegigihan Wali Songo dalam mendakwahkan Islam baik di kalangan masyarakat bawah maupun elit kerajaan, wilayah dan pulau lain yang berdekatan turut mendapat pengaruh Islam termasuk masyarakat yang tinggal di Pulau Bali. Pada titik ini penulis menjelaskan bahwa masuknya pengaruh Islam di Pulau Bali tidak selalu melalui ekspansi militer terutama yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit. Komunitas muslim pertama diperkirakan telah ada di Pulau Bali pada masa

pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang dipelopori oleh 40 pria muslim yang mengiringi Dalem Ketut Ngelesir (hlm. 26) namun perkembangan Islam selanjutnya lebih dikarenakan adanya upaya penyebaran ajaran Islam melalui pendekatan sosial dan budaya seperti yang dilakukan oleh Walisongo. Dalem Ngelesir adalah putra bungsu Kresna Kepakisan yang dikirim untuk memerintah Bali berdasarkan supremasi politik Majapahit pada tahun 1352 M. Bali sendiri berhasil ditaklukkan oleh Mahapatih Gajahmada yang dibantu oleh Adityawarman pada tahun 1343 M.

40 orang Islam yang datang ke Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk selanjutnya bekerja sebagai abdi dalem di Kerajaan Gelgel dan menempati sebuah pemukiman yang merupakan pemberian raja. Mereka membentuk sebuah komunitas muslim dan mendirikan Masjid Gelgel. Dengan demikian penyebaran Islam di Bali pada masa Kerajaan Majapahit berkuasa lebih dikarenakan adanya pendatang muslim yang selanjutnya sebagian diantara mereka menikah dengan perempuan setempat. Proses ini nyaris serupa dengan perkembangan agama Hindu di Bali yang disebarkan oleh pendatang terutama dari Pulau Jawa. Penulis sendiri membedakan antara penduduk asli Pulau Bali yang dikenal dengan Bali Aga dengan Bali pendatang. Keduanya dapat dibedakan dengan melihat tradisi yang hingga kini masih dijalankan oleh masyarakat Bali asli. Dengan sendirinya antara tradisi masyarakat Bali asli dan ajaran agama Hindu sesungguhnya merupakan sesuatu yang berbeda.

Namun dalam perkembangannya kaum Hindu Bali sendiri seringkali sulit membedakan antara tradisi dan agama, misalnya sesuatu yang dianggap menyangkut agama Hindu ternyata lebih terkait adat Bali (hlm. 27)

Perkembangan Islam di Bali selanjutnya dijelaskan secara terpisah di sejumlah kabupaten di Bali. Di beberapa kabupaten, perkembangan Islam terkait erat dengan peran para pendatang terutama yang berasal dari Banjar dan Bugis. Mereka umumnya berprofesi sebagai pedagang. Selain itu terdapat pula keterangan mengenai beberapa pendatang yang tidak hanya berprofesi sebagai pedagang, tetapi juga merupakan seorang ulamaseperti Habib Ali bin Abubakar bin Umar bin Abubakar Al Hamid di Kampung Kusamba yang kini termasuk dalam Kecamatan Dawan. Selain di Kusamba, Habib Ali juga menjadi pendakwah di wilayah Klungkung.

Bertambahnya Representasi Sebuah Komunitas Minoritas

Karya-karya sejarah kontemporer pada umumnya tidak dapat melepaskan diri dari karya-karya klasik yang monumental sebagai titik acuan sehingga terkadang data-data yang digunakan bersumber dari hanya beberapa buah karya. Demikian pula halnya dengan buku *Muslim Bali*. Walaupun demikian terdapat sebuah sisi lain dari karya ini terutama terkait data lapangan kekinian yang penulis coba untuk dikomparasikan dengan keterangan mengenai situasi dan

kondisi komunitas muslim pada masa lalu. Diantara data lapangan tersebut bahkan mengetengahkan sejumlah informasi yang kontroversial, diantaranya adalah keterangan yang diperoleh dari H. Hasyim Ahmad bahwa Nirartha atau Pandita Sakti Wawu Rawuh yang bermigrasi dari Daha ke Blambangan dan selanjutnya ke Bali, sesungguhnya adalah seorang muslim dan seringkali melantunkan doa-doa Islam namun dilakukan dengan nada persembahyangan Hindu (hlm.125). Nirartha adalah tokoh agama yang mengungsi dari Majapahit ke Bali dan menjadi penasehat utama Watu Renggong sejak 1489 M.

Selain data-data lapangan yang kontroversial, topik yang diangkat oleh penulis mengenai keberadaan komunitas muslim di Bali sendiri sudah merupakan sebuah topik yang menarik perhatian terutama bagi pembaca yang belum pernah berkunjung ke Pulau Bali dan melihat langsung keberadaan komunitas muslim di pulau ini. Seperti kebanyakan orang yang belum mengunjungi Bali, umumnya yang terlintas di benak mereka adalah gambaran sebuah pulau yang sangat kental dengan praktek-praktek ajaran agama Hindu berikut adat istiadat yang ketat sehingga kelompok-kelompok penganut agama lain termarginalisasi dalam sebuah kehidupan yang sempit tidak hanya secara ruang melainkan juga kehidupan sosial politik. Pemikiran demikian dapat dimaklumi mengingat informasi dan pengetahuan serta pemahaman orang yang belum pernah sekalipun mengunjungi Bali sangat terbatas bahkan di era digital seperti

sekarang sekalipun. Namun dengan membaca buku ini, pandangan dan pemikiran seperti itu bisa jadi sedikit banyak berubah karena beberapa hal yang dijelaskan dalam buku ini. Pertama adalah pemaparan sejarah bahwa selain muslim Bali, masyarakat Bali yang sebagian besar beragama Hindu sesungguhnya juga kelompok pendatang, sehingga tidak selalu semua yang menyangkut Bali adalah Hindu dan tidak semua yang menyangkut Hindu itu selalu identik dengan Bali. Dalam konteks lain, dapat dikatakan bahwa tidak semua orang Bali beragama Hindu karena kendati menggunakan nama-nama yang sudah umum digunakan oleh orang Bali yang notabene beragama Hindu, sebagian masyarakat Bali faktanya adalah seorang muslim atau kelompok masyarakat lainnya yang memiliki keyakinan berbeda dengan keyakinan masyarakat kebanyakan.

Selain penggunaan nama yang tidak lagi bisa digeneralisir untuk menunjukkan status keyakinan seseorang, statistik menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah muslim Bali meningkat dan ikut mempengaruhi berdirinya masjid-masjid baru. Situasi ini turut mempengaruhi wajah pemukiman dimana di tengah dominannya bangunan berbentuk pura, kini mulai terlihat sarana ibadah lain yang merupakan representasi dari keberadaan pemeluk keyakinan yang menggunakan sarana ibadah tersebut. Penulis mencatat setidaknya terdapat 22 masjid yang disebutkan dalam Bab Satu lengkap dengan alamatnya untuk memperkuat argument bahwa eksistensi muslim Bali semakin

terlihat. Selain masjid, penulis juga menunjukkan eksistensi muslim Bali di bidang ekonomi melalui munculnya berbagai rumah makan, warung dan restoran halal yang tergolong besar dan berada di kawasan perkotaan. Belum lagi, lanjut penulis, keberadaan warung-warung dan rumah makan milik pedagang muslim yang tergolong kecil dalam aktivitas perekonomian yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat menengah bawah di Bali.

Bukan Sekedar Wacana: Aplikasi Toleransi Pemeluk Hindu di Bali

Buku-buku yang bertemakan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama semakin penting untuk dibaca di tengah maraknya perselisihan yang mengarah pada tindak kekerasan dan kerusakan antar umat yang berbeda keyakinan. Berbagai kerusakan yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor termasuk pemilihan kepala daerah di semua tingkat pemerintahan. Di beberapa daerah, isu agama merupakan isu yang sering disinergikan dengan isu lain dalam menjatuhkan lawan politik sehingga sangat efektif untuk dipropagandakan oleh pihak-pihak yang memang menginginkan situasi yang tidak kondusif terkait kerukunan antar umat beragama.

Buku ini mengulas sebuah toleransi antar umat beragama yang telah berlangsung selama berabad-abad di Bali yang kini dikenal dengan Pulau Dewata. Sebutan itu sendiri berhubungan erat dengan keyakinan mayoritas penduduk

Bali sebagai pemeluk agama Hindu yang taat. Di tengah mayoritas masyarakat beragama Hindu, komunitas muslim yang tinggal di pulau ini tetap dapat hidup berdampingan dengan damai. Pada saat bersamaan, kondisi berbeda justru dirasakan oleh minoritas komunitas muslim di Myanmar dimana mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka karena diskriminasi berlebihan yang dilakukan oleh umat agama lain.

Toleransi umat Hindu Bali terhadap muslim Bali tidak hanya sebatas pada tataran pemikiran atau sebatas wacana melainkan diterapkan di lapangan dalam bentuk yang sangat simpatik. Pada hari Raya Nyepi yang pada satu kesempatan jatuh pada hari Jumat misalnya, umat muslim Bali diperkenankan melaksanakan Shalat Jumat. Padahal pada hari raya tersebut, umat Hindu sesungguhnya menghendaki tidak adanya aktivitas apapun yang terangkum dalam Catur Brata yakni empat larangan yang meliputi larangan menyalakan api, larangan bepergian, larangan bersenang-senang dan menghentikan semua jenis pekerjaan.

Dengan membaca sejarah keberadaan komunitas muslim Bali, pembaca juga akan mendapat informasi bahwa Bali khususnya di Loloan Jembrana juga pernah menjadi tempat pelarian orang-orang Islam asal Melayu yang dipimpin oleh Syekh Al Kodri saat wilayah mereka yakni Kuala Trengganu ditaklukkan oleh kekuatan Belanda. Keberadaan mereka hingga Indonesia merdeka tetap lestari dan tidak terusik oleh masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu. Sebaliknya, panji-panji

Islam yang bertuliskan kalimat tauhid justru hingga kini disimpan di Puri Negara sebagai penghargaan atas bantuan Syekh Al Kodri menghadang serangan dari kerajaan lain (hlm.245).

Pada bagian akhir, penulis berupaya membuat benang merah antara keberadaan dan hubungan komunitas Hindu dan Muslim di Bali pada masa lalu dan masa kontemporer khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru terutama terkait isu-isu ekonomi dan terorisme. Tidak pelak lagi bahwa kedatangan para pendatang di Bali langsung maupun tidak langsung meningkatkan persaingan yang berdampak langsung terhadap perekonomian penduduk asli. Seperti halnya di wilayah lain, para pendatang umumnya lebih gigih mencari nafkah untuk bisa bertahan hidup di tengah mayoritas penduduk asli yang telah mapan. Walaupun demikian, di beberapa daerah di Bali tidak jarang para pendatang termasuk Muslim mampu meraih sukses yang membuat penduduk setempat yang notabene beragama Hindu termarginalisasi secara ekonomi. Isu ini dapat semakin mengkerucut pada isu-isu SARA terutama sebelum dan setelah peristiwa *Bom Bali*. Seperti yang dijelaskan oleh penulis, Muslim di Bali tersudutkan akibat perbuatan segelintir Muslim lain yakni Amrozi dan teman-teman terorisnya yang salah dalam memaknai dan mengaplikasikan kata *jihad* dalam kasus *Bom Bali*. Tidak jarang orang yang mengenakan atribut keislaman menjadi sasaran sikap diskriminatif pasca peristiwa *Bom Bali* (hlm. 281).

Dampak lain yang dirasakan oleh

Muslim Bali adalah dilakukannya peng-etatan status kependudukan di seluruh wilayah Bali untuk membatasi kemungkinan bertambahnya warga Jawa-Muslim ke Bali. Namun sebaliknya, solidaritas dan ukhuwah Islamiyah di kalangan Muslim Bali semakin terbina tidak hanya di Pulau Bali namun juga komunitas Muslim Bali yang berada di luar Bali. Satu hal menarik yang dijelaskan oleh penulis dalam buku ini di bagian akhir adalah adanya penggabungan nama-nama yang menjadi ciri khas nama orang Bali dengan nama-nama yang bersifat keislaman seperti Kadek Syarifuddin dan Nengah Aminuddin. Penggabungan ini membuat identitas baru Muslim Bali yang dapat dikatakan moderat karena nama tersebut memberikan ciri kekerabatan masyarakat Bali dalam sebuah keluarga sekaligus memberikan ciri identitas keislaman.

Sumber Kolonial Yang Minim

Karya *Muslim Bali* menggunakan banyak sumber sekuler yang menitik-beratkan pada masa kedatangan Islam dan perkembangan awal agama tersebut di Pulau Bali. Karya-karya mengenai keruntuhan Majapahit dan perkembangan Islam awal di Nusantara mendominasi sumber-sumber yang digunakan oleh penulis untuk menceritakan keseluruhan isi buku ini. Namun sedikit disayangkan bahwa penulis kurang menggunakan sumber-sumber kolonial berikut karya-karya penulis Belanda yang sesungguhnya dapat digunakan untuk melengkapi penjelasan mengenai kehidupan sosial kemasyarakatan di Bali. Dari sekian ratus halaman buku ini,

hubungan Hindu-Muslim di Bali pada masa kolonial yang seharusnya menempati ruang dan waktu yang cukup panjang justru hanya ditulis kurang dari 10 halaman yakni pada halaman 235-242, itupun lebih menjelaskan situasi politik dan penaklukan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sehingga dinamika hubungan kedua pemeluk agama tersebut di Bali justru menjadi kurang terlihat. Sumber sekunder yang digunakan untuk menjelaskan sub judul ini juga terlalu sederhana yakni hanya terdapat satu catatan kaki yang sumbernya juga telah disebutkan di sub judul sebelumnya.

Penggunaan sumber internet juga menjadi perhatian tersendiri dalam membaca karya *Muslim Bali*. Beberapa sumber tersebut sayangnya kurang dirujuk kepada sumber lain terutama penggunaan sumber internet dari situs Wikipedia yang sebaiknya dihindari oleh penulis mengingat validitas situs ini yang terkadang masih disangsikan kebenarannya. Penempatan sumber-sumber internet ini bersama dengan buku-buku sekunder juga menjadi rancu dalam Daftar Pustaka mengingat kata *Daftar Pustaka* sendiri mengacu pada hanya sumber-sumber buku dan bukan sumber lain terlebih sumber internet. Jika tetap ingin disatukan, maka sumber-sumber tersebut sebaiknya berada dalam sub sumber referensi *Sumber Acuan*. Dengan demikian sebaiknya sumber internet dipisahkan keberadaannya dengan kepala sub referensi sendiri yakni *Sumber Internet*.

Selain kurangnya sumber kolonial termasuk arsip yang digunakan, penu-

lisan karya *Muslim Bali* juga terlihat lemah dari teknis penulisan jika disandarkan pada Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD) termasuk ketidak konsistenan penulis dalam menggunakan kata-kata yang sering digunakan seperti kata Majapahit yang terkadang ditulis dengan kata *Mojopahit* (hlm.47) tanpa menjelaskan mengapa kedua kata tersebut ditulis berbeda. Selain itu terdapat pula sisipan huruf dalam satu kata yang sesungguhnya tidak perlu digunakan seperti huruf *h* dalam kata Kedhiri dan kata Prabhu (hlm.93). Di halaman tersebut ketidak konsistenan ini bahkan ditunjukkan penulis dengan menuliskan kata Kediri (tanpa huruf *h*) di paragraf lain. Penulisan karya ini secara teknis juga sedikit terganggu dengan digunakannya tanda baca secara tidak tepat oleh penulis terutama penggunaan tanda baca titik dua (:) di beberapa halaman yang seharusnya tidak perlu digunakan seperti penjelasan mengenai nama ayah seseorang yang seharusnya ditulis tanpa menggunakan tanda baca tersebut (di halaman 111, penulis menggunakan tanda baca ini dalam kalimat *meneruskan ayahnya: R. Muhammad Yunus* yang seharusnya cukup menggunakan kata *yakni, yaitu* atau *yang bernama*).

Kesimpulan

Secara umum buku ini memaparkan perkembangan dan pengaruh Islam di Bali yang lebih banyak menyandarkan pada sumber-sumber sejarah sekunder. Keterbatasan sumber sejarah di masa-masa awal kedatangan Islam terutama pada masa Kerajaan Majapahit membuat

benang merah antara satu peristiwa dengan peristiwa lain seringkali tidak dapat dijelaskan secara komprehensif. Selain itu hubungan genealogis antara generasi awal komunitas Islam Bali dan generasi berikutnya sulit untuk ditelusuri karena kurangnya bukti-bukti. Dengan sendirinya penulis lebih banyak memaparkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari karya-karya sebelumnya atau sesekali membandingkan antara satu karya dengan karya lainnya.

Kendati kurang diperkaya dengan sumber-sumber yang seharusnya dapat menjadikan analisa penulis lebih tajam, namun deskripsi buku ini terkait toleransi antara pemeluk Hindu dan Islam serta umat beragama lainnya sangat bermanfaat bagi pembaca yang mengikuti kondisi perpolitikan yang dikaitkan dengan isu-isu SARA seperti yang kini dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Berbagai masalah yang dihadapi bangsa dan bersifat multidimensional khususnya setelah reformasi 1998 menguras begitu banyak energi sehingga melalaikan bangsa ini untuk bisa lebih produktif dalam menjalankan program-program pembangunan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah berikut isu-isu yang menjadi benih konflik pasca pelaksanaan pemilihan tersebut tidak jarang berasal dari adanya propaganda dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan perbedaan agama. Terkait dengan itu, buku ini justru dapat dijadikan bacaan untuk menangkal berbagai isu SARA sekaligus menjelaskan bahwa perbedaan agama dan hubungan antara penganut agama mayoritas dan minoritas bukan menjadi

halangan untuk dapat hidup berdampingan secara damai. Hubungan sosial kemasyarakatan Hindu-Muslim di Bali menunjukkan bahwa sebuah pembelajaran toleransi telah diperlihatkan dari generasi ke generasi sejak kedatangan Islam di pulau tersebut pada masa Kerajaan Majapahit. Sebaliknya penganut Islam yang hingga kini merupakan mayoritas masyarakat Indonesia bersikap sangat toleran terhadap pemeluk agama lain dan bahkan tidak memaksakan agar pemerintah menerapkan syariat Islam di seluruh wilayah republik ini.

Selain hubungan Hindu-Muslim terkait kerukunan hidup antar umat beragama, apa yang dikemukakan oleh penulis mengenai Bali sebagai *icon* pariwisata turut menjadi pembelajaran penting akan pembangunan yang tidak hanya berwawasan lingkungan dalam pengertian fisik dan ekonomi, namun juga pembangunan yang berwawasan lingkungan sosial dan budaya. Pesatnya pembangunan berbagai sarana dan prasarana di Bali untuk menunjang sector pariwisata ternyata berdampak pada hal lain yang sempat terlupakan

yakni kekhawatiran akan memudarnya kultur Bali itu sendiri. Seperti disinggung oleh penulis, bahwa tata ruang pembangunan fisik hanya berorientasi pada proyek yang menjadikan rancangan bentuk hotel dan bangunan penunjang lain justru tidak sesuai dengan kultur Bali. Hal inilah yang lambat laun Bali mulai tergerus dengan tidak hanya oleh para pendatang yang berbeda keyakinan dengan kebanyakan masyarakat lokal, melainkan juga berubahnya fisik bangunan yang tidak lagi mencerminkan kultur Bali. Bentuk dan tingkat penolakan masyarakat setempat termasuk terhadap para pendatang Muslim bisa jadi akan mempengaruhi wajah Bali di kemudian hari.

Agus Setiawan
*Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya
Universitas Indonesia*

Ketentuan penulisan Jurnal “ Jejak Nusantara”

1. Tulisan dalam bentuk artikel penelitian, kajian, telaahan mendalam yang didukung data dari referensi yang akurat.
2. Naskah merupakan tulisan asli, belum pernah diterbitkan pada media massa lain.
3. Naskah diketik dengan spasi rangkap menggunakan A4 maksimal panjang halaman 18 halaman (termasuk abstrak dan daftar pustaka). Huruf Times New Roman 12 , spasi 1,5.
4. Naskah merupakan hasil penelitian atau kajian di bidang sejarah dan nilai budaya, sesuai tema yang merupakan gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori, tinjauan, kepustakaan, dan resensi buku.
5. Setiap tulisan mengikuti norma penulisan karya tulis ilmiah pada umumnya yang disajikan dalam sistematika: a) judul artikel, b) nama penulis, c) pendahuluan, d) permasalahan, dan metode mengandung bagian atau tulisan pembahasan, penutup yang berisi kesimpulan dan saran, daftar kepustakaan serta lampiran (jika ada).
6. Naskah dilengkapi nama penulis dan daftar riwayat hidup penulis (disertai pas foto).
7. Daftar kepustakaan disajikan dengan standar baku ilmiah.
8. Naskah diserahkan dalam bentuk soft copy (cd) ke alamat :

Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 9
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270

Ataupun dikirim via email ke alamat email:
internalisasi.sejarah@gmail.com

9. Editor berhak mengedit, mengurangi, menambah bilamana perlu, tanpa meninggalkan pengertian yang sebenarnya.
10. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis artikel.
11. Naskah yang tidak diterbitkan akan dipertimbangkan untuk dimuat dalam terbitan jurnal “Jejak Nusantara” selanjutnya .



19335



Perp
Jen



Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan